



RKPD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
37. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
38. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 dan memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari Renja Perangkat Daerah sesuai Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD yang sudah dilakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (3) Hasil penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk kertas kerja Perangkat Daerah sebagaimana berita acara hasil penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
 - b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022.

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2022 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Juli 2021

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 02 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 19



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I – 7
1.4. Maksud dan Tujuan	I – 9
1.5. Sistematika Dokumen Rancangan RKPD.....	I – 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapin	II – 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II – 1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II – 21
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II – 23
2.1.1.4. Demografi	II – 23
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 28
2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .	II – 28
2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial.....	II – 33
2.1.2.3. Kepemudaan dan Olah Raga.....	II – 41
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II – 42
2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II – 42
2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II – 50
2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan.....	II – 68
2.1.3.4. Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	II – 72
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II – 78
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II – 78
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II – 80
2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia	II – 81
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II – 83
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	II – 84
2.2.2. Realisasi RPJMD (Realisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Lalu terhadap RPJMD atau Implikasi dari Realisasi terhadap Indikator RPJMD)	II – 113
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II – 116
2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 117
2.3.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II – 117
2.3.1.2. Kesejahteraan Sosial.....	II – 118
2.3.2. Aspek Pelayanan Umum.....	II – 124
2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II – 124
2.3.2.2. Layanan Urusan Wajib tidak berkaitan	



dengan Pelayanan Dasar	II – 124
2.3.2.3. Layanan Urusan Pilihan	II – 128
2.3.2.4. Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	II – 129

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 6
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 7
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III – 10
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III – 12

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 6
4.2. Prioritas Pembangunan	IV – 9
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV – 9
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	IV – 10
4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten	IV – 11
4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan	IV – 17

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Daerah	VI – 1
6.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya	VI – 4

BAB VII PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun 2020	II – 2
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian Di Kabupaten Tapin Tahun 2020	II – 4
Tabel 2.3.	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng Di Kabupaten Tapin Tahun 2020	II – 4
Tabel 2.4.	Luas Dan Prosentase RTH Kota Rantau Berdasarkan Tipologi Kepemilikan.....	II – 8
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tapin Tahun 2020	II – 24
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Tapin Tahun 2020	II – 25
Tabel 2.7.	Luas Wilayah, Jumlah Desa / Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2020	II – 26
Tabel 2.8.	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah Di Kabupaten Tapin Tahun 2020	II – 26
Tabel 2.9.	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Di Kabupaten Tapin Tahun 2020	II – 27
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Tapin Tahun 2020.	II – 27
Tabel 2.11.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah).....	II – 28
Tabel 2.12.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah).....	II – 29
Tabel 2.13.	PDRB Per Kapita ADHB dan PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)	II – 31
Tabel 2.14.	Nilai Inflasi Kabupaten Tapin dan Nasional Tahun 2016 – 2020.....	II – 32
Tabel 2.15.	Koefisien Gini Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.....	II – 32
Tabel 2.16.	Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020	II – 33
Tabel 2.17.	Data IPM Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.....	II – 34
Tabel 2.18.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020	II – 35
Tabel 2.19.	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020	II – 36
Tabel 2.20.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2020	II – 36
Tabel 2.21.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2020	II – 37



Tabel 2.22.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2020	II – 38
Tabel 2.23.	Prevalensi Stunting Di Kabupaten Tapin Menurut Riskesdas Kementerian Kesehatan	II – 39
Tabel 2.24.	Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Di Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2020	II – 40
Tabel 2.25.	Perkembangan Sarana Prasarana Olahraga Di Kabupaten Tapin Tahun 2020.	II – 41
Tabel 2.26.	Sarana Prasarana Kegiatan Kepemudaan Di Kabupaten Tapin Tahun 2020.	II – 41
Tabel 2.27.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.	II – 42
Tabel 2.28.	Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.	II – 43
Tabel 2.29.	Panjang Jalan Menurut Jenis Konstruksi, Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan Tahun 2020.	II – 44
Tabel 2.30.	Proporsi Panjang Jalan Menurut Jenis Konstruksi, Kondisi dan Status Jalan Tahun 2020.	II – 45
Tabel 2.31.	Pembagian Kewenangan Pengelolaan D/DIR Di Kabupaten Tapin.....	II – 46
Tabel 2.32.	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Di Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2020.	II – 46
Tabel 2.33.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Tapin s/d Tahun 2020.....	II – 47
Tabel 2.34.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....	II – 48
Tabel 2.35.	Jumlah Kejadian Bencana Di Kabupaten Tapin Tahun 2020.	II – 49
Tabel 2.36.	PMKS Penerima Bantuan Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....	II – 50
Tabel 2.37.	PMKS Penerima Bantuan Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Tapin Tahun 2020.	II – 50
Tabel 2.38.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2020.....	II – 52
Tabel 2.39.	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Di Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2020.....	II – 52
Tabel 2.40.	Jumlah Pernikahan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.....	II – 53
Tabel 2.41.	Ketersediaan Pangan Utama Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....	II – 53
Tabel 2.42.	Penanganan dan Pengurangan Sampah Di Kabupaten Tapin Tahun 2020.	II – 54
Tabel 2.43.	Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Di Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.....	II – 54
Tabel 2.44.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.	II – 55



Tabel 2.45.	Kondisi Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....	II – 55
Tabel 2.46.	Persentase PKK Aktif Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020	II – 57
Tabel 2.47.	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2020.....	II – 58
Tabel 2.48.	Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020	II – 59
Tabel 2.49.	Persentase Angkutan Darat Di Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.....	II – 59
Tabel 2.50.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Di Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2020.....	II – 60
Tabel 2.51.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Di Kabupaten Tapin Di Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.	II – 61
Tabel 2.52.	Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....	II – 62
Tabel 2.53.	Jumlah Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tapin yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....	II – 62
Tabel 2.54.	Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.....	II – 63
Tabel 2.55.	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....	II – 63
Tabel 2.56.	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Pemuda Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.	II – 64
Tabel 2.57.	Jumlah Organisasi Olahraga Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....	II – 65
Tabel 2.58.	Penyelenggaraan, Sarana Seni dan Budaya serta Cagar Budaya Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.	II – 66
Tabel 2.59.	Jumlah Anggota dan Kunjungan Perpustakaan Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.	II – 68
Tabel 2.60.	Produksi Perikanan Darat (Ton) Di Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.....	II – 69
Tabel 2.61.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020	II – 69
Tabel 2.62.	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020 .	II – 70
Tabel 2.63.	Produktivitas Padi di Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020	II – 70
Tabel 2.64.	Kontribusi Sektor Pertanian ADHB di Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2020.....	II – 71
Tabel 2.65.	Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2020.....	II – 72
Tabel 2.66.	Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2020.....	II – 72
Tabel 2.67.	Persentase Laporan Pertanggung jawaban yang Tepat Waktu Tahun 2016 – 2020.	II – 73
Tabel 2.68.	Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.....	II – 73
Tabel 2.69.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2020.....	II – 73



Tabel 2.70.	Peringkat, Skor, dan Status Kinerja LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2018.....	II – 74
Tabel 2.71.	Jumlah Informasi Manajemen Pemda di Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2020.....	II – 75
Tabel 2.72.	Jumlah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019 – 2020.	II – 75
Tabel 2.73.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2020.....	II – 76
Tabel 2.74.	Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020	II – 76
Tabel 2.75.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.	II – 77
Tabel 2.76.	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020.....	II – 78
Tabel 2.77.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.	II – 80
Tabel 2.78.	Rasio Penduduk Lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Tapin Tahun 2020.	II – 82
Tabel 2.79.	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tapin Tahun 2010 – 2020.	II – 83
Tabel 2.80.	Hasil Evaluasi Program dan Indikator Kinerja RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020.	II – 84
Tabel 3.1.	Nilai Inflasi Kabupaten Tapin dan Nasional Tahun 2016 – 2018..	III – 2
Tabel 3.2.	Nilai Produksi Barang dan Jasa Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2020	III – 2
Tabel 3.3.	PDRB Per Kapita ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2016 – 2020..	III – 4
Tabel 3.4.	Laju Pertumbuhan ADHK Tahun 2017 – 2020	III – 4
Tabel 3.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....	III – 5
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020	III – 5
Tabel 3.7.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 dan 2020	III – 8
Tabel 3.8.	Target 2021 dan Proyeksi 2022 Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin	III – 9
Tabel 3.9.	Target Tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023	III – 11
Tabel 3.10.	Total Pembiayaan Target Tahun 2021 Serta Proyeksi 2022 dan 2023	III – 12
Tabel 4.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023	IV – 7
Tabel 4.2.	Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Nasional.....	IV – 12
Tabel 4.3.	Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.....	IV – 13



Tabel 4.4.	Sinkronisasi Tujuan SDGs dengan Prioritas Kabupaten	IV – 13
Tabel 4.5.	Prioritas dan Arah Kebijakan Kabupaten Tapin.....	IV – 15
Tabel 4.6.	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan	IV – 18
Tabel 5.1.	Rencana Pogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 Kabupaten Tapin	V – 2
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Makro Daerah	VI – 2
Tabel 6.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022	VI – 2
Tabel 6.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021	VI – 5



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020II – 39
Grafik 2. 2	Prevalensi Stunting Di Kabupaten Tapin Menurut Data Hasil Entry E-PPBGM.....II – 40
Grafik 2. 3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Tapin Tahun 2017 – 2020.....II – 51
Grafik 2. 4	Kepemilikan KTP dan Akte Kelahiran Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020 II – 57
Grafik 2. 5	Jaringan Komunikasi Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2020II – 61
Grafik 2. 6	Perkembangan Grup Kesenian Di Kabupaten Tapin 2018–2020..II – 66
Grafik 2. 7	Produksi dan Produktivitas Karet Di Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020II – 71
Grafik 2. 8	Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2020.....II – 77
Grafik 2. 9	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2020.....II – 79
Grafik 2. 10	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih Di Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2020II – 81



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah wajib menyusun RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selain berorientasi pada substansi, penyusunan RKPD juga berorientasi pada proses antara lain: Pertama pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga Pendekatan politis, penjabaran dari agenda - agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Keempat pendekatan *bottom-up* dan *top-down* dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan serta desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.



Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagai perangkat daerah yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah dan juga mengkoordinasikan perencanaan yang bersifat sektoral.

RKPD disusun melalui proses yang dimulai dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir sampai dengan penetapan.

RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Substansi RKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan disusun berdasarkan penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

RKPD menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang



- Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
31. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus disease di Lingkungan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);



38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
41. Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/003/KUM/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2014 - 2034 dimana prioritas, sasaran pembangunan dan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam RKPD selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD.

1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Tapin dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Pemerintah pusat telah menetapkan Tema RKP Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan 7 agenda pembangunan yang menjadi pedoman RKPD Kabupaten Tapin dalam membuat strategi dan kebijakan yang selaras yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Sabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Tapin dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

RKPD Kabupaten Tapin berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dengan tema **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan”** dengan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD 2022 yaitu:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata.
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana.
6. KALSEL Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru.

1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Tapin dengan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Penyusunan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dengan visi **“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”** dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.



4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Tapin dengan RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034

Penyusunan RKPD Kabupaten Tapin memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin dengan menyelaraskan pencapaian strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang. Penyusunan RKPD Kabupaten Tapin memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034. Dalam menyusun RKPD juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Tapin dengan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Kabupaten Tapin menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022 dimaksudkan dalam rangka memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam

menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Tapin yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2021 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2022;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapin sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

1.5. Sistematika Dokumen Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2021, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :



BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menguraikan pengertian ringkas, kedudukan, peran dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunan, keterkaitan dengan dokumen RPJMD dan RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP dan program strategis nasional serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kabupaten Tahun 2021 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 bagi Kabupaten Tapin.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat uraian kondisi geografi dan demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan beberapa tahun terakhir, dan permasalahan pembangunan serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu sampai dengan tahun berjalan.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2020 serta pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tapin.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang

direncanakan, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJMD, serta tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memuat Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan permasalahan Pembangunan Daerah. Dalam bagian Kondisi Umum Daerah memuat kondisi riil Kabupaten Tapin. Data dan informasi disajikan berdasarkan Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tapin

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2,152.63 km², yang merupakan 5,8 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Binuang	150.91	8	3
2	Hatungun	79.57	8	0
3	Tapin Selatan	171.84	10	1
4	Salam Babaris	59.90	6	0
5	Tapin Tengah	306.26	17	0
6	Bungur	89.39	12	0
7	Piani	190.09	8	0
8	Lokpaikat	106.28	8	1
9	Tapin Utara	32.62	12	4
10	Bakarangan	70.40	12	0
11	Candi Laras Selatan	277.46	12	0
12	Candi Laras Utara	617.93	13	0
Kabupaten Tapin		2,152.63	126	9

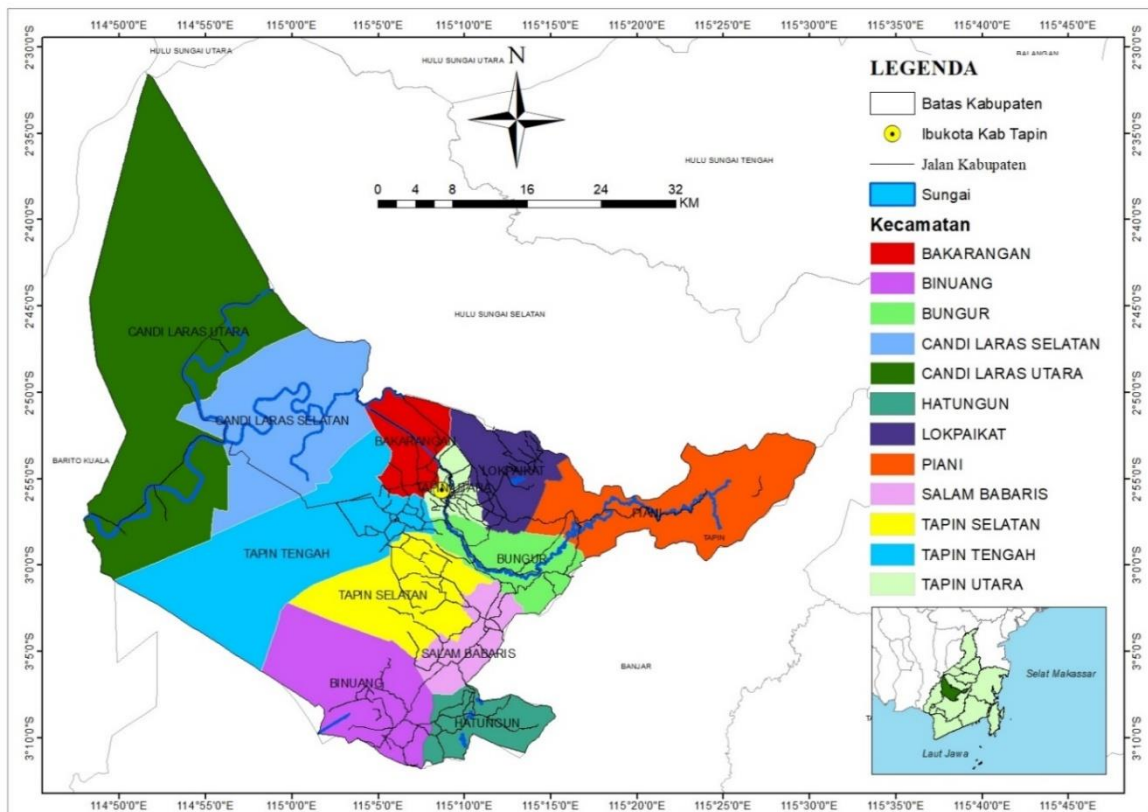
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Tapin terletak antara 20.32'.43" – 30.00'.43" Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13"– 1150.30'33" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.

**Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, 2021

C. Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34 persen dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang.
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

Tabel 2. 2
Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
	0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	> 500 m	
Binuang	8,258	3,911	940	130	0	0	13,239
Hatungun	0	0	3,344	4,093	2,123	0	9,560
Tapsel	6,566	2,975	5,803	0	0	0	15,344
Salba	0	0	6,411	869	0	0	7,280
Tapteng	29,552	1,404	0	0	0	0	30,956
Bungur	0	3,747	4,182	1,197	0	0	9,126
Piani	0	0	3,640	7,260	6,488	2,621	20,009
Lokpaikat	1,854	3,495	3,719	321	0	0	9,389
Tapin Utara	867	2,143	224	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	146,455	17,675	28,263	13,870	8,611	2,621	217,495
Persentase	67.34%	8.13%	12.99%	6.38%	3.96%	1.21%	100.00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen meliputi sekitar 18 persen dari luas wilayah.

Tabel 2. 3
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
	0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25%	>25-40%	>40%	
Binuang	12,915	0	0	30	294	0	13,239
Hatungun	0	264	6,070	2,110	256	860	9,560
Tapsel	15,184	160	0	0	0	0	15,344
Salba	4,854	576	730	500	160	460	7,280
Tapteng	30,956	0	0	0	0	0	30,956
Bungur	5,476	0	0	2,780	440	430	9,126
Piani	0	1,090	3,510	8,909	2,360	4,140	20,009
Lokpaikat	7,369	250	860	580	330	0	9,389
Tapin Utara	3,234	0	0	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	179,346	2,340	11,170	14,909	3,840	5,890	217,495
Persentase	82.46%	1.08%	5.14%	6.85%	1.77%	2.71%	100.00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

D. Jenis Tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari *organosol gleyhumus*, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.

E. Kemampuan Tanah

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat disebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman <30 cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

F. Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat jumlah curah hujan berkisar antara 81,2-397,4 mm, dimana curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan curah hujan terendah pada bulan Juni.



Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 26 - 30 °C Rata-rata suhu terendah pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, dan Desember. Adapun rata-rata suhu udara tertinggi pada bulan Agustus. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 75,38 – 83,13%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Oktober, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

G. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

H. Penggunaan Lahan

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 memiliki rencana pola ruang terdiri dari:

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung meliputi:



a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungun.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air:

- Kecamatan Salam Babaris;
- Kecamatan Hatungun;
- Hulu Sungai Tapin meliputi:
 1. Kecamatan Piani;
 2. Kecamatan Bungur; dan
 3. Kecamatan Tapin Utara.
- Hulu Sungai Negara meliputi:
 1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- **Kawasan Sempadan Sungai**
 1. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 2. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 548 (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
 3. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
 4. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;
 5. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
 6. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan
 7. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar.
- **Kawasan Sekitar Danau dan Waduk**
 1. Danau Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;
 2. Bendungan Tapin di Kecamatan Piani; dan
 3. Bendung Tapin di Kecamatan Bungur.

- **Kawasan Sekitar Mata Air**

1. Mata air di Desa Hatungun, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Binuang;
2. Mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung, Desa Buni'in Kecamatan Piani;
3. Mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan
4. Mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkap Kecamatan Hatungun. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di lokasi hulu sungai dan mata air.

- **Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) % dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas 20 (dua puluh) % ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) % ruang terbuka hijau privat.

Tabel 2. 4
Luas dan Prosentase RTH Kota Rantau berdasarkan
Tipologi Kepemilikan

No. LOKASI	NAMA RTH	LUAS (M2)	KEPEMILIKAN	% RTH
1	Eks Terminal Cangkring	3.459,94	RTH Publik	0,050
2	Pasa Ikan Ratau	3.999,74	RTH Publik	0,058
3	Tanah Eks Rencana Pasar	20.155,89	RTH Publik	0,293
4	Perumnas Haur Kuning	488,24	RTH Publik	0,007
5	Perumnas ustika Rangda	249,24	RTH Publik	0,004
6	Perumnas Asabri	269,12	RTH Publik	0,004
7	Perumnas Labuhan Permai	620,06	RTH Publik	0,009
8	Alun-Alun di Kawasan Rantau Baru	51.770,29	RTH Publik	0,751
9	Hutan Kota Kawasan Rantau Baru	34.432,14	RTH Publik	0,500
10	Danau Buatan Kawasan Rantau Baru	208.948,38	RTH Publik	3,033
11	Pasar Keraton di Ruas Lingkar Kupang Cangkring	114.533,60	RTH Publik	1,662
12	Sekolah Unggulan Terpadu Kawasan Rantau Baru	208.251,39	RTH Publik	3,022
13	Islamic Center Kawasan Rantau Baru	40.320,60	RTH Publik	0,585
14	Kawasan Perkantoran Rantau Baru	218.417,01	RTH Publik	3,170
15	Fasilitas Olahraga Kawasan Rantau Baru	171.943,27	RTH Publik	2,495
16	Hutan	1.206.847,50	RTH Publik	17,515
17	Persawahan	2.111.927,92	RTH Privat	30,651
18	Persawahan	390.594,21	RTH Privat	5,669
19	Hutan	559.582,53	RTH Publik	8,121
20	Hutan	680.596,09	RTH Publik	9,878



No. LOKASI	NAMA RTH	LUAS (M2)	KEPEMILIKAN	% RTH
21	Persawahan	91.726,56	RTH Privat	1,331
22	Persawahan	622.543,17	RTH Privat	9,035
23	Hutan	148.595,80	RTH Publik	2,157
	Total RTH	6.890.272,69	Proporsi RTH	29,91
	Luas Kota Rantau	23.034.662,62		
	TIPOLOGI KEPEMILIKAN	LUAS (M2)	% RTH	% RTU
1	RTH PUBLIK	3.673.480,83	53,31	15,95
2	RTH PRIVAT	3.216.791,86	46,69	13,97
	JUMLAH	6.890.272,69	100,00	29,91

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, 2021

d. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya meliputi:

- Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- Masjid Al Mukkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- Masjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Tasan Panyi di Kecamatan Tapin Utara;
- Masjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
- Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
- Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- Masjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur;
- Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- dan
- Masjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah.



e. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- **Kawasan rawan longsor**

1. Kecamatan Bungur;
2. Kecamatan Piani; dan
3. Kecamatan Hatungun.

- **Kawasan rawan banjir**

1. Kecamatan Candi Laras Utara;
2. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
3. Kecamatan Tapin Tengah.

f. Kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Bakarangan.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

- **Hutan Produksi Tetap (HP)**

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:

1. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;
2. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
3. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar;
4. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.

- **Hutan Produksi Konversi (HPK)**

Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi laras Utara.

- **Hutan Produksi Terbatas (HPT)**

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.



b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

• **Kawasan peruntukan tanaman pangan**

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri atas:

1. Kawasan pertanian lahan basah

Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 64.098 (enam puluh empat ribu sembilan puluh delapan) hektar.

2. Kawasan pertanian lahan kering

Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi:

- 1) Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- 2) Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektar;
- 3) Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) hektar;
- 4) Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar;
- 5) Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;
- 6) Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar; dan
- 7) Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.

3. Kawasan tanaman pangan berkelanjutan

Kawasan peruntukan tanaman pangan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pertanian lahan basah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

• **Kawasan peruntukan hortikultura**

Kawasan peruntukan hortikultura meliputi:

- a. Komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
 2. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;



3. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
 4. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
 5. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
 6. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
 7. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
 8. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
 9. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
 10. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
 11. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- b. Komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan
 - c. Komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.

• **Kawasan peruntukan peternakan**

Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:

- a. Ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam arti luas meliputi:
 1. Ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Benuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan



2. Ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.
- b. Ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:
 1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Selatan;
 4. Kecamatan Salam Babaris;
 5. Kecamatan Bungur;
 6. Kecamatan Piani; dan
 7. Kecamatan Tapin Utara.
- c. Ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi:
 1. Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Tapin Tengah;
 3. Kecamatan Bakarangan;
 4. Kecamatan Lokpaikat;
 5. Kecamatan Piani;
 6. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 7. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 8. Kecamatan Tapin Utara.
- d. Aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
 1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 4. Kecamatan Bakarangan.
- e. Kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
 1. Kecamatan Tapin Tengah;
 2. Kecamatan Bakarangan;
 3. Kecamatan Lokpaikat; dan
 4. Kecamatan Hatungun.



- **Kawasan peruntukan perkebunan**

Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas:

 - a. Kawasan perkebunan besar;
 - b. Kawasan perkebunan rakyat.
- c. Kawasan peruntukan perikanan**
 1. Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. Kawasan pengolahan ikan.
 2. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di:
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Kecamatan Bakarangan;
 - d. Kecamatan Tapin Tengah;
 - e. Kecamatan Tapin Selatan;
 - f. Kecamatan Tapin Utara;
 - g. Kecamatan Lokpaikat;
 - h. Kecamatan Binuang; dan
 - i. Kecamatan Bungur.
 3. Kawasan peruntukan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya kolam, keramba dan minapadi tersebar di seluruh kecamatan.
 4. Kawasan pengolahan ikan meliputi:
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - c. Kecamatan Bakarangan
- d. Kawasan peruntukan pertambangan**
 1. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
 - a. Mineral logam;
 - b. Mineral bukan logam;
 - c. Batuan; dan
 - d. Batu bara.
 2. Mineral logam meliputi:
 - a. Emas meliputi:
 1. Desa Kalumpang Kecamatan Salam Babaris; dan
 2. Desa Miawa Kecamatan Piani.
 - b. Mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan
 - c. Besi terdapat di Kecamatan Piani.



3. Mineral bukan logam meliputi:
 - a. Intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;
 - b. Kaolin meliputi:
 - 1) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 2) Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 - 3) Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;
 - 4) Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan
 - 5) Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.
 - c. Batu lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi:
 - 1) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 - 2) Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
 - 3) Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 - 4) Desa Bungur Kecamatan Bungur;
 - 5) Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 6) Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.
 - d. Batu gamping kapur meliputi:
 - 1) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 - 2) Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun;
 - 3) Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 - 4) G. Tarungin Kecamatan Hatungun;
 - 5) G. Kapayang;
 - 6) G. Batu Dinding Kecamatan Bungur;
 - 7) G. Talikur Kecamatan Bungur;
 - 8) G. Barung Kecamatan Piani;
 - 9) G. Pulankapitu Kecamatan Piani;
 - 10) Desa Baramban Kecamatan Piani;
 - 11) Desa Talikur Kecamatan Bungur;
 - 12) Desa Pantai Walang Kecamatan Bungur;
 - 13) G. Lampinit Kecamatan Bungur;
 - 14) Sandar Kecamatan Salam Babaris;
 - 15) Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;
 - 16) Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - 17) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.
 - e. Batu pasir kuarsa meliputi:
 - 1) Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;
 - 2) G. Gambir Kecamatan Tapin Selatan;
 - 3) G. Galumbang;
 - 4) Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
 - 5) Sido Mukti Kecamatan Hatungun;
 - 6) Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;



- 7) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 8) Karang Nangka Kecamatan Hatungun;
 - 9) Tungkap Kecamatan Binuang;
 - 10) Desa Burakai Kecamatan Hatungun;
 - 11) Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 - 12) Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
 - 13) Desa Tampunang Hulu Kecamatan Bungur;
 - 14) Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan
 - 15) Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.
- f. Fosfat meliputi:
- 1) Desa Beramban Kecamatan Piani;
 - 2) Desa Talikur Kecamatan Piani;
 - 3) G. Lampinit Kecamatan Bungur;
 - 4) Kecamatan Piani; dan
 - 5) Kecamatan Salam Babaris.
4. Batuan meliputi:
- a. Granit meliputi:
- 1) G. Batu Dikalang Kecamatan Piani;
 - 2) G. Karau Kecamatan Piani;
 - 3) G. Datar Gatus Kecamatan Piani;
 - 4) G. Hatalayang Kecamatan Piani;
 - 5) Desa Harakit Kecamatan Piani;
 - 6) Desa Batung Kecamatan Piani;
 - 7) Desa Bagandah Kecamatan Piani;
 - 8) Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan
 - 9) Desa Ranai Kecamatan Piani.
- b. Andesit meliputi:
- 1) G. Bagak – Asam Randah Kecamatan Hatungun;
 - 2) G. Batu Belawang;
 - 3) G. Haripit Kecamatan Hatungun;
 - 4) G. Batuago Kecamatan Hatungun;
 - 5) Desa Hariaman Kecamatan Piani;
 - 6) Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; dan
 - 7) Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani;
- c. Marmer meliputi
- 1) Gunung Talikur Kecamatan Piani; dan
 - 2) Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.
- d. Pasir meliputi:
- 1) Desa Shabah Kecamatan Bungur;
 - 2) Desa Tampunang Hilir Kecamatan Bungur;



- 3) Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan
- 4) Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.
- e. Tanah urug meliputi:
 - 1) Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;
 - 2) Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 3) Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang;
 - 4) Desa Karang Putih Kecamatan Binuang;
 - 5) Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan
 - 6) Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.
5. Batu bara berada di Format Warukin dan Format Tanjung meliputi:
 - a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Tapin Selatan;
 - c. Kecamatan Bungur;
 - d. Kecamatan Salam Babaris; dan
 - e. Kecamatan Lokpaikat.
6. Kawasan pertambangan seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) hektar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perijinan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kawasan peruntukan permukiman**
 1. Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:
 - a. Permukiman perkotaan; dan
 - b. Permukiman perdesaan.
 2. Permukiman perkotaan meliputi:
 - a. Permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi:
 - 1) Kecamatan Tapin Utara;
 - 2) Kecamatan Binuang; dan
 - 3) Kecamatan Candi Laras Selatan.
 - b. Kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi:
 - 1) Kecamatan Bakarangan;
 - 2) Kecamatan Lokpaikat;
 - 3) Kecamatan Bungur;
 - 4) Kecamatan Piani;
 - 5) Kecamatan Salam Babaris;
 - 6) Kecamatan Hatungun;
 - 7) Kecamatan Tapin Selatan;



- 8) Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - 9) Kecamatan Candilaras Utara.
3. Permukiman perdesaan terdiri atas:
- a. Kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- f. Kawasan peruntukan industri**
1. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - a. Industri besar;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri kecil dan mikro.
 2. Kawasan industri besar seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Candi Laras Utara.
 3. Kawasan industri menengah meliputi:
 - a. Industri minyak kelapa sawit meliputi:
 - 1) Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - 2) Kecamatan Candi Laras Selatan.
 - b. Industri pengolahan karet crumb rubber di Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - c. Industri bricket batu bara di Kecamatan Tapin Selatan.
 4. Kawasan industri kecil dan mikro meliputi:
 - a. Kerajinan keramik di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - b. Agro-industri di Kecamatan Candi Laras Utara dan Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - c. Sentra industri kecil di Kecamatan Binuang;
 - d. Industri perikanan terbatas di Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - e. Industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.

Kawasan industri tertentu untuk industri besar, industri menengah dan skala mikro, kecil dapat didirikan terpadu dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Kawasan peruntukan pariwisata**
1. Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah kabupaten terdiri atas:



- a. Kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
- a. Wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;
 - b. Wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang;
 - c. Wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah;
 - d. Wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur;
 - e. Wisata alam air terjun Mandian Junit di Kecamatan Piani;
 - f. Wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan Piani;
 - g. Wisata alam Peranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
 - h. Wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;
 - i. Wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
 - j. Wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
 - k. Wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; dan
 - l. Wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani.
3. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:
- a. Kawasan wisata budaya:
 - 1) Perahu Naga di Kecamatan Candi Laras Utara;
 - 2) Maayun Anak di Kecamatan Tapin Utara;
 - 3) Situs Candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - 4) Aruh Ganal di Kecamatan Piani.
 - b. Kawasan wisata religius:
 - 1) Makam Datu Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;
 - 2) Makam Syekh Salman AlFarisi di Kecamatan Bakarangan;
 - 3) Majelis ta'lim di Kecamatan Tapin Tengah.
4. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan dan kerajinan anyaman di Kecamatan Candi Laras Selatan.

h. Kawasan peruntukan lainnya

1. Kawasan peruntukan lainnya, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. Kawasan pertahanan dan keamanan.
2. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman terdiri atas:



- a. Fasilitas perkantoran pemerintahan meliputi:
 - 1) Fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru;
 - 2) Fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kecamatan; dan
 - 3) Fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.
- b. Fasilitas pendidikan meliputi:
 - 1) Fasilitas pendidikan tinggi Salman Al-Farisi berada di Kecamatan Tapin Selatan;
 - 2) Fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
 - 3) Fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- c. Fasilitas kesehatan meliputi:
 - 1) Fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru, Margasari Baru, dan Binuang Baru;
 - 2) Fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- d. Fasilitas peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk pendukung;
- e. Fasilitas rekreasi dan olah raga meliputi:
 - 1) Taman-Taman Kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala RT/RW, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;
 - 2) Lapangan umum atau lapangan olah raga skala RT/RW, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota;



- 3) Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan sepak bola, volley, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan permukiman; dan
 - 4) Stadion Mini Binuang di Kecamatan Binuang;
 - 5) Stadion Internasional Binuang di Kecamatan Binuang;
 - 6) Sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang;
 - 7) Lapangan Tennis Indoor di Kecamatan Binuang;
 - 8) Stadion Datu Muning di Kecamatan Tapin Utara;
 - 9) Gedung Sultan Kuning di Kecamatan Tapin Utara; dan
 - 10) Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.
3. Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa meliputi:
- a. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern diarahkan tersebar di :
 - 1) Kawasan Rantau Baru;
 - 2) Kawasan Margasari Baru;
 - 3) Kawasan Binuang Baru; dan
 - 4) Kawasan Pelabuhan Sungai Puting.
 - b. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL;
 - c. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
4. Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
- a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 - b. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah Kabupaten; dan
 - c. Kawasan Kepolisian meliputi: Kepolisian Resort berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat dan Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Tapin dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten. Rencana penetapan kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten terdiri atas:



- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- b. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi berada di Kawasan Rawa Batang Banyu yang meliputi:

- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
- c. Kecamatan Tapin Tengah.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berada di kawasan tertentu di Pegunungan Meratus sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari:

- a. Kawasan Rantau Baru;
- b. Kawasan Binuang Baru;
- c. Kawasan Margasari Baru;
- d. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting;
- e. Km 94 Kecamatan Binuang; dan
- f. Km 101 Kecamatan Tapin Selatan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya berada di Kawasan Pelestarian Budaya Adat Maayun Anak di Kecamatan Tapin Utara.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Bendungan Tapin sebagai Pembangkit Energi Listrik berada di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Hutan Lindung di Kecamatan Piani.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- a. Kawasan rawan longsor meliputi:
 - 1) Kecamatan Bungur;
 - 2) Kecamatan Piani; dan
 - 3) Kecamatan Hatungun.
- b. Kawasan rawan banjir meliputi:
 - 1) Kecamatan Candi Laras Utara;
 - 2) Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - 3) Kecamatan Tapin Tengah.

2.1.1.4. Demografi

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 189.475 jiwa, yang terdiri dari 95.810 jiwa laki-laki dan 93.665 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami kenaikan dari Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Tapin mengalami pertumbuhan sebesar 1,18 persen.

Rasio penduduk Kabupaten Tapin tahun 2020 sebesar 102. Rasio tersebut lebih besar dari 100 yang berarti penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan.

Tabel 2. 5
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020
1.	Binuang	31.258	1,33
2.	Hatungun	9.256	1,39
3.	Tapin Selatan	20.369	1,21
4.	Salam Babaris	11.858	0,67
5.	Tapin Tengah	21.195	1,80
6.	Bungur	13.246	1,27
7.	Piani	5.770	0,71
8.	Lokpaikat	11.580	2,58
9.	Tapin Utara	25.396	0,88
10.	Bakarangan	10.047	1,49
11.	Candi Laras Selatan	12.362	0,24
12.	Candi Laras Utara	17.138	0,59
Sensus Penduduk 2020		189.475	1,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Ditinjau dari persebarannya, penduduk Kabupaten Tapin tahun 2020 lebih banyak bertempat tinggal di Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara, dan Kecamatan Tapin Tengah.

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

- a. Faktor penambah
 - 1) Kelahiran (*fertilitas*) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.

- 2) Migrasi masuk (*imigrasi*) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan.
- b. Faktor pengurang
- 1) Kematian (*mortalitas*) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
 - 2) Migrasi keluar (*emigrasi*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Tabel 2. 6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	8.853	8.271	17.124
5 - 9	9.494	9.081	18.575
10 - 14	7.897	7.387	15.284
15 - 19	7.105	6.833	13.938
20 - 24	7.800	7.554	15.354
25 - 29	7.951	7.771	15.722
30 - 34	8.082	7.821	15.903
35 - 39	7.755	7.341	15.096
40 - 44	7.037	7.114	14.151
45 - 49	6.466	6.427	12.893
50 - 54	5.552	5.509	11.061
55 - 59	4.474	4.399	8.873
60 - 64	3.296	3.322	6.618
65 - 69	2.174	2.242	4.416
70 - 74	994	1.343	2.337
75+	880	1.250	2.130
Total	95.810	93.665	189.475

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tapin, 2021

Ditinjau dari tabel di atas, di tahun 2020 penduduk yang berusia produktif (15 tahun – 64 tahun) sebanyak 129.609 orang yang berarti masih lebih besar dari penduduk yang berusia tidak produktif (0 tahun – 14 tahun dan diatas 65 tahun) sebanyak 59.866 orang.

Sementara itu Luas wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin menurut kecamatan pada tahun 2020 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 7
Luas wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Binuang	150.91	8	3	31.258
2	Hatungun	79.57	8	0	9.256
3	Tapin Selatan	171.84	10	1	20.369
4	Salam Babaris	59.90	6	0	11.858
5	Tapin Tengah	306.26	17	0	21.195
6	Bungur	89.39	12	0	13.246
7	Piani	190.09	8	0	5.770
8	Lokpaikat	106.28	8	1	11.580
9	Tapin Utara	32.62	12	4	25.396
10	Bakarangan	70.40	12	0	10.047
11	Candi Laras Selatan	277.46	12	0	12.362
12	Candi Laras Utara	617.93	13	0	17.138
Kabupaten Tapin		2,152.63	126	9	189.475*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Binuang, dengan kecenderungan meningkat setiap tahun. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2. 8
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²)
1	Binuang	150.91	31.258	207
2	Hatungun	79.57	9.256	116
3	Tapin Selatan	171.84	20.369	119
4	Salam Babaris	59.90	11.858	198
5	Tapin Tengah	306.26	21.195	69
6	Bungur	89.39	13.246	148
7	Piani	190.09	5.770	30
8	Lokpaikat	106.28	11.580	109
9	Tapin Utara	32.62	25.396	779
10	Bakarangan	70.40	10.047	143
11	Candi Laras Selatan	277.46	12.362	45
12	Candi Laras Utara	617.93	17.138	28
Kabupaten Tapin		2,152.63	189.475*	88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

B. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pada tahun 2016-2020, data tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Tapin masih didominasi oleh para pekerja dengan lulusan sekolah dasar. Oleh karena itu, kondisi tingkat pendidikan sumber daya manusia di Kabupaten Tapin harus menjadi perhatian.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tapin ditinjau dari tingkat pendidikan masih harus ditingkatkan dalam rangka menghadapi tantangan kemajuan masa yang akan datang.

Tabel 2. 9
Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak/belum pernah sekolah, Tidak/belum tamat dan Tamat SD/MI Sederajat	48.823	50.467	48.263	45.228	42.796
2	Tamat SMP/MTs Sederajat	15.104	14.750	16.437	15.035	18.637
3	Tamat SMU/MA Sederajat	18.750	1.9710	19.255	23.282	24 701
4	Tamat Diploma/Universitas	7.083	8.799	8.850	10.845	10.802
	Jumlah	89.760	93.726	92.805	94.390	96.936

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

C. Jenis Pekerjaan Penduduk

Pada tahun 2018-2020 penduduk Kabupaten Tapin sebagian besar bekerja di Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa. Berdasarkan data di bawah bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan jasa-jasa sangat besar sumbangan yang diberikan terhadap perekonomian Kabupaten.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
1	Pertanian	40 892	36 405	39.529
2	Industri Pengolahan	15 533	19 776	15.391
3	Jasa-jasa	36 380	38 209	42.016
	Total	92 805	92 805	96.936

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2019-2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Tapin mengalami kenaikan pada tahun 2016-2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2017-2020. Hal tersebut, terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2016 sebesar 4,97%, tahun 2017 sebesar 5,14%, tahun 2018 sebesar 5,01%, tahun 2019 sebesar 4,25% dan tahun 2020 sebesar -1,5%, atau turun sebesar 5,75%. Tahun 2020 bila dibandingkan angka tersebut masih diatas laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai -1,81%, Kabupaten Tapin berada diperingkat ke enam dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2010 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.358.877,8 juta atau terjadi penurunan sebesar 9,28% dibanding tahun 2019. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tapin periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.11. sebagai berikut:

Tabel 2. 11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 – 2020
(Juta rupiah)

Lapangan Usaha	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018 (Juta Rupiah)	2019* (Juta Rupiah)	2020** (Juta Rupiah)
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1144680.03	1207664.36	1202481.66	1266624.56	1211621.36
B Pertambangan dan Penggalan	1917329.94	2028123.90	2166542.51	2233357.68	2185994.35
C Industri Pengolahan	354817.73	366226.95	380578.67	395663.42	381021.96
D Pengadaan Listrik dan Gas	4561.89	4622.60	4965.21	5170.78	5397.06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16602.96	17375.00	18551.27	18949.91	18888.00
F Konstruksi	289211.68	303426.27	320881.92	336046.34	333776.71
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	475774.47	506660.08	546357.42	581233.92	579879.38
H Transportasi dan Pergudangan	170499.29	176546.25	189443.87	198709.36	195595.04
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119394.73	125613.40	134214.72	138142.42	136938.20
J Informasi dan Komunikasi	206256.33	213996.40	228954.75	239311.29	257076.70



Lapangan Usaha	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018 (Juta Rupiah)	2019* (Juta Rupiah)	2020** (Juta Rupiah)
K Jasa Keuangan dan Asuransi	56628.08	59562.67	63306.71	67139.78	71070.49
L Real Estate	78285.10	80743.11	84919.02	88045.25	90660.19
M,N Jasa Perusahaan	5758.39	5848.04	6072.42	6364.78	6196.56
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	373055.37	381261.63	395662.00	414999.06	418793.10
P Jasa Pendidikan	257939.48	274782.72	293918.38	305622.50	304535.35
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92282.32	96352.57	103736.38	107535.47	109081.42
R,S,T,U Jasa lainnya	45896.57	48354.69	51860.09	52709.53	52351.90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5608974.37	5897160.64	6192446.99	6455626.05	6358877.79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	5608974.37	5897160.64	6192446.99	6455626.05	6358877.79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku pada pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.395.704,5 atau terjadi penurunan bila dibanding tahun 2019, pada tahun 2019 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 8.437.285,4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapin periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 12
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018 (Juta Rupiah)	2019 * (Juta Rupiah)	2020** (Juta Rupiah)
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1519400.96	1625548.53	1642876.84	1777052.32	1715849.00
B Pertambangan dan Penggalian	1914134.99	2066274.89	2289033.67	2293864.37	2236350.59
C Industri Pengolahan	486836.12	522239.56	545985.78	573732.05	561281.80
D Pengadaan Listrik dan Gas	5962.42	6842.28	7868.29	8439.43	9060.34
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21788.81	23413.27	25812.56	27259.41	27276.46
F Konstruksi	392344.83	420319.84	456463.81	491503.39	491166.96
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	659737.12	732860.23	813698.45	892400.78	906924.81



Lapangan Usaha	2016 (Juta Rupiah)	2017 (Juta Rupiah)	2018 (Juta Rupiah)	2019 * (Juta Rupiah)	2020** (Juta Rupiah)
H Transportasi dan Pergudangan	221213.17	237332.85	260082.30	278940.07	278406.08
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	157787.39	171359.60	188921.60	201221.27	204947.33
J Informasi dan Komunikasi	246419.13	263651.81	290078.14	312177.38	333832.05
K Jasa Keuangan dan Asuransi	77739.61	85133.31	94391.69	103728.70	109509.15
L Real Estate	98943.82	104308.45	112719.80	120230.36	126640.59
M,N Jasa Perusahaan	8256.54	8626.07	9304.20	10142.56	10152.67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	546436.56	572362.16	617207.76	661337.62	678636.74
P Jasa Pendidikan	348336.20	383556.74	419090.57	445696.55	456541.95
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127342.79	136516.82	148077.14	158679.68	166329.26
R,S,T,U Jasa lainnya	64340.66	70461.22	77546.76	80879.47	82798.74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6897021.12	7430807.64	7999159.37	8437285.42	8395704.53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	6897021.12	7430807.64	7999159.37	8437285.42	8395704.53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

B. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun mengalami fluktuatif, tahun 2016 sebesar Rp 39,81 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 37,42 Juta, Rp. 42,31 juta pada tahun 2018 menjadi Rp. 44,09 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 43,36 juta. Sementara itu untuk perkembangan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari PDRB Per kapita atas dasar harga konstan mengalami kenaikan pada tahun 2016-2019 dan turun pada tahun 2020 dengan rincian yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 30,43 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 31,59 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp. 32,75 juta Rp. 33,73 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 32,84 juta.

Tabel 2. 13
PDRB Perkapita ADHB dan PDRB Per Kapita ADHK
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB Perkapita ADHB	PDRB Perkapita ADHK
1	2016	39,81	30,43
2	2017	37,42	31,59
3	2018	42,31	32,75
4	2019*)	44,09	33,73
5	2020**)	43,36	32,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021, (diolah)

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

C. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi mengenai dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dinamika angka tingkat inflasi memiliki pengaruh besar terhadap beberapa variabel penting lainnya. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat.

Di Indonesia terdapat 44 kota yang dihitung tingkat inflasinya dan kota Banjarmasin adalah satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk dalam penghitungan resmi secara nasional. Dengan asumsi bahwa pergerakan harga di Kabupaten Tapin tidak terlalu jauh berbeda dengan tingkat harga di kota Banjarmasin, maka tingkat inflasi kota Banjarmasin dijadikan acuan dan dianggap sebagai tingkat inflasi di Kabupaten Tapin.

Kabupaten Tapin memakai data inflasi Kota Banjarmasin. Tingkat inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif berada pada tahun 2016 sebesar 3,68%, tahun 2017 sebesar 3,82%, tahun 2018 sebesar 2,63%, tahun 2019 sebesar 4,15% dan tahun 2020 sebesar 1,67%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, rata-rata pertumbuhan inflasi kota Banjarmasin sebesar 3,19%, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.14 berikut :

Tabel 2. 14
Nilai Inflasi Kabupaten Tapin dan Nasional
Tahun 2016-2020

Tahun	Tingkat Inflasi (%)	
	Kota Banjarmasin	Nasional
2016	3,68	3,02
2017	3,82	3,61
2018	2,63	3,13
2019	4,15	2,72
2020	1,67	1,68
Rata-rata	3,19	2,83

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021
2. Badan Pusat Statistik RI tahun,2021

D. Indeks Gini/Koefisien Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Pengelompokan nilai Koefisien Gini adalah:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Dalam menghitung nilai koefisien gini, maka dibutuhkan data-data seperti Jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumahtangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Perbandingan Koefisien Gini Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 15
Koefisien Gini Kabupaten Tapin
Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Tapin	0,32	0,33	0,28	0,268	0,274
Provinsi Kalimantan Selatan	0,332	0,347	0,344	0,330	0,332
Nasional	0,397	0,393	0,389	0,380	0,381

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021
2. Badan Pusat Statistik RI, 2021

E. Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Pada tahun 2016-2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dan pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan, baik dalam hal jumlah maupun persentase, dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin pada tahun 2016 sebanyak 6.810 jiwa atau 3,70%, tahun 2017 sebanyak 7.011 jiwa atau 3,77%, tahun 2018 sebanyak 6.979 jiwa atau 3,70%, tahun 2019 sebanyak 6.507 jiwa atau 3,41% dan pada tahun 2020 sebanyak 5.899 jiwa atau 3,06%.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Variabel Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	369.153	390.488	405.591	406.367	446.577
Jumlah Penduduk Miskin	6.810	7.011	6.979	6.507	5.899
Persentase Penduduk Miskin (P0)	3,7	3,77	3,7	3,41	3,06
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,25	0,4	0,35	0,46	0,45
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,03	0,08	0,06	0,09	0,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat bergantung pada status ekonomi masyarakat. Besarnya beban ekonomi dan kecilnya pendapatan yang diperoleh sebagian kecil kalangan belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang baik. Salah satu beban tersebut adalah tingginya angka ketergantungan penduduk dalam masyarakat. Pada sisi lain juga terjadi efek terhadap masyarakat dalam bentuk keterbatasan kemampuan sosial dalam masyarakat. Bentuk keterbatasan ini akan muncul dalam bentuk masalah kesejahteraan sosial seperti balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan sosial, komunitas adat terpencil dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin berbagai upaya telah dilakukan yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan pada akhir-akhir ini sudah mengalami peningkatan, hal ini tercermin pada turunnya angka penduduk miskin, dengan melakukan upaya/program bersifat proyek padat karya, penyediaan modal usaha mikro, pelayanan kesejahteraan sosial.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

IPM Kabupaten Tapin tahun 2016-2019 mengalami kenaikan akan tetapi tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019, yang semula 70,13 turun menjadi 70,11. Angka IPM tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,91 maupun IPM Nasional 71,94. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin berada pada urutan ke lima dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Data IPM Kabupaten Tapin bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional Tahun 2016 sampai 2020 akan nampak sebagai berikut :

Tabel 2. 17
Data IPM Kabupaten Tapin
Tahun 2016-2020

Kabupaten/Provinsi/Nasional	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Tapin	68,05	68,70	69,53	70,13	70,11
Provinsi Kalimantan Selatan	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91
Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021
3. Badan Pusat Statistik RI, 2021

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator baru yang digunakan dalam penghitungan IPM metode

baru menggantikan indikator Angka Melek Huruf yang digunakan pada metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2. 18
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Di Kabupaten Tapin dan Prov. Kalsel Tahun 2016-2020

Kabupaten/Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Tapin	11,24	11,52	11,85	11,86	11,94
Provinsi Kalimantan Selatan	12,29	12,46	12,50	12,52	12,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data harapan lama sekolah, Kabupaten Tapin berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2020 dan pada tahun 2020 berada di urutan ke-12 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

C. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun atau setingkat Diploma III.

Untuk menghitung angka rata-rata lama sekolah maka digunakan data jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun ke atas dan juga data jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas. Berikut adalah hasil olah kedua data tersebut sehingga menjadi angka rata-rata lama sekolah.

Tabel 2. 19
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Kabupaten/Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Tapin	7,44	7,53	7,54	7,75	7,76
Provinsi Kalimantan Selatan	7,89	7,99	8	8,20	8,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Pada Tahun 2020 Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tapin adalah 7,76 tahun artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tapin bersekolah sampai 7 tahun 6 bulan atau setingkat Kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Sementara itu angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2016-2020. Data tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,29 tahun sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,76 tahun . Pada tahun 2020 berada di urutan ke lima dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data angka rata-rata lama sekolah tahun 2016-2020, maka rata-rata lama sekolah harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin agar bisa lebih ditingkatkan.

D. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2. 20
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020

Tingkat Pendidikan	2019	2020
Kabupaten Tapin :		
SD/MI (%)	99,41	98,98
SLTP/MTs (%)	72,31	72,20

Tingkat Pendidikan	2019	2020
SLTA/MA/SMK (%)	54,45	54,79
Kalimantan Selatan :		
SD/MI (%)	98,81	98,76
SLTP/MTs (%)	74,84	75,51
SLTA/MA/SMK (%)	57,82	58,25

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APM di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020 cenderung berfluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APM tertinggi terdapat pada jenjang SD/MI dan APM terendah pada jenjang SLTA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah siswa yang masih sekolah pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

APM Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APM Kabupaten Tapin untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK selama periode tahun 2019-2020. APM Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APM Provinsi Kalimantan Selatan untuk jenjang pendidikan SD/MI.

E. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2. 21
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin dan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020

Tingkat Pendidikan	2019	2020
Kabupaten Tapin :		
SD/MI (%)	114,57	112,66

Tingkat Pendidikan	2019	2020
SLTP/MTs (%)	85,85	86,23
SLTA/MA/SMK (%)	63,54	65,08
Kalimantan Selatan :		
SD/MI (%)	108,69	107,28
SLTP/MTs (%)	83,83	86,31
SLTA/MA/SMK (%)	78,86	79,10

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APK di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020 cenderung menurun pada jenjang SD/MI. Namun untuk jenjang SLTP/MTs dan jenjang SLTA/MA/SMK cenderung meningkat di tahun 2020.

APK Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APK Kabupaten Tapin khususnya jenjang pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK selama periode tahun 2019-2020. APK Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APK Provinsi Kalimantan Selatan untuk jenjang pendidikan SD/MI untuk tahun 2019-2020.

F. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1- angka kematian bayi (AKB)).

Tabel 2. 22
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
AKB	28	27	14
AKHB	972	973	986

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, 2019-2021

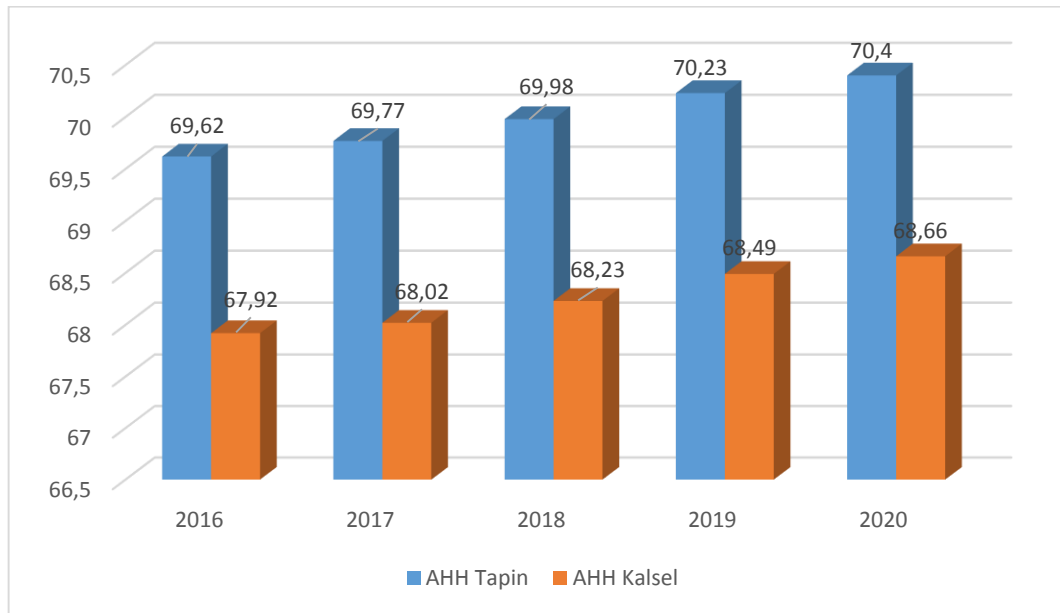
G. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada

suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Grafik 2. 1
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

AHH Kabupaten Tapin selama periode tahun 2016-2020 lebih tinggi dibandingkan dengan AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Data terakhir tahun 2020 AHH Kabupaten Tapin sebesar 70,40 tahun, sedangkan AHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 68,66 tahun.

H. Prevalensi Stunting

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Prevalensi Stunting menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan diadakan per 5 tahun sekali.

Tabel 2. 23
Prevalensi Stunting
Di Kabupaten Tapin Menurut Riskesdas
Kementerian Kesehatan

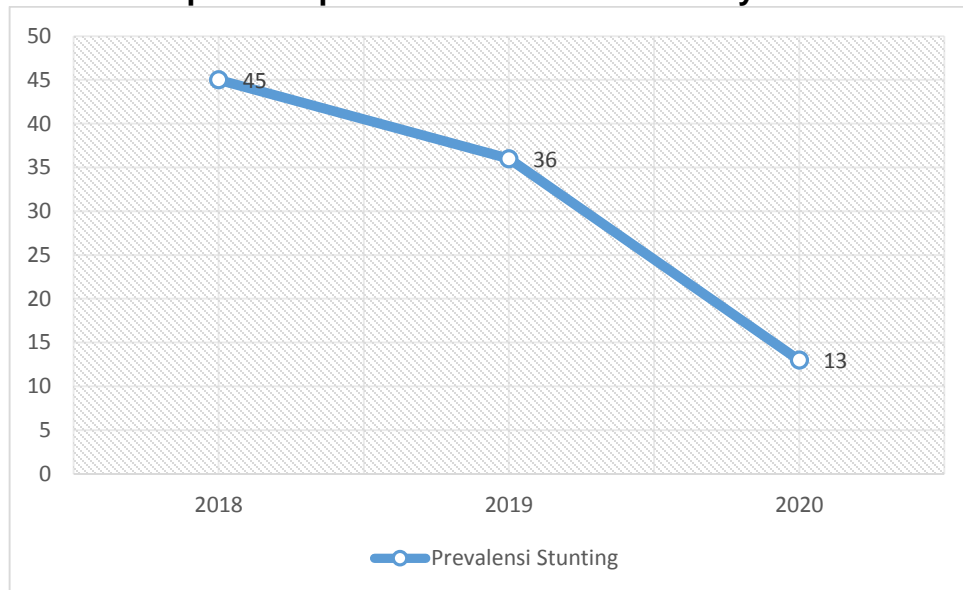
Uraian	2013	2018
Prevalensi Stunting	45,3 %	36,04 %

Sumber: Riskesdas, Kementerian Kesehatan, 2018

Prevalensi Stunting di Kabupaten Tapin menurun secara Signifikan dari tahun 2018 sebesar 36,04%, pada tahun 2019 sebesar 16,85% dan

pada tahun 2020 sebesar 13,73% dari data tersebut berarti penanganan stunting di Kabupaten Tapin semakin baik.

**Grafik 2.2
Prevalensi Stunting
di Kabupaten Tapin Menurut Data Hasil Entry E-PPBGM**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2018,2019 dan 2020

I. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja diartikan sebagai peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif atau disebut juga sumber daya manusia.

**Tabel 2.24
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
Di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020**

Uraian	2018*	2019*	2020
Penduduk yang bekerja	93.739	94.660	96.936
Angkatan Kerja	97.670	98.246	100.696
Rasio	95,98	96,35	96,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2018-2020

2.1.2.3. Kepemudaan dan Olah raga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Berikut adalah perkembangan bidang kepemudaan dan olahraga Kabupaten Tapin tahun 2021.

Tabel 2.25
Perkembangan Sarana Prasarana Olahraga
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	NAMA SARPRAS	LOKASI
1	Lapangan Basket Bur Anwar	Kec. Tapin Utara
2	Lapangan Sepak Bola Stadion Datu Muning	Kec. Tapin Utara
3	Sirkuit Grastrack Tebing Tinggi	Kec. Bungur
4	Lapangan Bola Volly Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
5	Lapangan Sepakbola Stadion Mini Binuang	Kec. Binuang
6	Lapangan tenis Datu Niang Talip Binuang	Kec. Binuang
7	Gedung Olahraga Datu Muning	Kec. Tapin Utara
8	Lapangan Tenis Indoor Binuang	Kec. Binuang
9	Lapangan Sepak Takraw Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
10	Gedung Olahraga Sultan Kuning	Kec. Tapin Utara
11	Stadion Mini Salam Babaris	Kec. Salam Babaris
12	Lapangan Tenis Tapin Putra	Kec. Tapin Utara
13	Lapangan Petanque Stadion Datu Muning	Kec. Tapin Utara
14	Gedung Bulu Tangkis Ds. A. Yani Pura	Kec. Binuang
15	Lapangan Bola Volly Stadion Datu Muning	Kec. Tapin Utara
16	Kolam Renang Galuh Diang Bulan	Kec. Tapin Utara
17	Lapangan Sepakbola Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
18	Dinding Panjat Tebing Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
19	Sirkuit Balap Motor Balipat Binuang	Kec. Binuang
20	Dinding Panjat Tebing Rantau Baru	Kec. Tapin Utara
21	Lapangan Tenis 30 November	Kec. Tapin Utara

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin, 2021

Tabel 2.26
Sarana Prasarana Kegiatan Kepemudaan
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	NAMA SARPRAS	LOKASI
1	Tribun Dwi Dharma	Kec. Tapin Utara
2	Gedung Ruhui Rahayu	Kec. Tapin Utara
3	Asrama SSB Binuang	Kec. Binuang
4	GOR Salam Babaris	Kec. Salam Babaris

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin, 2020

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, ketersediaan sekolah dan tenaga guru. Ketersediaan sekolah nampak dari rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah, sedangkan ketersediaan tenaga guru nampak dari rasio guru terhadap murid.

a. Rasio Guru dan Murid

Perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru sekolah yang bersangkutan. Rasio ini menginterpretasikan semakin tinggi nilai rasio ini semakin berkurang nilai pengawasan dan perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Rasio ini juga untuk mengukur mutu pengajaran di kelas dan menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Untuk menghitung rasio murid-guru dapat disusun tabel sebagai berikut :

Tabel 2.27
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	2019	2020
PAUD/TK		
Jumlah Guru	498	505
Jumlah Murid	5.857	5.542
Jumlah Sekolah	132	135
Rasio Murid Thd Guru	11,76	10,97
Rasio Murid Thd Sekolah	44,37	41,05
SD/MI		
Jumlah Guru	1.804	1.870
Jumlah Murid	21.099	21.231
Jumlah Sekolah	193	194
Rasio Murid Thd Guru	11,70	11,35
Rasio Murid Thd Sekolah	109,3	109,4
SMP/MTs		
Jumlah Guru	674	663
Jumlah Murid	7.549	7.200
Jumlah Sekolah	40	40
Rasio Murid Thd Guru	11,20	10,86
Rasio Murid Thd Sekolah	188,70	180,00

Sumber : 1. Kementerian Agama, 2021

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan tabel diatas rasio murid terhadap guru baik untuk jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan jenjang pendidikan SMP/TRs mengalami penurunan selama kurun waktu 2019-2020. Rasio murid terhadap guru untuk pendidikan PAUD/TK menunjukkan angka penurunan dari 11,76 persen di tahun 2019 menjadi 10,97 persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan beban yang untuk tiap orang guru dengan rasio sebesar 0,79 persen. Rasio murid terhadap guru untuk pendidikan dasar SD/MI juga menunjukan tren menurun selama tahun 2019-2020. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 dimana ada penurunan rasio sebesar 0,35 persen. Sedangkan untuk pendidikan SMP/MTS juga terjadi penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 menunjukkan rasio sebesar 11,20 persen, turun sebesar 0,34 persen menjadi 10,86 di tahun 2020.

B. Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti dokter, perawat, bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani.

Tabel 2.28
Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020

Komponen Perhitungan	Tahun	
	2019	2020
Sarana Kesehatan :	384	394
- Puskesmas Rawat Inap	2	2
- Puskesmas Biasa	11	11
- Puskesmas Pembantu	28	29
- Posyandu	211	213
- Posbindu	118	118
- Klinik Pratama	5	5
- RSU	2	2
- Apotik	7	14
Tenaga Kesehatan :	307	444
- Dokter Umum/Spesialis	18	20
- Dokter Gigi	na	9
- Bidan	149	226
- Perawat	140	189

Sumber : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, 2021
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Jumlah sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu bertambah 1 unit, posyandu bertambah 2 unit dan apotik bertambah 7 unit dalam kurun waktu tahun 2019-2020. Sementara jumlah tenaga kesehatan bidan dan perawat naik secara signifikan di tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Ini selain terjadi karena pelayanan sarana kesehatan yang mengalami penambahan, juga adanya rekrutmen baik dari penerimaan CPNS maupun untuk tenaga kesehatan yang bersifat kontraktual.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum tergambar dari beberapa indikator diantaranya adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik, SDA (Sumber Daya Air), rasio air bersih dan sanitasi, dan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.

a. Jalan dan Jembatan

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Tapin juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan. Proporsi jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan seluruhnya.

Kondisi jalan di Kabupaten Tapin dibedakan atas jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Pembagian jalan tersebut dibedakan atas kewenangannya.

Ruas jalan di wilayah Kabupaten Tapin dengan total panjang jalan sebesar 617,15 Km, dengan status, jenis konstruksi dan kondisi jalan sebagai berikut :

Tabel 2.29
Panjang Jalan menurut Jenis Konstruksi,
Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan Tahun 2020

Jenis Konstruksi/ Kondisi Jalan	Panjang Jalan menurut Status Jalan (Km)		
	Negara	Provinsi	Kabupaten
Jenis Permukaan :			
a. Aspal	79,99	10,12	493,34
b. Kerikil	9,00	-	53,11
c. Tanah	-	7,00	29,20
d. Cor	-	-	41,50
Jumlah	88,99	17,12	617,15
Kondisi :			
a. Baik	68,29	10,89	258,00
b. Sedang	2,00	4,23	155,47
c. Rusak	9,70	2,00	73,42
d. Rusak Berat	9,00	00	130,26
Jumlah	88,99	17,12	617,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Dari data tersebut diatas maka panjang jalan menurut kondisi jalan akan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Proporsi Panjang Jalan menurut Jenis Konstruksi,
Kondisi dan Status Jalan Tahun 2020

Jenis Konstruksi/ Kondisi Jalan	Proporsi Panjang Jalan menurut Status Jalan (%)		
	Negara	Provinsi	Kabupaten
Jenis Permukaan :			
a. Aspal	89,89	59,11	79,94
b. Kerikil	10,11	0	8,61
c. Tanah	0	40,89	4,73
d. Tidak dirinci	0	0	6,72
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Kondisi :			
a. Baik	76,74	63,61	41,81
b. Sedang	2,25	24,71	25,19
c. Rusak	10,90	11,68	11,90
d. Rusak Berat	10,11	0	21,11
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Dari tabel 2.30 tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 meskipun status jalan kabupaten secara keseluruhan merupakan porsi jalan terbesar tetapi dilihat dari panjang jalan dalam kondisi baik maka jalan kabupaten berada pada proporsi yang paling kecil yaitu hanya sebesar 41,81% sedangkan jalan provinsi sebesar 63,61% dan jalan nasional sebesar 76,74%.

b. SDA (Sumber Daya Air)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi area irigasi di Kabupaten Tapin berdasarkan kewenangan meliputi Daerah Irigasi Permukaan dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pusat di Provinsi Kalimantan Selatan lintas kabupaten yang berada di Kabupaten Tapin D.I Belanti I dan II dengan luasan 3.267 Ha, dengan rincian 2.267 Ha berada di Kabupaten Banjar dan 1.000 Ha di Kabupaten Tapin. Daerah Irigasi Permukaan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 Daerah Irigasi utuh yakni DI Belanti seluas 1.050 dan DI Binuang seluas 1.408. Sementara Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan DIR Sei Kalang Damar seluas 1.000 Ha. Untuk Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan total luasan 11.808 Ha yang terdiri dari 50 DI/DIR dengan 6 DI seluas 1.596 Ha dan 44 DIR 10.212 Ha.

Tabel 2.31
Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR
Di Kabupaten Tapin

Kewenangan	Luas Area (Ha)	Prosentase	Jumlah DI/DIR
Pusat	6.472,00	29,77	2
Provinsi	3.458,00	15,91	3
Kabupaten	11.808,00	54,32	50
Total	21.739,00	100,00	

Sumber: Peraturan Menteri PUPR, 2015

c. Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi masyarakat daerah yang baik juga didukung dengan akses dan ketersediaan dari air bersih akses pelayanan sanitasi serta pelayanan system persampahan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi
Di Kabupaten Tapin 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Air Bersih	51,36%	57,08%	59,65 %	62,83 %
Sanitasi	75,09%	77,36%	78,05 %	81,73%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapin, 2021

Selama periode tahun 2017-2020 persentase cakupan layanan air bersih meningkat, pada tahun 2017 sebesar 51,36 persen, tahun 2018 sebesar 57,08 persen, tahun 2019 sebesar 59,65 persen dan sebesar 62,83 persen pada tahun 2020. Meskipun terdapat peningkatan namun belum mampu untuk mencapai target RPJMD tahun 2020 sebesar 75 persen. Sementara cakupan sanitasi layak meningkat dari 75,09 persen ditahun 2017, 77,36 persen ditahun 2018, 78,05 persen ditahun 2019 menjadi 81,73 persen pada tahun 2020. Hal ini menandakan cakupan layanan akses sanitasi di Kabupaten Tapin sudah semakin baik.

d. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2034 telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014, dan dalam pelaksanaannya bisa di review 5 tahun sekali. Pada tahun 2020, akan dilaksanakan review pada dokumen RTRW kabupaten Tapin untuk menyelaraskan dengan kondisi dan

program pembangunan daerah. Untuk tahun 2021 masih mengalami proses untuk perubahan RTRW.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terdapat lima indikator yang dirinci dalam urusan perumahan, diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh, serta indikator rumah layak huni.

a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah rumah tidak layak huni.

Tabel 2.33
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Di Kabupaten Tapin s/d Tahun 2020

Uraian	Unit	Prosentase
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Basis Data TNP2K Kab. Tapin	2.369	100
Penanganan Program BSPS 2017-2020	1098	
Penanganan APBD Provinsi Tahun 2019-2020	50	
Penanganan APBD Kabupaten Tahun 2019-2020	25	
Penanganan Program DAK 2020	64	
Total RTLH yang sudah ditangani	1.237	52,21
Sisa RTLH yang belum ditangani	1.132	47,78

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2020 telah dilaksanakan program penanganan RTLH baik melalui Program BSPS, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Anggaran DAK Kab. Tapin dengan total RTLH yang ditangani sebesar 1.237 unit dengan persentase 52,21 persen dari total 2.369 unit RTLH di Kabupaten Tapin, total Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tapin tersebut masih berbasis pada data TNP2K Kabupaten Tapin. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menyusun Profile Perumahan di Kabupaten Tapin.

Selain peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tapin juga melaksanakan relokasi rumah di bantaran sungai dengan total rumah yang direlokasi berjumlah 134 (seratus tiga puluh empat) unit yang terletak di bantaran sungai sepanjang jalan H. Hakim Samad dengan meliputi 4 (Empat) Desa dan 2 (dua) kecamatan yaitu

Desa Pandahan, Desa PK. Hilir, Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah dan Desa Sungai Rutas Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan. Kemudian pada tahun 2021 dilanjutkan relokasi rumah sebanyak 74 (Tujuh Puluh empat) unit yang di lokasi yang sama.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.34
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin Tahun 2019–2020

No.	Uraian	2019	2020
1	Jumlah polisi pamong praja	134	119
2	Jumlah penduduk	189.422*	189.475**
3	Rasio per 10.000 penduduk	7,07	6,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Gambaran Wilayah Kebencanaan

Kabupaten Tapin memiliki beberapa kejadian bencana yang memberikan dampak yang cukup besar. Salah satu kejadian yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup besar adalah bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Untuk mengurangi dampak korban jiwa maka direncanakan jalur dan ruang evakuasi. Jalur evakuasi bencana alam banjir tersebut meliputi :

- Ruas jalan Margasari- Muara Muning- Rantau; dan
- Ruas jalan Muara Muning - Sungai Kandang – Rantau.

Dan ruang evakuasi bencana alam banjir meliputi :

- a. Kecamatan Candi Laras Utara;
- b. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
- c. Kecamatan Tapin Tengah.

Kejadian kebakaran juga berdampak kepada Kecamatan sekitar Kabupaten Tapin dengan korban mengungsi yang cukup besar. Selain itu bencana lain yang sering terjadi adalah kekeringan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berikut jumlah kejadian bencana di Kabupaten Tapin tahun pada tahun 2020:

Tabel 2. 35
Jumlah Kejadian Bencana Di Kabupaten Tapin
Tahun 2020

No.	KECAMATAN	KEJADIAN BENCANA						
		BANJIR	LONGSOR	PUTING BELIUNG	KARHUTLA	KEBAKARAN PERUMAHAN	POHON TUMBANG	LAIN-LAIN
1	TAPIN UTARA	8	0	0	1	2	14	2
2	PIANI	0	1	0	2	0	0	0
3	LOKPAIKAT	5	2	0	0	2	0	0
4	BUNGUR	2	0	0	1	1	1	0
5	TAPIN TENGAH	0	0	0	4	0	0	0
6	BINUANG	2	0	1	0	3	0	0
7	CANDI LARAS UTARA	0	0	0	10	1	0	1
8	BAKARANGAN	0	0	0	3	0	0	0
9	CANDI LARAS SELATAN	0	0	0	7	0	0	0
10	TAPIN SELATAN	2	0	0	3	3	4	0
11	SALAM BABARIS	0	0	0	1	0	0	0
12	HATUNGUN	0	1	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

F. Sosial

Masalah sosial yang dianggap krusial adalah penanganan kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penanganan sosial akibat Pandemi *Covid-19*.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019 sebanyak 18.334 orang PKKS yang memperoleh bantuan dan jumlah ini meningkat menjadi 24.303 pada tahun 2020.

Tabel 2. 36
PMKS Penerima Bantuan
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019	2020
1	PMKS penerima bantuan	18.334	24.303

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tapin, 2021

Dengan adanya Pandemi *Covid-19* yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial maka Pemerintah Kabupaten Tapin berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk membantu baik bantuan secara langsung berupa uang, maupun berupa paket bantuan sembako yang dananya bersumber dari APBN dan APBD.

Tabel 2.37
PMKS Penerima Bantuan terdampak *Covid-19*
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Sumber Dana	Jumlah
1	Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial (600rb/bulan untuk 3 bulan)	8.251 KK
2	Bantuan Sosial Tunai Dana Desa (600rb/bulan untuk 3 bulan)	9.004 KK
3	Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Kab. Tapin (600rb/bulan untuk 3 bulan)	5.000 KK
4	Bantuan Paket Sembako dari Pemerintah Kab. Tapin (Paket Sembako selama 3 bulan)	45.000 Paket

Sumber: 1. Dinas Sosial Kabupaten Tapin, 2021

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, 2021

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

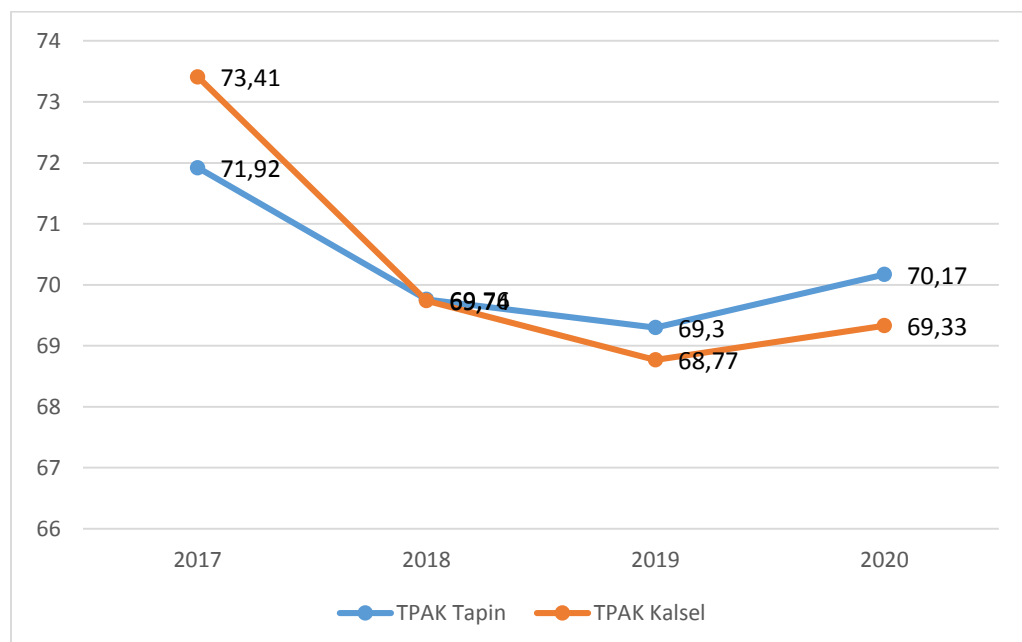
Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja

dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Berikut adalah tabel yang menyajikan data angkatan kerja:

Grafik 2.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2020



Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021
2. Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2021

Berdasarkan grafik di atas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tapin fluktuatif dari tahun 2016-2020, pada tahun 2020 dengan nilai 70,17 persen lebih besar dari TPAK Provinsi Kalimantan selatan di tahun 2020 sebesar 69,33.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Berikut ini adalah data pengangguran yang terjadi di Kabupaten Tapin dalam empat tahun terakhir:

Tabel 2. 38
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tapin Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019*	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin	4,39	4,02	3,65	3,73
TPT Provinsi Kalimantan Selatan	3,53	3,86	4,18	4,74
TPT Nasional	5,33	5,10	5,23	7,07

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021
2. .Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021
3. Badan Pusat Statistik RI, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada tahun 2017-2019 dan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Data pada tahun 2020 sebesar 3,73% yang mengalami selisih peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 0,08%.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari perkembangan indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG), serta besarnya persentase pernikahan anak.

a. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Partipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan jumlah perempuan yang berada di lembaga pemerintahan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,87	84,56	84,44	84,08
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,99	73,11	65,16	64,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui IPG mengalami kenaikan padatahun 2017-2018 dan terjadi penurunan pada tahun

2018-2020. Begitu juga dengan IDG mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal tersebut dikarenakan keterwakilan perempuan di dalam lembaga DPRD Kabupaten Tapin berkurang jumlahnya yang mana salah satu indikator tersebut digunakan dalam perhitungan indeks pemberdayaan gender (IDG).

b. Persentase Pernikahan Anak

Pernikahan anak di bawah umur masih meningkat di Kabupaten Tapin jumlah pernikahan anak dari tahun 2016 sampai dengan 2019 cenderung menurun, akan tetapi pada tahun 2020 meningkat kembali. Jumlah kasus pernikahan anak pada tahun 2016 terjadi 52 kali kasus, tahun 2017 terjadi 24 kasus, tahun 2018 terjadi 10 kasus, tahun 2019 terjadi 10 kali kasus pernikahan anak dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 26 kali pernikahan. Diharapkan di tahun ke depan jumlahnya dapat terus menurun. Berikut tabel jumlah pernikahan anak :

Tabel 2.40
Jumlah Pernikahan Anak
Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pernikahan Anak	52	24	10	10	26

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, 2021

C. Pangan

Dalam hal urusan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Tapin mengukur kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan pangan utama di masyarakat. Berikut adalah data pangan utama di Kabupaten Tapin tahun 2019-2020.

Tabel 2.41
Ketersediaan Pangan Utama
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019	2020
1	Produksi Padi Sawah (ton)	403.458	417.488
2	Produksi Padi Ladang (ton)	16.365	13.494
3	Jumlah	419.823	430.982

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Persentase ketersediaan pangan utama selama tahun 2019-2020 mengalami peningkatan jumlah produksi sebesar 11.159 ton dari tahun 2019 sebesar 419.823 ton dan sebesar 430.982 ton pada tahun 2020.

D. Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Berdasarkan data penanganan sampah yang tertangani mencapai angka 57,30 persen dan pengurangan sampah 14,57 persen.

Tabel 2. 42
Penanganan dan Pengurangan Sampah
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Indikator	2020
1	Persentase Penanganan Sampah	57,30%
2	Persentase Pengurangan Sampah	14,57%

Sumber: Jakstrada Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, 2021

b. Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Tempat pembuangan sampah menjadi hal yang penting dalam urusan lingkungan. Fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan pada tahun 2016-2019 dan pada Tahun 2019-2020 berkurang sebanyak 1 unit rincian tersebut bisa dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.43
Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
Di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Uraian	2016 (unit)	2017 (unit)	2018 (unit)	2019 (unit)	2020 (unit)
Permanen	15	21	22	22	21
Kontainer	11	11	11	11	11
Bin Komunal	-	-	1	2	2
Jumlah	26	32	34	35	34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Sementara untuk rata-rata timbunan sampah yang dapat diangkut per hari berjumlah 172,6 M3 di tahun 2020.

c. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Dalam urusan penataan ruang, aspek pelayanan umum dapat dilihat dari kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memperhatikan luas wilayah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020

Uraian	2019	2020
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	29,679	29,679

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, 2021

Berdasarkan tabel di atas rasio RTH per satuan wilayah masih stagnan dengan nilai rasio sebesar 29,679 tahun 2019 dan 2020.

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tapin masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang sebelumnya senilai 63,00 pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,09 tahun 2020. Kualitas air meningkat pada tahun 2019 sebesar 54,67 menjadi 57,78 pada tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Kondisi Lingkungan Hidup
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020

Uraian	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,00	69,09
Tutupan Lahan	46,52	46,36
Kualitas Air	54,67	57,78
Kualitas Udara	93,31	91,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, 2021

Meskipun demikian, Kualitas Udara mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 91,89 dibanding tahun sebelumnya di angka 93,31. Serta penurunan tutupan lahan dari sebelumnya 46,52 di tahun 2019 menjadi 46,36 pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya bukaan lahan untuk kegiatan ekonomi dan kebakaran lahan yang masih kerap terjadi.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Beberapa tugas dan fungsi institusi kependudukan dan catatan sipil, diantaranya adalah menata sisten koneksi NIP berbasis SIAK, penataan sistem informasi data kependudukan, penataan sistem pelayanan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, dan beberapa tugas dan fungsi yang lain, maka perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, adanya ketentuan dan peraturan yang mengikat, termasuk penyediaan fasilitas infrastruktur dan sistem pendanaan yang memadai.

Permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, diantaranya adalah 1) Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas dan anggaran, 2) Kinerja, motivasi dan kompetensi petugas, 3) belum optimalnya sistem SIAK, 4) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem kependudukan dan catatan sipil. Tantangan ke depan adalah tersedianya fasilitas dan anggaran yang memadai, meningkatkan motivasi dan kompetensi petugas, mengoptimalkan sistem SIAK, dan meningkatkan sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

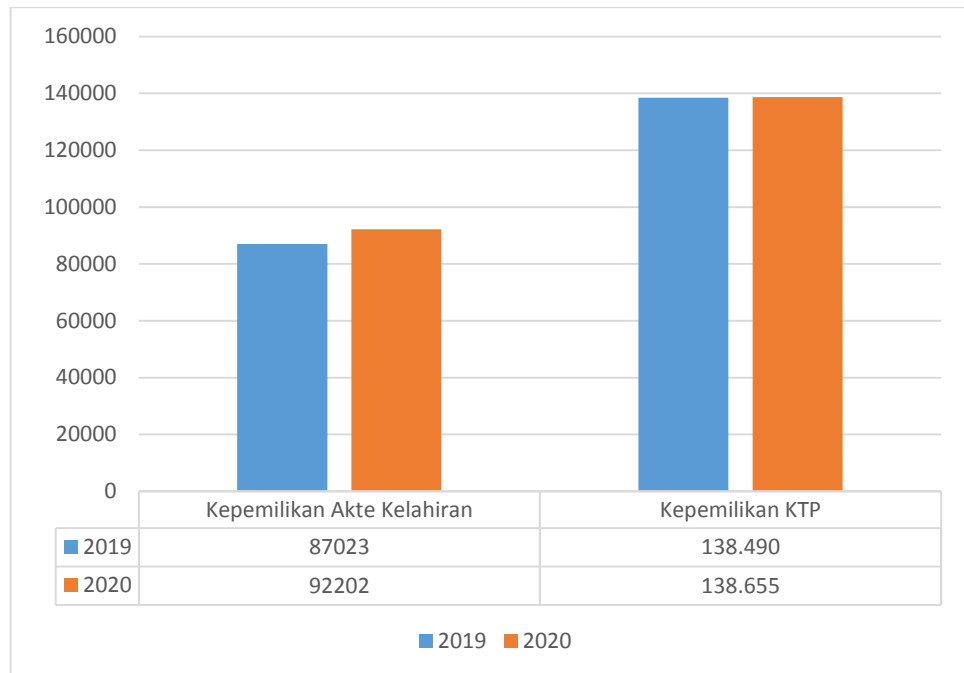
a. Persentase Kepemilikan KTP

Kepemilikan KTP semakin meningkat sebanyak 138.490 KTP di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 sebesar 138.655 KTP.

b. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran

Kepemilikan akta lahir semakin meningkat dari 87.023 akte di tahun 2019 dan naik ditahun 2020 menjadi 92.202 akte.

**Grafik 2. 4
Kepemilikan KTP dan Akte Kelahiran
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

**Tabel 2. 46
Persentase PKK Aktif Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PKK Aktif	85	90	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin, 2021

b. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan. IDM memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Tabel 2. 47
Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Tapin Tahun 2017-2020

Status IDM	2017	2018	2019	2020
Sangat Tertinggal	27	4	1	0
Tertinggal	84	61	21	11
Berkembang	15	61	100	109
Maju	-	-	4	6
Mandiri	-	-	0	0
Status Kabupaten	Tertinggal (0,5406)	Tertinggal (0,5824)	Berkembang (0,6344)	Berkembang (0,6543)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin, 2021

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tapin dari tahun 2017-2020 mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan pada tahun 2020 yakni dengan tidak adanya lagi desa sangat tertinggal dan berkurangnya desa tertinggal hanya tersisa 11 desa, desa berkembang menjadi 109 desa dan untuk status desa maju menjadi 6 desa maju, dengan status kabupaten “berkembang” dengan indeks 0,6543.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meningkatnya pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya daerah untuk menggarap sektor keluarga berencana. Dimasa yang akan datang, perencanaan dan pengelolaan sektor keluarga berencana akan mendapat perhatian lebih serius, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Peran keluarga berencana menjadi sangat penting, tidak saja prekrutan peserta KB baru dan memelihara peserta KB aktif yang ada, tapi juga mendekatkan pelayanan hingga ke pedesaan, sehingga cakupan KB baru dan penundaan usia nikah dapat dilakukan dengan baik.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Rasio akseptor KB mengalami fluktuatif, pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan, pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan kembali. Data Persentase PUS yang aktif ber- KB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 48
Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapin
Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PUS yang aktif ber-KB	78,89%	82,88%	82,98%	82,23%	83,16%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tapin, 2021

H. Perhubungan

Wilayah Kabupaten Tapin sebagian besar merupakan daratan sehingga sistem transportasi dan perhubungan darat menjadi sarana/ alat interaksi yang sangat penting. Berikut gambaran banyaknya kendaraan wajib uji menurut jenis kendaraan.

a. Persentase Angkutan Darat

Di dalam hal angkutan darat akan ditunjukkan persentase jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Persentase angkutan darat di Kabupaten Tapin mengalami fluktuatif, pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan, pada tahun 2017- 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2019-2020 mengalami penurunan kembali. Persentase tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Persentase Angkutan Darat Di Kabupaten Tapin
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Angkutan Darat (%)	7,65	7,25	11,96	13,51	8,58

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, 2021

b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.

Pengujian kir angkutan umum di Kabupaten Tapin terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Di Kabupaten Tapin Tahun 2018–2020

No.	Jenis	2018	2019	2020
1	Mobil barang :			
	Umum	335	-	312
	Tidak Umum	411	-	736
	Dinas	14	-	8
2	Mobil Bus :			
	Umum	1	-	-
	Tidak Umum	39	-	30
	Dinas	0	-	-
3	Mobil Penumpang :			
	Umum	11	-	10
	Tidak Umum	179	-	192
	Dinas	5	-	4
	Total	1.015	-	1.292

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, 2021

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal di Kabupaten Tapin stagnan, untuk jumlah tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.51
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal
Di Kabupaten Tapin Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelabuhan sungai	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal	2	2	2	2	2
	Jumlah	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, 2021

I. **Komunikasi dan Informatika**

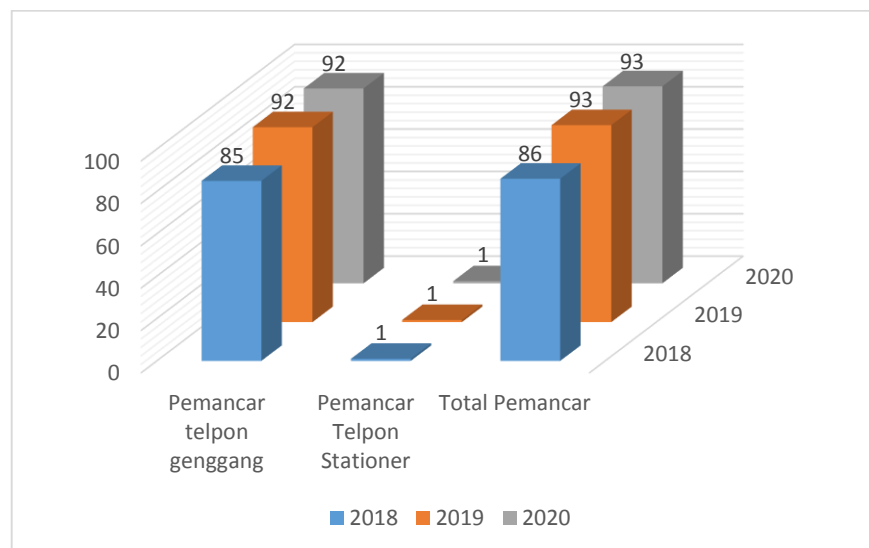
Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah.

Untuk perhitungan jaringan komunikasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 5
Jaringan Komunikasi
Kabupaten Tapin Tahun 2018–2020



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, 2021

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**a. Persentase koperasi aktif**

Pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) indikatornya dapat dilihat dari persentase koperasi yang aktif.

Tabel 2. 52
Persentase Koperasi Aktif
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019–2020

No.	Uraian	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	120	122
2	Jumlah koperasi	146	148
3	Persentase koperasi aktif	82.19%	82.43%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Berdasarkan tabel di atas, selama periode tahun 2019-2020 jumlah koperasi yang aktif bertambah dari 120 koperasi menjadi 122 koperasi. Dari segi presentase juga mengalami peningkatan walaupun ada penambahan penambahan 2 unit koperasi di tahun 2020. Koperasi aktif dengan persentase 82,43 persen perlu dicari suatu cara agar bisa mencapai tingkat keaktifan 100 persen di masa yang akan datang.

b. Jumlah Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tapin yang telah Memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Terkait data jumlah Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tapin yang telah Memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 53
Jumlah Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tapin yang telah Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
di Kabupaten Tapin 2019–2020

No.	Uraian	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro	1.380	6.542

Sumber: Dinas Perindustrian, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah jumlah Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tapin yang telah Memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) mengalami kenaikan pada periode tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

K. Penanaman Modal**a. Jumlah investor berskala nasional**

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020), jumlah investor mengalami fluktuatif. Jumlah PMDN yang pada tahun 2016 berjumlah 4 investor, pada tahun 2017 berjumlah 2 investor, pada

tahun 2019 berjumlah 19 investor dan berjumlah 12 investor pada tahun 2020. Sedangkan untuk PMA juga mengalami fluktuatif juga pada tahun 2016 sejumlah 7 Investor, tahun 2017 sejumlah 5 investor, tahun 2018 sejumlah 8 investor, tahun 2019 sejumlah 6 investor dan terakhir pada tahun 2020 hanya sejumlah 1 investor. Berikut ini disajikan jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Tapin:

Tabel 2.54
Jumlah Investor PMDN dan PMA
Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMDN	4	2	20	19	12
2	Jumlah PMA	7	5	8	6	1
3	Jumlah PMDN dan PMA	11	7	28	25	13

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Tapin, 2021

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional

Kabupaten Tapin merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan berbagai potensi yang ada. Untuk itu dibutuhkan adanya investasi dalam negeri maupun dari asing agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Jumlah investasi PMDN meningkat pada tahun 2016-2019 walaupun demikian pada tahun 2020 jumlah investasi PMDN sebesar Rp. 1.251.629.768.738,- turun dari tahun 2019 Rp. 1.973.758.100.000,- sedangkan jumlah investasi PMA mengalami fluktuatif pada tahun 2016 sebesar Rp 74.110.000.000,-, pada tahun 2017 sebesar Rp. 193.480.000.000,-, pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.498.960.000,-, pada tahun tahun 2019 Rp 101.301.000.000,-, dan pada tahun 2020 Rp. 42.758.364.806,- Berikut ini adalah data investasi tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 55
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kabupaten Tapin Tahun 2016 – 2020

Tahun	Nilai Investasi	
	PMA	PMDN
2016	IDR 74.110.000.000,-	IDR 64.350.000.000,-
2017	IDR 193.480.000.000,-	IDR 124.900.000.000,-
2018	IDR 21.498.960.000,-	IDR 326.168.900.000,-
2019	IDR 101.301.000.000,-	IDR 1.973.758.100.000,-
2020	IDR 42.758.364.806,-	IDR 1.251.629.768.738,-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Tapin, 2021

L. Pemuda dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga.

a. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Pemuda

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Sementara kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda.

Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah Organisasi dan Kegiatan pemuda stagnasi sedangkan jumlah kegiatan pemuda mengalami kenaikan sebesar 5 kali kegiatan pada tahun 2019-2020.

Tabel 2. 56
Jumlah Organisasi dan Kegiatan Pemuda
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 -2020

Uraian	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	12	12
Jumlah Kegiatan Pemuda	-	5

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin, 2021

b. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Sementara itu kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektivitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah organisasi olahraga stagnasi pada tahun 2019-2020 sedangkan jumlah kegiatan olahraga mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebesar 29 kali kegiatan dan pada tahun 2020 hanya sebesar 8 kali kegiatan data tersebut bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.57
Jumlah Organisasi Olahraga
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 -2020

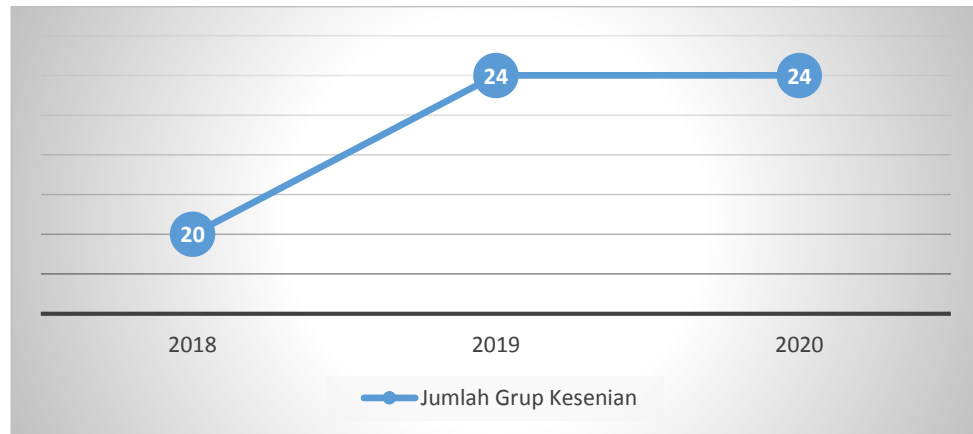
Uraian	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	35	35
Jumlah Kegiatan Olahraga	29	8

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin, 2021

M. Kebudayaan

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan harus dikembangkan kelembagaan kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kabupaten Tapin melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konstalasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah. Perkembangan group kesenian pada tahun 2018 sebanyak 20 buah naik pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 24 buah.

Grafik 2. 6
Perkembangan Grup Kesenian
Di Kabupaten Tapin 2018-2020



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, 2021

Tabel 2. 58
Penyelenggaraan, Sarana Seni dan Budaya serta Cagar Budaya
Kabupaten Tapin 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya	16	22	23	15	4
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	2	2	2	2
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	22	25	27	27	27

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, 2021

Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya mengalami kenaikan pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 dari 16 kali penyelenggaraan, 22 kali penyelenggaraan tahun 2017 dan 23 kali penyelenggaraan pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2018-2020 dari tahun 2018 dari sebesar 23 kali penyelenggaraan pada tahun 2019, sebesar 15 kali penyelenggaraan dan pada tahun 2020 hanya sebesar 4 kali penyelenggaraan hal tersebut dikarenakan terjadinya pandemi *Covid-19* pada tahun 2019-2020 dimana pemerintah memberlakukan PKKM berdasarkan arahan Satuan Tugas *Covid-19*. Sementara jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 dan 2017-2020 mengalami stagnasi. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dan pada tahun 2018-2020 mengalami stagnasi.

N. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagaipenunjang kelangsungan pendidikan. Pada tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Tapin mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik 2020 yang peruntukannya untuk pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah.

a. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Pada tahun 2020 dibangun 1 buah perpustakaan yang sangat representatif di Kawasan Rantau Baru yang diharapkan akan menambah jumlah pengunjung perpustakaan dan menambah minat masyarakat dalam literasi membaca.

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah.

Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Jumlah Jumlah Anggota Perpustakaan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 4.829 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 5.055 orang atau naik sebanyak 226 orang. Sedangkan Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 21.956 kunjungan dan pada tahun 2020 sebanyak 13.991 orang atau turun sebanyak 16.901 kunjungan.

Tabel 2.59
Jumlah Anggota dan Kunjungan Perpustakaan
Kabupaten Tapin Tahun 2019 –2020

Indikator	2019	2020
Jumlah Anggota Perpustakaan	4.829	5.055
Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	21.956	13.991

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin, 2021

O. Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2. Menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;
4. Melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. Menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Tapin selama tahun 2019-2020 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Produksi Perikanan Darat (Ton)
Di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
-Perikanan Rawa	1.762,9	1.796,6	1.582,6	1.622,8	1.807,92
-Perikanan Sungai	3.272,9	3.189,2	2.405,6	2.511,7	2.212,13
Total	5.035,8	4 985,8	3.988,2	4.134,5	4.182,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Produksi perikanan rawa pada tabel di atas menunjukkan fluktuatif pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan tahun 2017-2018 mengalami penurunan, tahun 2018-2020 mengalami kenaikan kembali. Adapun untuk perikanan sungai mengalami fluktuatif juga pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, tahun 2019-2020 mengalami kenaikan Kembali juga.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Tapin selama tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Tahun 2019 Konsumsi ikan sebesar 34,12 kg/kapita turun menjadi 26,82 di tahun 2020 sehingga persentase konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Tapin pada tahun 2020 adalah sebesar 78,62 persen.

Tabel 2.61
Konsumsi Ikan di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019	2020
1	Konsumsi Ikan (kg/kapita)	34,12	26,82
2	Target Daerah (kg/kapita)	34,12	34,11
3	Persentase	100,00	78,62

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, 2021

B. Pariwisata

Jumlah wisatawan ke Kabupaten Tapin selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif tahun 2016-2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan tapi pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Hal ini dapat dirinci pada tahun 2016 sebesar 464.575 orang, tahun 2017 sebesar 883.444 orang, tahun 2018 sebesar 1.535.961 orang, tahun 2019 sebesar 1.864.390 orang, dan 827.016 orang di tahun 2020 jumlah penurunan sebesar 1.037.374 orang. Turunnya jumlah wisatawan pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi

Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapin selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Wisatawan	464.575	883.444	1 535 961	1.864.390	827.016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

C. Pertanian

a. Produktivitas Padi

Tabel 2.63
Produktivitas Padi
di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Padi (ton)	391.698	421.199	435.914	419.823	430.942
2	Luas Panen Padi (ha)	75.292	80.604	84.705	82.410	87.895
3	Produktivitas (ton/ha)	5,20	5,23	5,15	5,09	4,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Berdasarkan tabel di atas produksi padi selama periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif, produksi padi pada tahun 2016 sebesar 391.698 ton, tahun 2017 sebesar 435.914 tahun, tahun 2018 sebesar 435.914 ton, tahun 2019 sebesar 419.823 ton, dan menjadi 430.942 ton di tahun 2020. Sementara untuk produktivitas padi pada tahun 2016 sebesar 5,20 ton/ha, tahun 2017 sebesar 5,23 ton/ha, tahun 2018 sebesar 5,15 ton/ha, 2019 sebesar 5,09 ton/ha dan sebesar 4,90 ton/ha di tahun 2020.

b. Kontribusi Sektor Pertanian

Sektor pertanian adalah sektor utama pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tapin setelah sektor pertambangan. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan. Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mengalami fluktuatif dan memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Tapin.

Tabel 2.64
Kontribusi Sektor Pertanian ADHB
Di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2020
(dalam juta rupiah)

Uraian	2017	2018	2019*	2020**
PDRB Sub Sektor Pertanian	1642876,84	1625548,53	1.777.052,3	1.715.849,0
PDRB Total	7430807,64	7999159,37	8.437.285,4	8.395.704,5
Kontribusi	20,54	21,88	21,06%	20,44%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

*) Angka sementara

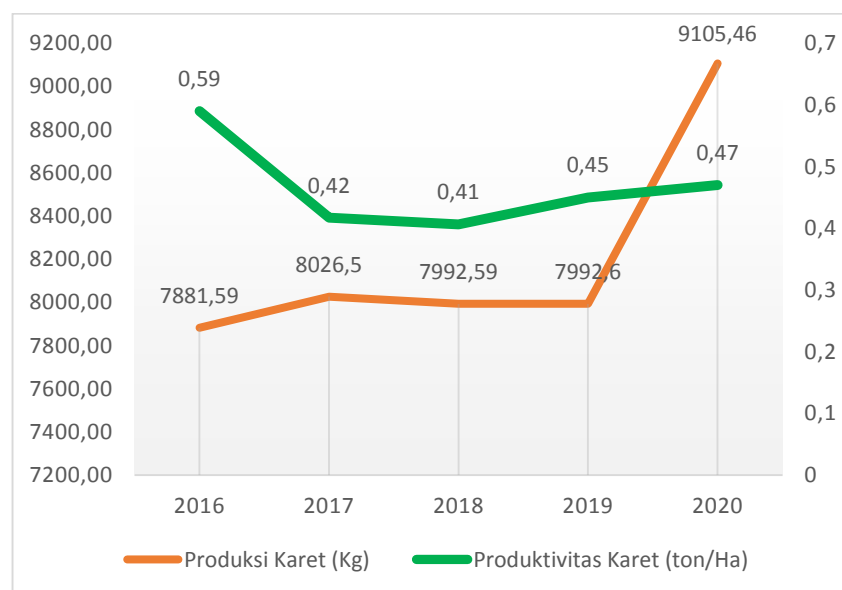
**) Angka sangat sementara

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2017 sebesar 20,54 persen, tahun 2018 sebesar 21,88 persen, tahun 2019 sebesar 21,06 persen dan 20,44 persen di tahun 2020.

c. Produktivitas Karet

Produksi karet di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif dengan rincian sebagai berikut: 7881,59 ton pada tahun 2016, 8026,5 ton tahun 2017, 7992,59 ton tahun 2018, 7992,6 ton pada tahun 2019 dan 9105,46 ton pada tahun 2020 sedangkan Produktivitas karet mengalami fluktuatif juga yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,59 ton/ha, tahun 2017 0,42 ton/ha, tahun 2018 sebesar 0,41 ton/ha, tahun 2019 sebesar 0,45 ton/ha mejadi 0,47 ton/ha pada tahun 2020. Produktivitas Karet di Kabupaten Tapin tahun 2016-2020 disajikan pada grafik sebagai berikut ini.

Grafik 2.7
Produksi dan Produktivitas Karet
Di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

D. Perdagangan**Kontribusi Sektor Perdagangan**

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tapin sektor perdagangan Pada tahun 2017 sebesar 9,86 persen, tahun 2018 sebesar 10,17 persen, tahun 2019 sebesar 10,58 persen, sedangkan di tahun 2020 telah mencapai 10,80 persen.

Tabel 2. 65
Kontribusi Sektor Perdagangan
Di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2020
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2017	2018	2019*	2020**
1	PDRB Sektor Perdagangan	732.860,23	813.698,45	892.400,8	906.924,8
2	PDRB Total	7.430.807,64	7.999.159,37	8.437.285,4	8.395.704,5
3	Kontribusi (%)	9,86%	10,17%	10,58%	10,80%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

E. Perindustrian**Kontribusi Sektor Industri**

Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2. 66
Kontribusi Sektor Industri
Kabupaten Tapin Tahun 2017-2020
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2017	2018	2019*	2020**
1	PDRB Sektor Perindustrian	522.239,56	545985,78	573.732,0	561.281,8
2	PDRB Total	7.430.807,64	7.999.159,37	8.437.285,4	8.395.704,5
3	Kontribusi (%)	7,03%	6,83%	6,80%	6,69%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

2.1.3.4. Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah**A. Administrasi Pemerintahan****a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**

Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu merupakan indikator Sekretariat DPRD dalam mengukur kinerja, dimana Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan antara lain:

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan. Dari tahun 2016-2020 laporan Pertanggungjawaban selalu disampaikan tepat waktu rincian tersebut bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Persentase Laporan Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, 2021

b. Nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tapin.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKjIP Pemerintah Kabupaten Tapin beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 68
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	B

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, 2021

Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Kabupaten Tapin dari tahun 2016 sampai 2017 mendapat nilai “CC”, pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mendapatkan menjadi nilai “B”. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan target sasaran pembangunan secara akuntabel.

Tabel 2. 69
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Nilai RB	-	C	CC

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, 2021

Berdasarkan tabel di atas Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Tapin pada tahun 2019 mendapatkan nilai C dan tahun 2020 mendapat nilai CC. Ini menunjukkan bahwa perlu melakukan upaya maksimal dalam upaya perbaikan Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Tapin.

c. Peringkat, Skor dan Status LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPKN (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil EKPPD terhadap LPPD selama beberapa tahun terakhir yang berisi peringkat, skor, dan status kinerja Pemerintah Daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.70
Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD
Kabupaten Tapin Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
Peringkat	124	196	124
Skor	3,1173	2,8640	3,1610
Status	Sangat tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Kemendagri, 2021

d. Jumlah Informasi Manajemen Pemda dan SPBE

Jumlah Informasi Manajemen Pemda adalah Jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda yang bersangkutan. Jumlah Informasi Manajemen Pemda di Kabupaten Tapin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71
**Jumlah Informasi Manajemen Pemda
di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020**

Indikator	2018	2019	2020
Jumlah Informasi Manajemen Pemda	4	4	4

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) diawali pada tahun 2019. Pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 nilai indeks stagnan dengan mendapat indeks 2,15 dengan predikat Cukup . Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tapin.

Tabel 2.72
**Jumlah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tahun 2019–2020**

Indikator	2019	2020
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,15	2,15

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

e. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Perkembangan indeks kepuasan layanan masyarakat pdi Kabupaten Tapin mengalami fluktuatif pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan hal ini dengan rincian: pada tahun 2017 sebesar 78,76 poin, tahun 2018 sebesar 74,87 poin, tahun 2019 sebesar 75 poin dan pada tahun 2020 sebesar 82,55 poin dari data tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin cukup baik dalam pelayanan publiknya. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tapin disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.73
**Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
di Kabupaten Tapin Tahun 2017-2020**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	78,76	74,87	75	82,55

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, 2021

B. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti mengalami fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020, pada tahun 2016 sebesar 61,82, tahun 2017 sebesar 70,22, tahun 2018 sebesar 81,22 persen, tahun 2019 sebesar 93,02 persen sedangkan di tahun 2020 telah sebesar 88 persen. Persentase tindak lanjut temuan pengawasan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.74
**Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti
Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	61,82 %	70,22 %	81,22 %	93,02 %	88%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapin, 2021

C. Perencanaan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan:

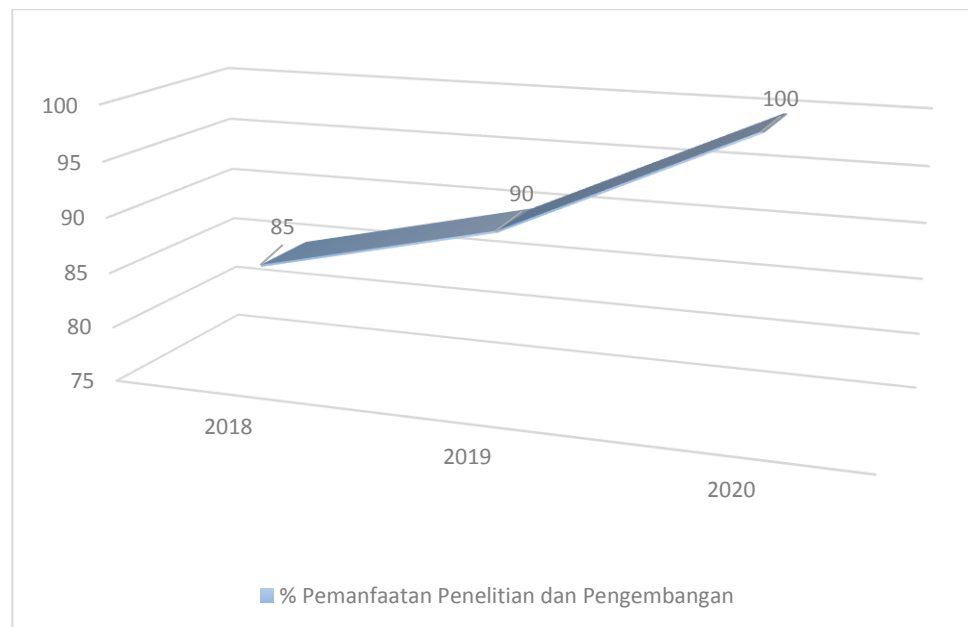
- RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA.
- RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA.
- RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.

D. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang terkait penelitian dan pengembangan akan mempunyai kewenangan antara lain melakukan penelitian daerah, merumuskan pengembangan dan inovasi daerah. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar

85 persen, tahun 2019 sebesar 90 persen sedangkan di tahun 2020 telah sebesar 100 persen. Persentase penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 2.8
Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020



Sumber: Bappelitbang Kabupaten Tapin, 2021

E. Keuangan

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya dilaksanakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapin pada kurun waktu 2016-2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.75
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapin, 2021

b. Penetapan APBD

Penetapan APBD Kabupaten Tapin selama tahun 2016-2020 selalu dapat dilakukan secara tepat waktu.

F. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan antara lain: merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah, merumuskan kebijaksanaan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah. Perkembangan Persentase ASN eselon IV ke atas yang memenuhi standar kompetensi pada tahun 2016 sebesar 83,12%, pada tahun 2017 sebesar 95%, pada tahun 2018 sebesar 98,29% naik pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 99%.

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tapin yang memenuhi standar kompetensi untuk eselon IV ke atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi
Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN eselon IV ke atas yang memenuhi standar kompetensi	83,12%	95%	98,29%	99%	99%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2021

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

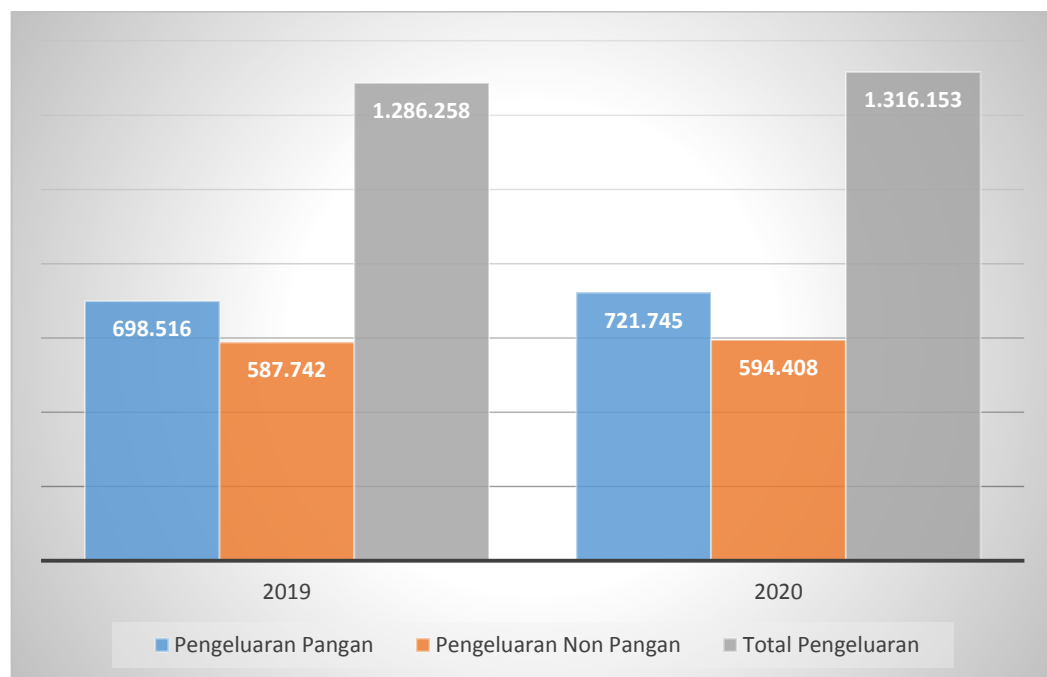
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Grafik 2.9
Persentase Konsumsi Rumah Tangga
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019–2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin tahun, 2021

Berdasarkan grafik di atas, besar konsumsi RT lebih tinggi untuk sektor pangan dibandingkan non pangan selama periode tahun 2019-2020.

Makanan dan minuman jadi masih menjadi kelompok makanan yang paling banyak dikonsumsi di tahun 2020 pada kelompok pengeluaran makanan, yakni sekitar 54,84 persen atau Rp. 721.745,-. Untuk kelompok bukan makanan didominasi oleh pengeluaran 'Perumahan dan fasilitas rumah tangga' yakni Rp. 594.408,- atau sekitar 45,16 persen.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

A. Jenis Dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel 2.77
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Di Kabupaten Tapin Tahun 2019 –2020

Uraian	2019	2020
Bank Umum		
Konvensional	9	9
Syariah		
BPR		
Konvensional	1	6
Syariah		
Total	10	15

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, 2021

B. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air Bersih (*Clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke

tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m]. Berikut adalah data persentase rumah tangga di Kabupaten Tapin yang menggunakan air minum bersih.

Grafik 2.10
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih
Di Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 64,70% di tahun 2018 dan meningkat menjadi 65,96% tahun 2019, juga pada tahun 2020 naik menjadi 75,34%. Hal ini terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tapin untuk terus meningkatkan capaian pemenuhan akses air bersih pada tahun akan datang guna pencapaian target Akses Air Minum Layak 100% tahun 2024.

2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu

memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan tingkat sarjana.

Tabel 2.78
Rasio Penduduk Lulusan Perguruan Tinggi
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Uraian	2020
1	Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah Perguruan Tinggi	12.720
2	Jumlah penduduk	189.475
3	Rasio lulusan (1/2)	6,71%

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2021

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih

tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 47,49 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Adapun tahun 2020 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 46,19 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan akan semakin baik.

Tabel 2.79
Rasio Ketergantungan
Di Kabupaten Tapin Tahun 2010–2020

No.	Uraian	2010	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	47.132	50.983
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	6.924	8.883
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	54.056	59.866
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	113.821	129.609
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	47,49%	46,19%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp. 1.534.525.280.796,08,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 741.193.355.012,08,- dan belanja langsung Rp. 793.331.925.784,00,-. Dana belanja langsung dilaksanakan oleh SKPD pemerintah daerah Kabupaten Tapin

untuk membiayai program dan kegiatan SKPD. Hasil realisasi dari pelaksanaan Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 627.168.084.343,80,- Belanja Tidak Langsung Rp. 612.512.348.641,00,- Total realisasi belanja adalah Rp. 1.239.680.432.984,80,- atau sebesar 80,79 persen, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan mendekati hasil yang maksimal, namun belum cukup menggambarkan seberapa baik realisasi pelaksanaan dari rencana target yang telah ditetapkan.

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berikut adalah telaahan mengenai hasil evaluasi program dan indikator kinerja kegiatan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 :

Tabel 2.80
Hasil Evaluasi Program dan Indikator Kinerja
RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	
1		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				
	1 01	BIDANG PENDIDIKAN				
	0 01 01	DINAS PENDIDIKAN				
1	1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	1 01 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	1 01 01 15	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	77	77	100.00
			Persentase PAUD yang terakreditasi	45	45	100.00
5	1 01 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang mengikuti program pendidikan Non Formal	0.012	0.012	100.00
			Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi	30.7	30.7	100.00
6	1 01 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100	81.36	81.36
			Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan pendidikan SD dan SMP	100	87.37	87.37
7	1 01 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan	100	100	100.00
8	1 01 01 23	Program Pembinaan SD	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	96	96	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD	91	91	100.00
			Angka Putus Sekolah Dasar	0.029	0.001	3.45
			Angka Mengulang Sekolah Dasar	0.015	0.01	66.67
9	1 01 01 24	Program Pembinaan SMP	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP	84.6	84.6	100.00
			Angka Putus Sekolah Menengah Pertama	0.3	0.01	3.33
			Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama	1.01	0.002	0.20
			Persentase sekolah yang terkreditasi jenjang SMP	80	100	125.00
	1 02	BIDANG KESEHATAN				
	1 02 01	DINAS KESEHATAN				
1	1 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100.00
2	1 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	100	100.00
3	1 02 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentasi Aparatur sesuai Kompetensinya (%)	100	99	99.00
4	1 02 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	100.00
5	1 02 01 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentasi Obat dan Perbekalan Kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan (%)	100	95	95.00
6	1 02 01 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi Madya	100	80	80.00
7	1 02 01 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kasus obat yang aman ditangani	100	100	100.00
8	1 02 01 19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga	100	0	0.00
9	1 02 01 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat	100	100	100.00
10	1 02 01 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar penyakit menular dan tidak menular	100	100	100.00
11	1 02 01 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan	100	88	88.00
12	1 02 01 33	Program Bebas Berobat	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan	100	79	79.00
13	1 02 01 34	Program Kesehatan Keluarga	Persentase Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA), Kespro, Lansia	100		0.00
	1 02 02	RSUD DATU SANGGUL				



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	1 02 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	1 02 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	1 02 02 35	Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Indikator kinerja Keuangan, Operasional, Mutu Pelayanan dan Pemanfaatan Bagi Masyarakat	80	77.7	97.13
4	1 02 02 36	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	68.64	59.55	86.76
	1 03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	1 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	77	77.00
2	1 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	52	52.00
3	1 03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
1	1 03 01 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih	80	83	103.75
2	1 03 01 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun	20	28.5	142.50
3	1 03 01 34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan	Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik	60	61	101.67
1	1 03 01 15	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60	71.98	119.97
			Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang	20	14.29	71.45
			Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	50	25	50.00
2	1 03 01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	5	6	120.00
3	1 03 01 18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	15	13	86.67
4	1 03 01 22	Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan Dan Jembatan	Persentase data jalan yang dimutakhirkan	100	100	100.00
			Persentase data jembatan yang dimutakhirkan	100	100	100.00
1	1 03 01 17	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Persentase Panjang Tebing Sungai yang Bebas Rawan Bencana	60	55	91.67
2	1 03 01 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan rigasi rawa dalam kondisi baik/sedang	40	38	95.00
			Persentase pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik	25	25	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	1 03 01 31	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang	100	96.16	96.16
2	1 03 01 32	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	100	43.97	43.97
3	1 03 01 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang	100	95.21	95.21
1	1 03 01 35	Program Peningkatan Perizinan, Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK	0	2	0
1 04		BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1 04 01		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	1 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100
2	1 04 01 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100
3	1 04 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	1 04 01 15	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	0.63	0.8	126.98
5	1 04 01 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan	18.18	18.18	100.00
6	1 04 01 17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100	100	100.00
7	1 04 01 21	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola	100	100	100.00
			Cakupan RTH dan Taman yang dikelola	100	100	100.00
8	1 04 01 23	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik	61.67	41.1	66.65
			Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik	61.67	41.1	66.65
1 05		BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1 05 01		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN				
1	1 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	1 05 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	1 05 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	1 05 01 26	Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100.00
5	1 05 01 27	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
6	1 05 01 29	Program peningkatan penegakan Perda dan Perkada	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100	100	100.00
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	100	100	100.00
7	1 05 01 30	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	100	100.00
			Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih	100	100	100.00
	1 05 02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	1 05 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	1 05 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	1 05 02 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	90	90	100.00
4	1 05 02 28	Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	81	81	100.00
5	1 05 02 31	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana	80	80	100.00
6	1 05 02 32	Program Pasca Bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang pulih	71	71	100.00
	1 05 03	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	1 05 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100.00
2	1 05 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	1 05 03 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	1 05 03 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100	50	50.00
5	1 05 03 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100.00
6	1 05 03 23	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	100	100	100.00
			Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	50	50	100.00
7	1 05 03 24	Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
8	1 05 03 33	Program Pemeliharaan Kamtibmas	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani	80	80	100.00
	1 06	BIDANG SOSIAL				
	1 06 01	DINAS SOSIAL				
1	1 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	1 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	96	96.00
	1 06 01 02 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	12	12	100.00
3	1 06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	1 06 01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PPKS lainnya	Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	55.05	87.54	159.02
5	1 06 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan	2.27	2.93	129.07
6	1 06 01 17	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	35.05	30.76	87.76
7	1 06 01 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	3.02	2.62	86.75
8	1 06 01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PPKS	56.15	52.65	93.77
9	1 06 01 22	Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100.00
10	1 06 01 23	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	10,07	10,93	118,93
	2	URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR				
	2 01	BIDANG TENAGA KERJA				
	2 01 01	DINAS TENAGA KERJA				
1	2 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	0	100	0
2	2 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	2 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	90	90.00
4	2 01 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				0.00
5	2 01 01 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50	33	66.00
			Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50	80	160.00
6	2 01 01 18	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50	50	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60	60	100.00
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	45	32	71.11
			Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja	10	10	100.00
7	2 01 01 19	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75	70	93.33
	2 02	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2 02 01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	2 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	0	100	0
2	2 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	0	100	0
3	2 02 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	0	100	0
4	2 02 01 20	Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	0	100	0
5	2 02 01 21	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	0	100	0
6	2 02 01 22	Program Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0	1.31	0
			Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah	57	53	92.98
			Persentase Pelaku Usaha Rumahan Perempuan (%)	12.5	12.5	100.00
7	2 02 01 23	Program Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan usia anak	2.5	1.59	0
8	2 02 01 24	Program Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput	100	100	100.00
9	2 02 01 25	Program pemenuhan Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan	8.3	8.3	100.00
			Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	1.69	1.69	100.00
			Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan	7.69	7.69	100.00
			Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA	84	84.62	100.74
			Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan	38.64	38.46	99.53
	2 03	BIDANG PANGAN				
	2 03 01	DINAS KETAHANAN PANGAN				
1	2 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran Dengan Capaian Kinerja 100 %	100	100	100.00
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	2 03 01 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Kondisinya Baik	80	80	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80	80	100.00
3	2 03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Laporan kinerja/ Keuangan dan dokumen perencanaan yang wajib disusun	100	100	100.00
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	2 03 01 21	Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	14656216	14656216	100.00
			Ketersediaan dan Kecukupan Energy (kkal/kap/hari)	12810	12810	100.00
5	2 03 01 22	Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	100	100	100.00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	83.9	83.9	100.00
	2 05	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	2 05 01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1	2 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan palaynan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	2 05 01 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	80	80.00
3	2 05 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	103.57	103.57
4	2 05 01 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	80	94.11	117.64
			Persentase cakupan area pelayanan	58.33	41.67	71.44
			Persentase volume sampah yang tertangani	48.18	71.87	149.17
5	2 05 01 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter pencemar udara yang diuji tidak melebihi baku mutu	80	96.7	120.88
			Perentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	60	87.5	145.83
			Status Mutu Air	5	3.2	64.00
6	2 05 01 26	Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	40	40	100.00
7	2 05 01 27	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah	25	25	100.00
8	2 05 01 28	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditetapkan haknya	25	0	0.00
9	2 05 01 29	Program Pnaatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air	28	100	357.14
			Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi	100	50	50.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
10	2 05 01 30	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	57	225.29	395.25
11	2 05 01 31	Program Kajian Dampak Lingkungan	Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan	25	44	176.00
	2 06	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2 06 01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	2 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	2 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	2 06 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	90.1	90.1	100.00
4	2 06 01 17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi data perorangan pada kartu keluarga	90.2	90.2	100.00
5	2 06 01 18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan	Persentase pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	85	85	100.00
6	2 06 01 19	Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM terhadap pelayanan KTP dan KK	89	88.73	99.70
			Persentase permohonan ktp yang diselesaikan tepat waktu	90	90	100.00
			Persentase permohonan pindah datang yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100.00
7	2 06 01 20	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan	89	88.34	99.26
			Persentase permohonan akta kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	90	90	100.00
			Persentase permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	96	96	100.00
			Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	96	96	100.00
			Persentase permohonan perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	96	96	100.00
	2 07	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	2 07 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	2 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	98	94	95.92
2	2 07 01 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	2 07 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	95	95	100.00
			Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun	95	95	100.00
4	2 07 01 08	Program Administrasi Pemerintahan Desa				0.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
5	2 07 01 21	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai standar	95	95	100.00
6	2 07 01 23	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai standard	80	80	100.00
			Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang konsisten	80	80	100.00
7	2 07 01 24	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	89	75	84.27
			Persentase PKK aktif	92	75	81.52
			Persentase posyandu aktif	84	50	59.52
2 08		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2 08 01		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	2 08 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	2 08 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	2 08 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	100	100	100.00
4	2 08 01 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	8.88	94.05	1,059.12
5	2 08 01 25	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi	Persentase Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2.1	2.28	108.57
6	2 08 01 26	Program Generasi Berencana (Genre)	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	67.02	86.21	128.63
			Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	92.28	84.53	91.60
7	2 08 01 27	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS	92.07	90.07	97.83
			Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB	83.93	78.59	93.64
			Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	72.11	80.93	112.23
8	2 08 01 28	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	70	40	57.14
9	2 08 01 29	Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	75	60	80.00
10	2 08 01 30	Program Advokasi dan Penggerakan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra Kerja	35	83	237.14
2 09		BIDANG PERHUBUNGAN				
2 09 01		DINAS PERHUBUNGAN				



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2 09 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	0	100	0
2	2 09 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	0	100	0
3	2 09 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	0	100	0
4	2 09 01 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar	0	100	0
5	2 09 01 22	Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor	0	100	0
6	2 09 01 23	Program Pelayanan Lalu-Lintas dan Angkutan	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek	0	100	0
	2 10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2 10 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	2 10 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	87	87.00
2	2 10 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	2 10 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	2 10 01 16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Statistik	Persentase layanan data statistik sektoral yang disajikan	100	100	100.00
5	2 10 01 16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Persandian	Persentase aparatur persandian yang memahami standar persandian	100	100	100.00
6	2 10 01 21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	Persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki izin	100	75	75.00
7	2 10 01 22	Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100	78	78.00
	2 12	BIDANG PENANAMAN MODAL				
	2 12 01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1	2 12 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	2 12 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	2 12 01 06	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	2 12 01 18	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	100	100	100.00
			Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
5	2 12 01 19	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	100	100	100.00
			Persentase perizinan yang diterbitkan	100	100	100.00
	2 13	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
	2 13 01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	2 13 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	2 13 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
			Waktu penyediaan petugas kebersihan dan keamanan kantor (bulan) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	2 13 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	2 13 01 17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi	100	100	100.00
5	2 13 01 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	96	96	100.00
			Persentase sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	100	100	100.00
6	2 13 01 22	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	7	7	100.00
			Persentase Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi	100	100	100.00
7	2 13 01 25	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Prestasi	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	10	8	80.00
			Persentase Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi	100	80	80.00
8	2 13 01 26	Program Pelayanan dan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100	100	100.00
			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (OKP dan Pramuka)	100	100	100.00
	2 16	BIDANG KEBUDAYAAN				
	2 16 01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
1	2 16 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	2 16 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	90	100.00
3	2 16 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
		Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
4	2 16 01 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik	80	59.52	74.40
5	2 16 01 18	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan	50	47.61	95.22
6	2 16 01 19	Program pengembangan Unsur Kebudayaan	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	30	14.81	49.37
7	2 16 01 20	Program Pemanfaatan Unsur Kebudayaan	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	70	40	57.14
			Persentase sanggar seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	70	40	57.14
8	2 16 01 20	Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina	20	27.33	136.65
9	2 16 01 21	Program Perlindungan dan Pelestarian Unsur Budaya	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100	96.29	96.29
10	2 16 01 21	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Persentase kelompok sadar wisata yang aktif	20	23.52	117.60
11	2 16 01 22	Program Pembinaan Unsur Kebudayaan	Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	80	14.81	18.51
12	2 16 01 22	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata				0.00
	2 17	BIDANG PERPUSTAKAAN				
	2 17 01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
1	2 17 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	2 17 01 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi yang baik	100	100	100.00
3	2 17 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	2 17 01 15	Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	4.48	0.94	20.98
5	2 17 01 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelola arsip yang terampil	53.33	45.28	84.91
6	2 17 01 16	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan tenaga pengelola perpustakaan yang terampil	100	50	50.00
			Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan	4.23	0.42	9.93
			Jumlah perpustakaan yang dibina	0	16	inf
7	2 17 01 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah perangkat daerah dan unit kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	53.33	45.28	84.91
8	2 17 01 17	Program Promosi Perpustakaan	Angka rata-rata pemanfaatan perpustakaan	2.29	0.87	37.99



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	3 01	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	3 01 01	DINAS PERIKANAN				
1	3 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100.00
2	3 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	70	70	100.00
3	3 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	100.00
4	3 01 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase realisasi Produksi Perikanan Budidaya	100	100	100.00
5	3 01 01 21	Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	100		0.00
6	3 01 01 26	Program Peningkatan Kualitas SDM, Kelembagaan dan Optimalisasi Produksi Perikanan	Prosentase jumlah kelompok yang naik kelas (%)	100		0.00
	3 03	BIDANG PERTANIAN				
	3 03 01	DINAS PERTANIAN				
1	3 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100.00
2	3 03 01 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	100	100.00
3	3 03 01 06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	100.00
			Luas Panen Cabe Rawit hiyung	0	0	0.00
			Luas Panen Bawang Merah	0	0	0.00
			Produktivitas Cabe Rawit hiyung	0	0	0.00
			Produktivitas Bawang Merah	0	0	0.00
			Produktivitas Jeruk	0	0	0.00
4	3 03 01 25	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Produktivitas Padi	49.97	50.77	101.60
			Produktivitas Jagung	48.76	46.41	95.18
			Produktivitas Kedelai	9.32	0	0.00
			Luas Panen Padi	80845	87895	108.72
			Luas Panen Jagung	1810	1005	55.52
			Luas Panen Kedelai	112	0	0.00
5	3 03 01 26	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Persentase RMU yang menghasilkan beras dengan mutu baik	10	10	100.00
			Jumlah kemitraan pemasaran yang dibentuk	1	0	0.00
6	3 03 01 27	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas	Jumlah Produksi Cabe Rawit Hiyung	1395	1232.8	88.37



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
		dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan				
			Jumlah Produksi Bawang Merah	1020	86.29	8.46
			Jumlah Produksi Jeruk	16216	13859.57	85.47
			Luas Panen Cabe Rawit Hiyung	152	184	121.05
			Luas Panen Bawang Merah	143	12	8.39
			Luas Panen Jeruk	414	684.81	165.41
			Produktivitas Cabe Rawit Hiyung	91.47	67	73.25
			Produktivitas Bawang Merah	71.22	71.91	100.97
			Produktivitasn Jeruk	391.56	202.39	51.69
7	3 03 01 28	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan pengolahan hasil hortikultura	1	1	100.00
			Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura	1	0	0.00
8	3 03 01 29	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase lahan sawah fungsional yang terairi	15.3	15.3	100.00
			Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami	63088	63088	100.00
			Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen	27.43	27.43	100.00
			Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen	2.46	2.46	100.00
9	3 03 01 30	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Produktivitas Tanaman Karet	639.82	548	85.65
			Produktivitas Tanaman Sawit	1972.63	4973	252.10
			Luas Tanaman Karet	14542	13285	91.36
			Luas Tanaman Sawit	3337	9299	278.66
			Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	2,5	1	250
10	3 03 01 31	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik	15,63	18,75	119.96
11	3 03 01 32	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	Populasi Sapi	7015	7015	100.00
			Populasi kambing	4716	4716	100.00
			Populasi unggas	2315533	2315533	100.00
			Angka konsumsi daging per kapita	3.89	4.1	105.40
			Persentase penyakit hewan yang tertangani	100	100	100.00
12	3 03 01 33	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina	2	2	100.00
13	3 03 01 34	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Persentase kelas kelompok tani madya	16	16	100.00
			Persentase penyuluh yang bersertifikat kompetensi teknis	45	45	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	3 06	BIDANG PERDAGANGAN				
	3 06 02	DINAS PERDAGANGAN				
1	3 06 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	99.17	99.17
2	3 06 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	96	96.00
3	3 06 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	3 06 02 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang tidak Sesuai SNI	90	70.6	78.44
			Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	100	48	48.00
5	3 06 02 20	Program Promosi dan Informasi Daerah	Persentase Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan	100	100	100.00
6	3 06 02 21	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasa	76	72.09	94.86
			Persentase ketersediaan informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat	100	100	100.00
			Persentase Pasar Tradisional yang direvitalisasi	75	75	100.00
			Persentase Pasar Tradisional yang dibangun	92.68	92.68	100.00
7	3 06 02 22	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	100	24.4	24.40
			Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang	100	90	90.00
	3 07	BIDANG PERINDUSTRIAN				
	3 07 01	DINAS PERINDUSTRIAN				
1	3 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	3 07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	3 07 01 06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	100.00
4	3 07 01 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro	18.4	18.1	98.37
5	3 07 01 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha baru	0		0.00
			Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha	14.98	13.11	87.52
6	3 07 01 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	87.23	82.19	94.22



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Persentase Koperasi Yang Dibina Dengan SHU Yang Meningkat	50	12	24.00
7	3 07 01 20	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	1.43	1.88	131.47
			Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam Dan Aneka	1.73	1.51	87.28
8	3 07 01 21	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0.33	0.66	200.00
			Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro Dan Kimia	0.25	0.5	200.00
4		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
4 01		FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
4 01 03		SEKRETARIAT DAERAH				
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
1	4 01 03 15	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Terhadap LPPD Kabupaten	3	3	100.00
2	4 01 03 16	Program Fasilitasi dan Penataan Batas Wilayah	Persentase Batas Wilayah Yang Telah Ditetapkan	100	100	100.00
3	4 01 03 17	Program Peningkatan Kesadaran Luhur Perjuangan Bangsa	Persentase Hari Besar Yang Diperingati Tepat Waktu	100	27.27	27.27
		BAGIAN HUKUM				
1	4 01 03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase usulan Raperda/perbup/kepbup yang diharmonisasi	100	88	88.00
		BAGIAN ORGANISASI				
1	4 01 03 27	Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SAKIP skpd dengan katagori baik (%)	0	100	0
2	4 01 03 28	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100	100	100.00
3	4 01 03 30	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) kabupaten Tapin (Nilai)	100	0	0.00
4	4 01 03 45	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	persentase SKPD yang memiliki standar pelayanan (%)	100	90	90.00
		BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL				
1	4 01 03 20	Program Publikasi Informasi	Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik	100	100	100.00
2	4 01 03 21	Program Protokoler	Persentase kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilayani	100	100	100.00
		BAGIAN UMUM				
1	4 01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	4 01 03 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	50	50.00
3	4 01 03 24	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	100	100	100.00
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1	4 01 03 25	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya	100	100	100.00
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
1	4 01 03 38	Program Pembinaan Kehidupan Beragama Untuk Meningkatkan Iman dan Taqwa	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dilaksanakan Secara Efektif Dan Akuntabel	68	20	29.41
2	4 01 03 39	Program Pembinaan Kesejahteraan Pembangunan Masyarakat	Persentase Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan Secara Efektif Dan Akuntabel	83	74.42	89.66
BAGIAN PERLENGKAPAN						
1	4 01 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100.00
2	4 01 03 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	95	95	100.00
3	4 01 03 24	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Dilayani Dengan Baik Dan Tepat Waktu	100	100	100.00
BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN						
1	4 01 03 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	100.00
2	4 01 03 22	Program peningkatan pengendalian bidang pembangunan	Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	90	60	66.67
3	4 01 03 23	Program perumusan kebijakan perekonomian	Persentase rumusan kebijakan yang direkomendasikan	80	80	100.00
4 01 04 SEKRETARIAT DPRD						
1	4 01 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90	60	66.67
2	4 01 04 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	90	100.00
3	4 01 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur sesuai kompetensinya	90	85	94.44
4	4 01 04 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
5	4 01 04 31	Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	90	85	94.44
6	4 01 04 32	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	80	80	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
7	4 01 04 40	Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pembahasan Penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80	65	81.25
	4 01 08	KECAMATAN PIANI				
1	4 01 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Piani	86	86	100.00
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100.00
			Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75 %	100	100	100.00
2	4 01 08 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100	95.8	95.80
3	4 01 08 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	100	100	100.00
4	4 01 08 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	100	62.5	62.50
5	4 01 08 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	40	0	0.00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100	100	100.00
6	4 01 08 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik	100	100	100.00
	4 01 09	KECAMATAN LOKPAIKAT				
1	4 01 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat	0	86.53	0
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100.00
			Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100.00
2	4 01 09 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80	74.75	93.44
3	4 01 09 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	100	100	100.00
4	4 01 09 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	100	100	100.00
5	4 01 09 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	70	0	0.00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100	0	0.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
6	4 01 09 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa Dengan Administrasi yang Baik	100	100	100.00
			Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas Yang Ditindaklanjuti	100	100	100.00
KELURAHAN BITAHAN						
1	4 01 09 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100	100	100.00
2	4 01 09 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Penduduk di Kelurahan Yang mendapatkan Pemberdayaan	100	100	100.00
4 01 10 KECAMATAN TAPIN UTARA						
1	4 01 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	ndeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	0	85	0
			Persentase Penyelesaian Pengaduan masyarakat yang Diselesaikan	100	85	0
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	0	85	0
			Persentase pelayanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75	100		0.00
			Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan kelurahan dan desa sesuai ketentuan	100		0.00
2	4 01 10 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	0	80	0
3	4 01 10 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	0	85	0
4	4 01 10 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	0	85	0
5	4 01 10 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	0	70	0
			Tingkat Partisipasi pelaku usaha Kecamatan	0	80	0
			jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan	1	1	100.00
			Jumlah koordinasi penguatan ekonomimasyarakat desa	1	1	100.00
6	4 01 10 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang Baik	0	80	0
			Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	0	80	0
			Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	1	100.00
			jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa	1	1	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			waktu koordinasi pengawasan dana desa	1	1	100.00
			waktu penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12	12	100.00
7	4 01 10 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	0	80	inf
8	4 01 10 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Penduduk di Kelurahan yang Mendapatkan Pemberdayaan	0	80	inf
KELURAHAN RANTAU KIWA						
1	4 01 10 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	418350000	98	0.00
2	4 01 10 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100	100	100.00
KELURAHAN RANTAU KANAN						
1	4 01 10 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100	100	100.00
2	4 01 10 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Rantau Kanan	100	100	100.00
KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG						
1	4 01 10 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100	100	100.00
2	4 01 10 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Penduduk di Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100	95	95.00
KELURAHAN KUPANG						
1	4 01 10 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam kondisi baik	100	100	100.00
2	4 01 10 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Penduduk di Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100	100	100.00
4 01 11 KECAMATAN BAKARANGAN						
1	4 01 11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan bakarangan	85	84	98.82
			Persentase Penyelesaian Pengaduan masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100.00
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	4 01 11 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	80	80.00
3	4 01 11 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan di laporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	4 01 11 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100	100	100.00
5	4 01 11 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	70	70	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Tingkat Partisipasi pelaku usaha Kecamatan	100	100	100.00
6	4 01 11 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang Baik	100	100	100.00
			Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100	100	100.00
	4 01 12	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN				
1	4 01 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan	86	86	100.00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75 (%)	100	100	100.00
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100.00
			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	100	100.00
2	4 01 12 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80	80	100.00
3	4 01 12 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	100.00
4	4 01 12 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan	100	100	100.00
5	4 01 12 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	80	80	100.00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100	100	100.00
6	4 01 12 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100	100	100.00
			Persentase desa dengan administrasi yang baik	100	100	100.00
	4 01 13	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA				
1	4 01 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Utara	87	87	100.00
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100.00
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100.00
2	4 01 13 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	80	80	100.00
3	4 01 13 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	4 01 13 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Jumlah Usulan Masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
5	4 01 13 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	70	85	121.43
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100	100	100.00
6	4 01 13 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa dengan Administrasi yang baik	100	100	100.00
			Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti	100	100	100.00
	4 01 14	KECAMATAN HATUNGUN				
1	4 01 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	87	87	100.00
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100.00
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100.00
2	4 01 14 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80	97	121.25
3	4 01 14 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	4 01 14 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100	100	100.00
5	4 01 14 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	70	0	0.00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100	0	0.00
6	4 01 14 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa dengan Administrasi yang baik	100	100	100.00
			Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti	100	100	100.00
	4 01 15	KECAMATAN SALAM BABARIS				
1	4 01 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86	86	100.00
			Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75	100	100	100.00
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100	100	100.00
2	4 01 15 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80	80	100.00
3	4 01 15 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
4	4 01 15 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100	100	100.00
5	4 01 15 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100	100	100.00
			Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	80	80	100.00
			Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0	0.00
6	4 01 15 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang Ditindaklanjuti	100	100	100.00
			Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik.	100	100	100.00
Kecamatan Tapin Tengah						
1	4 01 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	87	86	98.85
			Persentasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100.00
			Persentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	4 01 16 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	80	80.00
3	4 01 16 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentasi Laporan Kinerja dan Keuangan yang di susun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	4 01 16 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentasi usulan masyarakat (RKPDes) yang di Akomodir dalam Musreimbang Kecamatan	100	100	100.00
5	4 01 16 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan keagamaan	70	0	0.00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100	100	100.00
6	4 01 16 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentasi desa dengan Administrasi yang Baik	100	100	100.00
			Persentasi Laporan pengaduan kamtibmas yang di tindaklanjuti	100	100	100.00
4 01 17 KECAMATAN TAPIN SELATAN						
1	4 01 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan	86.5	81.87	94.65
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100.00
			Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2	4 01 17 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80	80	100.00
3	4 01 17 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	100	100	100.00
4	4 01 17 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) yang Diakomodir dalam Musrebang Kecamatan	100	100	100.00
5	4 01 17 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100	100	100.00
6	4 01 17 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	100	100	100.00
			Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang Ditindaklanjuti	100	100	100.00
7	4 01 17 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100	100	100.00
8	4 01 17 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Penduduk di Kelurahan yang Mendapatkan Pemberdayaan	100	100	100.00
		KELURAHAN TAMBARANGAN				
1	4 01 17 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	100	100	100.00
2	4 01 17 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Penduduk di Kelurahan yang Mendapatkan Pemberdayaan	100	100	100.00
	4 01 18	KECAMATAN BINUANG				
1	4 01 18 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang	86	86.06	100.07
			Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100.00
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	4 01 18 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80	80	100.00
3	4 01 18 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	4 01 18 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrebang kecamatan	100	100	100.00
5	4 01 18 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	76	0	0.00
			Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
6	4 01 18 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100	100	100.00
			Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidaklanjuti	100	100	100.00
7	4 01 18 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100	100	100.00
8	4 01 18 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100	100	100.00
KELURAHAN BINUANG						
1	4 01 18 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100	100	100.00
2	4 01 18 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100	100	100.00
KELURAHAN RAYA BELANTI						
1	4 01 18 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100	100	100.00
2	4 01 18 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100	100	100.00
KELURAHAN KARANGAN PUTIH						
1	4 01 18 43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100	100	100.00
2	4 01 18 44	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100	100	100.00
4 01 19 KECAMATAN BUNGUR						
1	4 01 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	86.5	86	99.42
			Persentase Penyelesaian masyarakat yang Diselesaikan	0	90	0
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	95	95.00
2	4 01 19 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	65	65.00
3	4 01 19 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	4 01 19 35	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100	100	100.00
5	4 01 19 41	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100	100	100.00
6	4 01 19 42	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100	100	100
4 02 FUNGSI PENGAWASAN						
4 02 01 INSPEKTORAT						



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	4 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	100	0
2	4 02 01 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	0	100	0
3	4 02 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	0	100	0
4	4 02 01 07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu	0	100	0
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	0	100	0
			Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	0	100	0
			Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100	100	100.00
5	4 02 01 08	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat	0	100	0
6	4 02 01 09	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	0	100	0
			Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	0		0.00
			Persentase self assesment per element dengan kesimpulan element level 3	0	0	0.00
7	4 02 01 10	Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan	Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	0	100	inf
	4 03	FUNGSI PERENCANAAN				
	4 03 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	4 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100.00
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	100	100.00
2	4 03 01 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	4 03 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	100.00
			persentase ketersediaan laporan kinerja/keuangan dan dokumen perencanaan yang wajib disusun	100	100	100.00
4	4 03 01 15	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100	100	100.00
			persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
5	4 03 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100.00
			Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100	100	100.00
			Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD	100	100	100.00
			Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah	100	100	100.00
6	4 03 01 26	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD	100	100	100.00
			Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	100	100	100.00
			Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	100	100	100.00
7	4 03 01 28	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD	100	100	100.00
			Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM	100	100	100.00
			Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM	100	100	100.00
	4 04	FUNGSI KEUANGAN				
	4 04 05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1	4 04 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	90.91	90.91
2	4 04 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	100	100.00
3	4 04 05 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00
4	4 04 05 07	Program Penyusunan Anggaran	Persentase Perda dan Perbup yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	100	100.00
5	4 04 05 08	Program Perbendaharaan	Persentase kejadian komplain	0	0	0.00
6	4 04 05 09	Program Penatausahaan Keuangan	Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100	85.71	85.71
7	4 04 05 10	Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100	100	100.00
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100	100	100.00



No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dimanfaatkan	100	0	0.00
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	100	100	100.00
			Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100	100	100.00
	4 04 06	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH				
1	4 04 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	100	0
			Adanya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100.00
2	4 04 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik	100	100	100.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100.00
3	4 04 06 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	0	100	0
			Adanya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100.00
4	4 04 06 11	Program Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Objek Pajak Baru	0.05	0.05	100.00
5	4 04 06 12	Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak daerah / retribusi daerah	5	5	100.00
			Nilai IKM	80	80	100.00
6	4 04 06 13	Program Penatausahaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	100	100	100.00
	4 05	FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	4 05 07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA				
1	4 05 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100.00
2	4 05 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik	100	0	0.00
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPSDM	80	80	100.00
3	4 05 07 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	0	0	0.00
			Persentase ketersediaan laporan yang wajib dibuat SKPD	100	100	100.00
4	4 05 07 15	Program Kinerja, Pengembangan karier dan Disiplin Aparatur	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment	80	75	93.75
			Persentase pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	90	85	94.44

No.	Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
			Persentase pejabat fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat jabatan	90	85	94.44
			Persentase ASN yang disiplin	90	85	94.44
5	4 05 07 16	Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment	0	0	0.00
			Persentase pegawai yang kompeten	70	87	124.29
			Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	0	0	0.00
6	4 05 07 17	Program Pengelolaan dan Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	95	85	89.47
			Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	99	75	75.76

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2021 (diolah)

Dari tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa, Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Triwulan 4 (empat) Tahun 2020 rata-rata tingkat capaian program Kabupaten Tapin adalah sebesar 88,21 %

2.2.2. Realisasi RPJMD (Realisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun lalu terhadap RPJMD atau Implikasi dari Realisasi terhadap Indikator RPJMD)

Program dan Kegiatan Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari tahun kedua atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

Dengan demikian capaian indikator dalam evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020, yang merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 juga merupakan realisasi atau capaian kinerja RPJMD. Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2020 bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

**Table 2.81
Capaian Indikator Tujuan dan
Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2020**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
		Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya Dan Berdaya Saing			
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	69,7	70,11	100,59	71,2
Sasaran 1: Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	a Rata-rata lama sekolah (poin)	8,3	7,76	93,49	9,61
	b Harapan lama sekolah (poin)	12,7	11,94	94,02	14
	c Rasio budaya baca (poin)	0,002677	0,002994	111,84	0,002691
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	71,12	70,40	98,99	73,28
Sasaran 3: Meningkatnya daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	12.112.800	11.841.000	97,76	1,323,595
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	80		-	86,67
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	a Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	84,73		-	85,3
	b Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73,25		-	73,47
Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Agrobisnis Dan Pariwisata Yang Dimulai Dari Desa					
Tujuan 1: Meningkatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	a Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5	-1,50	-30,00	5,6
	b Indeks Gini (poin)	0,3	0,2739	108,72	0,28
	c Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0,3		-	0,27
	d Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	6.441.815	6.358.880	98,71	7.039.145
	e Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	8.122.538	8.395.700	103,36	8.875.717
Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Agrobisnis	a Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	23,15	20,44	88,29	24,3
	b Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2,6		-	2,9



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		2020			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
	c	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,5		-	1,8
	d	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	7,4	6,69	90,41	8
Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Pariwisata		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	3,2		-	4
Sasaran 3: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM		Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1,4		-	1,7
Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa		Indeks Desa Membangun (poin)	0,57		-	0,6
Sasaran 5: Meningkatnya kemandirian pangan daerah		Skor Pola Pangan Harapan (poin)	86		-	90
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	a	Persentase penduduk miskin (%)	3,65	3,06	116,16	3,35
	b	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0,43	0,45	95,35	0,46
	c	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0,06	0,12	0,00	0,03
Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran		Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,8	3,73	101,84	3,2
Misi 3: Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan						
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur		Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	52,33		-	67,67
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	a	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	63		-	75
	b	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	55		-	65
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas jaringan air bersih		Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	58		-	64
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas jaringan irigasi		Luas areal sawah yang terairi (%)	69		-	75
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik		Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	44		-	64
Sasaran 5: Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi		Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	92		-	98
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	0,11	9,67	8790,91	0,32



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
		Sasaran 1: Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53,389	
	b Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	57	65	114,04	75
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	97,86			98,22
Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat					
Tujuan 1: Meningkatnya investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	5,2	-37,62	-723,46	6
Sasaran 1: Meningkatkan keamanan daerah	Indeks rasa aman (poin)	0,5	0,50	100,00	0,53
Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good And Clean Government)					
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	CC	CC	100,00	BB
Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	a Nilai SAKIP (predikat)	B	B	100,00	BB
	b Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	100,00	WTP
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	99			99
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	79	82,4	104,30	85

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2021
(diolah)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sampai sekarang pandemi *Covid-19* masih menjadi permasalahan utama dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang semakin besar, sehingga perlunya upaya-upaya dalam pemulihan kembali aspek sosial,

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menghambat penyebaran virus *Covid-19* sekarang telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat, sehingga harus dicarikan upaya-upaya yang bisa menghambat penyebaran virus *Covid-19* akan tetapi sektor ekonomi dan sosial masyarakat tetap berjalan dengan baik. Di bawah ini akan diuraikan permasalahan pembangunan daerah dipandang dari berbagai aspek yaitu:

2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

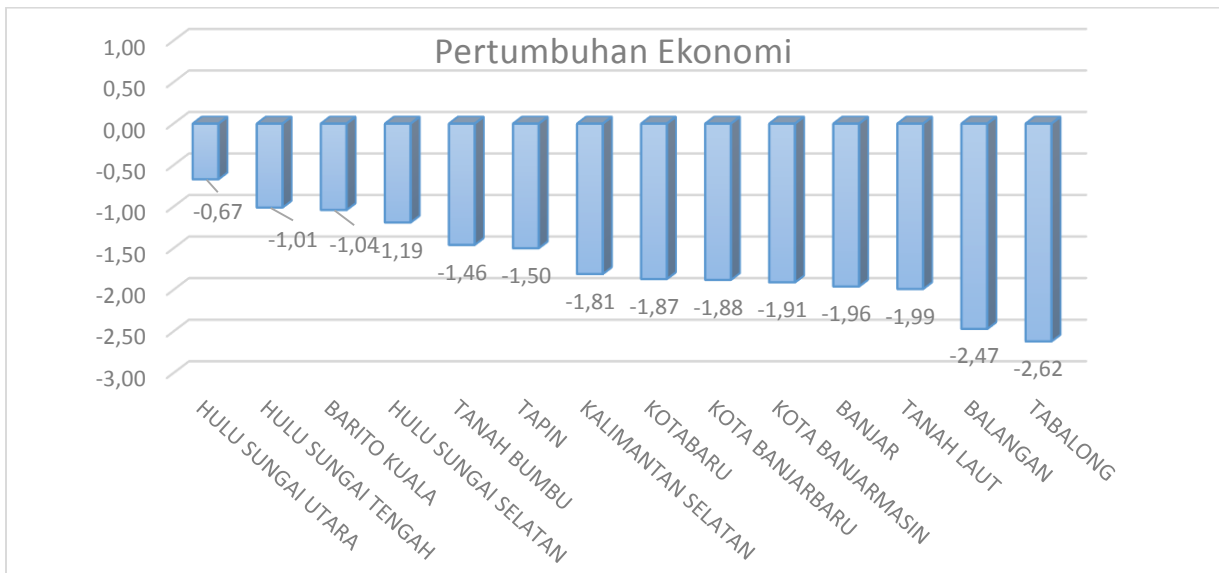
Kinerja perekonomian Kabupaten Tapin mengalami kenaikan pada tahun 2016-2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2017-2020. Hal tersebut, terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2016 sebesar 4,97%, tahun 2017 sebesar 5,14%, tahun 2018 sebesar 5,01%, tahun 2019 sebesar 4,25% dan tahun 2020 sebesar -1,5%, atau turun sebesar 5,75%. Tahun 2020 bila dibandingkan angka tersebut masih diatas laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai -1,81%, pada tahun tersebut juga Kabupaten Tapin berada diperingkat ke enam dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk data bisa dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 2. 82
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin
Tahun 2016-2020

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2016	4,97%
2017	5,14%
2018	5,01%
2019	4,25%
2020	-1,5%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

Grafik 2.11
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin
dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2010 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.358.877,8 juta atau terjadi penurunan sebesar 9,28% dibanding tahun 2019. Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.395.704,5 atau terjadi penurunan bila dibanding tahun 2019, pada tahun 2019 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 8.437.285,4.

2.3.1.2. Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Tapin tahun 2016-2019 mengalami kenaikan akan tetapi tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019, yang semula 70,13 turun menjadi 70,11. Angka IPM tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,91 maupun IPM Nasional 71,94. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin berada pada urutan ke lima dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Provinsi

Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2020 bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.12
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 11,24 tahun, pada tahun 2017 sebesar 11,52 tahun, pada tahun 2018 sebesar 11,85 tahun, pada tahun 2019 sebesar 11,86 tahun dan menjadi 11,94 di tahun 2020. Akan tetapi kecenderungan meningkat tersebut Kabupaten Tapin masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2020 dan pada tahun 2020 berada di urutan ke-12 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 bisa dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.13
**Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin
dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021 (diolah)

Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya harapan lama sekolah di Kabupaten Tapin diantaranya adalah sebagai berikut:

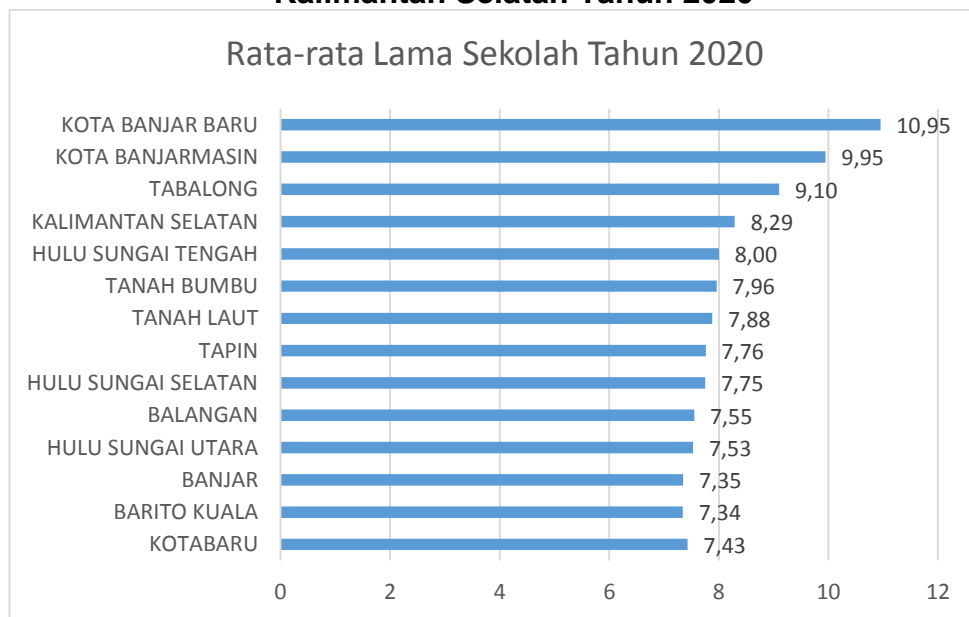
1. Jarak dari rumah sekolah khususnya ke SMP/setara maupun SMA/setara sangat jauh (tidak semudah akses ke SD/setara dengan jarak sekitar 3 s.d. 8 km dengan kondisi akses jalan seperti kecamatan Piani dan Bungur di daerah pegunungan) dan kecamatan Candi Laras selatan Dan Candi Laras Utara dengan daerah rawa;
2. Orangtua tidak memiliki cukup biaya untuk menyekolahkan anaknya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit, biaya yang cukup memberatkan adalah biaya personal yaitu buku, seragam, *transport*, dan uang jajan;
3. Kemampuan belajar anak yang rendah, didukung oleh rendahnya motivasi orangtua terhadap pendidikan (karena terkait juga dengan faktor ekonomi), dan juga anak sibuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga seperti bertani;
4. Pandangan orangtua bahwa pendidikan bukan merupakan kebutuhan pokok, tamat SD saja sudah cukup karena banyak juga lulusan pendidikan tinggi yang menganggur.

C. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,74 tahun, pada tahun 2017 sebesar 7,53

tahun, pada tahun 2018 sebesar 7,54 tahun, pada tahun 2019 sebesar 7,75 tahun Pada Tahun 2020 Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tapin adalah 7,76 artinya pada tahun 2020 rata-rata penduduk di Kabupaten Tapin bersekolah sampai 7 tahun 6 bulan atau setingkat Kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sementara itu angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2016-2020 yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,89 tahun, pada tahun 2017 sebesar 7,99 tahun, pada tahun 2018 sebesar 8 tahun, pada tahun 2019 sebesar 8,20 tahun dan pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,29 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,76. Pada tahun 2020 berada di urutan ke lima dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2020, maka rata-rata lama sekolah harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin agar bisa lebih ditingkatkan. Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 bisa dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.14
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021 (diolah)

Masih rendahnya capaian rata rata lama sekolah di Kabupaten Tapin disebabkan beberapa faktor seperti masih banyaknya penduduk Kabupaten Tapin hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar (SD/Sederajat) dan masih banyaknya siswa yang tidak melanjutkan

kejenjang yang lebih tinggi, serta masih adanya siswa putus sekolah di Kabupaten Tapin, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Table 2.83
Data Putus sekolah Kabupaten Tapin
Tahun 2017-2020

Satuan Pendidikan	2017	2018	2019	2020
SD	24 Siswa	44 Siswa	53 Siswa	22 Siswa
SMP	31 Siswa	128 Siswa	68 Siswa	38 Siswa

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, 2021

Sedangkan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Table 2.84
Data Angka Melanjutkan
Tahun 2017-2020

Satuan Pendidikan	2017	2018	2019	2020
angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	87,73 %	87 %	93,93 %	82,20 %
angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	91,86 %	91,87 %	84,78 %	81,32 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, 2021

D. Prevalensi Stunting

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 Kabupaten Tapin ditetapkan sebagai Lokus Nasional Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Dan diperkuat oleh Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/084/KUM/2021 Tentang Penetapan desa/kelurahan lokasi fokus pencegahan dan penanganan Stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitif di Kabupaten Tapin tahun 2022. Untuk lokus stunting di Kabupaten Tapin pada tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.85
Lokus Stunting di Kabupaten Tapin tahun 2022**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Stunting		Keterangan
			Jumlah Anak Stunting	% Prevalensi	
1	Piani	Harakit	21	53,85%	Desa Berkembang
2	Tapin Tengah	Serawi	53	53,54%	Desa Maju
3	Piani	Balawaian	9	42,86%	Desa Berkembang
4	Tapin Tengah	Mandurian	27	40,30%	Desa Berkembang
5	Hatungun	Batu Hapu	56	39,44%	Desa Maju
6	Tapin Tengah	Pematang Karangan Hulu	61	38,61%	Desa Berkembang
7	Tapin Tengah	Labung	38	38,38%	Desa Maju
8	Tapin Utara	Banua Halat Kiri	26	38,24%	Desa Maju
9	Bakarangan	Waringin	15	37,50%	Desa Maju
10	Bakarangan	Masta	7	36,84%	Desa Berkembang
11	Bakarangan	Paul	13	36,11%	Desa Berkembang
12	Tapin Tengah	Andhika	28	35,44%	Desa Berkembang
13	Tapin Tengah	Batang Lantik	21	34,43%	Desa Berkembang
14	Piani	Batu Ampar	12	32,43%	Desa Berkembang
15	Bungur	Hangui	11	32,35%	Desa Berkembang
16	Bungur	Shabah	48	29,81%	Desa Berkembang
17	Candi Laras Selatan	Marampiau	19	29,69%	Desa Maju
18	Piani	Pipitak Jaya	8	29,63%	Desa Berkembang
19	Tapin Selatan	Timbaan	15	29,41%	Desa Berkembang
20	Candi Laras Selatan	Marampiau Hilir	13	28,26%	Desa Berkembang
21	Tapin Selatan	Tandui	22	28,21%	Desa Berkembang
22	Piani	Batung	11	28,21%	Desa Berkembang
23	Hatungun	Matang Batas	22	27,50%	Desa Berkembang
24	Tapin Utara	Rantau Kiwa	52	27,37%	Kelurahan
25	Tapin Utara	Kupang	64	21,33%	Kelurahan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, 2021

Kendala dalam pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program Stunting antara lain:

1. Belum tersedianya kegiatan parenting di desa-desa yang dijadikan lokus stunting;
2. Rendahnya pemicuan 5 pilar perubahan perilaku masyarakat; dan
3. Masih ada desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD.

Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat antara lain:

1. Kegiatan posyandu yang sudah dilaksanakan berjalan biasa-bisa saja sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
2. Akses sanitasi dan air minum masih rendah; dan
3. Layanan remaja putri masih rendah.

Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksanaan antara lain:

1. Kurangnya tenaga pelaksana gizi di desa;
2. Data pengukuran yg di ukur oleh kader belum tervalidasi semua; dan
3. Kurangnya pengetahuan kader terhadap pemanfaatan pangan lokal.

Dari proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan adanya pandemi *Covid-19* membatasi pelaksanaan kegiatan dan terbenturnya jadwal kegiatan antar lintas sektor/program

2.3.2. Aspek Pelayanan Umum

2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tapin yaitu pada tahun 2020 permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi hanya sebesar 43,97%, Kondisi Jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 41,81% kondisi jembatan dalam keadaan baik hanya sebesar 50%. Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tapin pada tahun 2020 juga masih cukup rendah yaitu sebesar 62,83%, lebih rendah dari target yang di tetapkan pada RPJMD sebesar 75% pada tahun 2020. Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan penyediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, serta dari pihak swasta guna mendukung target pemerintah cakupan air minum layak 100% di tahun 2024.

2.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Bidang Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada tahun 2017-2019 dan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2017 sebesar 4,39 persen, tahun 2018 sebesar 4,02, tahun 2019 sebesar 3,65 persen dan tahun 2020 sebesar 3,73 persen yang mengalami selisih peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 0,08 persen. Pandemi *Covid-19* berdampak buruk pada perekonomian yang secara tidak langsung mempengaruhi naiknya tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin.

B. Persentase Pernikahan Anak

Jumlah pernikahan anak dari tahun 2016 sampai dengan 2019 cenderung menurun, akan tetapi pada tahun 2020 meningkat kembali. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan anak. Faktor ekonomi dan pendidikan, keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonomi rendah cenderung memiliki pendidikan yang rendah juga, anak dianggap menjadi beban ekonomi bagi keluarga dan ketidak mampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak, termasuk pada masa pandemi *Covid-19* ini dimana kondisi kesejahteraan yang terus menurun memaksa orang tua membiarkan anaknya untuk menikah karena dianggap sebagai salah satu solusi. Pada sisi lain, terjadinya pernikahan anak juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua, karena khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif dan melanggar ketentuan agama, dan yang tidak kalah penting adalah faktor teknologi dan media sosial, gencarnya ekspose seks menyebabkan seseorang dengan mudah mengakses video/film-film dewasa, dan karena sifat keingin tahun dan keinginan untuk mencoba dari seorang remaja yang secara fisiologis memang tinggi yang apabila tidak dibentengi dengan pola asuh yang baik dari orang tua dan keluarga menyebabkan remaja terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan agama yang berlaku yang berdampak terhadap pergaulan bebas dan anak hamil diluar nikah.

C. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tapin masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang sebelumnya senilai 63,00 pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,09 tahun 2020. Meskipun demikian, pada sub bagian IKLH untuk Kualitas udara mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 91,89 dibanding tahun sebelumnya di angka 93,31. Serta penurunan tutupan lahan dari sebelumnya 46,52 di tahun 2019 menjadi 46,36 pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya bukaan lahan untuk kegiatan ekonomi dan kebakaran lahan yang masih kerap terjadi. Permasalahan di lingkungan hidup juga pada tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi, tahun 2020 hanya 50% yang diverifikasi.

D. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan koperasi yaitu Persentase koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat pada tahun 2020 capaiannya hanya 24%. Namun sebagaimana kita ketahui bersama

bahwa pada Tahun 2020, kita ditimpa wabah *Covid-19* yang bersifat pandemi, sehingga arah kebijakan pemerintah berubah lebih fokus pada pengawasan bidang kesehatan. sehingga anggaran mengalami Refocusing yang menitikberatkan pada penanganan *Covid-19*. Dampak dari wabah *Covid-19* juga sangat menurunkan tingkat perekonomian masyarakat demikian juga halnya dengan koperasi koperasi yang kita bina. inilah beberapa hal terjadi yang mengakibatkan capaian bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sangat turun yaitu hanya 12 atau 24% dari target 50 buah koperasi.

E. Penanaman Modal

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020), jumlah investor mengalami fluktuatif. Jumlah PMDN yang pada tahun 2016 berjumlah 4 investor, pada tahun 2017 berjumlah 2 investor, pada tahun 2019 berjumlah 19 investor dan berjumlah 12 investor pada tahun 2020. Sedangkan untuk PMA juga mengalami fluktuatif juga pada tahun 2016 sejumlah 7 Investor, tahun 2017 sejumlah 5 investor, tahun 2018 sejumlah 8 investor, tahun 2019 sejumlah 6 investor dan terakhir pada tahun 2020 hanya sejumlah 1 investor. Jumlah investasi PMDN meningkat pada tahun 2016-2019 walaupun demikian pada tahun 2020 jumlah investasi PMDN sebesar Rp. 1.251.629.768.738,- turun dari tahun 2019 Rp. 1.973.758.100.000,- sedangkan jumlah investasi PMA mengalami fluktuatif pada tahun 2016 sebesar Rp 74.110.000.000,-, pada tahun 2017 sebesar Rp. 193.480.000.000,-, pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.498.960.000,-, pada tahun tahun 2019 Rp 101.301.000.000,-, dan pada tahun 2020 Rp. 42.758.364.806,-

Dari hal diatas permasalahan tersebut bisa dijelaskan bahwa Wabah *Covid-19* telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah merebaknya virus Corona adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi. Adanya pembatasan atau lockdown membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung, baik ekspor maupun impor. Begitu juga dengan Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tapin sangat berdampak terhadap pertumbuhan nilai investasinya.

Sumberdaya alam juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai investasi pada suatu daerah, terutama sumberdaya alam yang tidak



dapat diperbarui. Sedangkan jenis sumber daya alam satu ini mempunyai jumlah yang terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga apabila digunakan terus menerus akan habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan-bahan galian atau barang tambang. Akibatnya investasi disuatu daerah dapat mencapai titik jenuh karena keterbatasan lahan yang dapat digarap. Kabupaten Tapin salah satu daerah yang mengandalkan sumberdaya alam dalam hal ini bahan galian atau tambang, karena keterbatasan sumberdaya alam tersebut mengakibatkan berkurang juga lahan garapan atau lahan usaha yg perlu investasi baru.

LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh para investor. LKPM ini menjadi salah satu penunjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menghimbau para investor untuk melakukan LKPM tersebut. Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Agar memudahkan para investor, maka pihak BKPM menyediakan program LKPM online melalui situs <http://lkpmonline.bkpm.go.id>. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Selain itu, LKPM juga memberikan peranan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. LKPM ini harus diindahkan oleh para investor dari berbagai sektor usaha agar proses pendataan investasi bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan investasi tersebut harus semakin berkembang dan diperlukan kebijakan khusus untuk mendukung pelaksanaan penanaman modal tersebut. Jika investor tidak melaporkan LKPMnya ke BKPM maka investasi disuatu daerah tidak tercatat. Keaktifan investor (perusahaan) dalam menyampaikan LKPM tersebut sangat diperlukan. Di Kabupaten Tapin pun demikian pada tahun 2020 banyak investor (perusahaan) yang tidak menyampaikan LKPMnya hal ini berpengaruh terhadap nilai investasi yang tercatat di Kabupaten Tapin. Kegiatan monitoring pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan karena masih belum meredanya wabah *Covid-19*, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap penyampaian LKPM oleh investor (perusahaan).

F. Kebudayaan

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan, harus dikembangkan kelembagaan kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin

dikembangkan di Kabupaten Tapin melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya mengalami kenaikan pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 dari 16 kali penyelenggaraan, 22 kali penyelenggaraan tahun 2017 dan 23 kali penyelenggaraan pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2018-2020 dari tahun 2018 dari sebesar 23 kali penyelenggaraan pada tahun 2019, sebesar 15 kali penyelenggaraan dan pada tahun 2020 hanya sebesar 4 kali penyelenggaraan hal tersebut dikarenakan terjadinya pandemi *Covid-19* pada tahun 2019-2020 dimana pemerintah memberlakukan PKKM berdasarkan arahan Satuan Tugas *Covid-19*. Sementara jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 dan 2017-2020 mengalami stagnasi. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dan pada tahun 2018-2020 mengalami stagnasi.

2.3.2.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Bidang Perdagangan

Alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda terasah persentasenya pada tahun 2019 sebesar 85,08% mengalami penurunan, pada tahun 2020 hanya sebesar 48% hal ini dikarenakan:

1. Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP mengalami penurunan, Karena merupakan dampak Pandemi *Covid-19*, dimana berdasarkan edaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Surat Nomor 637/PKTN/4.3/SD/04/2020 Tanggal 1 April 2020 bahwa dimasa Pandemi *Covid-19* untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP diwilayah Kabupaten/Kota atau disesuaikan dengan status keadaan darurat yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat.
2. Pelayanan Tera/Tera Ulang belum maksimal karena untuk Kabupaten Tapin dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang masih difasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III untuk Wilayah Kalimantan, untuk Unit Metrologi Legal di Kabupaten Tapin sendiri belum bisa Melayani secara mandiri dikarenakan belum selesainya SOTK untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang dan juga Kurangnya Peralatan Standart yang dimiliki oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten Tapin Sendiri.
3. Sejak Tahun 2020 Sistem Permohonan Tera/Tera Ulang harus melalui Direktorat Metrologi yang ada di Bandung kemudian diteruskan Ke BSML untuk melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang untuk Kabupaten/Kota yang masih Difasilitasi, hal ini juga memperlambat Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III sekarang ini sangat minim, banyak Penera yang pindah Regional dan ditarik Ke Kementerian Perdagangan sehingga sangat berpengaruh dalam pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten/Kota yang masih difasilitasi oleh BSML. Selain itu juga pelayanan tera, tera ulang belum maksimal karena keterbatasan petugas yang berhak untuk melakukan tera dan tera ulang dalam hal ini ialah fungsional penera yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin baru ada 1 orang sedangkan area pelayanan begitu luas mencakup 12 kecamatan.

Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan hanya sebesar 24,4% pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya perubahan ketentuan pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga pencapaian target mengalami penurunan dan masa pandemi *Covid-19* mengakibatkan berkurangnya pengajuan pembuatan rekomendasi SIUP oleh pelaku usaha.

2.3.2.4. Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

A. Reformasi Birokrasi (RB)

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Tapin pada tahun 2019 mendapatkan nilai C dan tahun 2020 mendapat nilai CC. Ini menunjukkan bahwa perlu perbaikan Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Tapin.

B. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 stagnan dengan mendapat indeks 2,15 dengan predikat Cukup. Menunjukkan perlu perbaikan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tapin.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2022 pada dasarnya menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2022, lebih memperhatikan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, kondisi perekonomian global dan regional yang ditunjukkan untuk mengalokasikan dengan suatu pendekatan *money follow program* yang pada akhirnya dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien.

Di tengah Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah sekarang ini, diperlukan upaya dari pemerintah daerah memulihkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat terdampak Covid-19 baik secara simultan yang langsung memiliki dampak ekonomi kepada masyarakat maupun secara berkelanjutan sehingga roda perekonomian masyarakat Kabupaten Tapin tetap dapat berjalan dan berangsur-angsur normal.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian yang digambarkan melalui indikator makro ekonomi, secara umum merepresentasikan kondisi yang terjadi dan digunakan sebagai basis bagi penentuan kebijakan perekonomian pada masa selanjutnya. Secara umum, jika indikator makro ekonomi suatu daerah menunjukkan pertumbuhan positif maka kondisi keuangan di daerah tersebut cenderung stabil.

Secara ringkas, kondisi ekonomi makro Kabupaten Tapin tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. Inflasi

Kabupaten Tapin memakai data inflasi Kota Banjarmasin. Tingkat inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2016 berada pada tingkat 3,68%. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, rata-rata pertumbuhan inflasi kota Banjarmasin sebesar 3,37%, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.0 berikut :

Tabel 3. 1
Nilai Inflasi Kabupaten Tapin dan Nasional
Tahun 2016-2018

Tahun	Tingkat Inflasi (%)	
	Kota Banjarmasin	Nasional
2016	3,68	3,02
2017	3,82	3,61
2018	2,63	3,13
Rata-rata	3,37	3,25

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

2. Badan Pusat Statistik RI tahun,2021

B. Kontribusi PDRB Kabupaten Tapin

Perkembangan perekonomian suatu daerah biasanya diukur dengan tingkat produksi, yakni Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah *value added* yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah perekonomian. Nilai PDRB Kabupaten Tapin atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai produksi barang dan jasa dinilai dengan harga berlaku pada periode tahun 2020. Jika berdasarkan harga berlaku nilai PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2019 sebesar Rp. 8.437.285.420.000,- dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 8.395.704.530.000,-, Nilai PDRB Kabupaten Tapin atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.455.626.050.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.358.877.790.000. Berikut gambaran nilai produksi barang dan jasa berdasarkan harga berlaku dan harga konstan

Tabel 3. 2
Nilai produksi barang dan jasa
berdasarkan harga berlaku dan harga konstan 2020

Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	
		2020	2019	2020	2019
A	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1715849.00	1777052.32	1211621.36	1266624.56
B	Pertambangan dan Penggalian	2236350.59	2293864.37	2185994.35	2233357.68
C	Industri Pengolahan	561281.80	573732.05	381021.96	395663.42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9060.34	8439.43	5397.06	5170.78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27276.46	27259.41	18888.00	18949.91



Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	
		2020	2019	2020	2019
F	Konstruksi	491166.96	491503.39	333776.71	336046.34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	906924.81	892400.78	579879.38	581233.92
H	Transportasi dan Pergudangan	278406.08	278940.07	195595.04	198709.36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	204947.33	201221.27	136938.20	138142.42
J	Informasi dan Komunikasi	333832.05	312177.38	257076.70	239311.29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	109509.15	103728.70	71070.49	67139.78
L	Real Estate	126640.59	120230.36	90660.19	88045.25
M,N	Jasa Perusahaan	10152.67	10142.56	6196.56	6364.78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	678636.74	661337.62	418793.10	414999.06
P	Jasa Pendidikan	456541.95	445696.55	304535.35	305622.50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166329.26	158679.68	109081.42	107535.47
R,S, T,U	Jasa lainnya	82798.74	80879.47	52351.90	52709.53
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8395704.53	8437285.42	6358877.79	6455626.05
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	8395704.53	8437285.42	6358877.79	6455626.05

Sumber : PDRB Kab Tapin, 2020

C. Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun mengalami fluktuatif, tahun 2016 sebesar Rp 39,81 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 37,42 Juta, Rp. 42,31 juta pada tahun 2018 menjadi Rp. 44,09 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 43,36 juta. Sementara itu untuk perkembangan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari PDRB Per kapita atas dasar harga konstan mengalami kenaikan pada tahun 2016-2019 dan turun pada tahun 2020 dengan rincian yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 30,43 juta, pada tahun

2017 sebesar Rp 31,59 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp. 32,75 juta Rp. 33,73 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 32,84 juta.

Tabel 3.3
PDRB Perkapita ADHB dan PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah)
2016-2020

No	Tahun	PDRB Perkapita ADHB	PDRB Perkapita ADHK
1	2016	39,81	30,43
2	2017	37,42	31,59
3	2018	42,31	32,75
4	2019*)	44,09	33,73
5	2020**)	43,36	32,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021, (diolah)

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

D. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum perekonomian Kabupaten Tapin pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus dibandingkan pada tahun 2019 disebabkan karena pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap perekonomian di Kabupaten Tapin. Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4
Laju Pertumbuhan ADHK tahun 2018-2020

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Persen)		
		2020	2019	2018
A	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	-4.34	5.33	-0.43
B	Pertambangan dan Penggalian	-2.12	3.08	6.82
C	Industri Pengolahan	-3.70	3.96	3.92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.38	4.14	7.41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.33	2.15	6.77
F	Konstruksi	-0.68	4.73	5.75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.23	6.38	7.84
H	Transportasi dan Pergudangan	-1.57	4.89	7.31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.87	2.93	6.85
J	Informasi dan Komunikasi	7.42	4.52	6.99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.85	6.05	6.29
L	Real Estate	2.97	3.68	5.17
M,N	Jasa Perusahaan	-2.64	4.81	3.84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.91	4.89	3.78
P	Jasa Pendidikan	-0.36	3.98	6.96

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Persen)		
		2020	2019	2018
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.44	3.66	7.66
R,S, T,U	Jasa lainnya	-0.68	1.64	7.25
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1.50	4.25	5.01
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	-1.50	4.25	5.01

Sumber : PDRB Kab Tapin Tahun 2020

E. Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Berikut ini adalah data pengangguran yang terjadi di Kabupaten Tapin dalam empat tahun terakhir:

Tabel 3. 5
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tapin Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019*	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin	4,39	4,02	3,65	3,73
TPT Provinsi Kalimantan Selatan	3,53	3,86	4,18	4,74
TPT Nasional	5,33	5,10	5,23	7,07

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021
2. .Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021
3. Badan Pusat Statistik RI, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada tahun 2017-2019 dan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Data pada tahun 2020 sebesar 3,73% yang mengalami selisih peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 0,08%.

Tabel 3. 6
Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020

Variabel Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	369.153	390.488	405.591	406.367	446.577
Jumlah Penduduk Miskin	6.810	7.011	6.979	6.507	5.899
Persentase Penduduk Miskin (P0)	3,7	3,77	3,7	3,41	3,06
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,25	0,4	0,35	0,46	0,45
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,03	0,08	0,06	0,09	0,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2021

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah, penerimaan dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Di tengah pandemi Virus Covid-19 yang tengah mewabah sekarang ini, beberapa kebijakan perlu diambil dalam rangka menyesuaikan kondisi dan untuk menstabilkan kembali roda perekonomian masyarakat dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Maka dari itu, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tapin harus benar-benar berdampak secara langsung sehingga hasil yang dirasakan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tapin.

Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, sedangkan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Arah Kebijakan Keuangan Daerah berarti kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah

Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis :

Pertama, penerimaan meliputi semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya

Kedua, pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan Pengeluaran pembiayaan. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, DBH Pajak Provinsi, Dana Desa Bersumber APBN, Pendapatan Lain-lain, Dana Insentif Daerah (DID).

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini membatasi jenis-jenis pajak dan retribusi yang berhak dipungut oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD memerlukan investasi pemerintah daerah.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer : Dana Perimbangan seperti Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Desa sangat tergantung pada kondisi ekonomi makro nasional serta perkembangan indikator-indikator makro daerah seperti pertumbuhan penduduk, luas wilayah, jumlah pengangguran dan penduduk miskin dan lain-lain, merupakan dasar penetapan kebijakan pemerintah dalam menentukan dana perimbangan tersebut.

DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya, namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undang-undang bersifat transparan.

Sedangkan Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah dari Pemerintah, Hibah dari masyarakat/badan usaha dalam/luar negeri serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Per-UU-an (Pendapatan Dana



BOS) sangat tergantung pada kondisi ekonomi makro dan kebijakan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 dan 2020 disertai dengan target 2021 dan proyeksi 2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3. 7
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 dan 2020

Uraian	Realisasi		Pertumbuhan
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.654.403.116	88.919.972.484	-6,69%
1. Pajak Daerah	41.925.990.212	17.108.984.259	-29,60%
2. Retribusi Daerah	2.672.468.071	2.382.904.503	-5,42%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.423.556.028	3.698.384.878	26,30%
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.632.388.805	65.729.698.845	9,08%
DANA PERIMBANGAN	1.067.056.981.108	835.353.328.109	-10,86%
1. DBH Pajak	49.648.938.959	61.988.981.131	12,43%
2. DBH Bukan Pajak	395.886.004.720	209.618.672.976	-23,53%
3. DAU	477.467.034.000	421.844.570.000	-5,82%
4. DAK	144.055.003.429	141.901.104.002	-0,75%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	245.743.460.003	235.020.816.380	-2,18%
1. Pendapatan Hibah	2.885.000.000	3.288.330.943	20,85%
2. DBH Pajak Provinsi	91.591.137.461	73.606.520.773	-9,82%
3. Dana Desa Bersumber APBN	100.812.471.000	102.204.375.000	0,69%
4. Pendapatan Lain-lain	15.152.034.542	5.119.386.664	-33,11%
5. Dana Insentif Daerah (DID)	35.302.817.000	50.002.203.000	20,82%
JUMLAH PENDAPATAN	1.415.454.844.227	1.159.294.116.974	-9,05%

Sumber : BKAD Kab Tapin Tahun 2021

Tabel 3. 8
Target 2021 dan proyeksi 2022 pendapatan daerah Kabupaten Tapin

URAIAN	TARGET 2021	PROYEKSI 2022	Tumbuh (%)
PENDAPATAN DAERAH	Rp 982.674.369.778	Rp 716.587.158.000	-27,08%
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 71.897.510.578	Rp 26.771.765.000	-62,76%
2. PENDAPATAN TRANSFER	Rp 871.916.790.000	Rp 689.065.393.000	-20,97%
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	Rp 38.860.069.200	Rp 750.000.000	-98,07%

Sumber : BKAD Kab Tapin Tahun 2021

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin pada tahun 2021 sebagaimana tabel di atas, terlihat tidak seimbang, dimana Pendapatan daerah sangat tergantung pada pendapatan transfer Disisi lain pendapatan transfer sangat sulit untuk diproyeksikan terutama komponen pendapatan DAU dan DAK karena sangat tergantung pada kondisi ekonomi makro nasional serta perkembangan indikator-indikator makro daerah seperti pertumbuhan penduduk, luas wilayah, jumlah pengangguran dan penduduk miskin dan lain-lain, yang menjadi dasar penetapan kebijakan pemerintah dalam menentukan dana perimbangan tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Tapin berupaya menggali potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Untuk itu, kebijakan pendapatan daerah tahun 2022 diarahkan pada :

1. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komputer dalam penerimaan Pajak Daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
2. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Mengembangkan hubungan dengan pihak swasta untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD;

6. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan terkait peningkatan pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan belanja daerah terdiri dari Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini dengan tetap berpedoman kepada upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19 menjadi salah satu prioritas untuk menjamin keberlangsungan hidup, menjaga daya beli masyarakat, serta kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui proyeksi belanja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Target Tahun 2021 dan proyeksi belanja daerah tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 9
Target Tahun 2021 dan proyeksi belanja daerah tahun 2022 dan 2023**

Kode	URAIAN	Jumlah Anggaran		
		Anggaran Tahun 2021	Proyeksi	
			Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA	1.416.373.577.971,00	1.673.130.721.323,00	922.445.715.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	861.724.324.645,00	1.085.030.320.552,00	714.727.243.098,00
5.1.01	Belanja Pegawai	486.209.337.677,00	523.943.545.210,00	444.745.268.487,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.659.992.728,00	438.150.642.281,00	242.209.312.860,00
5.1.03	Belanja Bunga	5.940.375.000,00	7.282.683.508,00	2.772.661.751,00
5.1.05	Belanja Hibah	59.040.619.240,00	110.380.892.033,00	20.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.874.000.000,00	5.272.557.520,00	5.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	460.829.923.914,00	499.932.818.871,00	124.474.277.752,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.860.650.400,00	12.611.908.820,00	6.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.741.745.595,00	38.696.140.536,00	14.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.837.194.215,00	117.813.760.872,00	64.280.277.752,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	133.576.694.104,00	330.279.455.043,00	37.000.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	4.813.639.600,00	531.553.600,00	3.194.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.700.000.000,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	26.700.000.000,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	67.119.329.412,00	63.167.581.900,00	63.244.194.150,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.088.281.212,00	2.097.176.500,00	2.173.788.750,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	65.031.048.200,00	61.070.405.400,00	61.070.405.400,00

Sumber : BKAD Kab Tapin Tahun 2021

Belanja daerah pada tahun 2022 diproyeksikan naik menjadi sebesar Rp. 1.673.130.721.323,00 dibanding anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1.416.373.577.971,00.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan Pembayaran Bunga kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebesar Rp. 7.782.683.508,00.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, disamping komponen pendapatan daerah, penerimaan daerah juga dapat bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan Pembayaran Pokok Hutang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebesar Rp. 78.000.000.000,00.

Adapun total pembiayaan target tahun 2021 serta proyeksi 2022 dan 2023 sebagaimana berikut :

Tabel 3. 10
Total pembiayaan target tahun 2021 serta proyeksi 2022 dan 2023

Kode	URAIAN	Jumlah Anggaran		
		Anggaran Tahun 2021	Proyeksi	
			Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	435.199.208.193,00	287.541.642.693,00	1.500.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	286.041.642.693,00	286.041.642.693,00	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	148.657.565.500,00	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	1.500.000.000	1.500.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	84.500.000.000,00	77.157.565.500,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.XX	Pembayaran Pokok Hutang	-	78.000.000.000,00	70.657.565.500,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	982.674.369.778,00	1.470.089.078.630,00	998.103.280.500,00

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan pembiayaan anggaran yang relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;



- 2) Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah dari pada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut :
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program, kegiatan dan sub kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan sub kegiatan.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi target capaian rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program-program unggulan SKPD yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu strategis permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Isu-isu strategis Kabupaten Tapin yaitu:

1. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2020 berada pada peringkat ke enam dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan dengan -1,5 persen. Hal tersebut, terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2016 sebesar 4,97%, tahun 2017 sebesar 5,14%, tahun 2018 sebesar 5,01%, tahun 2019 sebesar 4,25% dan tahun 2020 sebesar -1,5%, atau turun sebesar 5,75% dibandingkan tahun 2019. Sementara untuk target di Tahun 2022 adalah 5,4 persen di dokumen RPJMD Kabupaten Tapin. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2010 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.358.877,8 juta atau terjadi penurunan sebesar 9,28% dibanding tahun 2019. Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.395.704,5 atau terjadi penurunan bila dibanding tahun 2019, pada tahun 2019 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 8.437.285,4.

Pandemi *Covid-19* berdampak buruk pada perekonomian yang secara tidak langsung mempengaruhi naiknya tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin. Dari data time series 4 (empat) tahun dari tahun 2017-2020, Tingkat Pengangguran



Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada tahun 2017-2019 dan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada tahun 2017 sebesar 4,39 persen, pada tahun 2018 sebesar 4,02, pada tahun 2019 sebesar 3,65 persen dan pada tahun 2020 sebesar 3,73 persen yang mengalami selisih peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 0,08 persen.

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada UMKM, Banyak usaha kecil dan menengah menjadi terganggu, diantaranya pedagang kecil di pasar tradisional yang menjadi sepi dikarenakan masyarakat takut untuk melakukan aktivitas keluar rumah, pengrajin kerajinan yang kehilangan sebagian besar pendapatannya di karenakan pemesanan hasil kerajinan dari pasar yang sangat berkurang, dan sektor UMKM lainnya juga turut terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 ini. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan koperasi sekarang yaitu Persentase koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat pada tahun 2020 capaiannya hanya 24%. Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada Tahun 2020, kita ditimpa wabah Covid-19 yang bersifat pandemi, sehingga arah kebijakan pemerintah berubah lebih fokus pada pengawasan bidang kesehatan. Sehingga anggaran mengalami Refocusing yang menitikberatkan pada penanganan Covid-19. Dampak dari wabah Covid-19 juga sangat menurunkan tingkat perekonomian masyarakat demikian juga halnya dengan koperasi koperasi yang kita bina. inilah beberapa hal terjadi yang mengakibatkan capaian bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sangat turun yaitu hanya 12 atau 24% dari target 50 buah koperasi.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020), jumlah investor mengalami fluktuatif. Jumlah PMDN yang pada tahun 2016 berjumlah 4 investor, pada tahun 2017 berjumlah 2 investor, pada tahun 2019 berjumlah 19 investor dan berjumlah 12 investor pada tahun 2020. Sedangkan untuk PMA juga mengalami fluktuatif juga pada tahun 2016 sejumlah 7 Investor, tahun 2017 sejumlah 5 investor, tahun 2018 sejumlah 8 investor, tahun 2019 sejumlah 6 investor dan terakhir pada tahun 2020 hanya sejumlah 1 investor. Jumlah investasi PMDN meningkat pada tahun 2016-2019 walaupun demikian pada tahun 2020 jumlah investasi PMDN sebesar Rp. 1.251.629.768.738,- turun dari tahun 2019 Rp. 1.973.758.100.000,- sedangkan jumlah investasi PMA mengalami fluktuatif pada tahun 2016 sebesar Rp 74.110.000.000,-, pada tahun 2017 sebesar Rp. 193.480.000.000,-, pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.498.960.000,-, pada tahun tahun 2019 Rp 101.301.000.000,-, dan pada tahun 2020 Rp. 42.758.364.806,-.



2. Pelayanan Publik

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) pada tahun 2019 mendapat indeks 2,15 dengan predikat Cukup. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tapin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) pada tahun 2019 mendapat indeks Reformasi Birokrasi sebesar 53,02 atau kategori "CC".

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016-2020, IPM Kabupaten Tapin tahun 2016-2019 mengalami kenaikan akan tetapi tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019, yang semula 70,13 turun menjadi 70,11. Angka IPM tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,91 maupun IPM Nasional 71,94. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin berada pada urutan ke lima dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam Sumber Daya Manusia khususnya pembangunan bidang Pendidikan yaitu Harapan lama sekolah Kabupaten Tapin. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 11,24 tahun, pada tahun 2017 sebesar 11,52 tahun, pada tahun 2018 sebesar 11,85 tahun, pada tahun 2019 sebesar 11,86 tahun dan menjadi 11,94 di tahun 2020. Akan tetapi kecenderungan meningkat tersebut Kabupaten Tapin masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2020 dan pada tahun 2020 berada di urutan ke-12 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2016-2020 cenderung meningkat yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,74 tahun, pada tahun 2017 sebesar 7,53 tahun, pada tahun 2018 sebesar 7,54 tahun, pada tahun 2019 sebesar 7,75 tahun Pada Tahun 2020 Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tapin adalah 7,76 artinya pada tahun 2020 rata-rata penduduk di Kabupaten Tapin bersekolah sampai 7 tahun 6 bulan atau setingkat Kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sementara itu angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2016-2020 yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,89 tahun, pada tahun 2017 sebesar 7,99 tahun, pada tahun 2018 sebesar 8 tahun, pada tahun 2019 sebesar 8,20 tahun dan pada



tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,29 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,76. Pada tahun 2020 berada di urutan ke lima dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2020, maka Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin agar bisa lebih ditingkatkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 Kabupaten Tapin ditetapkan sebagai Lokus Nasional Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Dan diperkuat oleh Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/084/KUM/2021 Tentang Penetapan desa/kelurahan lokasi fokus pencegahan dan penanganan Stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitif di Kabupaten Tapin tahun 2022.

Dalam hal pernikahan anak, jumlah pernikahan anak dari tahun 2016 sampai dengan 2019 cenderung menurun, akan tetapi pada tahun 2020 meningkat kembali. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan anak. Faktor ekonomi dan pendidikan, keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonomi rendah cenderung memiliki pendidikan yang rendah juga, anak dianggap menjadi beban ekonomi bagi keluarga dan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak, termasuk pada masa pandemi Covid-19 ini dimana kondisi kesejahteraan yang terus menurun memaksa orang tua membiarkan anaknya untuk menikah karena dianggap sebagai salah satu solusi.

4. Infrastruktur Pelayanan Dasar

Dalam sektor infrastruktur, pada tahun 2020 permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi hanya sebesar 43,97%, Kondisi Jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 41,81% kondisi Jembatan dalam keadaan baik hanya sebesar 50%. Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tapin pada tahun 2020 juga masih cukup rendah yaitu sebesar 62,83%, lebih rendah dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 75% pada tahun 2020. Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan penyediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, serta dari pihak swasta guna mendukung target pemerintah cakupan air minum layak 100% di tahun 2024.

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tapin masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang sebelumnya senilai 63,00 pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,09 tahun 2020. Meskipun demikian, pada sub bagian IKLH untuk Kualitas udara mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 91,89 dibanding tahun sebelumnya di angka 93,31. Serta penurunan tutupan lahan dari sebelumnya 46,52 di tahun 2019 menjadi 46,36 pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya bukaan lahan untuk kegiatan ekonomi dan kebakaran lahan yang masih kerap terjadi. Permasalahan di lingkungan hidup juga pada tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi, tahun 2020 hanya 50% yang diverifikasi.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut disusunlah program pembangunan daerah yang merupakan program atau sekumpulan program unggulan dengan melihat pada aspek pencapaian visi dan misi kepala daerah serta hasil perumusan analisis teknokratis.

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penurunan angka stunting.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.



4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Tapin tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan untuk tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan dan ditetapkan Visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, yaitu :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Pada Visi Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
2. Mewujudkan : Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
3. Maju : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
4. Sejahtera : Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
5. Agamis : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tapin tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun (2018-2023) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.	1.1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin.	a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan. b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. c. Meningkatnya daya beli masyarakat d. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.	2.1. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Sektor Agrobisnis. b. Meningkatnya Sektor Pariwisata c. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Meningkatnya kemandirian pangan daerah f. Menurunnya Pengangguran
3	Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.	3.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi
		3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
4	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.	4.1. Meningkatnya investasi.	Meningkatnya keamanan daerah.
5	Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>).	5.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan. b. Meningkatnya kualitas ASN c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2022 yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga dengan mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi, sosial secara nasional serta dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan *Politik Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu

- pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi

Sebagaimana RKP Tahun 2021, Pendekatan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dilakukan dengan Penguatan



Pelaksanaan Kebijakan *Money Follows Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial* dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran RKP 2021, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dan penguatan integrasi sumber pendanaan serta pengembangan bersifat inklusif dan dengan pendekatan pengarusutamaan gender.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dengan *Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing*, dan isu-isu strategis provinsi Kalimantan Selatan maka ditetapkan Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 : **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan”** dengan fokus pembangunan yaitu:

1. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan
2. UMKM
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata
4. Banjir, Karhutla, dan Covid-19

Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD 2022 yaitu:

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana
6. KALSEL Sebagai Gerbang Dari Food Estate Dan Ibu Kota Negara Baru

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan yang mendesak di Kabupaten Tapin tahun 2021 khususnya tentang pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), serta dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, serta RKP Tahun 2022 (RPJMN 2020-2024) yang memuat program prioritas pembangunan nasional, maka Tema RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022

yaitu **“PENGUATAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR SERTA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI”** dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Reformasi Birokrasi
4. Pemulihan sosial ekonomi

Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
2. Pemerataan Pelayanan Dasar serta meningkatkan kualitas SDM
3. Pengembangan wilayah potensial dan pemerataan pembangunan
4. Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik
5. Pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi

Prioritas Daerah Kabupaten Tapin dirumuskan dengan berpedoman terhadap prioritas nasional, prioritas provinsi Kalimantan selatan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sinkronisasi prioritas Kabupaten Tapin dengan prioritas nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional		Prioritas Kabupaten Tapin	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5	Pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3	Pengembangan wilayah potensial dan pemerataan pembangunan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2	Pemerataan Pelayanan Dasar serta meningkatkan kualitas SDM
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4	Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik

Prioritas Nasional		Prioritas Kabupaten Tapin	
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
7	Memperkuat Sabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4	Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik

Tabel 4.3
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan		Prioritas Kabupaten Tapin	
1	Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata	5	Pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi
		3	Pengembangan wilayah potensial dan pemerataan pembangunan
2	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	2	Pemerataan Pelayanan Dasar serta meningkatkan kualitas SDM
3	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4	Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
6	KALSEL Sebagai Gerbang Dari Food Estate Dan Ibu Kota Negara Baru	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian

Tabel 4.4
Sinkronisasi Tujuan SDGs dengan Prioritas Kabupaten Tapin

Tujuan SDGs		Prioritas Kabupaten Tapin	
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	5	Pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;	5	Pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;	2	Pemerataan Pelayanan Dasar serta meningkatkan kualitas SDM



Tujuan SDGs		Prioritas Kabupaten Tapin	
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;	2	Pemerataan Pelayanan Dasar serta meningkatkan kualitas SDM
5	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;	2	Pemerataan Pelayanan Dasar serta meningkatkan kualitas SDM
6	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
9	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
10	Mengurangi kesenjangan;	3	Pengembangan wilayah potensial dan pemerataan pembangunan
11	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;	3	Pengembangan wilayah potensial dan pemerataan pembangunan
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	5	Pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
14	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;	-	Kabupaten Tapin tidak mempunyai wilayah laut
15	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
16	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif diseluruh tingkatan;	4	Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik
17	Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	1	Penguatan Infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.5
Prioritas dan Arah Kebijakan Kabupaten Tapin

Prioritas	Arah kebijakan	Program prioritas daerah
Penguatan infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian	Memperkuat kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan dan menunjang pelayanan dasar dan perekonomian	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian serta mendukung potensi wilayah
		Pengembangan infrastruktur berbasis teknologi informasi dan komputer
		Rehabilitasi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
Pemerataan pelayanan dasar serta meningkatkan kualitas sdm	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kuantitas dan kualitas sda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
		Peningkatan layanan terpadu satu pintu
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
		Peningkatan pengendalian penyakit;
		Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas);
		Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
		Pencegahan dan penanganan pandemi Covid – 19
		Penurunan Stunting terintegrasi
Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
		Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
		Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
		Penjaminan mutu pendidikan
		Peningkatan tata kelola pendidikan.



Prioritas	Arah kebijakan	Program prioritas daerah
		Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan prestasi olahraga.
	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
		Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesetaraan gender
		Peningkatan kualitas pemuda.
		Penurunan perkawinan anak usia dini
Pengembangan wilayah potensial dan pemerataan pembangunan	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
		Memperkuat kemampuan sdm dan teknologi informasi komputer dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
		Meningkatkan ipm melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
Peningkatan kualitas dan profesionalitas pelayanan publik	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif
		Pengembangan teknologi informasi dan komputer serta inovasi dalam pelayanan publik
Pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi	Peningkatan nilai tambah produk produk daerah dan pemulihan ekonomi	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (umkm), dan koperasi yang mendukung penyerapan tenaga kerja
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas produksi bidang pertanian
	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Bantuan sosial tepat sasaran
		Pelaksanaan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni



4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN

Menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

**Tabel. 4.6
Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan**

1. Urusan Pendidikan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	47,24%	SD : 58% SMP : 58%
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	25,56%	SD : 28,3% SMP : 28,3%
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi		99,07%	
		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi		98,17%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100%	77%



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100%	25%
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100%	2,68%
3	Terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah SMK yang terevitalisasi		900 Unit	



2. Urusan Kesehatan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1:1000 Ratio Penduduk	1:1000 Ratio Penduduk
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	90%	100%
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. 2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan. 3. Pelayanan	100%	100%



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12. Pelayanan Kesehatan Orang		



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205/100.000	95/100.000
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15%	30%



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91%	82%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,4%	11
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,5	7,5
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	Insidensi TB per 100.000 penduduk	231/100.000	231
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	0,19	< 0,4
		Temuan menggunakan indikator SPM 100% (terduga TB)	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	90%	80%
		Treatment coverage pada pasien TB	Treatment coverage pada pasien TB	90%	95%
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	71%	70%



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Kabupaten/kota dengan Puskesmas yang 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59%	60%
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria		365 kab/kota	
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9%	40
		Jumlah kabupaten/kota dengan $\geq 40\%$ FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	40%	100%
		Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	90%	80%
		Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota		60 kab/kota	
4	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha		80%	



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan		90%	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan perizinan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai standar.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	49%	100%
		Persentase Sarana Produksi UMOT	Persentase Sarana Produksi UMOT	60%	10%



3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase luas sawah beririgasi	Persentase luas sawah beririgasi	54%	75%
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	34.125 Ha	100 Ha
		Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	143.826,2 Ha	100 Ha
		Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	25 Km	10 Km
2	Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,9%	99
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	27,1%	81



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	10%	65,92%
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	83,6%	100
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	85
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	Persentase angka BABS di tempat terbuka	2,98%	15
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan	penanganan 73% pengurangan 26%
3	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	72%/62%	66,5



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	50 Km	-
4	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	394 Materi Teknis	1
		Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	1122 Persetujuan Substansi	2
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	125 Materi Teknis	-
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	1153 Materi Teknis	1
5	Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)	2 DAS	-



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruag di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruag di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	2 DAS	-
			Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	186 kab/kota	1
6	Terciptanya kepatuhan Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi		Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	186 kab/kota	1
			Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah	151 kab/kota	1



4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	5779 Ha	2
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	81702 Unit	200



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase permukiman yang sudah dilengkapi	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	100%



5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	75%	100%
2	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana	Persentase penanganan pra bencana	100 %	100 %
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	100 %
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	100 %
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	100 %
3	Meningkatnya pelayanan pemadam	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %	100 %



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	50%	60%
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%	100 %



6. Urusan Sosial

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	60 %	93 %
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	3000 orang	56
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	7230 orang	12
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	100 %	2 %
2	Penguatan Pelaksanaan	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	150 Badan Usaha	10
3	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	7000 KPM	PKH: 3518
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	10,000,000 KPM	PKH: 3518 BPNT: 5064 BST: 6777



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	150 orang	26
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	8000 orang	1
		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	4000 lembaga	7
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	18000 orang	35
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	350,000 jiwa	300
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	250,000 jiwa	60
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	358 kelompok masyarakat	60



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	375 kelompok masyarakat	60
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	120.000 orang	300
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1,200 orang	30
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3,60 %	70
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	24 %	10 %
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,53 %	35,12



7. Urusan Tenaga Kerja

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	19-20%	100
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	17.800 Orang	24000
3	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	1.189.550 Orang	68
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	12.000 Orang	304



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja		Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	60 %	



8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2020	2,4
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85%	92%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2020	73,39
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkat minimal 3% dari kondisi 2020	68
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	70%	90%



9. Urusan Pangan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat	Persentase cadangan pangan masyarakat	10%	100%
		Persentase daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	14%	14,81%
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	92,8%	100
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85%	100%



10. Urusan Pertanahan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	129523 Kepala Keluarga	400
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	423421 bidang	508
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	42422 Hektar	±15



11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.22 Poin	69,1
2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	1700 Lembaga %	36
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Jumlah pengurangan timbulan sampah b. Jumlah penanganan timbulan sampah	11,18 31,40	pengurangan 26% penanganan 73%



12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	100%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97 %	96 %
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 %	100 %
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 %	69 %
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100 %	32 %
		Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	80 %	10 %



13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	13.494 Orang	1.164
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	2500 lembaga	287
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	2500 Sistem pelayanan	287
2	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	3944 Desa	1
		Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	56791 Desa	95
		Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal	14402 Desa	4
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Berkembang	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Berkembang	7500 Bumdes	93



14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57.00 Index	80
2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	62,54%	83,25%
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	62,54%	83,25%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	8,00%	9,76%



15. Urusan Perhubungan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85.00 (Nilai)	75
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	78,44 %	-
2	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	0.695 Rasio	0.4
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100 ribu Keberangkatan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	28.85 Rasio	0.0038



16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80%	50%
2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	65%	50%
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	65%	80%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	30%	50%
4	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang	55%	16%



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemerintah daerah	difasilitasi oleh pemerintah daerah		
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	200 orang	100 orang
5	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	70%	100%



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Publik (IKP) di Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	70%	50%
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	70%	50%
		Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	75%	100%



17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	50%	35%



18. Urusan Penanaman Modal

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Rp. 968.400.000.000.000	Rp 210.000.000.000



19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6.69% (Persen)	0,92
2	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.55% (Persen)	0,88
3	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	12 (Medali emas)	25



20. Urusan Statistik

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	85 %
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	85 %



21. Urusan Persandian

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya kemandirian siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100 Orang	2
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	5 Daerah	1
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	100 Orang	2



22. Urusan Kebudayaan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	10 %
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	4,156 Unit	28
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36 %	15 %
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	460 Unit	32
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1,96 %	10,00 %



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12 %	2 %
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	400 Unit	27
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	113 Unit	-
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	50 Orang	5
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	50 Orang	-
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36%	15%



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%	2%
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0,31%	15,00%
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1,96%	10,00%
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,33%	-



23. Urusan Perpustakaan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 (Index)	20
2	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,3 (Nilai)	10,6



24. Urusan Kearsipan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148. 880 Arsip	1923
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	170.362 Orang	308



25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pengelolaan Wilayah	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)		17.500.000 Ha	
	Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K		34 dokumen	
2	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	8.320.000 ton	4077.92
		Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	20.540.000 ton	408.147
		Produksi Garam		3.200.000 ton	
		Konsumsi ikan		59,53 kg/kap/th	
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan		93%	



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kelautan dan perikanan integratif	Operasi kapal pengawas/speedboat		180 hari operasi	



26. Urusan Pariwisata

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kontribusi	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	1.398.000.000.000	800.000.000
	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	260.000.000-2 80.000.000)	860423
		Kontribusi PDB Pariwisata	Kontribusi PDB Pariwisata	4,3%	2



27. Urusan Pertanian

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	2,00%	2,75
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,20%	1
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	3,28%	2
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	persentase peningkatan produktivitas peternakan	1,20%	1
2	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Tanaman Pangan = 95% Hortikultura = 90-95% Perkebunan = 80%	98
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,5%	100



28. Urusan Kehutanan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi		100000 Ha	
2	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial		250000 Ha	



29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)		100%	
2	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional		15,7%	
3	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi		100%	



30. Urusan Perdagangan

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5,96% - 7.86%	-
2	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha	Tertib Usaha	55% – 75%	70
3	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	42%	75
4	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waku, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	98%



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	50-75%	55
6	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	91%	8000%
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,9%	1,5%
8	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak	Inflasi Pangan bergejolak	3%-5%	3%



31. Urusan Perindustrian

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	6,8%	4,88%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	18,3%	7,8%
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	151.9 (Nilai)	-
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	20.6 juta	14092



No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	425.3 Triliun	-



32. Urusan Transmigrasi

No	Kinerja	Indikator		Target Nasional	Target Kabupaten
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53.12 (Index)	-
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	42.03 (Index)	-



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah disusun berdasarkan tingkat kebutuhan prioritas dan keterkaitan atas pencapaian target pada RPJMD, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka upaya menyelesaikan permasalahan/isu-isu strategis.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA TAHUN 2022

KABUPATEN TAPIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Pendidikan						300.393.562.305	0	0		315.413.240.420
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	244.245.236.503	0	0	100%	256.457.498.328
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Kinerja dan dokumen perencanaan	13 Laporan	24.350.000	0	0	13 Laporan	25.567.500
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Disdik Kab.Tapin	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	3 Dokumen	5.600.000	0	0	3 Dokumen	5.880.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Disdik Kab.Tapin	Jumlah dokumen RKA-SKPD Dinas Pendidikan yang di koodinasikan dan di susun	1 Dokumen	5.000.000	0	0	1 Dokumen	5.250.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Disdik Kab.Tapin	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD Dinas Pendidikan yang di koodinasikan dan di susun	1 Dokumen	6.250.000	0	0	1 Dokumen	6.562.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Disdik Kab. Tapin	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang di koodinasikan dan di susun	5 Dokumen	7.500.000	0	0	5 Dokumen	7.875.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan laporan akhir tahun	2 Laporan	238.435.416.103	0	0	2 Laporan	250.357.186.908
					waktu Workshop Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Disdik Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	238.426.137.003	0	0	12 Bulan	250.347.443.853
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Disdik Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.745.000	0	0	1 Dokumen	4.982.250
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Disdik Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	2.755.000	0	0	1 Dokumen	2.892.750
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Disdik Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.779.100	0	0	1 Dokumen	1.868.055
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat dinas pendidikan serta Konsultasi dan Monitoring	12 Bulan	16.866.000	0	0	12 Bulan	17.709.300
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Disdik Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	16.866.000	0	0	1 Tahun	17.709.300
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu pelaksanaan tapin expo	1 Kali	1.600.304.800	0	0	1 Kali	1.680.320.040
					Waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	1 Tahun				1 Tahun	
					Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan makan dan minum harian dan rapat	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat dinas pendidikan serta Konsultasi dan Monitoring	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah pelaksanaan Karnaval HUT RI	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah peringatan Hari Guru Nasional	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah Hari Pendidikan Nasional yang diperingati	1 Kali				1 Kali	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Disdik Kab. Tapin	Waktu Terlaksana penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Kali	18.038.700	0	0	1 Kali	18.940.635
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Disdik Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	216.410.300	0	0	12 Bulan	227.230.815
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Disdik Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	204.870.000	0	0	12 Bulan	215.113.500
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Disdik Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	47.744.000	0	0	12 Bulan	50.131.200
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Disdik Kab.Tapin	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	3.224.800	0	0	12 Bulan	3.386.040
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Disdik Kab.Tapin	Waktu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	24.000.000	0	0	12 Bulan	25.200.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Disdik Kab. Tapin	Waktu Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.086.017.000	0	0	12 Bulan	1.140.317.850
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	640.589.400	0	0	12 bulan	672.618.870
					waktu Pengadaan Tanah	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Disdik Kab. Tapin	waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	640.589.400	0	0	12 bulan	672.618.870
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	3.303.647.400	0	0	12 bulan	3.468.829.770
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Disdik Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	139.281.600	0	0	12 Bulan	146.245.680
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Disdik Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	33.292.000	0	0	12 Bulan	34.956.600
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Disdik Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	3.131.073.800	0	0	12 Bulan	3.287.627.490
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	224.062.800	0	0	12 Bulan	235.265.940
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Disdik Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	80.398.200	0	0	12 bulan	84.418.110
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Disdik Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	110.311.600	0	0	12 Bulan	115.827.180
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Disdik Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	33.353.000	0	0	12 bulan	35.020.650
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikmas, Pendidikan dasar jenjang SD dan SMP		Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	84%	56.133.325.802	0	0	88%	58.939.992.092
					Persentase PAUD yang terakreditasi	75%				90%	
					Angka Putus Sekolah Dasar	0,02%				0,01%	
					Angka Mengulang Sekolah Dasar	0,01%				0,00%	
					Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	100%				100%	
					Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD	93%				94%	
					Angka Putus Sekolah Menengah Pertama	0,20%				0%	
					Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama	0,33%				0%	
					Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	95%				100%	
					Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	96,15%				100%	
					Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	0,57%				0,59%	
					Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi	57,60%				76,90%	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			TAPIN	Jumlah Peserta Ujian Sekolah (US) SD	3300 Siswa	29.449.971.381	0	0	3300 Siswa	30.922.469.950
					Waktu penyusunan dan pengandaan soal uli coba UAS SD	3 Minggu				3 Minggu	
					Jumlah Kepala Sekolah dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah yang dibina sesuai dengan Luksis BOS	394 Kepsek/Bendahara				394 Kepsek/Bendahara	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Khataman Al Quran Massal jenjang SD	3300 Siswa				3300 Siswa	
					Jumlah Pembangunan SD	2 Unit				2 Unit	
					Jumlah Pembangunan Pagar Sekolah	8 Unit				8 Unit	
					Jumlah Data Pendidikan	1 Data				1 Data	
					Jumlah SD dan SMP yang terakreditasi	50 Sekolah				50 Sekolah	
					waktu Workshop Sekolah Ramah Anak	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pelaksanaan O2SN SD	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembangunan Sekolah	12 bulan				12 bulan	
					waktu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pelaksanaan Matematika and Science Olimpiade dan Olimpiade Sains Nasional	12 bulan				12 bulan	
					waktu Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Ruang Guru	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Tapin	Jumlah Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang di bina	3 Kegiatan	145.000.500	0	0	3 Kegiatan	152.250.525
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Kabupaten Tapin	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang tersedia	178 Sekolah	60.000.000	0	0	178 Sekolah	63.000.000
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Kabupaten Tapin	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	178 Sekolah	265.500.000	0	0	178 Sekolah	278.775.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang di bina	178 Sekolah	60.465.000	0	0	178 Sekolah	63.488.250
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Kabupaten Tapin	Jumlah terkelolanya Dana BOS Sekolah Dasar	175 Sekolah	17.201.060.000	0	0	175 Sekolah	18.061.113.000
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Tapin	Jumlah Terkelolanya Manajemen BOS Sekolah Dasar	178 Sekolah	100.488.000	0	0	178 Sekolah	105.512.400
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			TAPIN	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan UN/SMP-MTS	43 Sekolah	21.836.091.591	0	0	43 Sekolah	22.927.896.171
					Jumlah Mata Pelajaran UN Siswa SMP	4 Mata Pelajaran				4 Mata Pelajaran	
					Jumlah cabang lomba olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat SMP	5 Cabang				5 Cabang	
					Jumlah cabang lomba Festival Lomba seni siswa nasional Tingkat SMP	5 Cabang				5 Cabang	
					Jumlah cabang lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP	3 Cabang				3 Cabang	
					Jumlah Mata Pelajaran Olimpiade Sains Nasional yang ditingkatkan	3 Mata Pelajaran				3 Mata Pelajaran	
					Waktu pelaksanaan Liga sepak bola (GALA) Siswa Indonesia Tingkat SMP	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah Pembangunan SMP	1 Unit				1 Unit	
					Jumlah Pembangunan Pagar Sekolah	5 Unit				5 Unit	
					Jumlah Data Pendidikan	1 Data				1 Data	
					Jumlah SD dan SMP yang terakreditasi	50 Sekolah				50 Sekolah	
					waktu Workshop Sekolah Ramah Anak	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pengembangan Website Pendidikan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pelaksanaan Lomba Sanitasi/UKS SMP	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pengembangan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengembangan sekolah inklusi	40 sekolah				45 sekolah	
					Jumlah sekolah yang terakreditasi	50 sekolah				50 sekolah	
					Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Sanitasi/UKS jenjang TK,SD,dan SMP	4 sekolah/jenjang				4 sekolah/jenjang	
					Jumlah Meubelair Sekolah yang layak untuk kegiatan belajar mengajar	22 sekolah				22 sekolah	
					Waktu pelaksanaan pengembangan pembelajaran TIK	1 kali				1 kali	
					Jumlah Sekolah yang melaksanakan penerimaan siswa baru SMP	26 sekolah				26 sekolah	
					Jumlah Sarana Sekolah yang layak untuk kegiatan belajar mengajar	26 sekolah				26 sekolah	
					Jumlah Sampul raport yang dibagikan ke sekolah	26 sekolah				26 sekolah	
					Waktu pemberian penghargaan ke sekolah berprestasi dan Siswa Berprestasi jenjang SMP	1 kali				1 kali	
					Jumlah Guru yang mengikuti peningkatan wawasan mapel UN	26 guru/sekolah				26 guru/sekolah	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Khataman Al Quran jenjang SMP	1457 Siswa				1457 Siswa	
					Jumlah penilaian angka kredit jabatan fungsional	2 Kali				2 Kali	
					Jumlah Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang diseleksi	40 Orang				40 Orang	
					Jumlah Peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guru	200 Peserta				200 Peserta	
					waktu Diklat Guru SD, SMP Peningkatan kompetensi	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Guru yang Berprestasi	15 orang				15 orang	
					Jumlah peserta Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	199 Kepsek dan Pengawas				199 Kepsek dan Pengawas	
					Jumlah Sekolah yang menerapkan Finger Print	197 sekolah				197 sekolah	
					Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	1 sekolah				1 sekolah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Jumlah penilaian angka kredit jabatan fungsional	2 Kali				2 Kali	
					Jumlah Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang diseleksi	40 Orang				40 Orang	
					Jumlah Peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guru	200 Peserta				200 Peserta	
					waktu Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Guru yang Berprestasi	15 orang				15 orang	
					Jumlah peserta Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	199 Kepsek dan Pengawas				199 Kepsek dan Pengawas	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			Kab. Tapin	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5 Unit	1.240.284.420	0	0	5 Unit	1.302.298.641
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			Kabupaten Tapin	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1 Unit	296.624.490	0	0	1 Unit	311.455.715
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			Kab. Tapin	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 Unit	202.880.320	0	0	1 Unit	213.024.336
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD			Kab. Tapin	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	1 Lembaga	150.000.000	0	0	1 Lembaga	157.500.000
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD			Kab.Tapin	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	1 Paket	53.624.900	0	0	1 Paket	56.306.145
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			Tapin	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	130 Siswa PAUD	50.000.000	0	0	130 Siswa PAUD	52.500.000
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			Tapin	Tersedianya Dana Insentif bagi Pendidik PAUD non PNS (KB dan TK)	12 Bulan	1.206.000.000	0	0	12 Bulan	1.266.300.000
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			Tapin	Jumlah lembaga yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	183 Lembaga	30.191.000	0	0	183 Lembaga	31.700.550
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			Kabupaten Tapin	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen PAUD yang di bina	183 Lembaga	352.341.300	0	0	183 Lembaga	369.958.365
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			Tapin	Jumlah lembaga yang terkelolanya dana BOP PAUD	183 Lembaga	46.800.000	0	0	183 Lembaga	49.140.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			TAPIN	waktu Pengadaan komputer UNBK SKB	12 bulan	1.218.516.400	0	0	12 bulan	1.279.442.220
					waktu Peningkatan Mutu Satuan PNF	12 bulan				12 bulan	
					waktu Peningkatan prasarana pendidikan informal	12 bulan				12 bulan	
					waktu Kursus Wirausaha Perdesaan (KWD)	12 bulan				12 bulan	
					waktu Try Out UNBK Nonformal	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) / Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pelatihan Penilik/PKBM/LKP	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Kelompok Belajar Paket C	7 Kelompok Belajar				7 Kelompok Belajar	
					Jumlah Lembaga yang mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	12 Lembaga				12 Lembaga	
					Jumlah Kelompok Belajar Paket A	3 Kelompok Belajar				3 Kelompok Belajar	
					Jumlah Kelompok Belajar Paket B	6 Kelompok Belajar				6 Kelompok Belajar	
					Jumlah PKBM yang melaksanakan Proses Belajar Mengajar	11 Lembaga				11 Lembaga	
					Jumlah Cabang Lomba yang diikuti GTK PAUD Dikmas	8 Cabang				8 Cabang	
					Jumlah Lembaga yang ikut serta dalam pelaksanaan HAI	10 Lembaga				10 Lembaga	
					Jumlah Komputer UNBK SKB yang dikembangkan/dipelihara	1 Sanggar Kegiatan Belajar				1 Sanggar Kegiatan Belajar	
					Jumlah Kelompok belajar KF dan KF Qur'an	6 Kelompok Belajar				6 Kelompok Belajar	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Tapin	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	752 Warga Belajar	112.800.000	0	0	752 Warga Belajar	118.440.000
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			Tapin	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1 Kelompok	975.758.000	0	0	1 Kelompok	1.024.545.900
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Tapin	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14 Lembaga	30.095.400	0	0	14 Lembaga	31.600.170
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Tapin	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14 Lembaga	63.913.000	0	0	14 Lembaga	67.108.650
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Tapin	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang di bina	6 Lembaga	19.200.000	0	0	6 Lembaga	20.160.000
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Tapin	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	14 Lembaga	16.750.000	0	0	14 Lembaga	17.587.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Mutu Lulusan dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94%	15.000.000	0	0	100%	15.750.000
					Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan pendidikan SD dan SMP	96,35%				100%	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			TAPIN	Jumlah guru yang profesional	1200 Guru	15.000.000	0	0	1200 Guru	15.750.000
					Jumlah guru yang mengikuti diklat pendidikan profesi guru	160 Guru				160 Guru	
					Jumlah penyusunan Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 paket				1 paket	
					Waktu untuk menganalisis kebutuhan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah	1 kali				1 kali	
					Jumlah peserta Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	199 Kepsek dan Pengawas				199 Kepsek dan Pengawas	
					Jumlah Sekolah yang menerapkan Finger Print	197 sekolah				197 sekolah	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Kabupaten Tapin	Jumlah sekolah/lembaga yang dihitung dan dipetakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	401 Sekolah/Lembaga	15.000.000	0	0	401 Sekolah/Lembaga	15.750.000
	Dinas Kesehatan						101.223.135.057	0	0		106.284.291.810
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 100	73.823.087.517	0	0	100	77.514.241.893
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab-Tapin	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	10.049.900	0	0	12 bulan	10.552.395
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	71.418.289.417	0	0	12 bulan	74.989.203.888
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			KAB TAPIN	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	2.850.000	0	0	12 bulan	2.992.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			KAB TAPIN	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	10.399.500	0	0	12 bulan	10.919.475
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab-Tapin	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	169.198.200	0	0	12 bulan	177.658.110
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	8.373.700	0	0	12 bulan	8.792.385
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Tapin	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	17.083.400	0	0	12 bulan	17.937.570
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Tapin	waktu Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	1.987.800	0	0	12 bulan	2.087.190
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1.403.275.000	0	0	12 bulan	1.473.438.750
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kab. Tapin	waktu Pengadaan Mebel	12 bulan	6.000.000	0	0	12 bulan	6.300.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	145.961.000	0	0	12 bulan	153.259.050
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	337.364.400	0	0	12 bulan	354.232.620
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			KAB. TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	175.725.000	0	0	12 bulan	184.511.250
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Tapin	waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	98.230.200	0	0	12 bulan	103.141.710
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	18.300.000	0	0	12 bulan	19.215.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	25.073.887.040	0	0	A Nilai	26.327.581.392

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah alat-alat kesehatan (unit)	14 unit	4.038.963.505	0	0	9 unit	4.240.911.680
					Jumlah Rehabilitasi selasar Rumah Sakit Datu Sanggul (Paket0	0 paket				0 paket	
					Jumlah Pembangunan Gedung Radiologi	0 paket				0 paket	
					Jumlah Hydran RS	0 paket				0 paket	
					Jumlah Rehabilitasi gedung bersalin	0 paket				0 paket	
					Jumlah Rehabilitasi gedung gizi	0 paket				0 paket	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas			Kab. Tapin	waktu Pembangunan Puskesmas	12 bulan	1.000.000.000	0	0	12 bulan	1.050.000.000
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kab. Tapin	waktu Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 bulan	475.000.000	0	0	12 bulan	498.750.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			Kab. Tapin	waktu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12 bulan	300.000.000	0	0	12 bulan	315.000.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kab. Tapin	waktu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 bulan	150.000.000	0	0	12 bulan	157.500.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Tapin	waktu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 bulan	28.486.000	0	0	12 bulan	29.910.300
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Tapin	waktu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 bulan	28.486.000	0	0	12 bulan	29.910.300
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Tapin	waktu Pengadaan Obat, Vaksin	12 bulan	2.085.477.505	0	0	12 bulan	2.189.751.380
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	20.890.796.700	0	0	12 bulan	21.935.336.535
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	37.550.000	0	0	12 bulan	39.427.500
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	112.655.000	0	0	12 bulan	118.287.750
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	13.140.000	0	0	12 bulan	13.797.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	15.795.000	0	0	12 bulan	16.584.750
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	105.479.200	0	0	12 bulan	110.753.160
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12 bulan	114.265.000	0	0	12 bulan	119.978.250
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12 bulan	25.987.200	0	0	12 bulan	27.286.560
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	16.900.000	0	0	12 bulan	17.745.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12 bulan	16.900.000	0	0	12 bulan	17.745.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12 bulan	35.200.000	0	0	12 bulan	36.960.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis	12 bulan	85.933.200	0	0	12 bulan	90.229.860
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12 bulan	73.047.000	0	0	12 bulan	76.699.350
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 bulan	220.150.000	0	0	12 bulan	231.157.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 bulan	45.890.000	0	0	12 bulan	48.184.500
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 bulan	81.749.900	0	0	12 bulan	85.837.395
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12 bulan	63.400.000	0	0	12 bulan	66.570.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Kabupaten Tapin	waktu Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 bulan	68.439.900	0	0	12 bulan	71.861.895
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12 bulan	16.900.000	0	0	12 bulan	17.745.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Kab. Tpin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12 bulan	38.575.000	0	0	12 bulan	40.503.750
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Kab. tapin	waktu Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 bulan	250.959.900	0	0	12 bulan	263.507.895
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	18.955.160.900	0	0	12 bulan	19.902.918.945
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			Kab. Tapin	waktu Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	12 bulan	16.900.000	0	0	12 bulan	17.745.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			Kab. Tapin	waktu Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 bulan	75.010.000	0	0	12 bulan	78.760.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Tapin	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	72.690.000	0	0	12 bulan	76.324.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kab. Tapin	waktu Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 bulan	332.119.500	0	0	12 bulan	348.725.475
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			TAPIN	Waktu Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	12 bulan	144.126.835	0	0	12 bulan	151.333.177
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Kab. Tapin	waktu Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 bulan	144.126.835	0	0	12 bulan	151.333.177
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.981.139.200	0	0	100%	2.080.196.160
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 (%)				95 (%)	
					PRESENTASE PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	78 orang	1.760.400.000	0	0	80 orang	1.848.420.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Tapin	waktu Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	12 bulan	1.760.400.000	0	0	12 bulan	1.848.420.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	78 orang	220.739.200	0	0	80 orang	231.776.160
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	waktu Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	220.739.200	0	0	12 bulan	231.776.160
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		PRESENTASE SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100 persen	7.100.000	0	0	100 persen	7.455.000
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			TAPIN	Waktu Pembinaan Toko Obat dan Apotek	12 bulan	7.100.000	0	0	12 bulan	7.455.000
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Kabupaten Tapin	waktu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 bulan	7.100.000	0	0	12 bulan	7.455.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100%	337.921.300	0	0	100%	354.817.365
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			kab tapin	waktu Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	261.602.900	0	0	12 bulan	274.683.045
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			kab tapin	waktu Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 bulan	76.318.400	0	0	12 bulan	80.134.320
	Puskesmas Tapin Utara (APBD)						125.250.000	0	0		131.512.500
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	125.250.000	0	0	A Nilai	131.512.500
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN UTARA	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	125.250.000	0	0	12 bulan	131.512.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kecamatan Tapin Utara	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	125.250.000	0	0	12 bulan	131.512.500
	Puskesmas Tapin Utara (JKN)						1.221.548.572	0	0		1.282.626.001
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	1.221.548.572	0	0	A Nilai	1.282.626.001
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	1.221.548.572	0	0	12 bulan	1.282.626.001
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Puskesmas Tapin Utara	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	1.221.548.572	0	0	12 bulan	1.282.626.001
	Puskesmas Benuang (APBD)						210.512.800	0	0		221.038.440
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	210.512.800	0	0	A Nilai	221.038.440
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			BINUJANG	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	210.512.800	0	0	12 bulan	221.038.440
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			kecamatan Benuang	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	210.512.800	0	0	12 bulan	221.038.440
	Puskesmas Benuang (JKN)						1.281.251.920	0	0		1.345.314.516
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	1.281.251.920	0	0	A Nilai	1.345.314.516
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			BINUJANG	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	1.281.251.920	0	0	12 bulan	1.345.314.516
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Puskesmas Benuang	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	1.281.251.920	0	0	12 bulan	1.345.314.516
	Puskesmas Hatungun (APBD)						124.000.000	0	0		130.200.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	124.000.000	0	0	A Nilai	130.200.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	124.000.000	0	0	12 bulan	130.200.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kec. Hatungun	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	124.000.000	0	0	12 bulan	130.200.000
	Puskesmas Hatungun (JKN)						300.000.000	0	0		315.000.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	300.000.000	0	0	A Nilai	315.000.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	300.000.000	0	0	12 bulan	315.000.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Hatungun	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	300.000.000	0	0	12 bulan	315.000.000
	Puskesmas Tambaran (APBD)						163.350.000	0	0		171.517.500
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	163.350.000	0	0	A Nilai	171.517.500
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;TAPIN SELATAN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	163.350.000	0	0	12 bulan	171.517.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Puskesmas Tambaran	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	163.350.000	0	0	12 bulan	171.517.500
	Puskesmas Tambaran (JKN)						685.900.165	0	0		720.195.173
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	685.900.165	0	0	A Nilai	720.195.173
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN SELATAN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	685.900.165	0	0	12 bulan	720.195.173
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Tapin Selatan	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	685.900.165	0	0	12 bulan	720.195.173
	Puskesmas Salam Babaris (APBD)						110.230.000	0	0		115.741.500
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	110.230.000	0	0	A Nilai	115.741.500
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			SALAM BABARIS	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	110.230.000	0	0	12 bulan	115.741.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Tapin, Salam Babaris, Salam Babaris	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	110.230.000	0	0	12 bulan	115.741.500
	Puskesmas Salam Babaris (JKN)						393.231.865	0	0		412.893.458
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	393.231.865	0	0	A Nilai	412.893.458
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			SALAM BABARIS	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	393.231.865	0	0	12 bulan	412.893.458
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			SALAM BABARIS	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	393.231.865	0	0	12 bulan	412.893.458
	Puskesmas Banua Padang (APBD)						149.002.800	0	0		156.452.940
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	149.002.800	0	0	A Nilai	156.452.940
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	149.002.800	0	0	12 bulan	156.452.940
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			wilayah kerja puskesmas Banua Padang	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	149.002.800	0	0	12 bulan	156.452.940
	Puskesmas Banua Padang (JKN)						553.751.705	0	0		581.439.290
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	553.751.705	0	0	A Nilai	581.439.290
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			BUNGUR	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	553.751.705	0	0	12 bulan	581.439.290
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Puskesmas Banua Padang	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	553.751.705	0	0	12 bulan	581.439.290
	Puskesmas Bakarangan (APBD)						120.200.000	0	0		126.210.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	120.200.000	0	0	A Nilai	126.210.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			BAKARANGAN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	120.200.000	0	0	12 bulan	126.210.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			PUSKESMAS BAKARANGAN	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	120.200.000	0	0	12 bulan	126.210.000
	Puskesmas Bakarangan (JKN)						638.631.120	0	0		670.562.676
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	638.631.120	0	0	A Nilai	670.562.676
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			BAKARANGAN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	638.631.120	0	0	12 bulan	670.562.676
	Puskesmas Pandahan (APBD)						71.500.000	0	0		75.075.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	71.500.000	0	0	A Nilai	75.075.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN TENGAH	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	71.500.000	0	0	12 bulan	75.075.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Puskesmas Pandahan	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	71.500.000	0	0	12 bulan	75.075.000
	Puskesmas Pandahan (JKN)						338.100.000	0	0		355.005.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	338.100.000	0	0	A Nilai	355.005.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN TENGAH	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	338.100.000	0	0	12 bulan	355.005.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			kecamatan tapin Tengah puskesmas Pandahan	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	338.100.000	0	0	12 bulan	355.005.000
	Puskesmas Tambaruntung (APBD)						104.800.000	0	0		110.040.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	104.800.000	0	0	A Nilai	110.040.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN TENGAH	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	104.800.000	0	0	12 bulan	110.040.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Tambaruntung	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	104.800.000	0	0	12 bulan	110.040.000
	Puskesmas Tambaruntung (JKN)						455.011.300	0	0		477.761.865
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	455.011.300	0	0	A Nilai	477.761.865
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN TENGAH	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	455.011.300	0	0	12 bulan	477.761.865
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Tapin Tengah	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	455.011.300	0	0	12 bulan	477.761.865
	Puskesmas Baringin (APBD)						222.200.000	0	0		233.310.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	222.200.000	0	0	A Nilai	233.310.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			CANDI LARAS SELATAN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	222.200.000	0	0	12 bulan	233.310.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Puskesmas Baringin	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	222.200.000	0	0	12 bulan	233.310.000
	Puskesmas Baringin (JKN)						694.505.344	0	0		729.230.611
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	694.505.344	0	0	A Nilai	729.230.611
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			CANDI LARAS SELATAN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	694.505.344	0	0	12 bulan	729.230.611
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Puskesmas Baringin Kecamatan Candi Laras Selatan	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	694.505.344	0	0	12 bulan	729.230.611
	Puskesmas Margasari (APBD)						111.620.000	0	0		117.201.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	111.620.000	0	0	A Nilai	117.201.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			CANDI LARAS UTARA	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	111.620.000	0	0	12 bulan	117.201.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Seluruh wilayah kerja Puskesmas Margasari	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	111.620.000	0	0	12 bulan	117.201.000
	Puskesmas Margasari (JKN)						885.600.000	0	0		929.880.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	885.600.000	0	0		A Nilai	929.880.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%					92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;MARGASARI HILIR	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	885.600.000	0	0		12 bulan	929.880.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jl.Gusti Utbi No.3 Margasari Ilir RT.01 Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, INDONESIA	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	885.600.000	0	0		12 bulan	929.880.000
	Puskesmas Lokpaikat (APBD)						127.450.000	0	0			133.822.500
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	127.450.000	0	0		A Nilai	133.822.500
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%					92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			LOKPAIKAT	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	127.450.000	0	0		12 bulan	133.822.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	127.450.000	0	0		12 bulan	133.822.500
	Puskesmas Lokpaikat (JKN)						547.148.722	0	0			574.506.158
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	547.148.722	0	0		A Nilai	574.506.158
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%					92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			LOKPAIKAT	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	547.148.722	0	0		12 bulan	574.506.158
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Puskesmas Lokpaikat	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	547.148.722	0	0		12 bulan	574.506.158
	Puskesmas Piani (APBD)						117.725.000	0	0			123.611.250
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	117.725.000	0	0		A Nilai	123.611.250
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%					92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	117.725.000	0	0		12 bulan	123.611.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kecamatan Piani	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	12 bulan	117.725.000	0	0	12 bulan	123.611.250
	Puskesmas Piani (JKN)						308.000.000	0	0		323.400.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	308.000.000	0	0	A Nilai	323.400.000
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			PIANI	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	308.000.000	0	0	12 bulan	323.400.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab.Tapin,Piani	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 bulan	308.000.000	0	0	12 bulan	323.400.000
	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul						100.672.517.614	0	0		105.706.143.495
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 100	33.779.853.298	0	0	100	35.468.845.963
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			RSUD Datu Sanggul Rantau	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	33.779.853.298	0	0	12 bulan	35.468.845.963
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A Nilai	62.931.480.316	0	0	A Nilai	66.078.054.332
					Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	86,82%				92,72%	
					PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Jumlah alat-alat kesehatan (unit)	14 unit	9.831.480.316	0	0	9 unit	10.323.054.332
					Jumlah Rehabilitasi selasar Rumah Sakit Datu Sanggul (Paket0)	0 paket				0 paket	
					Jumlah Pembangunan Gedung Radiologi	0 paket				0 paket	
					Jumlah Hydran RS	0 paket				0 paket	
					Jumlah Rehabilitasi gedung bersalin	0 paket				0 paket	
					Jumlah Rehabilitasi gedung gizi	0 paket				0 paket	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			TAPIN	waktu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 bulan	9.831.480.316	0	0	12 bulan	10.323.054.332
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			TAPIN	waktu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 bulan	9.831.480.316	0	0	12 bulan	10.323.054.332
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	12 bulan	53.100.000.000	0	0	12 bulan	55.755.000.000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Tapin	waktu Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 bulan	53.100.000.000	0	0	12 bulan	55.755.000.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.961.184.000	0	0	100%	4.159.243.200
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 (%)				95 (%)	
					PRESENTASE PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	78 orang	3.961.184.000	0	0	80 orang	4.159.243.200
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			TAPIN	waktu Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	12 bulan	3.961.184.000	0	0	12 bulan	4.159.243.200
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Sekretariat)						14.317.706.956	0	0		15.033.592.304

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masvarakaf	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	14.317.706.956	0	0	100%	15.033.592.304	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%				100%		
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	560.460.000	0	0	12 Laporan	588.483.000	
					Waktu Honorarium Pegawai Tidak Tetap	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Monitoring Evaluasi & Pelaporan	12 bulan				12 bulan		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tapin	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Paket	560.460.000	0	0	1 Paket	588.483.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	10.888.256.956	0	0	2 laporan	11.432.669.804	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			DPUPR Kab Tapin	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Paket	10.870.046.956	0	0	1 Paket	11.413.549.304	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			DPUPR Kab Tapin	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Paket	11.700.000	0	0	1 Paket	12.285.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			DPUPR Kab Tapin	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 Paket	6.510.000	0	0	1 Paket	6.835.500	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1.428.889.900	0	0	12 bulan	1.500.334.395	
					waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan				12 bulan		
					Jumlah Kegiatan Tapin Expo	1 tahun				1 tahun		
					Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan				12 bulan		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DPUPR Kab Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	200.038.600	0	0	12 bulan	210.040.530	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			DPUPR Kab tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	58.783.000	0	0	12 bulan	61.722.150	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			DPUPR Kab Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	55.889.800	0	0	12 bulan	58.684.290	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			DPUPR Kab Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	14.995.000	0	0	12 bulan	15.744.750	
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			DPUPR Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	213.998.500	0	0	12 bulan	224.698.425	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			DPUPR Kab Tapin	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	9.020.000	0	0	12 bulan	9.471.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			DPUPR Kab Tapin	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	876.165.000	0	0	12 bulan	919.973.250	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	256.716.600	0	0	12 bulan	269.552.430	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			DPUPR Kab Tapin	Waktu Pengadaan Mebel	12 bulan	68.385.000	0	0	12 bulan	71.804.250	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			DPUPR Kab Tapin	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	188.331.600	0	0	12 bulan	197.748.180	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa Surat Penyurat	12 bulan	617.917.900	0	0	12 bulan	648.813.795	
					Waktu penyediaan jasa Surat Penyurat	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan				12 bulan		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			DPUPR Kab Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	11.600.000	0	0	12 bulan	12.180.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			DPUPR kab Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	343.624.000	0	0	12 bulan	360.805.200	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			DPUPR Kab Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	262.693.900	0	0	12 bulan	275.828.595	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Peralatan alat berat yang direkondisi	12 bulan	565.465.600	0	0	12 bulan	593.738.880	
					Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0 unit				0 unit		
					Jumlah Pemeliharaan alat-alat berat yang siap pakai	0 paket				0 paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			DPUPR kab Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	455.884.000	0	0	12 bulan	478.678.200
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			DPUPR Kab Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	109.581.600	0	0	12 bulan	115.060.680
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)						118.566.000.000	0	0		124.494.300.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik		Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	85%	3.541.000.000	0	0	90%	3.718.050.000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Akses Air bersih Yang di Bangun	120 sr	3.541.000.000	0	0	125 sr	3.718.050.000
					Jumlah Akses Air bersih Yang di Bangun	120 sr				125 sr	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			Tersebar	Waktu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	12 bulan	260.000.000	0	0	12 bulan	273.000.000
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM			Kabupaten Tapin	Waktu Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	12 bulan	260.000.000	0	0	12 bulan	273.000.000
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			Tapin	Terlaksananya Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Paket	3.021.000.000	0	0	Paket	3.172.050.000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	80%	1.426.000.000	0	0	85%	1.497.300.000
					Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah	90%				93%	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	1.426.000.000	0	0	12 bulan	1.497.300.000
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			Kabupaten Tapin	Waktu Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12 bulan	1.426.000.000	0	0	12 bulan	1.497.300.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah	93%	1.744.000.000	0	0	95%	1.831.200.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Akses Air Limbah Yang di Bangun	520 kk	1.744.000.000	0	0	525 kk	1.831.200.000
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			Tapin	Waktu Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	12 bulan	344.000.000	0	0	12 bulan	361.200.000
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			Tapin	Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Paket	1.400.000.000	0	0	Paket	1.470.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun (%)	65%	109.255.000.000	0	0	70%	114.717.750.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;BIN UANG	waktu Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	12 bulan	109.255.000.000	0	0	12 bulan	114.717.750.000
					waktu Pembangunan Gedung Kantor	12 bulan				12 bulan	
					Waktu monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			Kec. Tapin Utara	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor	Paket	109.255.000.000	0	0	Paket	114.717.750.000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik		Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik	70%	2.600.000.000	0	0	75%	2.730.000.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun	2 kilometer	2.600.000.000	0	0	2,5 kilometer	2.730.000.000
					Jumlah Luasan Tanah yang di ganti rugi	10 Ha				10 Ha	
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			Tersebar	Dokumen Pengawasan	Dokumen	640.000.000	0	0	Dokumen	672.000.000
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan			KABUPATEN TAPIN	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Paket	1.960.000.000	0	0	Paket	2.058.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)						358.015.597.356	0	0		375.916.377.224
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan Kabupaten		Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	55%	358.015.597.356	0	0	57%	375.916.377.224
					Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang	15%				18%	
					Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	60%				65%	
					Persentase panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara	21%				25%	
					Persentase Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	20%				22%	
					Persentase data jalan yang dimutakhirkan	100%				100%	
					Persentase data jembatan yang dimutakhirkan	100%				100%	
					Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	20%				25%	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			TAPIN	Panjang jalan dan jembatan yang di inspeksi	500 (meter)	358.015.597.356	0	0	500 (meter)	375.916.377.224
					Jumlah dokumen perencanaan untuk pembangunan jalan	10 dokumen				10 dokumen	
					Panjang Jembatan yang dibangun	212 km				212 km	
					Panjang Jalan Lingkar Dalam Kota Rantau yang dibangun (km)	25 km				25 km	
					Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan yang dibangun (Km)	6 km				6 km	
					AA Panjang bangunan pelengkap jalan yang dibangun	13 (Km)				13 (Km)	
					Panjang Jalan dan Jembatan yang terpelihara	22 (KM)				22 (KM)	
					Waktu monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Sistem Informasi Data Base Jalan	1 (Aplikasi)				1 (Aplikasi)	
					Jumlah Sistem Informasi Data Base Jembatan	1 (Aplikasi)				1 (Aplikasi)	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Paket	3.200.000.000	0	0	Paket	3.360.000.000
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan			Kabupaten Tapin	Jumlah lahan/Tanah yang dibebaskan (Ha)		125.214.188	0	0		131.474.897
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Survey kondisi Jalan/Jembatan	Paket	1.396.945.600	0	0	Paket	1.466.792.880
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan			tapin	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Paket	84.640.295.136	0	0	Paket	88.872.309.892
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Paket	12.550.000.000	0	0	Paket	13.177.500.000
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Paket	121.756.972.308	0	0	Paket	127.844.820.924
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Paket	22.750.000.000	0	0	Paket	23.887.500.000
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Paket	13.192.319.999	0	0	Paket	13.851.935.999
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Paket	76.500.000.000	0	0	Paket	80.325.000.000
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Paket	16.600.000.000	0	0	Paket	17.430.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			Kabupaten Tapin	Waktu Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	12 bulan	2.003.850.125	0	0	12 bulan	2.104.042.631
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen pengawasan	Paket	3.300.000.000	0	0	Paket	3.465.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Sumber Daya Air)						73.600.000.000	0	0		77.280.000.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Meningkatkan jaringan irigasi dan bangunan air		Persentase Panjang Tebing Sungai Yang Bebas Rawan Bencana	49%	73.600.000.000	0	0	50%	77.280.000.000
					Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan rigasi rawa dalam kondisi baik/sedang	65%				70%	
					Persentase pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik	52%				55%	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Panjang bangunan pengaman tebing sungai yang terbangun	3,24 km	62.500.000.000	0	0	3,64 km	65.625.000.000
					Panjang sungai yang di rehab	348,5 km				338 km	
					Waktu pembuatan Pintu Air	12 Bulan				12 Bulan	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			Kab. Tapin	Waktu Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	12 bulan	33.100.000.000	0	0	12 bulan	34.755.000.000
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			Kab. Tapin	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Paket	6.500.000.000	0	0	Paket	6.825.000.000
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai			Kab. Tapin	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Paket	22.900.000.000	0	0	Paket	24.045.000.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Panjang saluran irigasi yang terbangun	1,8 km	11.100.000.000	0	0	1,4 km	11.655.000.000
					Waktu monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Bulan				12 Bulan	
					Indeks Kinerja P3A Kabupaten Tapin	70%				70%	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			Kab. Tapin	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Paket	3.900.000.000	0	0	Paket	4.095.000.000
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Paket	7.200.000.000	0	0	Paket	7.560.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Tata Ruang)						2.169.999.900	0	0		2.278.499.895
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pemanfaatan tata ruang		Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang	86,60%	2.169.999.900	0	0	100%	2.278.499.895
					Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang	82,56%				100%	
					Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	90%				90%	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen RDTR Kawasan yang disusun (Dok)	2 dokumen	191.286.500	0	0	2 dokumen	200.850.825
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			Perkotaan Rantau, Kec. Tapin Utara; Perkotaan Binuang, Kec. Binuang	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	15%	191.286.500	0	0	30%	200.850.825
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen RDTR Kawasan yang disusun (Dok)	2 dokumen	1.235.063.000	0	0	2 dokumen	1.296.816.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Jumlah Dok Revisi yang dilaksanakan	3 dokumen					3 dokumen	
					Jumlah Dok yang dilaksanakan	3 dokumen					3 dokumen	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			Kec. Candi Laras Utara, Kec. Candi Laras Selatan, Kec. Bungur	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 kali	1.235.063.000	0	0		2 kali	1.296.816.150
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Survei dan Pemetaan yang dilaksanakan	4 kegiatan	420.482.000	0	0		4 kegiatan	441.506.100
					Jumlah Peta yang disusun	3 buah					3 buah	
					Jumlah aplikasi yang dilaksanakan	1 buah					1 buah	
					Jumlah Aplikasi Database yang disusun	1 buah					1 buah	
					Jumlah Dokumen yang dilaksanakan	3 dokumen					3 dokumen	
					Jumlah koordinasi penanganan pengendalian dan pemanfaatan ruang	8 kali					8 kali	
					Jumlah Aparat yang ikut diklat	10 orang					10 orang	
					Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang	20 bulan					20 bulan	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Kab. Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	312.912.000	0	0		1 Dokumen	328.557.600
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang			Kab. Tapin	Terlaksananya Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Paket	107.570.000	0	0		1 Paket	112.948.500
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dok Revisi yang dilaksanakan	3 dokumen	323.168.400	0	0		3 dokumen	339.326.820
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Kab. Tapin	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Bulan	323.168.400	0	0		12 Bulan	339.326.820
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Jasa Konstruksi)						235.381.000	0	0			247.150.050
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi		Persentase jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK	60%	235.381.000	0	0		60%	247.150.050
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			TAPIN	Jumlah Pebinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	0 kegiatan	120.561.000	0	0		0 kegiatan	126.589.050
1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			tapin	Waktu Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	12 bulan	120.561.000	0	0		12 bulan	126.589.050
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			TAPIN	Waktu Pembinaan Jasa Konstruksi	12 bulan	114.820.000	0	0		12 bulan	120.561.000
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			Kab. Tapin	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Paket	114.820.000	0	0		Paket	120.561.000
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						47.624.324.462	0	0			50.005.540.685
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	5.802.228.342	0	0		100%	6.092.339.759
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%					100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 laporan	9.665.000	0	0		13 laporan	10.148.250
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.365.000	0	0		Dokumen	2.483.250
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000	0	0		Dokumen	1.155.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000	0	0		Dokumen	1.155.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.150.000	0	0		Dokumen	1.207.500
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.150.000	0	0		Dokumen	1.207.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	2.160.000	0	0		Dokumen	2.268.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	640.000	0	0	Dokumen	672.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	2.776.093.242	0	0	2 laporan	2.914.897.904
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	2.772.073.242	0	0	Dokumen	2.910.676.904
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.010.000	0	0	Laporan	2.110.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.010.000	0	0	Laporan	2.110.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	2.007.714.000	0	0	12 bulan	2.108.099.700
					Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan				12 bulan	
					Waktu penyediaan barang cetakan dan pengandaan	12 bulan				12 bulan	
					Waktu pelaksanaan Tapin Expo 2020	1 kali				1 kali	
					Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Dokumen	387.291.800	0	0	Dokumen	406.656.390
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Dokumen	174.110.800	0	0	Dokumen	182.816.340
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Dokumen	50.762.400	0	0	Dokumen	53.300.520
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12 Dokumen	13.685.000	0	0	Dokumen	14.369.250
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Dokumen	9.075.000	0	0	Dokumen	9.528.750
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Indonesia	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	1.372.789.000	0	0	Dokumen	1.441.428.450
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	412.836.100	0	0	12 bulan	433.477.905
					Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan				12 bulan	
					Waktu penyediaan jasa Pegawai Non PNS	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	71.050.000	0	0	Dokumen	74.602.500
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Dokumen	115.800.000	0	0	Dokumen	121.590.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen	225.986.100	0	0	Dokumen	237.285.405
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	595.920.000	0	0	12 bulan	625.716.000
					Waktu pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	12 bulan				12 bulan	
					Waktu pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Dokumen	41.690.000	0	0	Dokumen	43.774.500
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Dokumen	238.230.000	0	0	Dokumen	250.141.500
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Dokumen	27.370.000	0	0	Dokumen	28.738.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	87.750.000	0	0	12 bulan	92.137.500
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab Tapin	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	200.880.000	0	0	Paket	210.924.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	1,45%	2.321.920.000	0	0	4,24%	2.438.016.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	4 buah	206.570.000	0	0	4 buah	216.898.500
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Paket	98.780.000	0	0	Paket	103.719.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	40.930.000	0	0	Dokumen	42.976.500
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 Dokumen	40.930.000	0	0	Dokumen	42.976.500
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.930.000	0	0	Dokumen	27.226.500
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	4 buah	72.400.000	0	0	4 buah	76.020.000
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	4 Kali	72.400.000	0	0	Kali	76.020.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	4 buah	2.042.950.000	0	0	4 buah	2.145.097.500
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1 Dokumen	2.042.950.000	0	0	Dokumen	2.145.097.500
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	1,45%	5.038.120.000	0	0	4,24%	5.290.026.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			TAPIN	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	4 buah	214.220.000	0	0	4 buah	224.931.000
					waktu Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1 laporan				1 laporan	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	214.220.000	0	0	Dokumen	224.931.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			TAPIN	Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	3 buah	4.823.900.000	0	0	3 buah	5.065.095.000
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100 Unit	4.788.100.000	0	0	Unit	5.027.505.000
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Kab Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	35.800.000	0	0	Dokumen	37.590.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	1,45%	4.797.545.000	0	0	4,24%	5.037.422.250
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	4 buah	4.797.545.000	0	0	4 buah	5.037.422.250
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	205 Unit	4.740.595.000	0	0	Unit	4.977.624.750
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1 Laporan	56.950.000	0	0	Laporan	59.797.500
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik	36,89%	10.377.687.300	0	0	65%	10.896.571.665
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			TAPIN	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola	100%				100%	
					Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) publik yang terpelihara dengan baik	2 kawasan	10.377.687.300	0	0	2 kawasan	10.896.571.665
					Jumlah pembangunan/ rehabilitasi drainase kawasan perumahan dan permukiman	1 kawasan				1 kawasan	
					Waktu pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)	12 bulan				12 bulan	
					Terpenuhinya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	1 tahun				1 tahun	
					waktu Pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum (PJU)	12 bulan				12 bulan	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			Kab. Tapin	Terlaksananya Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Paket	101.860.000	0	0	Paket	106.953.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			Kab. Tapin	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1 Dokumen	10.224.897.300	0	0	Dokumen	10.736.142.165
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			Kab. Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Dokumen	50.930.000	0	0	Dokumen	53.476.500
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100%	230.615.000	0	0	100%	242.145.750
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	12 bulan	230.615.000	0	0	12 bulan	242.145.750
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Penyuluhan hukum pertanahan	2 Jumlah penyuluhan hukum pertanahan				2 Jumlah penyuluhan hukum pertanahan	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	230.615.000	0	0	Dokumen	242.145.750
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100%	12.411.958.820	0	0	%	13.032.556.761
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Luasan Tanah yang di ganti rugi	10 Ha	12.411.958.820	0	0	10 Ha	13.032.556.761
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	12.411.958.820	0	0	Paket	13.032.556.761
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan	18,18%	6.644.250.000	0	0	27,27%	6.976.462.500
					Jumlah sistem informasi pertanahan yang dibuat	1 buah	6.644.250.000	0	0	1 buah	6.976.462.500
					Jumlah dokumen survey dan pendataan pertanahan	1 dokumen				1 dokumen	
					Jumlah sosialisasi sistem pendaftaran tanah	2 Kali				2 Kali	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1 Dokumen	6.470.535.000	0	0	Dokumen	6.794.061.750
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	173.715.000	0	0	Dokumen	182.400.750
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran						10.559.886.567	0	0		11.087.880.895
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.215.643.467	0	0	100%	7.576.425.640
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Terselekskannya cacatan laporan capaian dan ikhtisar kinerja SKPD (dok)	13 dok	8.875.000	0	0	13 dok	9.318.750
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rantau	jumlah penyusunan lapaon capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	13 dok	8.875.000	0	0	13 dok	9.318.750
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja SKPD (dok)	2 dok	5.821.555.722	0	0	2 dok	6.112.633.508
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.812.885.522	0	0	12 bulan	6.103.529.798
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rantau	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dok	3.300.000	0	0	4 dok	3.465.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Rantau	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dok	5.370.200	0	0	4 dok	5.638.710
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bhn)	12 bulan	769.637.300	0	0	12 bulan	808.119.165

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Terpenuhinya alat tulis kantor yang cukup(bln)	12 bulan					12 bulan	
					Tersedia nya barang cetakan dan pengadaan(bln)	12 bulan					12 bulan	
					Tersedia nya biaya pembelian alat-alat listrik dan elektronik (bln)	12 bulan					12 bulan	
					terpenuhinya makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat (bln)	12 bulan					12 bulan	
					Terlaksananya koordinasi dalam Daerah dan Luar Daerah (bln)	12 bulan					12 bulan	
					Penyelenggaraan Tapin Expo	1 kali					1" 2166;Dinas Perpustakaan dan Kearsifan;2;17;1;X kali	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rantau	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan		23.289.000	0	0	12 bulan	24.453.450
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rantau	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan		31.452.000	0	0	12 bulan	33.024.600
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rantau	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12		106.648.300	0	0	12	111.980.715
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			Rantau	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12 bulan		16.315.000	0	0	12 bulan	17.130.750
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Rantau	waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan		13.750.000	0	0	12 bulan	14.437.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rantau	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan		578.183.000	0	0	12 bulan	607.092.150
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Note book, Printer , AC dan PCT unit(%)	6 unit		234.258.145	0	0	6 unit	245.971.052
					Terpenuhinya peralatan korsik satpol pp (set)	8 set					8 set	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Rantau	Waktu Pengadaan Mebel	12 bulan		56.176.600	0	0	12 bulan	58.985.430
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit/set		64.476.600	0	0	6 unit/set	67.700.430
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Rantau	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	6 unit/set		107.365.545	0	0	6 unit/set	112.733.822
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit/set		6.239.400	0	0	2 unit/set	6.551.370
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Tersedianya jasa kebersihan Kantor dan belanja bahan pembersih(bln)	12 bulan		79.659.000	0	0	12 bulan	83.641.950
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rantau	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan		13.640.000	0	0	12 bulan	14.322.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rantau	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan		23.289.000	0	0	12 bulan	24.453.450
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rantau	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan		13.930.000	0	0	12 bulan	14.626.500
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rantau	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan		28.800.000	0	0	12 bulan	30.240.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terpenuhinya semua suku cadang, BBM/Gas/Pelumas untuk semua mobil dinas kasat. (bln)	12 bulan		301.658.300	0	0	12 bulan	316.741.215
					Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor, sebagai penunjang di dalam pelaksanaan tugas/kegiatan sehari-hari (bln)	12 bulan					12 bulan	
					Terpenuhinya semua suku cadang, BBM/Gas/Pelumas untuk semua Mobil Operasional dan Kendaraan Dinas Roda 2 (bln)	12					12	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan		273.438.300	0	0	12 bulan	287.110.215
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan		13.420.000	0	0	12 bulan	14.091.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan		14.800.000	0	0	12 bulan	15.540.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatnya investasi daerah		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%		2.884.683.000	0	0	100%	3.028.917.150
					Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	100%					100%	
					- Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%					100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					- Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih	100%					100%	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	waktu pelaksanaan kegiatan pengamanan (org)	120 orang	2.750.383.000	0	0		120 orang	2.887.902.150
					waktu pelaksanaan pengawalan unsur Muspida serta aset-aset yang ada di Kabupaten Tapin (bln)	12 bulan					12 bulan	
					jumlah tenaga dukung yang melaksanakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan (bln)	12 bulan					12 bulan	
					jumlah anggota untuk pengamanan unsur Muspida serta aset-aset yang ada di Kabupaten Tapin (bln)	12 bulan					12 bulan	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Kabupaten Tapin	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150 kali	2.090.799.000	0	0		150 kali	2.195.338.950
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Kabupaten tapin	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50 kali	22.500.000	0	0		50 kali	23.625.000
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kabupaten Tapin	Jumlah Anggota Satlinmas yang dibina	500 orang	22.000.000	0	0		500 orang	23.100.000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Kabupaten Tapin	Jumlah peningkatan Pengembangan Kapasitas	30 kali	590.884.000	0	0		35 kali	620.428.200
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kabupaten Tapin	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain	24 kali	9.200.000	0	0		24 kali	9.660.000
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras Ttantibum	10 unit/set	15.000.000	0	0		10 unit/set	15.750.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			TAPIN	Jumlah Perda yang disosialisasikan (buah)	8 buah	134.300.000	0	0		8 buah	141.015.000
					waktu Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda & Perkada	12 bulan					12 bulan	
					waktu peningkatan Kinerja PNS dan terbentuknya Tim Penegakan Disiplin PNS (bln)	12 bulan					12 bulan	
					waktu pelaksanaan peningkatan hubungan baik dan berkelanjutan dengan Aparat Hukum dan Instansi terkait dalam upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Perda & Perkada (bln)	12 bulan					12 bulan	
					waktu pelaksanaan Pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan pelanggar Perda & Perkada (bln)	12 bulan					12 bulan	
					waktu pelaksanaan Peningkatan kerjasama dengan Aparat Hukum Intansi terkait dalam rangka Penegakan Perda & Perkada (bln)	12 bulan					12 bulan	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 kali	34.000.000	0	0		24 kali	35.700.000
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50 kali	32.650.000	0	0		50 kali	34.282.500
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			kabupaten tapin	Jumlah Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 kali	67.650.000	0	0		100 kali	71.032.500
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatnya investasi daerah		Cakupan penanggulangan Bencana Kebakaran	100%	459.560.100	0	0		100%	482.538.105
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	jumlah kegiatan lomba keterampilan pemadam kebakaran tingkat kabupaten dan provinsi (keg)	12 bulan	436.960.100	0	0		12 bulan	458.808.105

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah pelaksanaan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 kali	391.560.000	0	0	100 kali	411.138.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran di dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 kali	28.000.100	0	0	50 kali	29.400.105
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			Kabupaten Tapin	Jumlah pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	50 kali	9.000.000	0	0	50 kali	9.450.000
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah pelaksanaan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 keg	8.400.000	0	0	50 keg	8.820.000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			TAPIN	waktu pemeliharaan sarpras kebakaran (bln)	12 bulan	22.600.000	0	0	12 bulan	23.730.000
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Kabupaten Tapin	Waktu Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 bulan	22.600.000	0	0	12 bulan	23.730.000
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						5.170.659.141	0	0		5.429.192.098
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%	4.194.120.421	0	0	90%	4.403.826.442
					Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	80%				80%	
					Persentase daerah terdampak bencana yang pulih	70%				80%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%				90%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	90%				90%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	2.930.000	0	0	8 laporan	3.076.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	2.930.000	0	0	13 Dokumen	3.076.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	2.671.604.121	0	0	2 laporan	2.805.184.327
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.667.738.321	0	0	12 Bulan	2.801.125.237
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.041.000	0	0	1 Dokumen	1.093.050
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	2.824.800	0	0	4 Dokumen	2.966.040
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan	678.631.000	0	0	12 bulan	712.562.550
					Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan	12 bulan				12 bulan	
					Waktu penyediaan Makanan dan minuman	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyediaan peralatan kebersihan kantor	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Tapin Expo	1 kali				1 kali	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6.497.900	0	0	12 Bulan	6.822.795
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	36.148.500	0	0	12 Bulan	37.955.925
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	70.000.000	0	0	12 Bulan	73.500.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	33.000.000	0	0	12 Bulan	34.650.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	2.994.600	0	0	12 Bulan	3.144.330
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	5.995.000	0	0	12 Bulan	6.294.750
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	523.995.000	0	0	12 Bulan	550.194.750
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	waktu Pengadaan mobil operasional	12 bulan	158.027.700	0	0	12 bulan	165.929.085
					waktu Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan				12 bulan	
					waktu	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					waktu pembangunan garasi mobil	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pembangunan gudang logistik dan perlengkapannya	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 Buah	142.912.700	0	0		27 Buah	150.058.335
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Buah	15.115.000	0	0		3 Buah	15.870.750
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	562.662.400	0	0		12 bulan	590.795.520
					Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Ekspedisi/Pengiriman	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.362.000	0	0		12 Bulan	2.480.100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	65.600.400	0	0		12 bulan	68.880.420
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	494.700.000	0	0		12 Bulan	519.435.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	12 bulan	120.265.200	0	0		12 bulan	126.278.460
					Waktu Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pemeliharaan rutin/berkala komputer periperalnya	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	94.705.000	0	0		12 Bulan	99.440.250
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	25.560.200	0	0		12 Bulan	26.838.210
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatnya investasi daerah		Persentase Desa Tangguh Bencana	70%	976.538.720	0	0		80%	1.025.365.656
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Sosialisasi kebencanaan	4 kali	66.649.900	0	0		4 kali	69.982.395
					waktu Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan	12 bulan					12 bulan	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			Kab. Tapin	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) di Desa/Kel	4 Desa/Kel	66.649.900	0	0		4 Desa/Kel	69.982.395
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			TAPIN	Jumlah Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	1 desa	811.767.820	0	0		1 desa	852.356.211
					Jumlah Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung , Tanah Longsor dan Kekeringan)	1 dokumen					1 dokumen	
					Waktu Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	12 bulan					12 bulan	
					Jumlah Tim Reaksi Cepat	25 orang					25 orang	
					Jumlah Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	15					15	
					Jumlah Pelatihan jitu Pasna	1 tahun					1 tahun	
					Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	2 kali					2 kali	
					waktu Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (banjir, karhutla, puting beliung, tanah longsor)	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	12 bulan					12 bulan	
					waktu Apel Kesiapsiagaan Bencana	12 bulan					12 bulan	
					waktu Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	12 bulan					12 bulan	
					waktu Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	12 bulan					12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					waktu Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pelaksanaan Mitigasi Struktural	12 bulan					12 bulan	
					Jumlah Pengelolaan Bencana/posko	2 kali					2 kali	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300	0	0		1 Dokumen	315
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40 Orang	17.068.000	0	0		40 Orang	17.921.400
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Waktu Pelaksanaan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	672.710.000	0	0		12 Bulan	706.345.500
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Kab. Tapin	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Buah	50.689.520	0	0		1 Buah	53.223.996
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Kab. tapin	Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan didesa/Kel	1 Desa/Kel	40.260.000	0	0		1 Desa/Kel	42.273.000
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Waktu Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	12 Bulan	31.040.000	0	0		12 Bulan	32.592.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			TAPIN	Waktu Operasional Dapur Umum lapangan	12 bulan	98.121.000	0	0		12 bulan	103.027.050
					Waktu Pengelolaan Peralatan dan Logistik	12 bulan					12 bulan	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	98.121.000	0	0		12 Bulan	103.027.050
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik						4.118.455.681	0	0			4.324.378.465
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.150.616.681	0	0		100%	2.258.147.515
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%					100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 laporan	6.925.000	0	0		13 laporan	7.271.250
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	6.925.000	0	0		12 bulan	7.271.250
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	1.066.382.241	0	0		2 laporan	1.119.701.353
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	1.061.822.241	0	0		12 bulan	1.114.913.353
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	3.060.000	0	0		12 bulan	3.213.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	1.500.000	0	0		12 bulan	1.575.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu ketersediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan	617.992.420	0	0		12 bulan	648.892.041
					Waktu ketersediaan alat tulis kantor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan					12 bulan	
					Waktu ketersediaan makanan/minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12 bulan					12 bulan	
					Waktu pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	7.779.600	0	0		12 bulan	8.168.580
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	53.276.920	0	0		12 bulan	55.940.766
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	49.190.600	0	0		12 bulan	51.650.130
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12.610.000	0	0		12 bulan	13.240.500
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	13.272.300	0	0		12 bulan	13.935.915
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	4.976.000	0	0		12 bulan	5.224.800
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	476.887.000	0	0		12 bulan	500.731.350
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah pengadaan AC, Personal Komputer dan Lap Top	12 unit	129.270.700	0	0		12 unit	135.734.235

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	129.270.700	0	0	12 bulan	135.734.235
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	134.283.400	0	0	12 bulan	140.997.570
					Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan				12 bulan	
					Waktu ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan gedung kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.238.800	0	0	12 bulan	2.350.740
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	38.082.000	0	0	12 bulan	39.986.100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	93.962.600	0	0	12 bulan	98.660.730
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	195.762.920	0	0	12 bulan	205.551.066
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan				12 bulan	
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	19.525.420	0	0	12 bulan	20.501.691
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	11.210.000	0	0	12 bulan	11.770.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	162.755.500	0	0	12 bulan	170.893.275
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	2.272.000	0	0	12 bulan	2.385.600
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80%	185.389.100	0	0	80%	194.658.555
					Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu	100%				100%	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			TAPIN	Jumlah peserta rakor Forum Pembaurnan Kebangsaan (FPK)	96 org/kali	185.389.100	0	0	96 org/kali	194.658.555
					Jumlah peserta rakor PPWK	60 org/kali				60 org/kali	
					Jumlah peserta Dialog/Diskusi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	140 org/keg				140 org/keg	
					Jumlah peserta Sosialisasi Pembaurnan Kebangsaan	100 org/keg				100 org/keg	
					Jumlah peserta Sarasehan/Diskusi/Dialog Interaktif ttg Peningkatan Kesadaran Bela Negara	120 org/keg				120 org/keg	
					waktu Revolusi Mental	12 bulan				12 bulan	
					waktu Gelar adat budaya Antar Suku dalam rangka karnaval Hari Jadi Kabupaten Tapin	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional Yang Dilaksanakan (Kali)	12 Kali				12 Kali	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			TAPIN	waktu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 bulan	122.699.100	0	0	12 bulan	128.834.055
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Tapin	waktu Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 bulan	62.690.000	0	0	12 bulan	65.824.500
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%	1.246.873.900	0	0	100%	1.309.217.595

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan			TAPIN	Jumlah peserta Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Politik	100 org/keg	1.246.873.900	0	0	100 org/keg	1.309.217.595
					Jumlah Partai Politik yang diverifikasi	10 Parpol				10 Parpol	
					Waktu pemantauan perkembangan politik di daerah	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah peserta Sosialisasi Pemilu Tahun 2020	200 org/keg				200 org/keg	
					Jumlah spanduk dan balihho Sosialisasi Pemilu 2020	11 buah				11 buah	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit			1.TAPIN	waktu Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	12 bulan	1.092.770.000	0	0	12 bulan	1.147.408.500
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			TAPIN	waktu Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Dae	12 bulan	85.499.000	0	0	12 bulan	89.773.950
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1. TAPIN	waktu Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Da	12 bulan	47.999.900	0	0	12 bulan	50.399.895
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit			1. TAPIN	waktu Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau	12 bulan	20.605.000	0	0	12 bulan	21.635.250
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatnya pembinaan terhadap Ormas		Persentase Ormas yang terdata	85%	107.449.300	0	0	90%	112.821.765
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			INDONESIA;KALIMAN TAN SELATAN;TAPIN	Jumlah peserta Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas	70 org/keg	107.449.300	0	0	70 org/keg	112.821.765
					waktu Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kab. Tapin	12 bulan				12 bulan	
					Waktu pengelolaan Sistem Informasi Informasi Ormas	12 bulan				12 bulan	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Kab. Tapin	waktu Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 bulan	73.149.400	0	0	12 bulan	76.806.870
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Kab. Tapin	waktu Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 bulan	34.299.900	0	0	12 bulan	36.014.895
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		- Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	80%	183.029.400	0	0	80%	192.180.870
					- Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelas Narkoba (P4GN)	90%				90%	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			TAPIN	waktu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12 bulan	183.029.400	0	0	12 bulan	192.180.870

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					waktu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	12 bulan					12 bulan	
					Jumlah peserta penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	150 org/keg					150 org/keg	
					Jumlah rakor peserta Tim P4GN	56 org/kali					56 org/kali	
					Jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	50 org/keg					50 org/keg	
					Jumlah peserta Sarasehan dan Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan waktu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 org/keg					60 org/keg	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1. TAPIN	waktu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 bulan		142.299.400	0	0	12 bulan	149.414.370
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1. TAPIN	waktu Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 bulan		40.730.000	0	0	12 bulan	42.766.500
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani	80%		245.097.300	0	0	80%	257.352.165
					Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten	0 Poin					0 Poin	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			TAPIN	Waktu pengawasan dini pemerintah daerah di Kab. Tapin	12 bulan		245.097.300	0	0	12 bulan	257.352.165
					Waktu penanganan konflik sosial	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kab. Tapin	12 bulan					12 bulan	
					waktu Bimtek Intelijen	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Penyelenggaraan Fasilitas (Bulan)	12 bulan					12 bulan	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			KAB. TAPIN	waktu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 bulan		178.247.400	0	0	12 bulan	187.159.770
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kab. Tapin	waktu Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 bulan		17.999.900	0	0	12 bulan	18.899.895
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan			Kab. Tapin	waktu Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penan	12 bulan		21.325.000	0	0	12 bulan	22.391.250
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	waktu Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan		27.525.000	0	0	12 bulan	28.901.250
					Dinas Sosial			18.619.799.933	0	0		19.550.789.930
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%		5.749.149.833	0	0	100%	6.036.607.325
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%					100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan		9.440.000	0	0	12 bulan	9.912.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	9.440.000	0	0	13 Laporan	9.912.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun	12 bulan	3.099.436.733	0	0	12 bulan	3.254.408.570
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.093.496.733	0	0	12 Bulan	3.248.171.570
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.970.000	0	0	1 Laporan	3.118.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.970.000	0	0	1 Laporan	3.118.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan alat tulis kantor yang cukup (Bulan)	12 Bulan	1.890.220.400	0	0	12 Bulan	1.984.731.420
					Waktu penyediaan barang cetakan dan pengandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai tamu dan rapat	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan rapat dan koordinasi dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah partisipasi aktif dalam hari jadi Kabupaten Tapin	1 Kali				1 Kali	
					Waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10.678.100	0	0	12 Bulan	11.212.005
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	132.703.600	0	0	12 Bulan	139.338.780
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	83.936.400	0	0	12 Bulan	88.133.220
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	12.838.600	0	0	12 Bulan	13.480.530
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Tapin	Jumlah Penyediaan Bahan/Material untuk Tapin Expo	1 Kali	1.823.700	0	0	1 Kali	1.914.885
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Tapin	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	35.365.000	0	0	12 Bulan	37.133.250
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.612.875.000	0	0	12 Bulan	1.693.518.750
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	348.202.600	0	0	12 Bulan	365.612.730
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	101.016.000	0	0	12 Bulan	106.066.800
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	247.186.600	0	0	12 Bulan	259.545.930
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pelayanan Surat Menyurat (Bulan)	12 Bulan	263.474.800	0	0	12 Bulan	276.648.540
					Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan jasa administrasian keuangan dan jasa pengolahan data perencanaan dan pelaporan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah partisipasi aktif dalam hari jadi Kabupaten Tapin	1 Kali				1 Kali	
					Waktu penyediaan jasa kebersihan Kantor dan belanja bahan pembersih	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	580.000	0	0	12 Bulan	609.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	85.200.000	0	0	12 Bulan	89.460.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	177.694.800	0	0	12 Bulan	186.579.540
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	138.375.300	0	0	12 Bulan	145.294.065
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	118.652.500	0	0	12 Bulan	124.585.125
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 unit	14.200.000	0	0	20 unit	14.910.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	5.522.800	0	0	1 Unit	5.798.940
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS	56,17%	3.075.491.800	0	0	56,18%	3.229.266.390
					Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%				100%	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS	137 KT	3.075.491.800	0	0	137 KT	3.229.266.390
					Jumlah pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna	5 Kali				5 Kali	
					Jumlah TKSK yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS dan memperoleh insentif	144 org/bln				144 org/bln	
					Jumlah PSM yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS	33 orang				33 orang	
					Jumlah Masyarakat bermasalah sosial psikologis yang dilayani dengan baik melalui LK3	15 orang				15 orang	
					Jumlah Panti Asuhan yang memberikan pelayanan dengan baik	7 PA				7 PA	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan	60 Orang	18.790.000	0	0	60 Orang	19.729.500
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan	12 Orang	12.150.000	0	0	12 Orang	12.757.500
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	3.038.681.800	0	0	7 Kegiatan	3.190.615.890
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			Kab. Tapin	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan	11 Orang	5.870.000	0	0	11 Orang	6.163.500
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan			Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	35,12%	3.525.327.700	0	0	35,14%	3.701.594.085
					Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	3,06%				3,08%	
					Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	10,12%				10,14%	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			TAPIN	Jumlah Anak Terlantar yang magang setelah mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Bakat	6 Orang	3.499.087.700	0	0	6 Orang	3.674.042.085
					Jumlah laporan Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Jaminan Sosial	1 Laporan				1 Laporan	
					Jumlah Laporan Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Dana Asistensi	1 Laporan				1 Laporan	
					Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan bimbingan dalam pengembangan bakat dan keterampilan	15 orang				15 orang	
					Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Bimbingan dan Keterampilan Melalui LK3	15 orang				15 orang	
					Jumlah Penyandang Disabilitas yang terampil dengan mengikuti praktek Belajar kerja	5 Orang				5 Orang	
					Jumlah Penyandang disabilitas berat yang mendapatkan Pelayanan Sosial dengan baik	10 orang				10 orang	
					Jumlah PMKS yang dilayani dengan baik atau memerlukan program sosial daerah dan pusat melalui SLRT	300 Orang				300 Orang	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan			Kab. Tapin	Jumlah Penyediaan Permakanan	905 Paket	2.345.945.000	0	0	905 Paket	2.463.242.250
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang			Kab. Tapin	Jumlah Penyediaan Sandang	60 Paket	13.500.000	0	0	60 Paket	14.175.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu			Kab. Tapin	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	20 Buah	24.968.000	0	0	20 Buah	26.216.400
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Kab. Tapin	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	20 Orang	15.000.000	0	0	20 Orang	15.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Kab. Tapin	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan Bimbingan Sosial	5 Keluarga	7.000.000	0	0	5 Keluarga	7.350.000
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			Kab. Tapin	Jumlah PMKS yang mendapatkan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	35 Orang	5.000.000	0	0	35 Orang	5.250.000
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kab. Tapin	Jumlah PMKS yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	7.000.000	0	0	20 Orang	7.350.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			Kab. Tapin	Jumlah PMKS yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	500 Orang	997.947.400	0	0	500 Orang	1.047.844.770
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan			Kab. Tapin	Jumlah PMKS yang mendapatkan Layanan Kedaruratan	20 Orang	7.000.000	0	0	20 Orang	7.350.000
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Kab. Tapin	Jumlah PMKS yang mendapatkan pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20 Orang	7.000.000	0	0	20 Orang	7.350.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan			Kab. Tapin	Jumlah PMKS yang mendapatkan Layanan Rujukan	500 Orang	7.000.000	0	0	500 Orang	7.350.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			TAPIN	Jumlah anak lanjut usia yang dilayani dengan baik	5 Orang	26.240.000	0	0	5 Orang	27.552.000
					Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang dilayani dengan baik	5 Orang				5 Orang	
					Jumlah Penyandang Kronis dan Psikitok yang dilayani dengan baik	5 orang				5 orang	
					Jumlah Penyandang Gangguan Jiwa (Mental) Sensorik dan Intelektual yang dilayani dengan baik	5 orang				5 orang	
					Jumlah Perempuan Rawan Sosial ekonomi (PRSE) yang mendapatkan Pelayanan Sosial dengan baik	14 orang				14 orang	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Kab. Tapin	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20 Orang	7.240.000	0	0	20 Orang	7.602.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	55,12%	1.062.383.200	0	0	55,14%	1.115.502.360
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			TAPIN	Jumlah anak lanjut usia yang dilayani dengan baik	5 Orang	50.220.000	0	0	5 Orang	52.731.000
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			Kab. Tapin	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang mendapatkan Penjangkauan	50 Orang	47.990.000	0	0	50 Orang	50.389.500
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar			Kab. Tapin	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang mendapatkan Rujukan	50 Orang	2.230.000	0	0	50 Orang	2.341.500
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah laporan kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 bulan	1.012.163.200	0	0	12 bulan	1.062.771.360
					Jumlah laporan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Laporan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah laporan verifikasi dan validasi Data PMKS	1 laporan				1 laporan	
					Jumlah laporan verifikasi dan validasi Data PBI	1 laporan				1 laporan	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Waktu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	464.145.000	0	0	12 Bulan	487.352.250
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	159.470.200	0	0	12 Bulan	167.443.710
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			kab. tapin	Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	350 Orang	388.548.000	0	0	350 Orang	407.975.400
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya keamanan daerah			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan	2,29%	5.126.134.000	0	0	2,30%	5.382.440.700
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	12 Bulan	4.915.954.000	0	0	12 Bulan	5.161.751.700
					Jumlah rumah tidak layak huni yang diidentifikasi dan diprioritaskan untuk direhab	25 Rumah				25 Rumah	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan			Kab. Tapin	Jumlah Penyediaan Makanan	500 Paket	195.064.000	0	0	500 Paket	204.817.200
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Kab. Tapin	Jumlah Rumah masyarakat miskin (RUTLAHU) yang direhab	120 Unit	4.502.840.000	0	0	120 Unit	4.727.982.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	12 Bulan	210.180.000	0	0	12 Bulan	220.689.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			Kab.Tapin	Jumlah tenaga penanganan Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi	80 Orang	22.010.000	0	0	80 Orang	23.110.500
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			Kab.Tapin	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi	50 Orang	188.170.000	0	0	50 Orang	197.578.500
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan pelayanan pada lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan		Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS	56,17%	81.313.400	0	0	56,18%	85.379.070
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu Pemeliharaan TMP Ziarah Pendiri	12 Bulan	81.313.400	0	0	12 Bulan	85.379.070
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dirawat	1 Buah	81.313.400	0	0	1 Buah	85.379.070
	Dinas Tenaga Kerja						5.003.339.911	0	0		5.253.506.907
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	3.951.285.107	0	0	100%	4.148.849.362
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12.198.000	0	0	12 Bulan	12.807.900
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	12.198.000	0	0	10 Dokumen	12.807.900
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Bulan	2.699.155.557	0	0	3 Bulan	2.834.113.335
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.696.355.557	0	0	12 Bulan	2.831.173.335
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2.800.000	0	0	1 Dokumen	2.940.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	685.921.800	0	0	12 Bulan	720.217.890
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	215.314.800	0	0	12 Bulan	226.080.540
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	8.700.000	0	0	12 Bulan	9.135.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	461.907.000	0	0	12 Bulan	485.002.350
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	9 Unit	186.376.950	0	0	9 Unit	195.695.798
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	186.376.950	0	0	12 Bulan	195.695.798
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	12 Bulan	113.332.000	0	0	12 Bulan	118.998.600
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	70.682.000	0	0	12 Bulan	74.216.100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	42.650.000	0	0	12 Bulan	44.782.500
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin sarana daan prasarana BLK Tapin	12 Bulan	254.300.800	0	0	12 Bulan	267.015.840
					Jumlah gedung workshop/ bengkel yang direhab	0 Gedung				0 Gedung	
					Waktu Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan				12 Bulan	
					waktu pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					waktu pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Rehab Gedung	1 Unit				1 Unit	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	33.842.800	0	0	12 bulan	35.534.940
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	13.350.000	0	0	12 Bulan	14.017.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	3 Gedung	207.108.000	0	0	2 Gedung	217.463.400
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07											
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja		Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	75%	505.296.704	0	0	75%	530.561.539

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			TAPIN	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan	16 Orang	478.911.704	0	0	16 Orang	502.857.289
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	288 Orang	478.911.704	0	0	336 Orang	502.857.289
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			TAPIN	Jumlah orang yang mendapatkan informasi pasar kerja	50 Orang	26.385.000	0	0	50 Orang	27.704.250
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Kab. Tapin	Jumlah Lembaga kerja swasta yang terbina	25 Lembaga	26.385.000	0	0	25 Lembaga	27.704.250
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	40%	330.876.200	0	0	40%	347.420.010
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar di bursa kerja online	20 Orang	192.330.000	0	0	20 Orang	201.946.500
					Jumlah Masyarakat/ pencari kerja yang diberikan fasilitas sistem pendanaan	22 Orang				22 Orang	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Siap Pakai	75 Orang				75 Orang	
					Jumlah Wirausaha baru yang mendapat pelatihan	10 Orang				10 Orang	
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			Kab. Tapin	Jumlah orang yang mendapatkan informasi Pelayanan Kerja	30 Orang	15.491.500	0	0	30 Orang	16.266.075
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			Kab. Tapin	Jumlah Orang Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	105 Orang	17.877.500	0	0	105 Orang	18.771.375
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja			Kab. Tapin	Waktu Perluasan Kesempatan Kerja	12 bulan	158.961.000	0	0	12 bulan	166.909.050
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			TAPIN	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar di bursa kerja online	2500 Orang	122.580.900	0	0	2500 Orang	128.709.945
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Kab. Tapin	Jumlah Orang Yang mendapatkan Informasi Pasar Kerja Online	1300 Orang	122.580.900	0	0	1300 Orang	128.709.945
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta sosialisasi PMI (Pekerja Migran)	25 Orang	15.965.300	0	0	25 Orang	16.763.565
					Jumlah Tim Satgas	23 Orang				23 Orang	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang mendapat kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	45 Orang	6.388.500	0	0	45 Orang	6.707.925
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang mendapat Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migra Indonesia (CPMI)	30 Orang	9.576.800	0	0	30 Orang	10.055.640
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan		Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	215.881.900	0	0	50%	226.675.995
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	100 Buah	34.839.700	0	0	100 Buah	36.581.685
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	30 Orang				30 Orang	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen PP yang divalidasi	50 Dokumen	11.661.200	0	0	50 Dokumen	12.244.260
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	15 Orang	23.178.500	0	0	15 Orang	24.337.425
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Kasus yang terselesaikan	10 Kasus	181.042.200	0	0	10 Kasus	190.094.310
					Jumlah Tenaga Kerja yang memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	0 Orang				0 Orang	
					Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi jamsostek sektor formal dan informal	30 Orang				30 Orang	
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan Bipartit dan Tripartit	30 Orang				30 Orang	
					Jumlah Tim Dewan Pengupahan	14 Orang				14 Orang	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Masyarakat Kabupaten Tapin	Jumlah Orang Yang diberi Sosialisasi Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	500 Orang	83.491.400	0	0	500 Orang	87.665.970

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			KABUPATEN TAPIN	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Kabupaten/Kota	10 Kasus	97.550.800	0	0	0	10 Kasus	102.428.340
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						5.559.384.799	0	0			5.837.354.039
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.968.605.399	0	0		100%	4.167.035.669
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%					100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD	13 bh	15.000.000	0	0		13 bh	15.750.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rantau	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD	4 bh	15.000.000	0	0		bh	15.750.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan semestaran dan akhir tahun	2 bh	2.138.978.949	0	0		2 bh	2.245.927.896
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rantau	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.128.970.949	0	0		bulan	2.235.419.496
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rantau	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	1 bh	5.000.200	0	0		bh	5.250.210
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Rantau	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	1 bh	5.007.800	0	0		bh	5.258.190
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	1.301.798.700	0	0		12 bulan	1.366.888.635
					Waktu ketersediaan barang cetakan dan Pengandaan	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu ketersediaan Konsumsi Harian Pegawai Rapat dan Tamu	11 bulan					11 bulan	
					Waktu Ketersediaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Kebersihan keamanan kantor dan Bahan Pembersih	12 bulan					12 bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali					1 Kali	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rantau	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	8.607.400	0	0		Bulan	9.037.770
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rantau	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	55.237.700	0	0		Bulan	57.999.585
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rantau	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	72.510.800	0	0		Bulan	76.136.340
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Rantau	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	11.384.800	0	0		Bulan	11.954.040
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Rantau	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	2.238.000	0	0		Bulan	2.349.900
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Rantau	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	2.750.000	0	0		Bulan	2.887.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rantau	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.149.070.000	0	0		Bulan	1.206.523.500
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 buah	161.705.250	0	0		24 buah	169.790.513
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rantau	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Buah	95.614.000	0	0		Buah	100.394.700
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rantau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	34 Buah	66.091.250	0	0		Buah	69.395.813
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Benda Pos dan Jasa Pengiriman	12 bulan	209.230.800	0	0		12 bulan	219.692.340
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rantau	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.160.000	0	0		Bulan	1.218.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rantau	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	69.934.000	0	0		Bulan	73.430.700
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rantau	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	138.136.800	0	0		Bulan	145.043.640
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	12 bulan	141.891.700	0	0		12 bulan	148.986.285
					Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	12 bulan					12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Rantau	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	97.103.000	0	0		Bulan	101.958.150
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			KABUPATEN TAPIN	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	5.000.000	0	0		Bulan	5.250.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rantau	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	39.788.700	0	0		12 bulan	41.778.135
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan		Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	2,40%	223.544.900	0	0		2,50%	234.722.145
					Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah	56%					57%	
					Persentase pelaku usaha rumahan perempuan	20%					22%	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah SKPD yang mengikuti kegiatan dan asistensi PPRG dan ARG	45 SKPD	71.699.300	0	0		45 SKPD	75.284.265
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	12 bulan	19.989.700	0	0		bulan	20.989.185
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			Kabupaten Tapin	Jumlah SKPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	45 skpd	51.709.600	0	0		skpd	54.295.080
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Memahami (KKG) di Bidang Politik dan Dunia Usaha	109 Orang	30.226.900	0	0		109 Orang	31.738.245
					Jumlah Peserta yg mengikuti Pelatihan Keterampilan dibidang Usaha Rumahan Perempuan	109 Orang					109 Orang	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	148 orang	30.226.900	0	0		orang	31.738.245
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah pemetaan dan pengembangan usaha rumahan perempuan	12 kecamatan	121.618.700	0	0		12 kecamatan	127.699.635
					Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi / Gerakan / Kelompok Perempuan	72 Orang					72 Orang	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Pameran Hasil Karya Perempuan	12 Kecamatan					12 Kecamatan	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	174 orang	35.259.000	0	0		orang	37.021.950
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	172 orang	24.375.500	0	0		orang	25.594.275
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Pelaksanaan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kali	61.984.200	0	0		kali	65.083.410
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	90%	153.779.300	0	0		90%	161.468.265
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pendampingan dan Advokasi Tindakan Hukum Akibat Tindak Kekerasan	8 Kasus	27.278.800	0	0		8 Kasus	28.642.740
					Jumlah PUSPA yang terbentuk (bh) dan Jumlah Partisipasi PUSPA	1 Buah					1 Buah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 kali	27.278.800	0	0	kali	28.642.740
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Kasus yang ditangani Pelayanan Penanganan Tindak kekerasan	12 Kasus	104.155.700	0	0	12 Kasus	109.363.485
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bulan	86.180.000	0	0	bulan	90.489.000
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bulan	17.975.700	0	0	bulan	18.874.485
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta yang Memahami Sosialisasi PTT Perlindungan dan Anak Berbasis Masyarakat di kecamatan	100 Orang	22.344.800	0	0	100 Orang	23.462.040
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta yg mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	22.344.800	0	0	orang	23.462.040
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Kualitas Keluarga		Persentase perkawinan usia anak	2,20%	499.259.300	0	0	2,10%	524.222.265
					Persentase keluarga pelaku usaha	0,91%				0,96%	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah peserta yang mengikuti gerakan pencegahan perkawinan usia anak dan Penatalaksanaan Puspa	350 orang	376.034.400	0	0	350 orang	394.836.120
					Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Kartini	50 kelompok				50 kelompok	
					Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Ibu	50 kelompok				50 kelompok	
					waktu Pembentukan dan Pelaksanaan PUSPA	12 bulan				12 bulan	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	64.045.300	0	0	orang	67.247.565
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bulan	137.793.900	0	0	bulan	144.683.595
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kegiatan	174.195.200	0	0	kegiatan	182.904.960
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu Peningkatan Kualitas Keluarga	12 bulan	123.224.900	0	0	12 bulan	129.386.145
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah SKPD yang mendapatkan Advokasi kebijakan dan pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34 SKPD	6.257.000	0	0	SKPD	6.569.850
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta yg mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 orang	116.967.900	0	0	orang	122.816.295
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput	90%	135.435.700	0	0	90%	142.207.485
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kekerasan	1 Kali	135.435.700	0	0	1 Kali	142.207.485

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Jumlah Dokumen (Buku) Data Gender dan Anak (dokumen (b)	1 dokumen				1 dokumen	
					Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Elektronik	40 Orang				40 Orang	
					Jumlah peserta yang memahami Forum Data Gender dan Anak	12 bulan				12 bulan	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bulan	67.966.000	0	0	bulan	71.364.300
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah SKPD yang memanfaatkan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	35 skpd	67.469.700	0	0	skpd	70.843.185
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan	8,30%	486.080.100	0	0	8,30%	510.384.105
					Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	1,69%				1,69%	
					Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan	7,69%				7,69%	
					Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA	50%				50%	
					Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan	53,84%				61,53%	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Kecamatan yang di Asistensi Kecamatan Layak Anak	4 kecamatan	65.812.200	0	0	4 kecamatan	69.102.810
					Jumlah Puskesmas yang di Advokasi dan Edukasi PRA	13 puskesmas				13 puskesmas	
					Jumlah Peserta Yang Memahami Pelatihan Kha Tenaga Pendidik Dan Advokasi Sekolah Ramah Anak (SRA)	54 orang				54 orang	
					Jumlah Peserta yang Memahami Sosialisasi Forum Pendidikan Pengasuhan Budaya dan Sekolah Ramah Anak	54 Orang				54 Orang	
					Jumlah Peserta Yang Memahami Pelatihan Ruang Bermain Ramah Anak	21 Orang				21 Orang	
					Jumlah Forum Anak Kecamatan Yang dibina	12 Kecamatan				12 Kecamatan	
					Jumlah Anak yang Berpartisipasi dalam Jambore Form Anak dan Lomba Inovasi & Kreativitas	15 anak				15 anak	
					Jumlah SKPD sebagai Anggota Gugus Tugas KLA	30 SKPD				30 SKPD	
					Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan gebyar ramadhan	145 orang				145 orang	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah lembaga dan SKPD yang mendapatkan Advokasi Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	73 Lembaga	59.892.900	0	0	Lembaga	62.887.545
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kali	5.919.300	0	0	kali	6.215.265
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	72 Orang	420.267.900	0	0	72 Orang	441.281.295
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kali	34.574.800	0	0	kali	36.303.540
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 kali	224.044.200	0	0	kali	235.246.410
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	161.648.900	0	0	bulan	169.731.345
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	90%	92.680.100	0	0	90%	97.314.105

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	waktu Kampanye Gerakan Nasional Anti Kekerasan (GNAKSA)	12 bulan	19.178.000	0	0	12 bulan	20.136.900
					waktu Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	12 bulan				12 bulan	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kali	19.178.000	0	0	kali	20.136.900
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Rujukan Akibat Tindak Kekerasan	8 Kasus	40.517.000	0	0	8 Kasus	42.542.850
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	27.549.000	0	0	bulan	28.926.450
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bulan	12.968.000	0	0	bulan	13.616.400
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta Yang Memahami Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Anak	50 Orang	32.985.100	0	0	50 Orang	34.634.355
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Peserta	21.863.100	0	0	Peserta	22.956.255
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	jumlah peserta satgas	165 Peserta	11.122.000	0	0	Peserta	11.678.100
	Dinas Ketahanan Pangan						5.757.010.540	0	0		6.044.861.067
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100% %	3.275.215.640	0	0	100% %	3.438.976.422
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100% %				100% %	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100% %				100% %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	24.200.100	0	0	12 bulan	25.410.105
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab.Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	24.200.100	0	0	12 Bulan	25.410.105
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / Akhir Tahun	12 bulan	2.002.121.340	0	0	12 bulan	2.102.227.407
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.962.821.340	0	0	12 Bulan	2.060.962.407
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			kab.tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	39.300.000	0	0	12 Bulan	41.265.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Peralatan dan Komponen Listrik Untuk Kantor	12 Bulan	995.479.800	0	0	12 Bulan	1.045.253.790
					Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Di sediakan	12 Bulan				12 Bulan	
					Pengadaan Komputer Unit Jaringan	8 Laptop dan Printer				8 Laptop dan Printer	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	5 Orang				5 Orang	
					Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengandaan yang Di sediakan	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Pameran Pembangunan	1 Pameran				1 Pameran	
					Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan				12 Bulan	
					Rapat-Rapat Konsultasi/Koordinasi	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	9.999.400	0	0	12 Bulan	10.499.370
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	159.169.800	0	0	12 Bulan	167.128.290
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	97.259.500	0	0	12 Bulan	102.122.475

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	15.502.100	0	0	12 Bulan	16.277.205
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kab Tapin	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	1 pameran	3.556.000	0	0	1 pameran	3.733.800
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Tapin	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	11.680.000	0	0	12 Bulan	12.264.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	698.313.000	0	0	12 Bulan	733.228.650
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	129.470.000	0	0	12 Bulan	135.943.500
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	55.470.000	0	0	12 Bulan	58.243.500
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	74.000.000	0	0	12 Bulan	77.700.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Waktu Kendaraan Dinas/Operasional Yang Di Pelihara Rutin/Berkala	12 Bulan	123.944.400	0	0	12 Bulan	130.141.620
					Jumlah Waktu Peralatan Gedung Kantor Yang Di Pelihara Rutin/Berkala	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Waktu Perengkapan Gedung Kantor Yang Di Pelihara Rutin/Berkala	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	102.194.800	0	0	12 Bulan	107.304.540
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	13.200.000	0	0	12 Bulan	13.860.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	8.549.600	0	0	12 Bulan	8.977.080
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat		Ketersediaan Pangan Utama	15248327 kg/kapita	2.315.129.900	0	0	15553294 kg/kapita	2.430.886.395
					Persentase pangan yang aman dikonsumsi	100%				100%	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan			TAPIN	Data Analisis Ketersediaan (BNBM, PPH, HBKN dan Analisis)	1 Laporan	438.267.700	0	0	1 Laporan	460.181.085
					Jumlah Kelompok yg Dibina untuk pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	2 kali Lomba				2 kali Lomba	
					Jumlah Dokumen Data dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	1 Laporan				1 Laporan	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			Rantau	Terlaksananya Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	28.900.000	0	0	1 Laporan	30.345.000
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Rantau	Terlaksananya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 x Lomba	338.197.700	0	0	2 x Lomba	355.107.585
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			Rantau	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	42.600.000	0	0	1 Laporan	44.730.000
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			Rantau	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Laporan	8.170.000	0	0	1 Laporan	8.578.500
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			Rantau	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1 Laporan	20.400.000	0	0	1 Laporan	21.420.000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	10 Ton	1.217.537.600	0	0	10 Ton	1.278.414.480
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	1.217.537.600	0	0	10 Ton	1.278.414.480
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			TAPIN	Jumlah Data dan Analisis PPH Konsumsi dan PPM	1 Laporan	659.324.600	0	0	1 Laporan	692.290.830
					Jumlah KWT yg di bina untuk pengembangan pangan B2SA	7 KWT				7 KWT	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			Rantau	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1 Laporan	298.213.300	0	0	1 Laporan	313.123.965
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7 KWT	361.111.300	0	0	7 KWT	379.166.865

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Ketersediaan pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup		Ketersediaan Pangan Utama	15248327 kg/kapita	81.050.000	0	0	15553294 kg/kapita	85.102.500
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			TAPIN	Terantisipasinya Masalah Rawan Pangan Melalui Implementasi SKPG	1 Laporan	57.300.000	0	0	1 Laporan	60.165.000
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			Rantau	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Laporan	57.300.000	0	0	1 Laporan	60.165.000
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Terantisipasinya Masalah Rawan Pangan Melalui Implementasi SKPG	1 Laporan	23.750.000	0	0	1 Laporan	24.937.500
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			Rantau	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	23.750.000	0	0	1 Laporan	24.937.500
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Ketersediaan pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	100%	85.615.000	0	0	100%	89.895.750
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Sampel Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	3 Sampel	85.615.000	0	0	3 Sampel	89.895.750
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			-	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sampel	85.615.000	0	0	3 Sampel	89.895.750
Dinas Lingkungan Hidup							21.200.872.667	0	0	22.260.916.300	
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100% %	7.540.051.239	0	0	100% %	7.917.053.801
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100% %				100% %	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100% %				100% %	
					Status Mutu Air	Cemar Sedang status				Cemar Sedang status	
					Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80%				80%	
					Persentase Parameter Kerusakan Tanah yang diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	60%				60%	
					Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	80%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat (laporan)	14 Laporan	31.135.500	0	0	14 Laporan	32.692.275
					Jumlah Jasa Non PNS yang disediakan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)	3 Laporan	3.965.000	0	0	3 Laporan	4.163.250
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			TAPIN	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3 Laporan	26.235.400	0	0	3 Laporan	27.547.170
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	8 Laporan	935.100	0	0	8 Laporan	981.855
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Laporan)	2 Laporan	4.576.987.839	0	0	2 Laporan	4.805.837.231
					Jumlah Jasa Non PNS yang disediakan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12 Bulan	4.532.202.939	0	0	12 Bulan	4.758.813.086
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			TAPIN	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Bulan)	12 Bulan	39.785.100	0	0	12 Bulan	41.774.355
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			TAPIN	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1 Laporan	3.099.900	0	0	1 Laporan	3.254.895
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			TAPIN	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (Laporan)	1 Laporan	1.899.900	0	0	1 Laporan	1.994.895
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	12 Bulan	885.739.500	0	0	12 Bulan	930.026.475
					Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Waktu koordinasi kedalam dan keluar daerah yang disediakan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah stand Tapin Expo yang dibuat (Stand)	1 Stand				1 Stand	
					Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	12 Bulan	7.846.300	0	0	12 Bulan	8.238.615
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12 Bulan	73.588.900	0	0	12 Bulan	77.268.345
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bulan)	12 Bulan	81.793.800	0	0	12 Bulan	85.883.490
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			TAPIN	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan (Bulan)	12 Bulan	5.246.900	0	0	12 Bulan	5.509.245
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			TAPIN	Tersedianya Bahan/Material (bulan)	12 Bulan	2.161.000	0	0	12 Bulan	2.269.050
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			TAPIN	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)	12 Bulan	6.100.000	0	0	12 Bulan	6.405.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			INDONESIA	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Bulan)	12 Bulan	709.002.600	0	0	12 Bulan	744.452.730
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (unit)	8 Unit	26.143.500	0	0	12 Unit	27.450.675
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			TAPIN	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (Unit)	3 Unit	26.143.500	0	0	5 Unit	27.450.675
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa telepon, internet, listrik dan air (Bulan)	12 Bulan	261.139.500	0	0	12 Bulan	274.196.475
					Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah stand Tapin Expo yang dibuat (Stand)	1 Stand				1 Stand	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12 Bulan	139.880.000	0	0	12 Bulan	146.874.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			TAPIN	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (Bulan)	12 Bulan	121.259.500	0	0	12 Bulan	127.322.475
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	1.758.905.400	0	0	12 Bulan	1.846.850.670
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			TAPIN	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bulan)	12 Bulan	1.279.307.800	0	0	12 Bulan	1.343.273.190
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Kabupaeen Tapin	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (Bulan)	12 Bulan	161.491.900	0	0	12 Bulan	169.566.495
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			Kabupaten Tapin	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat tak Bermotor (Bulan)	12 Bulan	31.250.000	0	0	12 Bulan	32.812.500
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			TAPIN	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya (Bulan)	12 Bulan	147.749.200	0	0	12 Bulan	155.136.660
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			TAPIN	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor (Bulan)	12 Bulan	59.977.500	0	0	12 Bulan	62.976.375
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			TAPIN	Terpeliharanya Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (bulan)	12 Bulan	42.929.000	0	0	12 Bulan	45.075.450
	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Yang Baik	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah	100%	947.930.500	0	0	100%	995.327.025
					Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan	60%				65%	
					Status Mutu Air	Cemar Sedang status				Cemar Sedang status	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80%				80%	
					Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	60%				60%	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang dibuat (laporan)	1 Laporan	947.930.500	0	0	1 Laporan	995.327.025
					Jumlah Kajian daya dukung daya tampung yang dibuat (laporan)	0 Laporan				0 Laporan	
					Jumlah Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat (laporan)	0 Laporan				0 Laporan	
					Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan atas kegiatan/usaha (Keg/usaha)	20 Kegiatan/Usaha				15 Kegiatan/Usaha	
					Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tentang Amdal (Orang)	2 Orang				2 Orang	
					Jumlah perusahaan yang taat melaporkan hasil rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan (Perusahaan)	25 Perusahaan				25 Perusahaan	
					Jumlah SDM komisi penilai Amdal yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	20 Orang				20 Orang	
					Jumlah Dokumen yang Dilaksanakan (Dokumen)	3 Dokumen				3 Dokumen	
					Jumlah Dokumen yang Dilaksanakan (Dokumen)	0 Dokumen				0 Dokumen	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dokumen)	2 Dokumen	900.000.000	0	0	2 Dokumen	945.000.000
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			Kabupaten Tapin	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan atas kegiatan/Usaha (Keg/Usaha)	15 Keg/Usaha	47.930.500	0	0	15 Keg/Usaha	50.327.025
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Status Mutu Air	Cemar Sedang status	2.212.710.228	0	0	Cemar Sedang status	2.323.345.739
					Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80%				80%	
					Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	60%				60%	
					Persentase parameter pengujian yang mengasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	71%				79%	
					Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	80%				100%	
					Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah	100%				100%	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			TAPIN	jumlah hasil analisa laboratorium tentang kualitas lingkungan yang dipantau (kali)	180 Kali	1.674.883.028	0	0	180 Kali	1.758.627.179
					Jumlah laporan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Lingkungan (laporan)	1 Laporan				0 Laporan	
					Jumlah laporan Inventarisasi GRK (laporan)	1 Laporan				1 Laporan	
					Jumlah SDM laboratorium lingkungan yang mengikuti pelatihan (orang)	10 Orang				10 Orang	
					Jumlah alat laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (Unit)	1 Unit				1 Unit	
					Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Tapin	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Tapin (LHU)	180 Laporan Hasil Uji (LHU)	455.297.300	0	0	180 Laporan Hasil Uji (LHU)	478.062.165
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kegiatan)	2 Kegiatan	211.260.700	0	0	2 Kegiatan	221.823.735
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	1.008.325.028	0	0	12 Bulan	1.058.741.279

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah laporan status kerusakan tanah (laporan)	1 Laporan	151.930.000	0	0	1 Laporan	159.526.500
					Waktu Penyediaan Informasi Lingkungan hidup Secara Online (bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan/pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat (Bulan)	12 Bulan	151.930.000	0	0	12 Bulan	159.526.500
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah lokasi pengelolaan kali/sungai di Kabupaten Tapin (lokasi)	1 Lokasi	385.897.200	0	0	1 Lokasi	405.192.060
					Jumlah laporan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut (laporan)	0 Laporan				0 Laporan	
					Jumlah Lokasi yang dilakukan penutupan lahan (lokasi)	1 Lokasi				1 Lokasi	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			Kabupaten Tapin	Luas Area yang Direhabilitasi (M2)	100 M2	64.475.000	0	0	100 M2	67.698.750
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			Kabupaten Tapin	Jumlah Desa Mandiri Peduli Gambut yang Terbentuk	1 Desa	321.422.200	0	0	1 Desa	337.493.310
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Yang Baik		Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	80%	2.442.425.700	0	0	100%	2.564.546.985
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah lokasi konservasi SDA dan keaneekaragaman hayati yang dikelola (lokasi)	2 Lokasi	2.442.425.700	0	0	2 Lokasi	2.564.546.985
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7 Ha	2.442.425.700	0	0	7 Ha	2.564.546.985
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase cakupan area pelayanan	66,67%	325.106.600	0	0	66,67%	341.361.930
					Persentase volume sampah yang tertangani	54,40%				58,25%	
					Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	90%				95%	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			TAPIN	Jumlah kegiatan yang diawasi keataannya terhadap pengelolaan B3 dan LB3 (kegiatan/u)	38 Kegiatan/Usaha	44.106.600	0	0	40 Kegiatan/Usaha	46.311.930
					Jumlah rekomendasi dokumen perijinan tempat penyimpanan sementara LB3 (dokumen)	10 Dokumen				12 Dokumen	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			Kabupaten Tapin	Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dan mempunyai izin penyimpanan sementara limbah B3 memenuhi ketentuan	6 Perusahaan	44.106.600	0	0	6 Perusahaan	46.311.930
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah TPS khusus LB3 yang di bangun dan dikelola (unit)	1 Unit	281.000.000	0	0	1 Unit	295.050.000
					Tersedianya peralatan penunjang operasional persampahan (Unit)	3 Unit				3 Unit	
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kabupaten Tapin	Persentase hasil pengendalian dan pengelolaan sampah B3 domestik (non corporate) di Kabupaten Tapin (%)	80%	281.000.000	0	0	80%	295.050.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air	36%	29.944.200	0	0	40%	31.441.410
					Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara	36%				40%	
					Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi	100%				100%	
					Persentase MHA yang ditetapkan haknya	50%				62,50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya melalui bimtek atau sosialisasi (orang)	3 Orang	29.944.200	0	0	3 Orang	31.441.410
					Jumlah pemegang izin lingkungan yang diawasi ketaatannya (perusahaan)	33 Perusahaan				35 Perusahaan	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1 Kegiatan	29.944.200	0	0	1 Kegiatan	31.441.410
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Yang Baik		Persentase MHA yang ditetapkan haknya	50%	267.752.100	0	0	62,50%	281.139.705
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			TAPIN	Jumlah kelompok masyarakat hukum adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi (kelompok)	0 Kelompok	119.002.200	0	0	0 Kelompok	124.952.310
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Kegiatan)	1 Kegiatan	119.002.200	0	0	1 Kegiatan	124.952.310
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			TAPIN	Jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan keterampilannya dalam pengelolaan LH (kelompok)	1 Kelompok	148.749.900	0	0	1 Kelompok	156.187.395
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Kegiatan	148.749.900	0	0	1 Kegiatan	156.187.395
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Yang Baik		Persentase MHA yang ditetapkan haknya	50%	56.074.900	0	0	62,50%	58.878.645
					Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	80%				100%	
					Status Mutu Air	Cemar Sedang status				Cemar Sedang status	
					Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80%				80%	
					Persentase Parameter Kerusakan Tanah yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	60%				60%	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dilaksanakan (kali)	3 Kali	56.074.900	0	0	3 Kali	58.878.645
					Jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH (kali)	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah sosialisasi/pelatihan perlindungan dan konservasi SDA yang dilaksanakan (kali)	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang disosialisasikan (kali)	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah promosi dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilaksanakan (kali)	3 Kali				3 Kali	
					Jumlah bimtek perlindungan dan pengelolaan LH yang dilaksanakan (kali)	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah lembaga kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk pengembangan kepedulian LH (kelompok)	1 Kelompok				1 Kelompok	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (Kegiatan)	1 Kegiatan	56.074.900	0	0	1 Kegiatan	58.878.645

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Yang Baik		Status Mutu Air	Cemar Sedang status	468.321.600	0	0	Cemar Sedang status	491.737.680
					Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80%				80%	
					Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	60%				60%	
					Persentase MHA yang ditetapkan haknya	50%				62,50%	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah pelaksanaan penilaian kota sehat/adiwira (kali)	3 Kali	468.321.600	0	0	3 Kali	491.737.680
					Jumlah sekolah yang dibina (sekolah)	10 Sekolah				10 Sekolah	
					Jumlah lokasi pengelolaan kampung iklim (lokasi)	1 Lokasi				1 Lokasi	
					Jumlah lomba memelihara dan menjaga lingkungan sekolah (kali)	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah pelaksanaan penilaian kebersihan kantor SKPD (kali)	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah usulan penghargaan tentang lingkungan hidup (usulan)	1 Usulan				1 Usulan	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kegiatan)	1 Kegiatan	468.321.600	0	0	1 Kegiatan	491.737.680
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air	36%	35.215.000	0	0	40%	36.975.750
					Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara	36%				40%	
					Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi	100%				100%	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang di verifikasi dan diidentifikasi (pengaduan)	4 Pengaduan	35.215.000	0	0	4 Pengaduan	36.975.750
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota (Kegiatan)	1 Kegiatan	35.215.000	0	0	1 Kegiatan	36.975.750
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase cakupan area pelayanan	66,67%	6.875.340.600	0	0	66,67%	7.219.107.630
					Persentase volume sampah yang tertangani	54,40%				58,25%	
					Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	90%				95%	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			TAPIN	Waktu pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan perkotaan yang disediakan (bulan)	12 Bulan	6.875.340.600	0	0	12 Bulan	7.219.107.630
					Waktu operasional armada persampahan dan alat berat yang dipelihara (bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan (bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu operasional pemeliharaan bank sampah yang disediakan (bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu operasional rumah sampah dan satgas persampahan yang disediakan (bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang disediakan / dibangun (paket)	5 Paket				6 Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Jumlah sosialisasi dan kampanye sistem pengurangan sampah yang dilaksanakan (kali)	6 Kali					6 Kali	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu yang disediakan untuk Pelaksanaan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Bulan)	12 Bulan	5.535.478.200	0	0		12 Bulan	5.812.252.110
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kali)	1 Kali	45.662.400	0	0		1 Kali	47.945.520
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan yang Disediakan (Unit)	3 Unit	1.084.200.000	0	0		Unit	1.138.410.000
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang Disediakan (Unit)	2 Unit	210.000.000	0	0		Unit	220.500.000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						5.441.761.094	0	0			5.713.849.149
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	4.563.877.494	0	0		100%	4.792.071.369
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%					100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	13 buah	45.311.800	0	0		13 buah	47.577.390
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			KABUPATEN TAPIN	Jumlah laporan capaian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (Laporan)	13 Buah	45.311.800	0	0		13 Buah	47.577.390
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	2 buah	2.659.497.894	0	0		2 buah	2.792.472.789
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.657.497.894	0	0		12 Bulan	2.790.372.789
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1 Buah	1.000.000	0	0		1 Buah	1.050.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (Laporan)	1 Buah	1.000.000	0	0		1 Buah	1.050.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu penyediaan ATK	12 bulan	825.230.000	0	0		12 bulan	866.491.500
					waktu penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 bulan					12 bulan	
					waktu penyediaan instalasi listrik	12 bulan					12 bulan	
					waktu koordinasi dan konsultasi	12 bulan					12 bulan	
					waktu penyediaan makan minum	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	808.500	0	0		12 Bulan	848.925
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	808.500	0	0		12 Bulan	848.925
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	185.882.500	0	0		12 Bulan	195.176.625
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	185.882.500	0	0		12 Bulan	195.176.625
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	111.300.000	0	0		12 Bulan	116.865.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	8.490.000	0	0		12 Bulan	8.914.500
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	4.075.000	0	0		12 Bulan	4.278.750
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	514.674.000	0	0		12 Bulan	540.407.700
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	waktu pengadaan peralatan kantor	12 bulan	615.087.200	0	0		12 bulan	645.841.560
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	538.344.200	0	0		12 Bulan	565.261.410

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Buah	76.743.000	0	0	12 Buah	80.580.150
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu penyediaan komunikasi sumber daya listrik dan air	12 bulan	366.661.200	0	0	12 bulan	384.994.260
					Jumlah jasa kebersihan (OB)tahun	2 orang				2 orang	
					waktu penyediaan surat menyurat	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah kegiatan tapin expo	1 kali				1 kali	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	189.000.000	0	0	12 Bulan	198.450.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	177.661.200	0	0	12 Bulan	186.544.260
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Jumlah Kegiatan Tapin Expo	1 Kali	177.661.200	0	0	1 Kali	186.544.260
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu penyediaan pemeliharaan dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas	12 bulan	52.089.400	0	0	12 bulan	54.693.870
					waktu pemeliharaan gedung kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	40.035.000	0	0	12 Bulan	42.036.750
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	8.925.000	0	0	12 Bulan	9.371.250
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	3.129.400	0	0	12 bulan	3.285.870
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan		IKM terhadap pelayanan KTP & Kartu Keluarga	89% poin	231.750.000	0	0	89% poin	243.337.500
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			TAPIN	jumlah pelayanan publik	12 kecamatan	219.900.000	0	0	12 kecamatan	230.895.000
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN	Jumlah Pelayan Publik	11 Orang	219.900.000	0	0	11 Orang	230.895.000
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			TAPIN	waktu Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 bulan	11.850.000	0	0	12 bulan	12.442.500
					waktu pengadaan blanko,tinta ribbon dan film KIA	12 bulan				12 bulan	
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan SKM	2 Dokumen Laporan	11.850.000	0	0	2 Dokumen Laporan	12.442.500
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan		IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan	89% poin	322.401.100	0	0	89% poin	338.521.155
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			TAPIN	jumlah pencatatan perkawinan massal pasangan non muslim	1 kali	322.401.100	0	0	1 kali	338.521.155
					jumlah pelayanan publik (tahun)	16 orang				16 orang	
					waktu Pembentukan tim registrasi kematian di desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	12 bulan				12 bulan	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN	Waktu Pencatatan, Penatausahaan, dan penerbitan dokumen akta kematian	12 Bulan	63.610.300	0	0	12 Bulan	66.790.815
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN	Waktu Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Bulan	168.900.200	0	0	12 Bulan	177.345.210

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN	Jumlah IKM Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Semester	89.890.600	0	0	2 Semester	94.385.130
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang kependudukan		Tingkat Akurasi Data Penduduk	90,30%	323.732.500	0	0	90,40%	339.919.125
					Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan	84%				85%	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			TAPIN	waktu Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan	12 bulan	91.850.000	0	0	12 bulan	96.442.500
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TAPIN	Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan Data Kependudukan	1 SKPD	91.850.000	0	0	1 SKPD	96.442.500
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			TAPIN	Waktu pembinaan Desa Tertib Administrasi Kependudukan	12 bulan	134.242.500	0	0	12 bulan	140.954.625
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN	Jumlah Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	134.242.500	0	0	1 Dokumen	140.954.625
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			TAPIN	jumlah desa yang dibina (20 kali)	10 desa	97.640.000	0	0	10 desa	102.522.000
					waktu Desa Adminduk	12 bulan				12 bulan	
					Jumla Desa Tertib Administrasi Kependudukan	20 desa				20 desa	
					waktu Bimtek peningkatan kapasitas petugas pelayanan adminduk	12 bulan				12 bulan	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13 Kali	97.640.000	0	0	13 Kali	102.522.000
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						7.259.155.532	0	0		7.622.113.309
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	98%	3.879.548.172	0	0	98%	4.073.525.581
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98%				98%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	95%				97%	
					- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	91%				93%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan capai kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Laporan	7.548.500	0	0	9 Laporan	7.925.925
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7.548.500	0	0	10 Laporan	7.925.925
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semester dan akhir tahun	6 Laporan	2.612.115.572	0	0	6 Laporan	2.742.721.351
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	2.604.850.672	0	0	12 Bln	2.735.093.206
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1.941.000	0	0	1 Laporan	2.038.050
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.323.900	0	0	12 Laporan	5.590.095
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	873.815.100	0	0	12 Bulan	917.505.855
					Pelaksanaan HUT kabupaten	1 Kali				1 Kali	
					Waktu penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan ATK	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Makan dan Minum harian Pegawai	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pelaksanaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan				12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Waktu Peliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	51.287.000	0	0	12 Bln	53.851.350
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bln	64.493.400	0	0	12 Bln	67.718.070
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bln	36.807.100	0	0	12 Bln	38.647.455
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bln	4.912.600	0	0	12 Bln	5.158.230
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Tapin	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bln	10.000.000	0	0	12 Bln	10.500.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	706.315.000	0	0	12 Bln	741.630.750
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	88.172.200	0	0	12 bulan	92.580.810
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bln	52.876.600	0	0	12 Bln	55.520.430
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	35.295.600	0	0	12 Bln	37.060.380
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa Telephone , Internet Listrik dan Air	12 Bulan	192.768.000	0	0	12 Bulan	202.406.400
					waktu Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	4.640.000	0	0	12 Bln	4.872.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	50.354.000	0	0	12 Bln	52.871.700
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	137.774.000	0	0	12 Bln	144.662.700
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Peliharaan Kendaraan Oprasioanal Kantor	12 Bulan	105.128.800	0	0	12 Bulan	110.385.240
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bln	45.385.800	0	0	12 Bln	47.655.090
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bln	17.200.000	0	0	12 Bln	18.060.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	42.543.000	0	0	12 Bln	44.670.150
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar	47%	26.443.000	0	0	67%	27.765.150
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			TAPIN	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	91%				93%	
					waktu Pembuatan Regulasi Desa	12 bulan	26.443.000	0	0	12 bulan	27.765.150
					waktu Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pelatihan Administrasi Desa	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah desa yang memutakhirkan data IDM	126 Desa				126 Desa	
					waktu Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pengembangan Adat dan Budaya di Desa	12 bulan				12 bulan	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	126 Desa	26.443.000	0	0	126 Desa	27.765.150
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten	79%	888.440.360	0	0	81%	932.862.378
					- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	91%				93%	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			TAPIN	waktu Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan	12 bulan	888.440.360	0	0	12 bulan	932.862.378
					waktu Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Gotong Royong Masyarakat Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Kegiatan Analisa Pengembangan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal	12 bulan				12 bulan	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	126 Desa	888.440.360	0	0	126 Desa	932.862.378

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar	47%	1.191.555.000	0	0	67%	1.251.132.750
					- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten	79%				81%	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			TAPIN	waktu Penatausahaan Keuangan Desa	12 bulan	1.191.555.000	0	0	12 bulan	1.251.132.750
					waktu Pendampingan Penyusunan Data Profil Desa	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Desa yg mengikiti perlombaan desa tingkat kabupaten	12 Desa				12 Desa	
					waktu Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah desa yang di dampingi dalam Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa	126 Desa				126 Desa	
					waktu Pembuatan PERDA dan PERBUB Berkaitan dengan PDMDES	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah BPD yg ditata	126 Desa				126 Desa	
					waktu Pilkaades Gelombang 3	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembuatan Regulasi Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pelatihan Administrasi Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penataan Aset Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Sosialisasi Produk Hukum Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pelatihan Pelaksanaan Operasional BUMDesa	12 bulan				12 bulan	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			126 Desa dan 12 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	126 Desa	50.133.000	0	0	126 Desa	52.639.650
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			126 desa dan 12 kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	126 Desa	75.889.000	0	0	126 Desa	79.683.450
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			126 desa dan 12 kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	126 Desa	70.261.000	0	0	126 Desa	73.774.050
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			126 Desa di 12 Kecamatan se Kabupaten Tapin	Waktu Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	12 bulan	209.846.500	0	0	12 bulan	220.338.825
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			60 desa dan 12 kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	126 Desa	478.121.500	0	0	126 Desa	502.027.575
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			126 Desa dan 12 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan tertatanya administrasi desa	126 Desa	185.799.000	0	0	126 Desa	195.088.950
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			126 Desa dan 12 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa an BPD	126 Kec/Desa	26.663.000	0	0	126 Kec/Desa	27.996.150
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			126 desa dan 12 kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	126 Kec/Desa	94.842.000	0	0	126 Kec/Desa	99.584.100
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar	47%	1.273.169.000	0	0	67%	1.336.827.450
					- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten	79%				81%	
					- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	91%				93%	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	waktu Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga	12 bulan	1.273.169.000	0	0	12 bulan	1.336.827.450
					Jumlah BUMDes yang di bina	126 BUMDes				126 BUMDes	
					Jumlah posyantek yang dikembangkan	5 posyantek				5 posyantek	
					waktu Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa (DAPM)	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pendampingan Program Inovasi Desa (Inovasi Desa)	12 bulan				12 bulan	
					waktu Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					waktu Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan SDA	12 bulan				12 bulan		
					waktu Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG	12 bulan				12 bulan		
					waktu Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG	12 bulan				12 bulan		
					waktu Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan	12 bulan				12 bulan		
					waktu Kegiatan Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	12 bulan				12 bulan		
					Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kabupaten	1 PKK				1 PKK		
					Jumlah posyandu yang diberdayakan dan dikembangkan	194 posyandu				194 posyandu		
					waktu Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa	12 bulan				12 bulan		
					waktu Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar	12 bulan				12 bulan		
					waktu PKK Kabupaten	12 bulan				12 bulan		
					waktu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	12 bulan				12 bulan		
					waktu Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Terhadap pembangunan (Pelatihan)	12 bulan				12 bulan		
					waktu Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Posyandu	12 bulan				12 bulan		
					waktu Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Lomba	12 bulan				12 bulan		
					waktu Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	12 bulan				12 bulan		
					waktu Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat	12 bulan				12 bulan		
					waktu Pengembangan Adat dan Budaya di Desa	12 bulan				12 bulan		
					waktu Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	12 bulan				12 bulan		
					waktu Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	12 bulan				12 bulan		
					Jumlah pokjanal posyandu yang dikembangkan dan diberdayakan	126 pokjanal				126 pokjanal		
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi PKK serta pembinaan dan pelatihan TP.PKK	12 kec		419.865.100	0	0	12 kec	440.858.355
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			126 Desa di 12 Kecamatan se Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	126 Desa		363.150.500	0	0	126 Desa	381.308.025
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			126 Desa di 12 Kecamatan se Kabupaten Tapin	Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Desa yang berasal dari BUMDes dan BUMDESMA	126 Desa		243.204.200	0	0	126 Desa	255.364.410
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			126 Desa di 12 Kecamatan se Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi PosyanteK Kecamatan PosyanteK Desa dan Pelaksanaan Lomba Inovasi Desa Tingkat Kabupaten	126 Desa		246.949.200	0	0	126 Desa	259.296.660
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							5.291.882.239	0	0		5.556.476.351
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%		3.989.280.339	0	0	100%	4.188.744.356
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%					100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 Laporan		5.000.000	0	0	13 Laporan	5.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rantau	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	5.000.000	0	0	13 Laporan	5.250.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	2 Laporan	2.675.112.094	0	0	2 Laporan	2.808.867.699
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rantau	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 bulan	2.670.212.094	0	0	15 bulan	2.803.722.699
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rantau	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.450.000	0	0	1 Laporan	2.572.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Rantau	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.450.000	0	0	1 Laporan	2.572.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	694.803.900	0	0	12 Bulan	729.544.095
					Waktu Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman	11 Bulan				11 Bulan	
					Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali				1 Kali	
					Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	4.157.500	0	0	12 bulan	4.365.375
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	29.030.400	0	0	12 bulan	30.481.920
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	62.900.500	0	0	12 bulan	66.045.525
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	11.985.200	0	0	12 bulan	12.584.460
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	4.015.300	0	0	12 bulan	4.216.065
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	8.250.000	0	0	12 bulan	8.662.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	574.465.000	0	0	12 bulan	603.188.250
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kantor	29 Unit	77.704.545	0	0	29 Unit	81.589.772
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rantau	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	74.704.545	0	0	7 Unit	78.439.772
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rantau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	3.000.000	0	0	1 Unit	3.150.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	212.315.600	0	0	12 Bulan	222.931.380
					Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.531.200	0	0	12 bulan	1.607.760
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	78.600.000	0	0	12 bulan	82.530.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rantau	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	132.184.400	0	0	12 bulan	138.793.620
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48 Unit	324.344.200	0	0	48 Unit	340.561.410
					Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Rantau	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas SKPD	44 Buah	118.859.200	0	0	44 Buah	124.802.160
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rantau	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46 Unit/kali	5.100.000	0	0	46 Unit/kali	5.355.000
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rantau	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	200.385.000	0	0	1 Kegiatan	210.404.250
	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terkendalinya Angka Kelahiran		Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	80%	215.253.200	0	0	85%	226.015.860	
					Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	85%				85%		
					Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	45%				50%		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	11 Sekolah	90.847.800	0	0	11 Sekolah	95.390.190	
					Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Koalisi Kependudukan	1 Kali				1 Kali		
					Jumlah pelaksanaan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB	160 Dokumen				160 Dokumen		
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan			Tapin	Jumlah sub Kegiatan dukungan pelaksanaan survei/ pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	1 kali/keg	70.374.700	0	0	1 kali/keg	73.893.435	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			Tapin	Jumlah sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1 kali/keg	15.619.200	0	0	1 kali/keg	16.400.160	
2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			Tapin	Jumlah sub Kegiatan Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 kali/keg	4.853.900	0	0	1 kali/keg	5.096.595	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu pelaksanaan penyebaruasan informasi dan advokasi	12 Bulan	124.405.400	0	0	12 Bulan	130.625.670	
					Waktu Pelaksanaan Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	12 Bulan				12 Bulan		
					waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan				12 bulan		
					waktu Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Pelaksanaan Pembentukan Rumah Dataku	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Pelaksanaan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	12 bulan				12 bulan		
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			Tapin	Jumlah sub kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2 kali/keg	7.663.900	0	0	2 kali/keg	8.047.095	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain			Tapin	Jumlah sub kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	6 kali/keg	56.000.100	0	0	6 kali/keg	58.800.105	
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			Tapin	Jumlah sub kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 kali/keg	37.354.200	0	0	1 kali/keg	39.221.910	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Tapin	Jumlah sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 bulan	5.582.000	0	0	12 bulan	5.861.100	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK			Tapin	Jumlah sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	12 bulan	17.805.200	0	0	12 bulan	18.695.460	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesertaan ber-KB		Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,08%	424.330.800	0	0	2,07%	445.547.340	
					Persentase peserta KB aktif MKOP	8,86%				8,83%		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			TAPIN	Waktu pelaksanaan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu	12 Bulan	40.763.100	0	0	12 Bulan	42.801.255	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kesertaan KB & Kesro	1 Kali				1 Kali		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			rantau	Jumlah sub kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 bulan	37.850.000	0	0	12 bulan	39.742.500
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			Tapin	Jumlah sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 bulan	2.913.100	0	0	12 bulan	3.058.755
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat melalui KB	2 Kali	17.640.000	0	0	2 Kali	18.522.000
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			Tapin	Jumlah sub kegiatan Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12 bulan	17.640.000	0	0	12 bulan	18.522.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan kemah bakti saka kencana	150 Orang	290.511.200	0	0	150 Orang	305.036.760
					Jumlah Pelaksanaan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD)	250 Akseptor				250 Akseptor	
					Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita	130 Orang				130 Orang	
					Waktu pelaksanaan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	2 kali				2 kali	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Rantau	Jumlah sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 bulan	30.000.000	0	0	12 bulan	31.500.000
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			rantau	Jumlah sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 bulan	52.507.900	0	0	12 bulan	55.133.295
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			rantau	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	774 Akseptor	71.600.200	0	0	774 Akseptor	75.180.210
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Rantau	Jumlah sub kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7 Akseptor	30.085.700	0	0	7 Akseptor	31.589.985
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			rantau	Jumlah sub kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	978 Akseptor	106.317.400	0	0	978 Akseptor	111.633.270
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	4 Kali	75.416.500	0	0	4 Kali	79.187.325
					Jumlah pelaksanaan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes	1 Kali				1 Kali	
					Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah pelaksanaan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional	3 Kali				3 Kali	
					Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKB, BKL dan orang tua hebat	3 Kali				3 Kali	
					Jumlah pelaksanaan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL)	2 Kelompok				2 Kelompok	
					Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali				3 Kali	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			rantau	Jumlah sub kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12 bulan	36.726.600	0	0	12 bulan	38.562.930
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			rantau	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	12 bulan	38.689.900	0	0	12 bulan	40.624.395

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	79,52%	663.017.900	0	0	71,12%	696.168.795
					Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	92,56%				92,80%	
					Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS	92,14%				92,19%	
					Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB	84,02%				84,07%	
					Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	73,11%				73,66%	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			TAPIN	Jumlah pelaksanaan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	3 Kali	629.800.600	0	0	3 Kali	661.290.630
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberda			Tapin	Jumlah sub kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	20 Kegiatan	112.300.000	0	0	20 Kegiatan	117.915.000
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Tapin	Jumlah sub kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 kegiatan	41.625.000	0	0	2 kegiatan	43.706.250
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Tapin	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 bulan	319.489.800	0	0	12 bulan	335.464.290
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			TAPIN	Jumlah sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 bulan	100.510.900	0	0	12 bulan	105.536.445
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Tapin	Jumlah sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	6 Kegiatan	29.731.000	0	0	6 Kegiatan	31.217.550
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK			Tapin	Jumlah sub kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	2 Kegiatan	26.143.900	0	0	2 Kegiatan	27.451.095
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			TAPIN	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional	2 Kali	33.217.300	0	0	2 Kali	34.878.165
					Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK	3 Kali				3 Kali	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			TAPIN	Jumlah sub kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kegiatan	21.387.800	0	0	1 Kegiatan	22.457.190
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			TAPIN	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kegiatan	5.479.900	0	0	1 Kegiatan	5.753.895
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			TAPIN	Jumlah sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Kegiatan	6.349.600	0	0	1 Kegiatan	6.667.080
	Dinas Perhubungan						10.121.076.307	0	0		10.627.130.122

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masvarakaf	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.961.716.677	0	0	100%	4.159.802.511	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%				100%		
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			INDONESIA;KALIMAN TAN SELATAN;TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	23.734.000	0	0	12 laporan	24.920.700	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	23.734.000	0	0	Bulan	24.920.700	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran & akhir tahun	2 Laporan	3.111.990.277	0	0	2 Laporan	3.267.589.791	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.065.756.277	0	0	Bulan	3.219.044.091	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	2.134.000	0	0	Bulan	2.240.700	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	44.100.000	0	0	Bulan	46.305.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	522.295.700	0	0	12 bulan	548.410.485	
					Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggunaan	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan				12 bulan		
					Waktu Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan				12 bulan		
					Waktu pelaksanaan Tapin Expo 2020	10 hari				10 hari		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	7.660.400	0	0	Bulan	8.043.420	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	66.397.200	0	0	Bulan	69.717.060	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	88.033.500	0	0	Bulan	92.435.175	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	15.167.600	0	0	Bulan	15.925.980	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	345.037.000	0	0	Bulan	362.288.850	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	190.400.000	0	0	12 bulan	199.920.000	
					Waktu tenaga teknis pendukung administrasi perkantoran	12 bulan				12 bulan		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	110.400.000	0	0	Bulan	115.920.000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	21.000.000	0	0	Bulan	22.050.000	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	59.000.000	0	0	Bulan	61.950.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	113.296.700	0	0	12 Bulan	118.961.535	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan				12 Bulan		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	90.504.700	0	0	Bulan	95.029.935	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	22.792.000	0	0	Bulan	23.931.600	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya dan optimalisasi kinerja pelayanan jasa perhubungan		Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek	100%	5.821.002.130	0	0	100%	6.112.052.237	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	12 bulan	56.798.900	0	0	12 bulan	59.638.845	
					Waktu Pemeliharaan Warning Light	12 bulan				12 bulan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Waktu Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pemeliharaan Traffic Light	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pengadaan dan Pemasangan Rambu Darat	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rambu Darat	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungsai	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pengadaan Prasarana Keselamatan Jalan	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pencahayaan Jalan	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pembuatan Zona Selamat Sekolah	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pembuatan Marka Jalan	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pemeliharaan Halte	12 Bulan					12 Bulan	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	12 Bulan	12.880.000	0	0		Bulan	13.524.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	12 Bulan	43.918.900	0	0		Bulan	46.114.845
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pemeliharaan Terminal / Tempat Parkir	12 Bulan	89.511.400	0	0		12 Bulan	93.986.970
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	12 Bulan	89.511.400	0	0		Bulan	93.986.970
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pemeliharaan Terminal / Tempat Parkir	12 Bulan	140.034.000	0	0		12 Bulan	147.035.700
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	12 Bulan	17.860.000	0	0		Bulan	18.753.000
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bulan	122.174.000	0	0		12 bulan	128.282.700
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pengadaan Buku dan Plat Uji KIR	12 Bulan	3.136.133.730	0	0		12 Bulan	3.292.940.417
					Waktu Pemeliharaan/Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Akreditasi Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan					12 bulan	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	2.951.153.630	0	0		Bulan	3.098.711.312
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	80.000.000	0	0		Bulan	84.000.000
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	104.980.100	0	0		Bulan	110.229.105
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas	12 Bulan	2.177.032.100	0	0		12 Bulan	2.285.883.705
					Waktu Sosialisasi Peraturan Perundangan di Bidang Lalu Lintas	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12 Bulan					12 Bulan	
					waktu Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas	12 bulan					12 bulan	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	8.000.000	0	0		Bulan	8.400.000
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12 Bulan	1.937.997.100	0	0		Bulan	2.034.896.955
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	75.055.000	0	0		Bulan	78.807.750
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	112.344.000	0	0		Bulan	117.961.200
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	43.636.000	0	0		Bulan	45.817.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas	12 Bulan	72.590.000	0	0	12 Bulan	76.219.500
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	12 Bulan	41.200.000	0	0	Bulan	43.260.000
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Bulan	31.390.000	0	0	Bulan	32.959.500
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	12 bulan	52.102.000	0	0	12 bulan	54.707.100
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Bulan	52.102.000	0	0	Bulan	54.707.100
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pelayanan dan Pengawasan Angkutan	12 Bulan	96.800.000	0	0	12 Bulan	101.640.000
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	96.800.000	0	0	Bulan	101.640.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya dan optimalisasi kinerja pelayanan jasa perhubungan		Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar	95%	338.357.500	0	0	100%	355.275.375
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			TAPIN	Waktu Penyediaan Pembangunan pelabuhan/dermaga	12 Bulan	129.600.000	0	0	12 Bulan	136.080.000
2.15.03.2.12.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Bulan	129.600.000	0	0	Bulan	136.080.000
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Waktu Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga	12 Bulan	208.757.500	0	0	12 Bulan	219.195.375
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Bulan	198.417.500	0	0	Bulan	208.338.375
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Bulan	10.340.000	0	0	Bulan	10.857.000
	Dinas Komunikasi Dan Informatika						6.553.253.442	0	0		6.880.916.114
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	4.825.439.842	0	0	100%	5.066.711.834
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor	%				%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKIP)	1 Dokumen	12.000.000	0	0	1 Dokumen	12.600.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100% 12 Bulan	12.000.000	0	0	100% 12 Bulan	12.600.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Pelayanan Pengadministrasian Keuangan dan Perencanaan	12 bulan	3.333.334.062	0	0	12 bulan	3.500.000.765
					Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	2 Laporan				2 Laporan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.330.334.062	0	0	12 bulan	3.496.850.765
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100% 12 Bulan	1.750.000	0	0	100% 12 Bulan	1.837.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100% 12 Bulan	1.250.000	0	0	100% 12 Bulan	1.312.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor yang Terlaksana	12 bulan	739.202.000	0	0	12 bulan	776.162.100
					Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pelaksana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengunjung Pada Stand Kominfo	200 Pengunjung				200 Pengunjung	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100% 12 Bulan	44.785.500	0	0	100% 12 Bulan	47.024.775

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Tersedianya Bahan Logistik dan Kebersihan kantor	100% 12 Bulan	72.899.500	0	0	100% 12 Bulan	76.544.475
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kabupaten Tapin	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	100% 12 Bulan	50.000.000	0	0	100% 12 Bulan	52.500.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Tersedianya Makanan dan Minuman	100% 12 Bulan	8.000.000	0	0	100% 12 Bulan	8.400.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100% 12 Bulan	563.517.000	0	0	100% 12 Bulan	591.692.850
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	1 Paket	425.112.680	0	0	1 Paket	446.368.314
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100% 1 paket	425.112.680	0	0	100% 1 paket	446.368.314
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	251.155.600	0	0	12 bulan	263.713.380
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pemeliharaan Taman dan Penchilauan Kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100% 12 Bulan	94.155.600	0	0	100% 12 Bulan	98.863.380
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Umum Kantor	100% 12 Bulan	157.000.000	0	0	100% 12 Bulan	164.850.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dengan baik	2 unit	64.635.500	0	0	2 unit	67.867.275
					Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala	12 bulan				12 bulan	
					Perengkapan / Peralatan Gedung Kantor waktu Pengadaan Konsultansi	12 bulan				12 bulan	
					Pembangunan Kantor Diskominfo						
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dins/Operasional	100% 12 Bulan	31.995.000	0	0	100% 12 Bulan	33.594.750
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	100% 12 Bulan	12.955.000	0	0	100% 12 Bulan	13.602.750
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Binaan Lainnya			Kabupaten Tapin	Terpeliharanya Rutin/Berkala Perengkapan Geung Kantor	100% 12 Bulan	19.685.500	0	0	100% 12 Bulan	20.669.775
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Layanan terhadap Informasi Publik		Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100%	1.001.442.600	0	0	100%	1.051.514.730
					Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa	100%				100%	
					Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online	100%				100%	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Realisasi waktu tayang hasil kerjasama Pemda dengan LPPL	7350 menit	1.001.442.600	0	0	7350 menit	1.051.514.730
					Jumlah SDM yang paham tentang Opini dan Aspirasi Publik	50 Orang				50 Orang	
					Jumlah Media yang bekerjasama dalam penyebarluasan informasi daerah	1 Media				1 Media	
					Jumlah Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten	288 Berita				288 Berita	
					Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	1 KIM				1 KIM	
					Jumlah jam tayang Talkshow (60 Menit 1x Tayang) (wawancara)	1 Tayang				1 Tayang	
					Jumlah kerjasama informasi dan media massa kegiatan pelatihan jurnalistik bagi pelajar	60 Siswa				60 Siswa	
					waktu Updating Berita Pada Website Kabupaten	12 bulan				12 bulan	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60 orang 1 Paket	49.216.000	0	0	60 orang 1 Paket	51.676.800
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	480 berita 1 Paket	12.600.000	0	0	480 berita 1 Paket	13.230.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			Kabupaten Tapin	Waktu Pelayanan Informasi Publik	12 bulan	29.450.000	0	0	12 bulan	30.922.500
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Layanan Hubungan Media	10000 menit 1 Paket	874.860.200	0	0	10000 menit 1 Paket	918.603.210
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	60 orang 1 Paket	35.316.400	0	0	60 orang 1 Paket	37.082.220
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Meningkatnya level SPBE Kabupaten		Persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki Izin	64,67%	619.985.000	0	0	64,67%	650.984.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Website Kabupaten yang berfungsi secara baik	2 Website	449.000.000	0	0	2 Website	471.450.000
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75% 1 Paket	209.000.000	0	0	100% 1 Paket	219.450.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50% 1 Paket	240.000.000	0	0	75% 1 Paket	252.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Jaringan Internet Publik (WiFi Gratis) bagi masyarakat	3 Jaringan	170.985.000	0	0	3 Jaringan	179.534.250
					Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang di Data	70 unit				70 unit	
					Jangkauan Jaringan Fiber Optic	10 Km				10 Km	
					Jumlah Sosialisasi Bimtek IT	40 orang				40 orang	
					waktu Pengembangan Aplikasi e-Government	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembangunan Internet Di SKPD & Kecamatan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Jumlah mengikuti peningkatan wawasan dan pelatihan TI	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Kabupaten	12 bulan				12 bulan	
					jumlah Evaluasi SPBE	1 kali				1 kali	
					Jumlah Sosialisasi SPBE	1 kali				1 kali	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75% 1 Paket	82.350.000	0	0	100% 1 Paket	86.467.500
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	4 unit 1 Paket	36.360.000	0	0	5 unit 1 Paket	38.178.000
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Paket 1 Paket	44.025.000	0	0	1 Paket 1 Paket	46.226.250
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			Kabupaten Tapin	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	12 bulan	8.250.000	0	0	12 bulan	8.662.500
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya layanan statistik sektoral		Persentase data statistik sektoral yang disajikan	100%	67.118.000	0	0	100%	70.473.900
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Buku KDA dan PDRB yang dicetak	150 Buah	67.118.000	0	0	150 Buah	70.473.900
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	210 buku 1 Paket	67.118.000	0	0	210 buku 1 Paket	70.473.900
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya pengamanan data dan persandian		Persentase aparatur persandian yang memahami standar persandian	100%	39.268.000	0	0	100%	41.231.400
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase peserta Bimtek yang memahami materi Bimtek (%)	70%	39.268.000	0	0	70%	41.231.400
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Kabupaten Tapin	Waktu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 bulan	39.268.000	0	0	12 bulan	41.231.400
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						6.315.776.488	0	0		6.631.565.312
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	5.436.558.488	0	0	100%	5.708.386.412
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	11 Dokumen	13.540.000	0	0	11 Dokumen	14.217.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	13 Dokumen	13.540.000	0	0	13 Dokumen	14.217.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah bulan laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	12 Bulan	3.244.159.088	0	0	12 Bulan	3.406.367.042
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Jumlah dokumen laporan keuangan Waktu Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dokumen	3.213.459.188	0	0	2 Dokumen	3.374.132.147
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Dokumen	30.699.900	0	0	3 Dokumen	32.234.895
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	994.866.100	0	0	12 Bulan	1.044.609.405
					Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggantian	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah pelaksanaan tapin expo	1 Paket				1 Paket	
					waktu Pengadaan Pakaian Dinas / Khusus	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	111.496.500	0	0	12 bulan	117.071.325
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	73.989.400	0	0	12 Bulan	77.688.870
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian			Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	12 Bulan	11.796.000	0	0	12 Bulan	12.385.800
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	32.039.200	0	0	12 Bulan	33.641.160
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	765.545.000	0	0	12 Bulan	803.822.250
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah perlengkapan gedung kantor	2 Paket	334.451.300	0	0	2 Paket	351.173.865
					Jumlah peralatan gedung kantor	3 Paket				3 Paket	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	224.500.000	0	0	30 Unit	235.725.000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	109.951.300	0	0	30 Unit	115.448.865
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	481.029.400	0	0	12 Bulan	505.080.870
					Jumlah bulan tagihan pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah pelaksanaan tapin expo	1 Paket				1 Paket	
					Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanan	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tapin	Telaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.995.200	0	0	12 Bulan	2.094.960
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	12 Bulan	361.200.000	0	0	12 Bulan	379.260.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	Waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	117.834.200	0	0	12 Bulan	123.725.910
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah kendaraan operasional/dinas yang dipelihara	6 Unit	368.512.600	0	0	6 Unit	386.938.230
					Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Buah				1 Buah	
					Jumlah gedung kantor terpelihara	1 Buah				1 Buah	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanjutan			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanjutan	12 bulan	91.707.600	0	0	12 bulan	96.292.980
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	21.420.000	0	0	15 Unit	22.491.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah waktu terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	255.385.000	0	0	12 Bulan	268.154.250
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatnya investasi daerah		Persentase dokumen RUPM yang tersedia	50%	23.898.000	0	0	0%	25.092.900
					Persentase rekomendasi PM	100%				100%	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			TAPIN	waktu Pengembangan potensi unggulan daerah	12 bulan	23.898.000	0	0	12 bulan	25.092.900
					waktu Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Tapin	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Kabupaten tapin	Jumlah Peluang Penanaman Modal Daerah yang Teridentifikasi	2 Buah	23.898.000	0	0	2 Buah	25.092.900
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya keamanan daerah	.Meningkatnya investasi daerah		Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan	100%	21.000.000	0	0	100%	22.050.000
					Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	100%				100%	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	waktu Partisipasi penyelenggaraan pameran investasi	12 bulan	21.000.000	0	0	12 bulan	22.050.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			-	Jumlah Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan	1 Buah	21.000.000	0	0	1 Buah	22.050.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya keamanan daerah	.Meningkatnya investasi daerah		Persentase perizinan yang diterbitkan	100%	778.720.000	0	0	100%	817.656.000
					Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	100%				100%	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			TAPIN	Nilai IKM yang diperoleh	81 Poin	778.720.000	0	0	81 Poin	817.656.000
					waktu Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	12 bulan				12 bulan	
					Persentase perizinan yang diterbitkan	100%				100%	
					Jumlah perizinan jasa usaha dan perizinan tertentu yang diproses	1756 Izin				1756 Izin	
					waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 bulan				12 bulan	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kab. Tapin	Jumlah Izin yang Diterbitkan	1850 Izin	178.100.000	0	0	1900 Izin	187.005.000
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dilingkungan Pemkab. Tapin	12 Kali	489.000.000	0	0	12 Kali	513.450.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Kab. Tapin	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti	10 Buah	41.285.000	0	0	10 Buah	43.349.250
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal terkait Pemberian Fasilitas Insentif Daerah	1 Kali	70.335.000	0	0	1 Kali	73.851.750
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya keamanan daerah	.Meningkatnya investasi daerah		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	100%	52.600.000	0	0	100%	55.230.000
					Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	100%				100%	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah pelaksanaan monitoring	10 Kali	52.600.000	0	0	10 Kali	55.230.000
					Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu	100%				100%	
					Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	7 Aduan				7 Aduan	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	20 Perusahaan	52.600.000	0	0	20 Perusahaan	55.230.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya keamanan daerah	.Meningkatnya investasi daerah		Persentase rekomendasi PM	100%	3.000.000	0	0	100%	3.150.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	waktu Pengolahan dan Penyajian Data Perizinan dan Non Perizinan	12 bulan	3.000.000	0	0	12 bulan	3.150.000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kab. Tapin	Jumlah inventarisasi dan updating data penanaman modal, perizinan dan non perizinan	12 Dokumen	3.000.000	0	0	12 Dokumen	3.150.000
	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga						19.382.093.526	0	0		20.351.198.202
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	14.468.800	0	0	12 bulan	15.192.240
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			DISPORA	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 dokumen	14.468.800	0	0	14 dokumen	15.192.240

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	12 bulan	3.389.183.626	0	0	12 bulan	3.558.642.807
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.377.633.826	0	0	12 bulan	3.546.515.517
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	6.324.800	0	0	1 dokumen	6.641.040
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	5.225.000	0	0	2 dokumen	5.486.250
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	2.035.465.900	0	0	12 bulan	2.137.239.195
					Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Penyediaan Barang cetakan dan pengagandaan	12 bulan				12 bulan	
					Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	86.329.100	0	0	12 Bulan	90.645.555
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			DISPORA	Waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	94.472.800	0	0	12 Bulan	99.196.440
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			DISPORA	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	17.150.000	0	0	12 Bulan	18.007.500
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			DISPORA	Waktu penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	23.034.000	0	0	12 Bulan	24.185.700
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			DISPORA	Waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.814.480.000	0	0	12 Bulan	1.905.204.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	137.169.800	0	0	12 bulan	144.028.290
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	116.169.800	0	0	12 Bulan	121.978.290
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	21.000.000	0	0	12 Bulan	22.050.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu 1/2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	731.720.000	0	0	12 bulan	768.306.000
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			DISPORA	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	8.120.000	0	0	12 Bulan	8.526.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	12 Bulan	216.000.000	0	0	12 Bulan	226.800.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	Waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	507.600.000	0	0	12 Bulan	532.980.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	525.000.000	0	0	12 bulan	551.250.000
					Waktu Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	Waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	154.750.000	0	0	12 Bulan	162.487.500
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	66.000.000	0	0	12 Bulan	69.300.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	304.250.000	0	0	12 Bulan	319.462.500
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARAGA										
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya peran serta calon pemuda pelopor dan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	92%	1.909.769.300	0	0	100%	2.005.257.765
					Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi	88%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Jumlah peserta pelatihan	40 Orang	1.098.492.300	0	0	40 Orang	1.153.416.915
					Jumlah peserta kapal pemuda nusantara	2 orang				2 orang	
					Jumlah peserta PPAN & Jenesys	4 orang				4 orang	
					Jumlah Peserta PPAP/BPAP/JPI terpilih	4 orang				4 orang	
					Jumlah peserta penyuluhan narkoba	40 Orang				40 Orang	
					Jumlah peserta SP4	10 orang				10 orang	
					Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	40 Orang				40 Orang	
					Jumlah peserta napak tilas	12 Orang				12 Orang	
					Jumlah peserta terpilih	53 orang				53 orang	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda			Kabupaten tapin	Waktu Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	12 Bulan	28.918.100	0	0	12 Bulan	30.364.005
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			kab. tapin	Waktu Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	12 Bulan	65.262.200	0	0	12 Bulan	68.525.310
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis			Kabupaten Tapin	Waktu Terpenuhinya Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program S	12 Bulan	32.855.300	0	0	12 Bulan	34.498.065
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			Kabupaten Tapin	Waktu Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	12 Bulan	119.089.800	0	0	12 Bulan	125.044.290
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			Kabupaten Tapin	Waktu Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	12 Bulan	38.014.600	0	0	12 Bulan	39.915.330
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			Indonesia	Jumlah peserta terseleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	53 orang	814.352.300	0	0	53 orang	855.069.915
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah pembinaan paduan suara remaja dan pemuda	2 Kali	811.277.000	0	0	2 Kali	851.840.850
					Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang dibina	12 Okp dan pramuka				12 Okp dan pramuka	
					Jumlah peserta diklat	40 Orang				40 Orang	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			kab. tapin	Waktu Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	12 Bulan	811.277.000	0	0	12 Bulan	851.840.850
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya prestasi olahraga		Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	16 Cabang Olahraga	10.154.051.300	0	0	18 Cabang Olahraga	10.661.753.865
					Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	24 Cabang Olahraga				27 Cabang Olahraga	
					Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	96%				96%	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	21 buah	994.104.000	0	0	21 buah	1.043.809.200
					Jumlah petugas keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana olahraga	408 orang				408 orang	
					Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	4 Paket				4 Paket	
					Waktu Pengadaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana olahraga	12 bulan				12 bulan	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			kab. tapin	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	12 Bulan	994.104.000	0	0	12 Bulan	1.043.809.200
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah penyelenggaraan kegiatan	2 kali	1.382.303.600	0	0	2 kali	1.451.418.780
					Waktu pembinaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu pelestarian pembinaan penyelenggaraan dan pengiriman atlet Olahraga Tradisional	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Cabang Olah Raga yang di Lombokan	10 cabor				10 cabor	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			kab. tapin	Waktu Penyelenggaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12 Bulan	1.030.353.600	0	0	12 Bulan	1.081.871.280
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			Kalimantan selatan	Waktu Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	12 Bulan	351.950.000	0	0	12 Bulan	369.547.500
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah cabang olahraga pelajar yang dilombakan dan dibina	10 cabor	943.998.800	0	0	10 cabor	991.198.740
					Jumlah cabang olahraga prestasi yang dilombakan dan dibina	10 cabor				10 cabor	
					Jumlah cabang olahraga paralympic yang dilombakan	7 Cabor				7 Cabor	
					Waktu pembinaan, pembibitan dan penciriman atlet olahraga khusus	12 Bulan				12 Bulan	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			kab. tapin	Waktu Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	12 Bulan	943.998.800	0	0	12 Bulan	991.198.740
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			TAPIN	Jumlah peserta pelatihan pelatih olahraga prestasi	20 orang	5.530.770.100	0	0	20 orang	5.807.308.605
2.19.03.2.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan			Kabupaten Tapin	Waktu Standarisasi Organisasi Keolahragaan	12 Bulan	5.530.770.100	0	0	12 Bulan	5.807.308.605
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			TAPIN	Waktu pembinaan dan penyelenggaraan	12 Bulan	1.302.874.800	0	0	12 Bulan	1.368.018.540
					Waktu pembinaan dan fasilitasi olahraga bagi ASN lingkup Pemkab Tapin	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu pembinaan dan pelatihan marching band	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penampilan komunitas	12 bulan				12 bulan	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			kab. tapin	Waktu Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Bulan	819.195.400	0	0	12 Bulan	860.155.170
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			kab. tapin	Waktu Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan	12 Bulan	483.679.400	0	0	12 Bulan	507.863.370
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya peran serta calon pemuda pelopor dan organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	92%	485.264.800	0	0	100%	509.528.040
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			TAPIN	Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang dibina	12 Okp dan pramuka	485.264.800	0	0	12 Okp dan pramuka	509.528.040
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			kab. tapin	Waktu Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Bulan	450.000.000	0	0	12 Bulan	472.500.000
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			kab. tapin	Jumlah peserta Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	40 orang	35.264.800	0	0	40 orang	37.028.040
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata						12.352.761.194	0	0		12.970.399.254
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	98%	5.331.627.244	0	0	100%	5.598.208.606
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	3.000.000	0	0	12 bulan	3.150.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Penyusunan laporan kinerja dan dokumen perencanaan	13 dok	3.000.000	0	0	13 dok	3.150.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	12 bulan	3.042.243.544	0	0	12 bulan	3.194.355.721
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.040.243.544	0	0	12 bulan	3.192.255.721
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang wajib disusun	1 dok	1.000.000	0	0	1 dok	1.050.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang wajib disusun	1 dok	1.000.000	0	0	1 dok	1.050.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	1.361.862.800	0	0	12 bulan	1.429.955.940
					waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan				12 bulan	
					waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan					12 bulan	
					Jumlah pelaksanaan tapin expo	1 kali					1 kali	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	7.322.700	0	0		12 bulan	7.688.835
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	153.075.500	0	0		12 bulan	160.729.275
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	76.905.000	0	0		12 bulan	80.750.250
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	17.849.600	0	0		12 bulan	18.742.080
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	3.840.000	0	0		12 bulan	4.032.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	5.500.000	0	0		12 bulan	5.775.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Indonesia	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1.097.370.000	0	0		12 bulan	1.152.238.500
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang tersedia	1 unit	493.895.000	0	0		0 unit	518.589.750
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin		127.750.800	0	0			134.138.340
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 buah	27.630.200	0	0		10 buah	29.011.710
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	12 bulan	78.882.000	0	0		12 bulan	82.826.100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	127.600.000	0	0		12 bulan	133.980.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	26.338.300	0	0		12 bulan	27.655.215
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	11.360.000	0	0		12 Bulan	11.928.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	31.064.600	0	0		12 bulan	32.617.830
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya		Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	45%	513.524.400	0	0		80%	539.200.620
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	waktu Pemuktahiran Penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD)	12 bulan	51.472.000	0	0		12 bulan	54.045.600
					waktu Pendataan Seni, Budaya, Sastra dan Tradisi Khas Daerah (WBTD)	12 bulan					12 bulan	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Penyusunan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	1 bh	45.506.900	0	0		1 bh	47.782.245
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Kabupaten Tapin	Jumlah sanggar seni budaya terbina	3 klp	5.965.100	0	0		3 klp	6.263.355
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Jumlah sanggar budaya aktif	2 kelompok	238.619.400	0	0		2 kelompok	250.550.370
					Jumlah promosi seni budaya daerah	6 group					6 group	
					waktu Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pembinaan Standarisasi Pelayanan Usaha Industri Pariwisata	12 paket					12 paket	
					Jumlah event aktualisasi budaya daerah	2 kali					2 kali	
					waktu Mengikuti Festival seni dan budaya daerah	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penampilan seni bernuansa islami dan hiburan rakyat pada Tapin Expo	12 bulan					12 bulan	
					waktu Festival Layang-layang	12 bulan					12 bulan	
					waktu Festival teater tradisi (mamanda /Ba pandang / Japin carita) - (Org)	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pagelaran Seni Budaya di Rantau Baru	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pawai Seni Budaya Daerah	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	12 bulan					12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Kabupaten Tapin dan Propinsi Kalimantan Selatan	Jumlah pelaksanaan event seni dan budaya	6 kali	117.304.400	0	0	6 kali	123.169.620
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			Kabupaten Tapin	Jumlah Pembinaan sanggar seni budaya	3 klp	57.784.000	0	0	3 klp	60.673.200
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Pemberian Penghargaan kepada Pelaku seni dan budaya yang aktif	10 orang	63.531.000	0	0	10 orang	66.707.550
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah kegiatan aruh adat	7 kali	223.433.000	0	0	7 kali	234.604.650
					Jumlah jasa pemangku adat dayak	300 orang/bulan				300 orang/bulan	
					waktu Dukungan Penyelenggaraan Ritus Budaya Daerah	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah peserta lomba kampung tematik (kampung)	12 kampung				12 kampung	
					Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (bh)	2 buah				2 buah	
					Waktu pembinaan dan pembentukan desa wisata (bln)	12 bulan				12 bulan	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			Kabupaten Tapin	Jumlah pelaksanaan event Lembaga adat	19 kali	63.450.000	0	0	19 kali	66.622.500
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			KAbupaten Tapin	Jumlah petugas jasa kebersihan pemangku adat dayak yang aktif	300 org/bulan	159.983.000	0	0	300 org/bulan	167.982.150
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya		Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	95%	768.220.600	0	0	100%	806.631.630
					Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	75%				80%	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah sanggar seni budaya terbina	6 kelompok	768.220.600	0	0	6 kelompok	806.631.630
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Bimtek Kesenian Tradisional	50 orang	361.114.000	0	0	50 orang	379.169.700
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Pelaku seni dan budaya yang bersertifikasi	50 orang	236.100.000	0	0	50 orang	247.905.000
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Bimtek Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	50 orang	171.006.600	0	0	50 orang	179.556.930
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya		Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100%	190.329.900	0	0	100%	199.846.395
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah benda cagar budaya yang terdaftar	50 buah	22.009.900	0	0	50 buah	23.110.395
2.22.05.2.01.01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Kabupaten Tapin	Jumlah objek diduga Cagar Budaya yang terdata	10 buah	22.009.900	0	0	10 buah	23.110.395
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah juru pelihara BCB/situs yang aktif	324 orang/bulan	168.320.000	0	0	324 orang/bulan	176.736.000
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya			Kabupaten Tapin	Jumlah petugas jasa kebersihan Cagar Budaya yang aktif	324 org/bulan	168.320.000	0	0	324 org/bulan	176.736.000
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya		Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	100%	187.067.100	0	0	100%	196.420.455
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah juru pelihara BCB/situs yang aktif	324 orang/bulan	187.067.100	0	0	324 orang/bulan	196.420.455
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Kabupaten Tapin	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana Museum	1 buah	187.067.100	0	0	1 buah	196.420.455
3.26	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik	78%	3.796.357.150	0	0	80%	3.986.175.008
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 dok	14.756.000	0	0	1 dok	15.493.800
					Jumlah peserta lomba kampung tematik	12 klp				12 klp	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	1 buah	14.756.000	0	0	1 buah	15.493.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah destinasi yang terpelihara	3 bh	494.876.450	0	0	3 bh	519.620.273
					Jumlah rakoor	5 kali				5 kali	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah kawasan wisata strategis yang terpelihara	3 buah	440.838.050	0	0	3 buah	462.879.953
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Pembinaan pokdarwis	16 klp	54.038.400	0	0	16 klp	56.740.320
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2 bh	3.284.195.700	0	0	2 bh	3.448.405.485
					Waktu pembinaan dan pembentukan desa wisata	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah rakoor	3 kali				3 kali	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana destinasi yang tersedia	8 Jenis	3.284.195.700	0	0	2 Jenis	3.448.405.485
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta Pembinaan Standarisasi Pelayanan Usaha Industri Pariwisata	48 orang	2.529.000	0	0	58 orang	2.655.450
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			Kabupaten Tapin	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	10 klp	2.529.000	0	0	10 klp	2.655.450
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Persentase destinasi wisata yang dipasarkan	40%	1.213.707.700	0	0	50%	1.274.393.085
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			INDONESIA;KALIMAN TAN SELATAN	Jumlah buku / CD Profil Pariwisata	1 bh	1.213.707.700	0	0	1 bh	1.274.393.085
					Jumlah promosi pariwisata	3 kali				3 kali	
					Jumlah informasi pariwisata	48 bh				48 bh	
					Waktu pembuatan bahan dan pembelian alat promosi pariwisata	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah pelaku usaha pariwisata yang bekerjasama	8 orang				10 orang	
					Jumlah terplih duta wisata	8 orang				8 orang	
					Jumlah duta wisata yang mengikuti pemilihan nanang galuh	2 orang				2 orang	
					Jumlah peserta	100 orang				100 orang	
					Jumlah peserta festival pasar digital	50 booth				75 booth	
					Jumlah peserta terbaik lomba photo pariwisata	10 orang				10 orang	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata	6 kali	441.947.500	0	0	6 kali	464.044.875
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			Indonesia	Jumlah Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata	6 kali	521.262.700	0	0	6 kali	547.325.835
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			Kabupaten Tapin	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi pariwisata	48 buah	84.170.000	0	0	48 buah	88.378.500
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			Indonesia	Jumlah koordinasi dengan Mitra Event pariwisata	1 kali	166.327.500	0	0	2 kali	174.643.875
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase kelompok sadar wisata yang aktif	40%	58.861.000	0	0	55%	61.804.050
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			TAPIN	Jumlah rakoor	3 kali	58.861.000	0	0	3 kali	61.804.050
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			Kabupaten Tapin	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 buah	58.861.000	0	0	1 buah	61.804.050
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase kelompok sadar wisata yang aktif	40%	293.066.100	0	0	55%	307.719.405
					Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina	45%				50%	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			TAPIN	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata	75 orang	270.482.100	0	0	75 orang	284.006.205
					Jumlah peserta pembinaan dan bimtek tata kelola Pokdarwis	100 orang				100 orang	
					Jumlah peserta pembinaan dan bimtek tata kelola Pokdarwis	100 orang				100 orang	
					Jumlah peserta apresiasi Pokdarwis	22 orang				98 orang	
					Jumlah Peserta	50 orang				50 orang	
					Jumlah rakoor pembangunan kemitraan pariwisata	3 kali				3 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	40 orang	63.476.300	0	0	40 orang	66.650.115
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Bimtek peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 orang	111.692.800	0	0	50 orang	117.277.440
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 orang	63.475.000	0	0	50 orang	66.648.750
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Bimtek Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	40 orang	31.838.000	0	0	40 orang	33.429.900
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			TAPIN	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	48 orang	22.584.000	0	0	58 orang	23.713.200
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 orang	22.584.000	0	0	50 orang	23.713.200
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan						6.438.038.961	0	0		6.759.940.909
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	3.889.662.051	0	0	100%	4.084.145.154
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	19.225.000	0	0	12 bulan	20.186.250
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	19.225.000	0	0	Laporan	20.186.250
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun	13 Laporan	2.710.977.951	0	0	13 Laporan	2.846.526.849
					Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang disusun	2 Laporan				2 Laporan	
					Waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.709.985.351	0	0	bulan	2.845.484.619
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	691.600	0	0	Laporan	726.180
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	301.000	0	0	Laporan	316.050
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	526.452.500	0	0	12 Bulan	552.775.125
					Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali				1 Kali	
					Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bln)	12 Bulan	2.262.500	0	0	12 Bulan	2.375.625
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bln)	12 Bulan	40.948.200	0	0	12 Bulan	42.995.610
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor (bln)	12 Bulan	82.539.100	0	0	12 Bulan	86.666.055
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bln)	12 Bulan	27.674.700	0	0	12 Bulan	29.058.435
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan Bahan/material	12 Bulan	2.133.000	0	0	12 Bulan	2.239.650
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	9.200.000	0	0	12 Bulan	9.660.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	361.695.000	0	0	12 Bulan	379.779.750
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	29 Buah	235.222.200	0	0	29 Buah	246.983.310
					waktu Pembangunan Sarana Gedung/kantor	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	82 Buah	219.647.800	0	0	90 Buah	230.630.190
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	8 Buah	15.574.400	0	0	10 Buah	16.353.120
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	339.735.200	0	0	12 Bulan	356.721.960
					Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan jasa surat menyurat (bln)	12 Bulan	1.160.000	0	0	12 Bulan	1.218.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bln)	12 Bulan	198.996.000	0	0	12 Bulan	208.945.800
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bln)	12 Bulan	139.579.200	0	0	12 Bulan	146.558.160
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	58.049.200	0	0	12 Bulan	60.951.660
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu terpelihara peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bln)	12 Bulan	35.974.200	0	0	12 Bulan	37.772.910
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (bln)	12 Bulan	22.075.000	0	0	12 Bulan	23.178.750
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan Perpustakaan		Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	4,97%	2.067.767.310	0	0	5,47%	2.171.155.676
					Angka rata - rata pemanfaatan Perpustakaan	1,08%				0,37%	
					Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP	50%				33,33%	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan	800 Buku	1.864.694.510	0	0	800 Buku	1.957.929.236
					Jumlah Perpustakaan yang dibina	16 Buah				16 Buah	
					Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	16 Orang				16 Orang	
					Jumlah orang yang dilayani dengan baik	21817 Orang				21817 Orang	
					Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan	800 Buku				800 Buku	
					Jumlah Perpustakaan yang dibina	16 Buah				16 Buah	
					Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	16 Orang				16 Orang	
					Jumlah orang yang dilayani dengan baik	21817 Orang				21817 Orang	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil (org)	132 org	56.529.000	0	0	150 org	59.355.450
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rutin Tingkat Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah orang yang dilayani dengan baik (org)	22.636 org	654.285.750	0	0	23.047 org	687.000.038
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Rustaka			Kabupaten Tapin	Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan (buku)	900 Buku	1.153.879.760	0	0	1.000 Buku	1.211.573.748
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah pengunjung (pemustaka)	21817 Orang	203.072.800	0	0	21817 Orang	213.226.440
					Jumlah jenis alat promosi yang tercetak	3 Jenis				3 Jenis	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Kabupaten Tapin	Jumlah jenis alat promosi yang tercetak (jenis)	5 Jenis	15.598.800	0	0	6 Jenis	16.378.740
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Kabupaten Tapin	Jumlah pengunjung (pemustaka) (org)	22.636 Org	187.474.000	0	0	23.047 Org	196.847.700
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin		Persentase pengelola arsip yang terampil	55,55% %	355.739.600	0	0	57,78% %	373.526.580

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah laporan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	25 Buah	204.397.600	0	0	26 Buah	214.617.480
					Jumlah peserta Bimbingan Teknis Kearsipan (org)	50 Org				Org	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan (org)	Org				100 Org	
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (bln)	12 bln				12 bln	
					Jumlah laporan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	25 Buah				26 Buah	
					Jumlah PERBUP Kearsipan yang tersusun (paket)	1 paket				1 paket	
					Jumlah PERDA Kearsipan yang tersusun (paket)	paket				paket	
					Jumlah peserta Bimbingan Teknis Kearsipan (org)	50 Org				50 Org	
					Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan (org)	100 Org				100 Org	
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (bln)	12 bln				12 bln	
					Jumlah PERBUP Kearsipan yang tersusun (paket)	1 paket				1 paket	
					Jumlah PERDA Kearsipan yang tersusun (paket)	1 paket				1 paket	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			Kabupaten Tapin	Jumlah SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa arsip yang ditata sesuai NSPK	10 Unit kerja	85.301.000	0	0	12 Unit kerja	89.566.050
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			Kabupaten Tapin	Jumlah arsip yang di pelihara (Box) yang sesuai NSPK	20 Box	76.336.600	0	0	30 Box	80.153.430
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil pengawasan kearsipan internal	5 laporan	42.760.000	0	0	5 laporan	44.898.000
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah arsip yang dikelola sesuai NSPK (buah)	1225 buah	151.342.000	0	0	1230 buah	158.909.100
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			Kabupaten Tapin	Jumlah SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dikelola sesuai NSPK	3 Unit kerja	151.342.000	0	0	3 Unit kerja	158.909.100
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin		Persentase SKPD dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	55,55% %	124.870.000	0	0	57,78% %	131.113.500
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			TAPIN	Jumlah Jadwal Retensi Arsip yang tersusun (buah)	buah	124.870.000	0	0	buah	131.113.500
					Jumlah pengadaan sarana penyimpanan (buah)	buah				buah	
					Jumlah Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip (org)	11 org				11 org	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			Kabupaten Tapin	Jumlah SKPD yang arsipnya dimusnahkan sesuai NSPK	1 Unit kerja	124.870.000	0	0	1 Unit kerja	131.113.500
							8.051.594.408	0	0		8.454.174.128
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	5.601.092.758	0	0	100%	5.881.147.396
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	70%				70%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buku)	8 buku	209.950.000	0	0	8 buku	220.447.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	209.950.000	0	0	dokumen	220.447.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun (Laporan)	5 laporan	3.946.544.158	0	0	5 laporan	4.143.871.366
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tapin	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	3.905.044.158	0	0	Bulan	4.100.296.366
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tapin	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	22.600.000	0	0	12 bulan	23.730.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulan	18.900.000	0	0	bulan	19.845.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	12 bulan	696.352.100	0	0	12 bulan	731.169.705

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)	12 bulan				12 bulan	
					Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta pembinaan dan money dalam daerah dan panas tani	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah terlaksananya Tapin Expo (kali)	1 kali				1 kali	
					Jumlah waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor (bulan)	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tapin	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	3.024.000	0	0	bulan	3.175.200
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tapin	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	51.964.500	0	0	Unit	54.562.725
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tapin	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	133.228.600	0	0	Bulan	139.890.030
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tapin	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	4.800.000	0	0	bulan	5.040.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Tapin	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	bulan	3.250.000	0	0	bulan	3.412.500
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Tapin	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	kali	2.400.000	0	0	kali	2.520.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tapin	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	497.685.000	0	0	bulan	522.569.250
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	waktu Pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	205.008.100	0	0	12 bulan	215.258.505
					jumlah pengadaan peralatan kantor (unit)	1 unit				1 unit	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			tapin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		205.008.100	0	0		215.258.505
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan	184.976.400	0	0	12 bulan	194.225.220
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tapin	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		127.076.400	0	0		133.430.220
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tapin	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		57.900.000	0	0		60.795.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah dan jenis peralatan dinas yang dipelihara rutin/berkala	20 Unit	358.262.000	0	0	20 Unit	376.175.100
					Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	26 Unit				26 Unit	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	140.742.000	0	0	12 bulan	147.779.100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			tapin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.500.000	0	0		14.175.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			tapin	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		204.020.000	0	0		214.221.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Produksi Perikanan		Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	100%	419.333.000	0	0	100%	440.299.650
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			TAPIN	waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	12 bulan	350.189.000	0	0	12 bulan	367.698.450
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			tapin	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	12 Bulan	92.989.000	0	0	Bulan	97.638.450
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			Kabupaten Tapin	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket	257.200.000	0	0	Paket	270.060.000
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	12 bulan	69.144.000	0	0	12 bulan	72.601.200
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			tapin	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok	69.144.000	0	0	Kelompok	72.601.200
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Produksi Perikanan		Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	100%	1.705.831.850	0	0	100%	1.791.123.443

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			TAPIN	Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan (Kelompok) dan rehab sarana budidaya	5 paket	15.500.000	0	0	5 paket	16.275.000
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			tapin	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	kali	15.500.000	0	0	kali	16.275.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			TAPIN	Jumlah Bulan Sarana dan Prasana BBIL LINUH (Bulan)	12 bulan	1.690.331.850	0	0	12 bulan	1.774.848.443
					Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan (Kelompok) dan rehab sarana budidaya	5 paket				5 paket	
					waktu Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Ikan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pengembangan Pertanian Terpadu Kebun PKK Bidan Perikanan	12 bulan				12 bulan	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	terlaksananya Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	paket	1.345.944.000	0	0	paket	1.413.241.200
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	paket	327.627.850	0	0	paket	344.009.243
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			KAB TAPIN	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	bulan	16.760.000	0	0	bulan	17.598.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Produksi Perikanan		Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	100%	123.867.000	0	0	100%	130.060.350
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			TAPIN	jumlah Razia terpadu dan pengawasan SD Perikanan (kali)	15 kali	123.867.000	0	0	15 kali	130.060.350
					Jumlah pemantauan jual beli anak ikan (kali)	20 kali				20 kali	
					waktu Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi	12 bulan				12 bulan	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan	kali	123.867.000	0	0	kali	130.060.350
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Produksi Perikanan		Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	100%	201.469.800	0	0	100%	211.543.290
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			TAPIN	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)	12 bulan	36.400.000	0	0	12 bulan	38.220.000
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	laporan	36.400.000	0	0	laporan	38.220.000
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			TAPIN	Jumlah uji sampel produk perikanan	10 sampel	3.080.000	0	0	10 sampel	3.234.000
					jumlah penanganan pasca panen dan promosi	9 kali				9 kali	
					waktu Kemitraan dan Diklat Usaha Perikanan	12 bulan				12 bulan	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			Kab. Tapin	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	kali	3.080.000	0	0	kali	3.234.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			TAPIN	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)	12 bulan	161.989.800	0	0	12 bulan	170.089.290
					jumlah penanganan pasca panen dan promosi	9 kali				9 kali	
					waktu Kampanye Makan Ikan	12 bulan				12 bulan	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	bulan	134.266.600	0	0	bulan	140.979.930
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Terlaksananya Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	paket	27.723.200	0	0	paket	29.109.360
							49.369.763.485	0	0		51.838.251.659
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	23.282.804.585	0	0	100%	24.446.944.814
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (Dokumen)	5 Dokumen	72.558.000	0	0	5 Dokumen	76.185.900
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	dokumen	72.558.000	0	0	dokumen	76.185.900
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala (dokumen)	4 Dokumen	13.966.955.185	0	0	4 Dokumen	14.665.302.944
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	13.899.155.185	0	0	12 bulan	14.594.112.944
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kabupaten Tapin	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen	39.600.000	0	0	1 dokumen	41.580.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir	1 dokumen	3.000.000	0	0	1 dokumen	3.150.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	25.200.000	0	0	2 dokumen	26.460.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan ATK (Bulan)	12 Bulan	1.737.329.300	0	0	12 Bulan	1.824.195.765
					Waktu Penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					waktu pemenuhan barang cetakan penggandaan dan penjiplakan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					waktu pelaksanaan rapat-rapat konsultasi pelatihan Pembinaan/monitoring ke kecamatan dan menghadiri rapat koordinasi (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					jumlah promosi komoditi pertanian dan produk olahan serta ekspor kegiatan (kali)	1 kali				1 kali	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Tersedianya Alat tulis Kantor	12 bulan	109.188.700	0	0	12 bulan	114.648.135
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Tersedianya barang bahan logistik Kantor	12 bulan	227.197.600	0	0	12 bulan	238.557.480
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	52.970.000	0	0	12 bulan	55.618.500
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	43.010.000	0	0	12 bulan	45.160.500
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Tersedianya Fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	16.500.000	0	0	12 bulan	17.325.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1.288.463.000	0	0	12 bulan	1.352.886.150
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Kegiatan penunjang Operasional yang diperlukan	100%	5.372.954.900	0	0	100%	5.641.602.645
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	995.828.900	0	0	1 Paket	1.045.620.345
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Paket	3.008.000.000	0	0	2 Paket	3.158.400.000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1.369.126.000	0	0	1 Paket	1.437.582.300
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Telpon Internet Listrik dan Air (Bulan)	12 Bulan	777.800.000	0	0	12 Bulan	816.690.000
					Waktu pembayaran upah untuk petugas kebersihan kantor dan keamanan kantor (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					waktu optimalnya pelayanan administasi kecamatan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	296.400.000	0	0	12 bulan	311.220.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	481.400.000	0	0	12 bulan	505.470.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor hingga dapat digunakan dan berfungsi dengan baik (Bulan)	12 Bulan	1.355.207.200	0	0	12 Bulan	1.422.967.560
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	12 bulan	394.379.800	0	0	12 bulan	414.098.790
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	31.250.000	0	0	12 bulan	32.812.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	929.577.400	0	0	12 bulan	976.056.270
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		-Produktivitas Padi (Ku/Ha)	51 Ku/Ha	8.062.232.100	0	0	52 Ku/Ha	8.465.343.705
					- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	50 Ku/Ha				51 Ku/Ha	
					- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	10 Ku/Ha				10 Ku/Ha	
					- Luas Panen Padi (Ha)	82.768 Ha				83.746 Ha	
					- Luas Panen Jagung (Ha)	1.937 Ha				2.003 Ha	
					- Luas Panen Kedelai (Ha)	120 Ha				124 Ha	
					Persentase RMU yang menghasilkan Beras dengan mutu baik (%)	20%				25%	
					Jumlah Kemitraan Pemasaran yang dibentuk (MoU)	1 MoU				1 MoU	
					- Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	163 Ha				171 Ha	
					- Luas Panen Bawang Merah (Ha)	153 Ha				161 Ha	
					- Luas Panen Jeruk (Ha)	444 Ha				466 Ha	
					- Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	94 Ku/Ha				94 Ku/Ha	
					- Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	73 Ku/Ha				73 Ku/Ha	
					- Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	1,00 %				1,00%	
					- Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura	1 Mitra				1 Mitra	
					- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	679 Ku/Ha				699 Ku/Ha	
					- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	2.175 Ku/Ha				2.284 Ku/Ha	
					- Luas Tanaman Karet (Ha)	15.427 Ha				15.890 Ha	
					- Luas Tanaman Sawit (Ha)	3.540 Ha				3.646 Ha	
					- Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	3%				3%	
					Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik (%)	25,00%				28,18%	
					- Populasi sapi (ekor)	7.734 ekor				8.121 ekor	
					- Populasi kambing (ekor)	4.851 ekor				4.920 ekor	
					- Populasi unggas (ekor)	2.346.072 ekor				2.364.135 ekor	
					Angka konsumsi daging per kapita (kg/kapita/tahun)	4 kg/kapita/tahun				4 kg/kapita/tahun	
					- Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	100 %				100%	
					Jumlah kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina (kelompok)	2 Kelompok				2 Kelompok	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			TAPIN	Luas Pertanaman Padi (Ha)	86.535 Ha	5.175.786.500	0	0	87.548 Ha	5.434.575.825
					Luas Pertanaman Jagung (Ha)	1.100 Ha				1.200 Ha	
					Luas Pertanaman Kedelai (Ha)	400 Ha				450 Ha	
					Jumlah Produksi Benih Padi Bermutu (ton)	7 ton				7 ton	
					Jumlah kelompok penangkar yang dibina (Kelompok)	3 Kelompok				3 Kelompok	
					Waktu Optimalisasi pengelolaan TTP (tahun)	1 tahun				1 tahun	
					Jumlah pertemuan kelompok usaha dan pengolahan hasil pertanian (kali)	6 kali				6 kali	
					Jumlah promosi hasil produksi dan pengolahan Tanaman Pangan (kali)	1 kali				1 kali	
					Jumlah Pengembangan Cabe Rawit Hiyung (Ha)	25 Ha				25 Ha	
					Jumlah Produksi Bibit Jeruk (mata tempel)	5.000 mata tempel				5.000 mata tempel	
					Jumlah Pengembangan Jeruk (Ha)	25 Ha				25 Ha	
					Jumlah Desa pengembangan tanaman Toqa dan sayuran (Desa)	2 Desa				2 Desa	
					Jumlah Pengembangan Bawang Merah (Ha)	78 Ha				78 Ha	
					Waktu pengelolaan Kebun Pertanian Terpadu (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Promosi yang dilaksanakan (kali)	1 kali				1 kali	
					Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan yang dibina (kelompok)	1 kelompok				1 kelompok	
					Jumlah Luasan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat yang dikembangkan (Ha)	25 Ha				25 Ha	
					Jumlah bibit Aren Genjah yang diserahkan kepada masyarakat (Pohon)	1.125 Pohon				1.125 Pohon	
					Jumlah Kelompok Tani yang didampingi (Kelompok)	3 Kelompok				3 Kelompok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Luas Intensifikasi Karet (Ha)	15 Ha					15 Ha	
					Luas Rehabilitasi Karet (Ha)	100 Ha					100 Ha	
					Jumlah Ketersediaan Bibit Karet Okulasi Yang Bermutu (pohon)	20.000 Pohon					20.000 Pohon	
					Jumlah Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit Yang Bermutu (pohon)	9.750 Pohon					9.750 Pohon	
					Jumlah Bimtek yang diselenggarakan (Kali)	9 Kali					9 Kali	
					Waktu penyediaan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat (Bulan)	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah promosi atas hasil produksi peternakan (Kali)	1 Kali					1 Kali	
					Jumlah promosi/ sosialisasi Gerakan Minum Susu (Kali)	1 Kali					1 Kali	
					Jumlah promosi gerakan makan daging dan telur (Kali)	5 Kali					5 Kali	
					Jumlah sosialisasi Penumbuhan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan (Kali)	1 Kali					1 Kali	
					Waktu inventarisasi pengolahan hasil peternakan (Bulan)	12 Bulan					12 Bulan	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			Kabupaten Tapin	Jumlah Luas Pertanaman Padi (Ha)	89577,6 Ha	5.175.786.500		0	0	94056,48 Ha	5.434.575.825
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah bantuan hadiah ternak unggul (Paket)	2 Paket	156.381.200		0	0	2 Paket	164.200.260
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			Kabupaten Tapin	Waktu pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Bulan	156.381.200		0	0	12 Bulan	164.200.260
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu optimalisasi pengelolaan pembibitan ternak (tahun)	1 tahun	2.730.064.400		0	0	1 tahun	2.866.567.620
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			Kabupaten Tapin	Jumlah Angka Kelahiran Ternak Sapi (Ekor)	1600 ekor	2.142.538.200		0	0	1700 ekor	2.249.665.110
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 paket	350.088.800		0	0	1 paket	367.593.240
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			Kabupaten Tapin	Waktu Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Bulan)	12 Bulan	237.437.400		0	0	12 Bulan	249.309.270
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase lahan sawah fungsional yang terairi (persen)	15,40%	12.779.857.200		0	0	15,45%	13.418.850.060
					Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen (Persen)	27,98%					28,26%	
					Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (persen)	2,51%					2,53%	
					Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)	63138,00 Ha					63163,00 Ha	
					Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	100%					100%	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			TAPIN	Jumlah Peserta AUTP (org)	3500 org	93.450.500		0	0	3500 org	98.123.025
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta AUTP (Ha)	3000 Ha	93.450.500		0	0	3000 Ha	98.123.025
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			TAPIN	Jumlah sarana pengairan dan irigasi yang dibangun (paket)	5 paket	12.686.406.700		0	0	5 paket	13.320.727.035
					Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun (meter)	5.000 meter					5.000 meter	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			Kabupaten Tapin	Jumlah sarana pengairan dan irigasi yang dibangun/direhab (paket)	2 Paket	2.057.600.000		0	0	2 Paket	2.160.480.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			Kabupaten Tapin	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun (Meter)	7500 Meter	9.803.770.000		0	0	7500 Meter	10.293.958.500
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Paket)	2 paket	825.036.700		0	0	2 paket	866.288.535
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (Kecamatan)	12 Kecamatan	132.851.600		0	0	12 Kecamatan	139.494.180
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			Kabupaten Tapin	Jumlah Hewan yang divaksin dan diobati (Ekor)	9000 ekor	132.851.600		0	0	9000 ekor	139.494.180
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah cakupan wilayah pemberantasan rabies tingkat kabupaten (Kecamatan)	12 Kecamatan	9.087.000		0	0	12 Kecamatan	9.541.350
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Waktu Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	9.087.000		0	0	12 Bulan	9.541.350
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu pelayanan kesehatan hewan pada wilayah sentra peternakan (Bulan)	12 Bulan	39.101.000		0	0	12 Bulan	41.056.050

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Bulan	39.101.000	0	0	12 Bulan	41.056.050
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Pesaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			TAPIN	Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (Kecamatan)	12 Kecamatan	127.830.200	0	0	12 Kecamatan	134.221.710
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kelompok Hasil Peternakan yang dibina (Kelompok)	2 kelompok	127.830.200	0	0	2 kelompok	134.221.710
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		-Produktivitas Padi (Ku/Ha)	51 Ku/Ha	1.009.360.000	0	0	52 Ku/Ha	1.059.828.000
					- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	50 Ku/Ha				51 Ku/Ha	
					- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	10 Ku/Ha				10 Ku/Ha	
					- Luas Panen Padi (Ha)	82.768 Ha				83.746 Ha	
					- Luas Panen Jagung (Ha)	1.937 Ha				2.003 Ha	
					- Luas Panen Kedelai (Ha)	120 Ha				124 Ha	
					- Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	163 Ha				171 Ha	
					- Luas Panen Bawang Merah (Ha)	153 Ha				161 Ha	
					- Luas Panen Jeruk (Ha)	444 Ha				466 Ha	
					- Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	94 Ku/Ha				94 Ku/Ha	
					- Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	73 Ku/Ha				73 Ku/Ha	
					- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	679 Ku/Ha				699 Ku/Ha	
					- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	2.175 Ku/Ha				2.284 Ku/Ha	
					- Luas Tanaman Karet (Ha)	15.427 Ha				15.890 Ha	
					- Luas Tanaman Sawit (Ha)	3.540 Ha				3.646 Ha	
					- Persentase Intensitas serangan OPT Perkebunan	3%				3%	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Bahan Pengendalian OPT (paket)	1 paket	1.009.360.000	0	0	1 paket	1.059.828.000
					Jumlah komoditas hortikultura yg di sertifikasi (komoditas)	1 komoditas				1 komoditas	
					Jumlah Kelompok Tani yang terlatih PHT Perkebunan (kelompok)	2 kelompok				2 kelompok	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Kabupaten Tapin	Jumlah Bahan Pengendalian OPT (paket)	3 Paket	1.009.360.000	0	0	3 Paket	1.059.828.000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase Perijinan yang dipenuhi (%)	100%	51.690.000	0	0	100%	54.274.500
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Bokar Bermutu (Ton)	500 Ton	51.690.000	0	0	500 Ton	54.274.500
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian			Kabupaten Tapin	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1 paket	51.690.000	0	0	1 paket	54.274.500
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase Kelas kelompok tani Madya (%)	22%	3.874.949.800	0	0	25%	4.068.697.290
					Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis (%)	65%				75%	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			TAPIN	Jumlah Kelas Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan (BPP) yang Meningkatkan (unit)	2 Unit	3.874.949.800	0	0	2 Unit	4.068.697.290
					Jumlah Program Penyuluhan Pertanian yang Disusun (Buku)	13 Buku				13 Buku	
					Jumlah Penyuluh Pertanian yang Meningkatkan Kompetensinya (orang)	19 orang				21 orang	
					Jumlah Media Informasi Penyuluhan yang diterbitkan (paket)	7 paket				7 paket	
					Jumlah Percontohan usaha tani yang dilaksanakan (unit)	8 unit				8 unit	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			Kabupaten Tapin	Jumlah Kelas Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan (BPP) yang Meningkatkan (unit)	5 Unit	631.566.800	0	0	5 Unit	663.145.140
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			Kabupaten Tapin	Jumlah Kelompok Tani yang di berdayakan (kelompok)	55 kelompok	449.821.700	0	0	55 kelompok	472.312.785
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12 bulan	406.452.200	0	0	12 bulan	426.774.810
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			Kabupaten Tapin	Waktu Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	12 bulan	75.715.100	0	0	12 bulan	79.500.855
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (unit)	3 Unit	2.311.394.000	0	0	3 Unit	2.426.963.700
	Dinas Perdagangan						10.851.463.180	0	0		11.394.036.339
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	5.282.391.180	0	0	100%	5.546.510.739
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%					100%	
					Persentase Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah ketersediaan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	10 laporan	8.950.000	0	0		10 laporan	9.397.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rantau	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	10 berkas	8.950.000	0	0		berkas	9.397.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah ketersediaan laporan keuangan	2 laporan	3.661.772.480	0	0		2 laporan	3.844.861.104
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rantau	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.651.772.480	0	0			3.834.361.104
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rantau	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	1 berkas	3.900.000	0	0		berkas	4.095.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Rantau	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	4 berkas	6.100.000	0	0		berkas	6.405.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu ketersediaan komponen listrik	12 Bulan	754.679.600	0	0		12 Bulan	792.413.580
					waktu ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan					12 Bulan	
					waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan					12 Bulan	
					waktu ketersediaan konsumsi	12 Bulan					12 Bulan	
					waktu ketersediaan Perjalanan Dinas	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah tersedianya Tapin Expo	1 kegiatan					1 kegiatan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rantau	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		17.664.600	0	0			18.547.830
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rantau	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	66.507.000	0	0		12 bulan	69.832.350
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rantau	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	92.259.800	0	0		bulan	96.872.790
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Rantau	waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	23.724.800	0	0		bulan	24.911.040
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Rantau	waktu Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	3.097.400	0	0		bulan	3.252.270
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Rantau	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	6.000.000	0	0		12 bulan	6.300.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rantau	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	545.426.000	0	0		bulan	572.697.300
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	7 buah	185.327.100	0	0		7 buah	194.593.455
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rantau	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	147.779.200	0	0		unit	155.168.160
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	37.547.900	0	0		unit	39.425.295
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu ketersediaan jasa telepon listrik dan air	12 Bulan	331.761.600	0	0		12 Bulan	348.349.680
					waktu ketersediaan jasa petugas kebersihan kantor	12 Bulan					12 Bulan	
					waktu ketersediaan jasa Keamanan kantor	12 Bulan					12 Bulan	
					waktu ketersediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rantau	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 bulan	130.381.600	0	0		bulan	136.900.680
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 bulan	201.380.000	0	0		bulan	211.449.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu ketersediaan jasa kendaraan dinas/operasional	12 bulan	339.900.400	0	0		12 bulan	356.895.420
					Waktu ketersediaan pemeliharaan Peralatan inventaris kantor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	12 bulan					12 bulan	
					waktu Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	waktu Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	76.195.400	0	0		bulan	80.005.170
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19.850.000	0	0			20.842.500
X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Rantau	waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	12 bulan	6.000.000	0	0		bulan	6.300.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	237.855.000	0	0		12 bulan	249.747.750
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	100%	48.699.800	0	0	100%	51.134.790
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			TAPIN	Jumlah rekomendasi izin usaha perdagangan	400 surat	37.924.800	0	0	400 surat	39.821.040
					Jumlah Pengawasan monitoring dan evaluasi perusahaan	12 kali				12 kali	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kabupaten Tapin	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	150 buah	37.924.800	0	0	buah	39.821.040
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			TAPIN	jumlah Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	12 kali	10.775.000	0	0	12 kali	11.313.750
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			Kab. Tapin	Jumlah Obyek berpotensi mengedarkan yang dimonitor	12 buah	10.775.000	0	0	buah	11.313.750
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Persentase Pasar Tradisional yang dibangun	97,66%	4.508.274.800	0	0	100%	4.733.688.540
					Persentase Pasar Tradisional yang direvitalisasi	91,67%				100%	
					Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	78 indeks				79 indeks	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			TAPIN	waktu pembangunan pasar	12 bulan	4.444.426.800	0	0	12 bulan	4.666.648.140
					waktu Pembuatan raperda retribusi pasar	12 bulan				12 bulan	
					waktu revitalisasi pasar tradisional	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pengembangan dan peningkatan pasar	12 bulan				12 bulan	
					waktu ketersediaan Peresmian pasar kuliner ramadhan	1 kegiatan				1 kegiatan	
					waktu ketersediaan pemeliharaan sarana/prasarana pasar	12 bulan				12 bulan	
					waktu ketersediaan Pembersihan lingkungan pasar	12 bulan				12 bulan	
					waktu ketersediaan Pembersihan drainase pasar	12 bulan				12 bulan	
					waktu ketersediaan Pengamanan dan penertiban pasar	12 bulan				12 bulan	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana dan prasarana yang diperbaiki	3 buah	2.079.434.800	0	0	buah	2.183.406.540
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	26 orang	2.364.992.000	0	0	orang	2.483.241.600
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			TAPIN	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	1000 data	63.848.000	0	0	1000 data	67.040.400
					jumlah ketersediaan database pasar	1000 surat				1000 surat	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Surat Perjanjian Sewa menyewa toko/kios/warung	750 Dokumen	63.848.000	0	0	Dokumen	67.040.400
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat	100%	113.858.000	0	0	100%	119.550.900
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			TAPIN	waktu ketersediaan Pengawasan barang beredar, barang dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus	12 bulan	50.058.000	0	0	12 bulan	52.560.900
					waktu ketersediaan Pengawasan, pemantauan, monitoring dan informasi harga sembako	12 bulan				12 bulan	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Kabupaten Tapin	stabilitas ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1,5 persen	50.058.000	0	0	persen	52.560.900
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Pendataan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	48 Kali	63.800.000	0	0	48 Kali	66.990.000
					Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar	3 Kali				3 Kali	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Kabupaten Tapin	Waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 bulan	63.800.000	0	0	12 bulan	66.990.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Persentase Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan	100%	137.999.900	0	0	100%	144.899.895

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah partisipasi pameran luar kabupaten Tapin	2 Kali	137.999.900	0	0	2 Kali	144.899.895
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang mengikuti Sosialisasi	50 orang	30.400.000	0	0	orang	31.920.000
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional			Luar Kabupaten Tapin	Jumlah Pameran produk unggulan daerah yang diikuti	2 kali	60.600.000	0	0	kali	63.630.000
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal			Kabupaten Tapin	Jumlah Pameran produk unggulan daerah yang diikuti	2 kali	46.999.900	0	0	kali	49.349.895
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang tidak Sesuai SNI	95%	272.689.500	0	0	95%	286.323.975
					Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	100%				100%	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			TAPIN	waktu pembuatan perda jasa retribusi metrologi	12 bulan	272.689.500	0	0	12 bulan	286.323.975
					waktu Pengadaan peralatan standar metrologi	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembangunan Gedung Metrologi	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya (UTTP)	4 kali				4 kali	
					Jumlah ketersediaan penyuluhan	1 kali				1 kali	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Kabupaten Tapin	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	1.382 buah	251.507.500	0	0	buah	264.082.875
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			Masyarakat	Jumlah Konsumen mendapatkan penyuluhan	100 orang	21.182.000	0	0	orang	22.241.100
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang	100%	487.550.000	0	0	100%	511.927.500
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			TAPIN	waktu Sosialisasi SRG	12 bulan	487.550.000	0	0	12 bulan	511.927.500
					Waktu Monitoring dan pengawasan SRG	12 bulan				12 bulan	
					jumlah Koordinasi penyelenggaraan Tapin Expo	1 Kali				1 Kali	
					jumlah ketersediaan kegiatan operasional Pengelolaan SRG	12 bulan				12 bulan	
					jumlah ketersediaan penyuluhan pedagang informal kecil	1 kali				1 kali	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Resi yang diterbitkan	12 resi	487.550.000	0	0	resi	511.927.500
	Dinas Perindustrian						6.355.966.133	0	0		6.673.764.440
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	4.151.068.733	0	0	100%	4.358.622.170
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	7.500.000	0	0	13 Laporan	7.875.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	7.500.000	0	0	13 Laporan	7.875.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	2 Laporan	2.524.238.233	0	0	2 Laporan	2.650.450.145
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.516.738.233	0	0	12 Bulan	2.642.575.145
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.250.000	0	0	1 Laporan	4.462.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.250.000	0	0	1 Laporan	3.412.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah ketersediaan komponen listrik	12 Bulan	1.242.304.200	0	0	12 Bulan	1.304.419.410
					Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah partisipasi Tapin Expo	1 Kali				1 Kali	
					Waktu ketersediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.833.400	0	0	12 Bulan	4.025.070
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	55.927.700	0	0	12 Bulan	58.724.085
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	78.589.200	0	0	12 Bulan	82.518.660
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	16.697.900	0	0	12 Bulan	17.532.795
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	1.352.000	0	0	12 Bulan	1.419.600
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	4.500.000	0	0	12 Bulan	4.725.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.081.404.000	0	0	12 Bulan	1.135.474.200
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1 Paket	163.201.200	0	0	1 Paket	171.361.260
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37 Unit	163.201.200	0	0	37 Unit	171.361.260
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	168.800.000	0	0	12 Bulan	177.240.000
					Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah partisipasi Tapin Expo	1 Kali				1 Kali	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	66.000.000	0	0	12 Bulan	69.300.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	102.800.000	0	0	12 Bulan	107.940.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	45.025.100	0	0	12 Bulan	47.276.355
					Jumlah ketersediaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Paket				1 Paket	
					Jumlah ketersediaan pemeliharaan gedung kantor	1 Paket				1 Paket	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	30.445.100	0	0	12 Bulan	31.967.355
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	14.580.000	0	0	12 Bulan	15.309.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Koperasi Aktif	87,59%	36.485.000	0	0	87,84%	38.309.250
					Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	70%				80%	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah pemeringkatan koperasi	1 Kali	36.485.000	0	0	1 Kali	38.309.250
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Pemeringkatan	36.485.000	0	0	1 Pemeringkatan	38.309.250
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Koperasi Aktif	87,59%	26.960.000	0	0	87,84%	28.308.000
					Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	70%				80%	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Bimbingan RAT Koperasi	1 Kali	26.960.000	0	0	1 Kali	28.308.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1 Bimbingan	26.960.000	0	0	1 Bimbingan	28.308.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Koperasi Aktif	87,59%	48.455.000	0	0	87,84%	50.877.750
					Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	70%				80%	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Penyuluhan Perpajakan Bagi koperasi	1 Kali	48.455.000	0	0	1 Kali	50.877.750
					Waktu ketersediaan operasional data koparasi online	12 Bulan				12 Bulan	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Pelatihan	48.455.000	0	0	1 Pelatihan	50.877.750
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro	20,90%	497.977.500	0	0	22,55%	522.876.375
					Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha	16,91%				17,88%	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			TAPIN	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru	1 Kali	497.977.500	0	0	1 Kali	522.876.375
					Jumlah Pembinaan UP2K	1 Kali				1 Kali	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2 Pelatihan	497.977.500	0	0	2 Pelatihan	522.876.375
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0,38% %	1.302.722.000	0	0	0,41% %	1.367.858.100
					Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	0,27% %				0,29% %	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN	Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tapin EXPO	1 Kali	1.302.722.000	0	0	1 Kali	1.367.858.100
					Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Kalsel Expo	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Baniarmasin Festival Sasirangan	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional	2 Kali				2 Kali	
					Jumlah penyediaan pendukung Operasionalisasi DEKRANASDA Kab.Tapin	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu ketersediaan operasional kegiatan pengolahan kaolin	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu ketersediaan operasional Galeri TAMASA	12 Bulan				12 Bulan	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Rantau	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	10 Sertifikasi	12.500.000	0	0	10 Sertifikasi	13.125.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Kec. Tapin Selatan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Bulan	108.796.300	0	0	12 Bulan	114.236.115
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Kec. Tapin Utara	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Bulan	150.155.400	0	0	12 Bulan	157.663.170
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jakarta, Banjarmasin, Banjarbaru, Rantau	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Pameran	1.031.270.300	0	0	5 Pameran	1.082.833.815
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,38% %	143.183.600	0	0	0,41% %	150.342.780

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	0,27% %					0,29% %	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	1 kali	143.183.600	0	0		1 kali	150.342.780
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 Sosialisasi	143.183.600	0	0		4 Sosialisasi	150.342.780
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,38% %	149.114.300	0	0		0,41% %	156.570.015
					Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	0,27% %					0,29% %	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu penyediaan inventarisasi dan pendataan usaha IKM	12 Bulan	149.114.300	0	0		12 Bulan	156.570.015
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Laporan	98.616.900	0	0		1 Laporan	103.547.745
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Peta	35.401.500	0	0		1 Peta	37.171.575
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			Kabupaten Tapin	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Rapat	15.095.900	0	0		1 Rapat	15.850.695
	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)						299.157.700	0	0			314.115.585
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase usulan raperda /perbup/kepbup yang ditetapkan	100%	299.157.700	0	0		%	314.115.585
					Persentase perkara hukum yang diselesaikan	100%					%	
					Persentase Produk Hukum yang disebarluaskan	100%					%	
					Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	74%					77%	
					Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	93%					98%	
					Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten	3 Poin					3 Poin	
					Persentase batas wilayah yang telah ditetapkan	100%					100%	
					Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu	100%					100%	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			TAPIN	Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	1 Dokumen	299.157.700	0	0		1 Dokumen	314.115.585
					Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	1 Dokumen					1 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	2 Dokumen					2 Dokumen	
					Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi (Bulan)	12 bulan					12 bulan	
					Jumlah Konflik Batas Yang Diselesaikan (Kabupaten)	1 Kabupaten					1 Kabupaten	
					Jumlah Kegiatan Penamaan Rupabumi	1 Kegiatan					1 Kegiatan	
					Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional Yang Dilaksanakan (Kali)	12 Kali					12 Kali	
					Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	2 Dokumen					2 Dokumen	
					Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi (Bulan)	12 bulan					12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Jumlah Konflik Batas Yang Diselesaikan (Kabupaten)	1 Kabupaten				1 Kabupaten	
					Jumlah Kegiatan Penamaan Rupabumi	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
					Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional Yang Dilaksanakan (Kali)	12 Kali				12 Kali	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan			Kabupaten Tapin	Waktu Penataan Administrasi Pemerintahan	12 bulan	49.000.000	0	0	12 bulan	51.450.000
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			Rantau	Waktu Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12 bulan	37.800.000	0	0	12 bulan	39.690.000
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Rantau	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 bulan	212.357.700	0	0	12 bulan	222.975.585
	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)						988.160.200	0	0		1.037.568.210
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase usulan raperda /perbup/kepup yang ditetapkan	100%	988.160.200	0	0	%	1.037.568.210
					Persentase perkara hukum yang diselesaikan	100%				%	
					Persentase Produk Hukum yang disebarluaskan	100%				%	
					Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	74%				77%	
					Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	93%				98%	
					Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten	3 Poin				3 Poin	
					Persentase batas wilayah yang telah ditetapkan	100%				100%	
					Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu	100%				100%	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			TAPIN	Jumlah Dokumen Kumpulan Produk Hukum	1 buah	988.160.200	0	0	buah	1.037.568.210
					Persentase Penanganan Perkara yang diselesaikan	100%				%	
					Waktu pelaksanaan koordinasi RANHAM (bln)	12 bulan				bulan	
					Jumlah Raperda/Perbup/Keppup yang diselesaikan	255 produk hukum				produk hukum	
					Waktu pengelolaan Jaringan Informasi Hukum (bln)	12 bulan				bulan	
					Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan (org)	200 orang				orang	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Raperda/Perbup/Keppup yang diselesaikan	255 produk hukum	265.014.100	0	0	255 produk hukum	278.264.805
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			Kabupaten Tapin	Waktu pelaksanaan koordinasi RANHAM	12 bulan	443.598.600	0	0	12 bulan	465.778.530
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Kumpulan Produk Hukum	1 dokumen	279.547.500	0	0	1 dokumen	293.524.875
	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)						515.292.500	0	0		541.057.125
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	515.292.500	0	0	100%	541.057.125
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100 Nilai				100 Nilai	
					Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	100%				100%	
					Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%				100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%				100%	
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100 Nilai				100 Nilai	
					Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	100%				100%	
					Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%				100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%				%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	97%				97%	
					Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi			TAPIN	waktu Pelaksanaan Analisis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja	12 bulan	515.292.500	0	0	12 bulan	541.057.125
					waktu Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	12 bulan				12 bulan	
					waktu Review dan Evaluasi Kelembagaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12 bulan				12 bulan	
					waktu Asistensi dan Fasilitasi Aturan Ketatalaksanaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembinaan Pelayanan Publik	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah organisasi sosial yang ditunjang pelaksanaannya	5 organisasi				5 organisasi	
					waktu Pelaksanaan Analisis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	12 bulan				12 bulan	
					waktu Review dan Evaluasi Kelembagaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12 bulan				12 bulan	
					waktu Asistensi dan Fasilitasi Aturan Ketatalaksanaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembinaan Pelayanan Publik	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pelaksanaan Analisis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah organisasi sosial yang ditunjang pelaksanaannya	5 organisasi				5 organisasi	
					Waktu tersedia rumah Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	12 Bulan				12 Bulan	
					waktu Review dan Evaluasi Kelembagaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Rantau	Jumlah skpd yang telah di Anjab, ABK, dan Eviab	10 Dok	209.760.000	0	0	10 Dok	220.248.000
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Rantau	Jumlah SKPD dengan kinerja pelayanan berkategori baik	2 SKPD	114.136.100	0	0	2 SKPD	119.842.905
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Rantau	Nilai Transparansi dan Akuntabilitas Pemkab. Tapin	BB Nilai	191.396.400	0	0	BB Nilai	200.966.220
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	Sekretariat Daerah (Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol)						5.323.949.900	0	0		5.590.147.395
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	5.323.949.900	0	0	100%	5.590.147.395
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100 Nilai				100 Nilai	
					Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	100%				100%	
					Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%	
					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100 Nilai					100 Nilai	
					Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	100%					100%	
					Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	97%					97%	
					Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	100%					100%	
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			TAPIN	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah terhadap Publik melalui Media Massa dan Media elektronik	1 Berita	5.323.949.900	0	0		1 Berita	5.590.147.395
					Jumlah Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil yang dilayani	1 jadwal dan sambutan					1 jadwal dan sambutan	
					waktu Penunjang Keprotokoleran Kepala Daerah	12 bulan					12 bulan	
					Jumlah paket kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	5 Paket					5 Paket	
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			Tapin	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	12 bulan	393.099.100	0	0		12 bulan	412.754.055
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Tapin	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 bulan	2.063.050.800	0	0		12 bulan	2.166.203.340
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			Tapin	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 bulan	2.867.800.000	0	0		12 bulan	3.011.190.000
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01					SEKRETARIAT DAERAH							
					Sekretariat Daerah (Bagian Umum)		34.807.543.455	0	0			36.547.920.628
X					Semua Urusan							
X.XX					Semua Bidang							
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	34.807.543.455	0	0		100%	36.547.920.628
					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100 Nilai					100 Nilai	
					Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	100%					100%	
					Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%	
					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100 Nilai					100 Nilai	
					Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	100%					100%	
					Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	97%					97%	
					Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	13.700.000	0	0		12 bulan	14.385.000
					waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan					12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	13.700.000	0	0		12 bulan	14.385.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	12 bulan	16.163.899.149	0	0		12 bulan	16.972.094.106
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	15.996.607.149	0	0		12 bulan	16.796.437.506
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kabupaten Tapin	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	161.480.000	0	0		12 bulan	169.554.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	2.906.000	0	0		12 bulan	3.051.300
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	2.906.000	0	0		12 bulan	3.051.300
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	3.111.541.600	0	0		12 bulan	3.267.118.680
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kabupaten Tapin	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 bulan	2.985.541.600	0	0		12 bulan	3.134.818.680
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kabupaten Tapin	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	126.000.000	0	0		12 bulan	132.300.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	10.834.738.800	0	0		12 bulan	11.376.475.740
					waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan					12 bulan	
					waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan					12 bulan	
					pelaksanaan Tapin Expo	1 kali					1 kali	
					waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu penyediaan komponen alat listrik/penerangan di bangunan kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	389.382.500	0	0		12 bulan	408.851.625
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	211.500.000	0	0		12 bulan	222.075.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	74.600.000	0	0		12 bulan	78.330.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	10.380.500	0	0		12 bulan	10.899.525
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	2.554.952.600	0	0		12 bulan	2.682.700.230
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	7.593.923.200	0	0		12 bulan	7.973.619.360
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah acara dilingkungan Pemkab Tapin	13 Kali	2.760.400.000	0	0		15 Kali	2.898.420.000
					waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor di Sekretariat Daerah dan Gedung Pendopo Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah acara dilingkungan Pemkab Tapin	13 Kali					15 Kali	
					waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor di Sekretariat Daerah dan Gedung Pendopo Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Paket pengadaan Tanah untuk Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	0 Paket					0 Paket	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	184.400.000	0	0		12 bulan	193.620.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	2.576.000.000	0	0		12 bulan	2.704.800.000
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			TAPIN	Jumlah Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil yang dilayani	1 jadwal dan sambutan	1.923.263.906	0	0		1 jadwal dan sambutan	2.019.427.101
					Waktu Terpeliharanya mobil dinas jabatan Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan					12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Waktu Terpeliharanya rumah jabatan Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah paket Inventaris Rumah Jabatan Kdh dan Wakil Kdh	5 bulan					5 bulan	
					Jumlah penambahan tanah daerah	5 Paket					5 Paket	
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	168.541.206	0	0		12 bulan	176.968.266
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	754.722.700	0	0		12 bulan	792.458.835
X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	1.000.000.000	0	0		12 bulan	1.050.000.000
	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)						736.499.100	0	0			773.324.055
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	100%	736.499.100	0	0		100%	773.324.055
					Persentase BUMD yang sehat dan profitable	100%					100%	
					Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	100%					100%	
					Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	100%					100%	
					Persentase BUMD yang sehat dan profitable	100%					100%	
					Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	100%					100%	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			TAPIN	Waktu penyediaan lelang dan maintenance LPSE	12 bulan	736.499.100	0	0		12 bulan	773.324.055
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Tapin	Waktu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	456.874.300	0	0		12 bulan	479.718.015
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			tapin	Waktu Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 bulan	213.725.000	0	0		12 bulan	224.411.250
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			tapin	Waktu Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	65.899.800	0	0		12 bulan	69.194.790
	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)						16.429.766.600	0	0			17.251.254.930
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase usulan raperda /perbup/kepbup yang ditetapkan	100%	16.429.766.600	0	0		%	17.251.254.930
					Persentase perkara hukum yang diselesaikan	100%					%	
					Persentase Produk Hukum yang disebarluaskan	100%					%	
					Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	74%					77%	
					Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	93%					98%	
					Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten	3 Poin					3 Poin	
					Persentase batas wilayah yang telah ditetapkan	100%					100%	
					Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu	100%					100%	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			TAPIN	Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	300 orang	16.429.766.600	0	0		300 orang	17.251.254.930
					Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	300 orang					300 orang	
					Jumlah kunjungan safari Ramadhan	20 kali					20 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	300 orang					300 orang	
					Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Fitri	1 kegiatan					1 kegiatan	
					Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Adha	1 kegiatan					1 kegiatan	
					Jumlah kunjungan safari Jumat	20 kali					20 kali	
					Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar Islam	5 kegiatan					5 kegiatan	
					Jumlah qori yang berprestasi di tingkat daerah provinsi dan nasional	35 orang					35 orang	
					Jumlah peserta kafilah yang dibina	35 orang					35 orang	
					Jumlah cabang yang diikuti	30 cabang					30 cabang	
					Jumlah Pelaksanaan Dialog/audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	1 kali					1 kali	
					Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji daerah	1 kegiatan					1 kegiatan	
					Jumlah pensiunan wredatama yang dibantu untuk meningkatkan kesejahteraannya	29 orang/kali					29 orang/kali	
					Jumlah organisasi sosial yang ditunjang pelaksanaannya	5 organisasi					5 organisasi	
					Jumlah pelaksanaan silaturahmi	30 kali					30 kali	
					Jumlah tokoh masyarakat pemuka agama dan aktivis sosial yang mendapatkan fasilitasi masalah sosial	5 orang					5 orang	
					Jumlah organisasi sosial yang berperan aktif dalam pengembangan kreativitas masyarakat	0 organisasi					0 organisasi	
					Jumlah kunjungan safari Ramadhan	20 kali					20 kali	
					Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	300 orang					300 orang	
					Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Fitri	1 kegiatan					1 kegiatan	
					Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Adha	1 kegiatan					1 kegiatan	
					Jumlah kunjungan safari Jumat	20 kali					20 kali	
					Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar Islam	5 kegiatan					5 kegiatan	
					Jumlah qori yang berprestasi di tingkat daerah provinsi dan nasional	35 orang					35 orang	
					Jumlah peserta kafilah yang dibina	35 orang					35 orang	
					Jumlah cabang yang diikuti	30 cabang					30 cabang	
					Jumlah Pelaksanaan Dialog/audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	1 kali					1 kali	
					Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji daerah	1 kegiatan					1 kegiatan	
					Jumlah pensiunan wredatama yang dibantu untuk meningkatkan kesejahteraannya	29 orang/kali					29 orang/kali	
					Jumlah organisasi sosial yang ditunjang pelaksanaannya	5 organisasi					5 organisasi	
					Jumlah pelaksanaan silaturahmi	30 kali					30 kali	
					Jumlah tokoh masyarakat pemuka agama dan aktivis sosial yang mendapatkan fasilitasi masalah sosial	5 orang					5 orang	
					Jumlah organisasi sosial yang berperan aktif dalam pengembangan kreativitas masyarakat	3 organisasi					3 organisasi	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Tapin	Waktu Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 bulan	3.954.763.900	0	0		12 bulan	4.152.502.095
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Tapin	Jumlah kegiatan pengelolaan dan pembinaan mental spritual yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	94 kegiatan	3.954.763.900	0	0		kegiatan	4.152.502.095
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			Tapin	Waktu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	12 bulan	12.475.002.700	0	0		12 bulan	13.098.752.835
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			Tapin	Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	55 kegiatan	12.475.002.700	0	0		kegiatan	13.098.752.835
	Sekretariat Daerah (Bagian Perlengkapan)						9.460.035.300	0	0			9.933.037.065
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	9.460.035.300	0	0		100%	9.933.037.065

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100 Nilai					100 Nilai	
					Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	100%					100%	
					Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%	
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100 Nilai					100 Nilai	
					Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	100%					100%	
					Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	97%					97%	
					Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	100%					100%	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan barang cetakan dan penagandaan	12 bulan	95.000.000		0	0	12 bulan	99.750.000
					waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan					12 bulan	
					waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan					12 bulan	
					pelaksanaan Tapin Expo	1 kali					1 kali	
					waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu penyediaan komponen alat listrik/penerangan di bangunan kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Sekretariat Daerah	Waktu penyediaan komponen alat listrik/penerangan di bangunan kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan	95.000.000		0	0	12 Bulan	99.750.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Barang dan jasa yang disediakan	1 Buah	2.623.549.400		0	0	1 Buah	2.754.726.870
					Barang dan jasa yang disediakan	1 Buah					1 Buah	
					Paket pengadaan Tanah untuk Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	0 Paket					0 Paket	
					Jumlah kendaraan dinas/operasional	8 unit					8 unit	
					Jumlah paket perlengkapan Asrama Mahasiswa	2 Paket					2 Paket	
					Jumlah penambahan tanah daerah	5 Paket					5 Paket	
					Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	3 Paket					3 Paket	
					Waktu tersedia rumah Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah paket kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	5 Paket					5 Paket	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Sekretariat Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional	8 Unit	138.034.400		0	0	8 Unit	144.936.120
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Sekretariat Daerah	Jumlah paket pengadaan mebel	3 Paket	796.074.000		0	0	3 Paket	835.877.700
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin	3 Paket	1.504.789.000		0	0	3 Paket	1.580.028.450
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Jumlah paket pengadaan gedung kantor	2 Paket	175.697.000		0	0	2 Paket	184.481.850
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Jumlah paket pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3 Paket	8.955.000		0	0	3 Paket	9.402.750
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah acara dilingkungan Pemkab Tapin	13 Kali	1.622.875.300		0	0	15 Kali	1.704.019.065
					waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor di Sekretariat Daerah dan Gedung Pendopo Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah acara dilingkungan Pemkab Tapin	13 Kali					15 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan					12 bulan	
					Waktu tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor di Sekretariat Daerah dan Gedung Pendopo Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Paket pengadaan Tanah untuk Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	0 Paket					0 Paket	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sekretariat Daerah	Jumlah acara diilngkungan Pemkab Tapin	13 Acara	1.002.444.900	0	0		15 Acara	1.052.567.145
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	620.430.400	0	0		12 bulan	651.451.920
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	620.430.400	0	0		12 bulan	651.451.920
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	620.430.400	0	0		12 bulan	651.451.920
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	620.430.400	0	0		12 bulan	651.451.920
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	620.430.400	0	0		12 bulan	651.451.920
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	620.430.400	0	0		12 bulan	651.451.920
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	620.430.400	0	0		12 Bulan	651.451.920
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Pemanfaatan tanah daerah secara efektif dan efisien	12 Bulan	2.827.038.800	0	0		12 Bulan	2.968.390.740
					Pemanfaatan tanah daerah secara efektif dan efisien	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Pengelolaan aset yang efektif dan efisien	12 Bulan					12 Bulan	
					Terpenuhiya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara fasilitas komputer dan kelengkapannya di Sekretariat Daerah dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara Asrama Mahasiswa/i Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara perlengkapan gedung kantor Sekratriat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara fasilitas mobil dinas dan sepeda motor dinas di Sekertariat Daerah	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 bulan					12 bulan	
					Waktu terpelihara rumah dinas	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Terpeliharanya mobil dinas jabatan Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Terpeliharanya rumah jabatan Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah kendaraan dinas/operasional	8 unit					8 unit	
					Waktu Pengelolaan aset yang efektif dan efisien	12 Bulan					12 Bulan	
					Terpenuhiya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara fasilitas komputer dan kelengkapannya di Sekertariat Daerah dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara Asrama Mahasiswa/i Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara perlengkapan gedung kantor Sekratriat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara fasilitas mobil dinas dan sepeda motor dinas di Sekertariat Daerah	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu terpelihara gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	12 bulan					12 bulan	
					Waktu terpelihara rumah dinas	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Terpeliharanya mobil dinas jabatan Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan					12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Waktu Terpeliharanya rumah jabatan Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			sekretariat daerah kabupaten tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1.369.980.800	0	0		12 bulan	1.438.479.840
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			sekretariat daerah kabupaten tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1.369.980.800	0	0		12 bulan	1.438.479.840
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			sekretariat daerah kabupaten tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1.369.980.800	0	0		12 bulan	1.438.479.840
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			sekretariat daerah kabupaten tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1.369.980.800	0	0		12 bulan	1.438.479.840
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			sekretariat daerah kabupaten tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1.369.980.800	0	0		12 bulan	1.438.479.840
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			sekretariat daerah kabupaten tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1.369.980.800	0	0		12 bulan	1.438.479.840
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			sekretariat daerah kabupaten tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	1.369.980.800	0	0		12 Bulan	1.438.479.840
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	518.072.100	0	0		12 bulan	543.975.705
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	518.072.100	0	0		12 bulan	543.975.705
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	518.072.100	0	0		12 bulan	543.975.705
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	518.072.100	0	0		12 bulan	543.975.705
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	518.072.100	0	0		12 bulan	543.975.705
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	518.072.100	0	0		12 bulan	543.975.705
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	518.072.100	0	0		12 Bulan	543.975.705
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	721.335.900	0	0		12 bulan	757.402.695
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	721.335.900	0	0		12 bulan	757.402.695
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	721.335.900	0	0		12 bulan	757.402.695
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	721.335.900	0	0		12 bulan	757.402.695
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	721.335.900	0	0		12 bulan	757.402.695
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	721.335.900	0	0		12 bulan	757.402.695
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	721.335.900	0	0		12 Bulan	757.402.695
X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Sekretariat Daerah Kab Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	12 bulan	217.650.000	0	0		12 bulan	228.532.500
X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Sekretariat Daerah Kab Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	12 bulan	217.650.000	0	0		12 bulan	228.532.500
X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Sekretariat Daerah Kab Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	12 bulan	217.650.000	0	0		12 bulan	228.532.500
X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Sekretariat Daerah Kab Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	12 bulan	217.650.000	0	0		12 bulan	228.532.500
X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Sekretariat Daerah Kab Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	12 bulan	217.650.000	0	0		12 bulan	228.532.500
X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Sekretariat Daerah Kab Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	12 Bulan	217.650.000	0	0		12 Bulan	228.532.500
X.XX.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			TAPIN	Jumlah paket Inventaris Rumah Jabatan Kdh dan Wakil Kdh	5 bulan	2.291.571.800	0	0		5 bulan	2.406.150.390
					Waktu Tersedianya belanja rumah tangga Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah paket Inventaris Rumah Jabatan Kdh dan Wakil Kdh	5 bulan					5 bulan	
					Waktu Tersedianya belanja rumah tangga Kdh dan Wakil Kdh	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	3 Paket					3 Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 bulan	1.448.636.000	0	0	12 bulan	1.521.067.800
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			Tapin	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	717.935.800	0	0	12 bulan	753.832.590
X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 bulan	125.000.000	0	0	12 bulan	131.250.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi Dan Pembangunan)						354.470.000	0	0		372.193.500
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	100%	354.470.000	0	0	100%	372.193.500
					Persentase BUMD yang sehat dan profitable	100%				100%	
					Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	100%				100%	
					Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase BUMD yang sehat dan profitable	100%				100%	
					Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	100%				100%	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			TAPIN	jumlah BUMD yang sehat	6 BUMD	236.820.000	0	0	6 BUMD	248.661.000
					jumlah BUMD yang sehat	6 BUMD				6 BUMD	
					jumlah laporan TPID	2 dokumen				2 dokumen	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Tapin	jumlah BUMD yang dibina	2 BUMD	139.920.000	0	0	2 BUMD	146.916.000
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Tapin	jumlah laporan TPID	2 Dokumen	61.500.000	0	0	2 Dokumen	64.575.000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			Tapin	jumlah laporan pembinaan ekonomi mikro kecil	1 Dokumen	35.400.000	0	0	1 Dokumen	37.170.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			TAPIN	jumlah laporan evaluasi CSR	5 dokumen	53.700.000	0	0	5 dokumen	56.385.000
					jumlah laporan evaluasi CSR	5 dokumen				5 dokumen	
					pesentase pengadaan barang dan jasa SKPD yang tepat waktu	95 Persen				100 Persen	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			Tapin	jumlah fasilitasi penyusunan program pembangunan	4 Kali	5.250.000	0	0	4 Kali	5.512.500
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			Tapin	jumlah laporan evaluasi program pembangunan	4 Dokumen	37.850.000	0	0	4 Dokumen	39.742.500
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			Tapin	jumlah laporan pelaksanaan pembangunan	1 Dokumen	10.600.000	0	0	1 Dokumen	11.130.000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			TAPIN	Jumlah rumusan kebijakan dibidang pertambangan yang ditindak lanjuti	10 kebijakan	63.950.000	0	0	10 kebijakan	67.147.500
					Jumlah rumusan kebijakan dibidang pertambangan yang ditindak lanjuti	10 kebijakan				10 kebijakan	
					jumlah dokumen kebijakan yang direkomendasikan	5 dokumen				5 dokumen	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Tapin	jumlah koordinasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	4 Kali	45.405.000	0	0	4 Kali	47.675.250
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Tapin	jumlah koordinasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	4 Kali	6.345.000	0	0	4 Kali	6.662.250
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Tapin	jumlah koordinasi kebijakan energi dan air	4 Kali	12.200.000	0	0	4 Kali	12.810.000
	Sekretariat DPRD						45.217.485.442	0	0		47.478.359.714
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%	26.232.801.942	0	0	90%	27.544.442.039
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%				90%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase aparatur sesuai kompetensinya	90%				90%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan semesteran dan akhir tahun (Laporan)	15 Laporan	89.400.000	0	0	0	15 Laporan	93.870.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Sekretariat DPRD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	89.400.000	0	0	0	Dokumen	93.870.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan semesteran dan akhir tahun (Laporan)	15 Laporan	5.209.071.042	0	0	0	15 Laporan	5.469.524.594
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Sekretariat DPRD Kab Tapin	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.099.271.042	0	0	0	Bulan	5.354.234.594
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Tapin	waktu koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 bulan	103.800.000	0	0	0	bulan	108.990.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tapin	jumlah laporan akhir tahun	1 Dokumen	3.000.000	0	0	0	Dokumen	3.150.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Tapin	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	1 Dokumen	3.000.000	0	0	0	Dokumen	3.150.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dan jenis barang Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Buah)	44 Buah	4.636.881.600	0	0	0	44 Buah	4.868.725.680
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Set, DPRD Kab. Tapin	Waktu yang disediakan untuk menyediakan komponen listrik Kantor	12 Bulan	32.581.500	0	0	0	Bulan	34.210.575
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tapin	Waktu yang disediakan untuk menyediakan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	61.029.500	0	0	0	Bulan	64.080.975
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	Waktu yang disediakan untuk menyediakan bahan logistik kantor	12 Bulan	187.972.400	0	0	0	Bulan	197.371.020
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Tapin	Waktu yang disediakan untuk menyediakan berkas cetak dan digandakan	12 Bulan	57.113.700	0	0	0	Bulan	59.969.385
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Tapin	Waktu yang disediakan untuk menyediakan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	126.000.000	0	0	0	Bulan	132.300.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Tapin	jumlah penyediaan Bahan material kantor	1 kali	17.615.500	0	0	0	kali	18.496.275
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Tapin	Waktu menyediakan fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	87.450.000	0	0	0	Bulan	91.822.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tapin	Waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	4.067.119.000	0	0	0	Bulan	4.270.474.950
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Buah)	50 Buah	609.713.000	0	0	0	50 Buah	640.198.650
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	3 Paket	547.953.000	0	0	0	Paket	575.350.650
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Dokumen pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Dokumen	61.760.000	0	0	0	Dokumen	64.848.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan kantor (Org/Thn)	156 Orang/Tahun	411.200.000	0	0	0	156 Orang/Tahun	431.760.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	11.600.000	0	0	0	Bulan	12.180.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	198.000.000	0	0	0	Bulan	207.900.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	201.600.000	0	0	0	Bulan	211.680.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala mobil Kendaraan dinas/operasional (Bulan)	12 Bulan	653.293.600	0	0	0	12 Bulan	685.958.280
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			ASN	Waktu Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	327.994.800	0	0	0	Bulan	344.394.540
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Tapin	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Buah	185.855.600	0	0	0	Buah	195.148.380
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	41.443.200	0	0	0	Bulan	43.515.360
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya.	2 Buah	98.000.000	0	0	0	Buah	102.900.000
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi			TAPIN	Jumlah Kegiatan Pelantikan-pelantikan/Sidang Istimewa (Kali/Tahun)	1 kali	61.950.000	0	0	0	1 kali	65.047.500
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Tapin	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Kali	61.950.000	0	0	0	Kali	65.047.500
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			TAPIN	Jumlah Pakaian dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya yang diadakan (Stell)	175 Stell	14.561.292.700	0	0	0	175 Stell	15.289.357.335
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Tapin	Waktu penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	12 Bulan	14.201.657.200	0	0	0	Bulan	14.911.740.060
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Kab. Tapin	Jumlah penyediaan pakaian dinas dan Atribut DPRD	2 Paket	284.635.500	0	0	0	Paket	298.867.275
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Kab, Tapin	Jumlah pelaksanaan Medical Check UP DPRD	25 Orang	75.000.000	0	0	0	Orang	78.750.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
4.02	SEKRETARIAT DPRD											
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	18.984.683.500	0	0	90%	19.933.917.675	
					Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	80%				80%		
					Persentase pembahasan Penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80%				80%		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			TAPIN	Jumlah rancangan Perda atas inisiatif DPRD yang terfasilitasi menjadi Perda	10 Perda	655.851.000	0	0	10 Perda	688.643.550	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Tapin	Waktu untuk penyusunan dan Pembahasan peraturan Daerah	12 Bulan	41.101.400	0	0	Bulan	43.156.470	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Tapin	Waktu untuk pembahasan rancangan peraturan Daerah	12 Bulan	344.749.800	0	0	Bulan	361.987.290	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			Tapin	Jumlah Naskah Akademik yang di fasilitasi	10 Naskah	269.999.800	0	0	Naskah	283.499.790	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			TAPIN	Jumlah Bahan Kajian Untuk Fungsi Anggaran Dan Pengawasan DPRD, Bahan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD (Bhn/Thn)	1 Tahun	187.900.000	0	0	1 Tahun	197.295.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS			Tapin	Pertemuan pembahasan KUA dan PPAS	3 Kali	41.400.000	0	0	Kali	43.470.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Tapin	Pertemuan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	3 Kali	27.650.000	0	0	Kali	29.032.500	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD			Tapin	Pertemuan pembahasan APBD	3 Kali	34.525.000	0	0	Kali	36.251.250	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan			Tapin	Pertemuan pembahasan PBD Perubahan	3 Kali	34.525.000	0	0	Kali	36.251.250	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester			Tapin	Pertemuan pembahasan Laporan Semester	1 Kali	22.150.000	0	0	Kali	23.257.500	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Tapin	Pertemuan pembahasan pertanggungjawaban APBD	3 Kali	27.650.000	0	0	Kali	29.032.500	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			TAPIN	Waktu Tenaga Pengolah data umum dan Kepegawaian yang tersedia (Bulan)	12 Bulan	717.854.500	0	0	12 Bulan	753.747.225	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Tapin	Waktu untuk publikasi dan dokumentasi kegiatan Dewan	12 Bulan	117.167.500	0	0	Bulan	123.025.875	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Tapin	Waktu untuk penyediaan Tim ahli dan kelompok pakar	12 Bulan	303.000.000	0	0	Bulan	318.150.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD			Tapin	Waktu untuk penyusunan program kerja DPRD	12 Bulan	297.687.000	0	0	Bulan	312.571.350	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			TAPIN	Waktu pelaksanaan kunjungan kerja/Sidak/monitoring dalam daerah DPRD (Bulan)	12 Bulan	392.400.000	0	0	12 Bulan	412.020.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			Tapin	Waktu untuk kunjungan kerja dalam daerah	12 Bulan	19.500.000	0	0	Bulan	20.475.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Tapin	Waktu untuk penyusunan pokok-pokok pikiran Dewan	12 Bulan	4.575.000	0	0	Bulan	4.803.750	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			Tapin	Jumlah pelaksanaan Reses	3 Kali	368.325.000	0	0	Kali	386.741.250	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Informasi kegiatan DPRD yang dimuat di media massa publik (Bulan)	12 Bulan	30.000.000	0	0	12 Bulan	31.500.000	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			Tapin	Waktu untuk bahan komunikasi dan publikasi dewan	12 Bulan	30.000.000	0	0	Bulan	31.500.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			TAPIN	Waktu pelaksanaan Ketua dan Anggota DPRD untuk mengikuti workshop/bimtek, studi banding/Kunjungan kerja/Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	17.000.678.000	0	0	12 Bulan	17.850.711.900	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Kab Tapin	Waktu untuk penyelenggaraan Koordinasi dan konsultasi Dewan	12 Bulan	14.211.736.000	0	0	Bulan	14.922.322.800	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Tapin	Waktu untuk penyelenggaraan fasilitasi Tugas pimpinan DPRD	12 Bulan	2.788.942.000	0	0	Bulan	2.928.389.100	
	Kecamatan Piani						2.214.371.537	0	0		2.325.090.114	
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani	86,8 poin	2.078.071.537	0	0	87 poin	2.181.975.114	
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%		
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%		
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%		
					Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%				100%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	2.600.000	0	0	13 Laporan	2.730.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Piani	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	2.600.000	0	0	12 Bulan	2.730.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			PIANI	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Laporan	1.302.567.537	0	0	2 Laporan	1.367.695.914
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Piani	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.301.254.337	0	0	12 Bulan	1.366.317.054
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Piani	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	689.000	0	0	12 Bulan	723.450
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Piani	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	624.200	0	0	12 Bulan	655.410
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	336.831.400	0	0	12 Bulan	353.672.970
					Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.559.500	0	0	12 Bulan	4.787.475
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	22.435.700	0	0	12 Bulan	23.557.485
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	34.321.100	0	0	12 Bulan	36.037.155
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor kecamatan Piani	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	11.572.100	0	0	12 Bulan	12.150.705
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	263.943.000	0	0	12 Bulan	277.140.150
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket/unit	145.212.200	0	0	11 Paket/unit	152.472.810
					Jumlah Peningkatan Halaman kantor Kec. Piani	1 Paket				1 Paket	
					waktu Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kec. Piani	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	85.957.200	0	0	1 Paket	90.255.060
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Piani	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	59.255.000	0	0	1 Paket	62.217.750
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	63.858.500	0	0	12 Bulan	67.051.425
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.650.000	0	0	12 Bulan	1.732.500
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Piani	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	26.208.500	0	0	12 Bulan	27.518.925
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	36.000.000	0	0	12 Bulan	37.800.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	12 Bulan	227.001.900	0	0	12 Bulan	238.351.995
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	30.470.900	0	0	12 Bulan	31.994.445
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	6.330.000	0	0	12 Bulan	6.646.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor Kecamatan Piani	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	190.201.000	0	0	12 Bulan	199.711.050
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani	86,8 poin	28.800.000	0	0	87 poin	30.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			PIANI	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	12 Bulan	28.800.000	0	0		12 Bulan	30.240.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Kecamatan Piani	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan	28.800.000	0	0		12 Bulan	30.240.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	80%	33.350.000	0	0		85%	35.017.500
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%					100%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%					100%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			PIANI	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali	33.350.000	0	0		1 Kali	35.017.500
					Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali					1 Kali	
					Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali					1 Kali	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Piani	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Paket	3.850.000	0	0		1 Paket	4.042.500
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Piani	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	29.500.000	0	0		12 Bulan	30.975.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani	86,8 poin	12.950.000	0	0		87 poin	13.597.500
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah			PIANI	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	1 Kali	12.950.000	0	0		1 Kali	13.597.500
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Piani	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	12 Bulan	12.950.000	0	0		12 Bulan	13.597.500
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%	61.200.000	0	0		100%	64.260.000
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%					100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			PIANI	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 Kali	61.200.000	0	0		1 Kali	64.260.000
					Jumlah Koordinasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan					1 Kegiatan	
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	9 Kali					9 Kali	
					Jumlah koordinasi pengawasan dana desa	12 Bulan					12 Bulan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Piani	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Bulan	32.250.000	0	0		12 Bulan	33.862.500
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Piani	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	4.050.000	0	0		12 Bulan	4.252.500
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Piani	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Bulan	4.050.000	0	0		12 Bulan	4.252.500
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Piani	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	4.050.000	0	0		12 Bulan	4.252.500
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Piani	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Paket	3.900.000	0	0		1 Paket	4.095.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Piani	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	12.900.000	0	0		12 Bulan	13.545.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
	Kecamatan Lokpaikat						3.971.929.258	0	0		4.170.525.721
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masvarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat	86,7 poin	3.710.656.458	0	0	86,8 poin	3.896.189.281
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masvarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%				80%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Lokpaikat	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	5.250.000	0	0	9 laporan	5.512.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Laporan	2.772.847.658	0	0	2 Laporan	2.911.490.041
					Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan				13 Laporan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Lokpaikat	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.770.397.658	0	0	12 bulan	2.908.917.541
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Lokpaikat	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.300.000	0	0	1 laporan	1.365.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Lokpaikat	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1.150.000	0	0	1 laporan	1.207.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	300.758.100	0	0	12 Bulan	315.796.005
					Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Org/Bulan				12 Org/Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Org/Bulan				12 Org/Bulan	
					Waktu Penyediaan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.294.800	0	0	12 bulan	5.559.540
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	16.295.100	0	0	12 bulan	17.109.855
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	62.560.900	0	0	12 bulan	65.688.945
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	15.229.300	0	0	12 bulan	15.990.765
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	201.378.000	0	0	12 bulan	211.446.900
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Buah	222.014.200	0	0	7 Buah	233.114.910
					Jumlah Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kec. Lokpaikat	1 Paket				1 Paket	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	177.469.200	0	0	12 bulan	186.342.660
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	44.545.000	0	0	12 bulan	46.772.250
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	83.637.000	0	0	12 Bulan	87.818.850
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	3.480.000	0	0	12 bulan	3.654.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	44.157.000	0	0	12 bulan	46.364.850
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	36.000.000	0	0	12 bulan	37.800.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	326.149.500	0	0	12 Bulan	342.456.975
					Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan				12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan					12 Bulan	
					waktu Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	43.082.300	0	0		12 bulan	45.236.415
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	7.830.000	0	0		12 bulan	8.221.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	275.237.200	0	0		12 bulan	288.999.060
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat	86,7 poin	24.000.000	0	0		86,8 poin	25.200.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			LOKPAIKAT	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	24 Org/Bulan	24.000.000	0	0		24 Org/Bulan	25.200.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 bulan	24.000.000	0	0		12 bulan	25.200.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	164.492.800	0	0		100%	172.717.440
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%					100%	
					Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%					100%	
					Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%					100%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			LOKPAIKAT	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali	55.792.800	0	0		1 Kali	58.582.440
					Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali					1 Kali	
					Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan					12 Bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali					1 Kali	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kali	6.000.000	0	0		1 kali	6.300.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Lokpaikat	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 bulan	49.792.800	0	0		12 bulan	52.282.440
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			TAPIN	Waktu Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	108.700.000	0	0		12 Bulan	114.135.000
					waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bitahan	12 bulan					12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	1 paket					1 paket	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Bitahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan	108.000.000	0	0		12 bulan	113.400.000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan			Kelurahan Bitahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	12 bulan	700.000	0	0		12 bulan	735.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat	86,7 poin	22.620.000	0	0		86,8 poin	23.751.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penucaan Kepala Daerah			LOKPAIKAT	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	1 Kali	22.620.000	0	0		1 Kali	23.751.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	1 kali	22.620.000	0	0	1 kali	23.751.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%	50.160.000	0	0	100%	52.668.000
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%				100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			LOKPAIKAT	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 Kali	50.160.000	0	0	1 Kali	52.668.000
					Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	9 Kali				9 Kali	
					Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan				12 Bulan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 kali	4.625.000	0	0	1 kali	4.856.250
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 kali	4.625.000	0	0	1 kali	4.856.250
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya	1 kali	4.625.000	0	0	1 kali	4.856.250
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	4.475.000	0	0	1 kali	4.698.750
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 kali	4.275.000	0	0	1 kali	4.488.750
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 kali	1.900.000	0	0	1 kali	1.995.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 kali	4.850.000	0	0	1 kali	5.092.500
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kali	4.800.000	0	0	1 kali	5.040.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Lokaikat	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 kali	15.985.000	0	0	1 kali	16.784.250
	Bitahan						465.099.000	0	0		488.353.950
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	465.099.000	0	0	100%	488.353.950
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
					Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%				100%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			BITAHAN	Waktu Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	465.099.000	0	0	12 Bulan	488.353.950
					waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bitahan	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	1 paket				1 paket	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kelurahan Bitahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 kali	1.599.000	0	0	1 kali	1.678.950
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Bitahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 bulan	382.400.000	0	0	12 bulan	401.520.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Bitahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 bulan	81.100.000	0	0	12 bulan	85.155.000
	Kecamatan Tapin Utara						6.332.065.090	0	0		6.648.668.345
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara	100 poin	5.612.398.090	0	0	100 poin	5.893.017.995
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%				80%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	13 Laporan	6.445.000	0	0	13 Laporan	6.767.250
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	6.445.000	0	0	12 Bulan	6.767.250
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun	2 Laporan	5.122.484.590	0	0	2 Laporan	5.378.608.820
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.119.934.590	0	0	12 Bulan	5.375.931.320
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.275.000	0	0	1 Laporan	1.338.750
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.275.000	0	0	1 Laporan	1.338.750
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Instalasi Listrik dan Komponen Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	253.410.500	0	0	12 Bulan	266.081.025
					Waktu Penyediaan Jasa Alat tulis Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.999.900	0	0	12 Bulan	5.249.895
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15.287.000	0	0	12 Bulan	16.051.350
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	29.345.000	0	0	12 Bulan	30.812.250
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	8.277.200	0	0	12 Bulan	8.691.060
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	6.247.400	0	0	12 Bulan	6.559.770
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	189.254.000	0	0	12 Bulan	198.716.700
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket/Unit	46.602.000	0	0	11 Paket/Unit	48.932.100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	46.602.000	0	0	1 Paket	48.932.100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	74.288.400	0	0	12 Bulan	78.002.820
					Jumlah Tapin Expo yang Terselenggara	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
					Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan Lingkungan	1 Tahun				1 Tahun	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	30.034.200	0	0	12 Bulan	31.535.910
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	44.254.200	0	0	12 Bulan	46.466.910
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	109.167.600	0	0	12 Bulan	114.625.980
					Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan				12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	17.533.600	0	0	1 Paket	18.410.280
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	11.714.000	0	0	1 Paket	12.299.700
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	79.920.000	0	0	1 Paket	83.916.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara	100 poin	28.800.000	0	0	100 poin	30.240.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			TAPIN UTARA	Waktu Penyediaan Jasa Perekaman dan Pelayanan E-KTP	12 Bulan	28.800.000	0	0	12 Bulan	30.240.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Paket	28.800.000	0	0	1 Paket	30.240.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	660.387.000	0	0	100%	693.406.350
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	70%				70%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			TAPIN UTARA	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali	40.545.000	0	0	1 Kali	42.572.250
					Jumlah Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	1 Kali				1 Kali	
					Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali				1 Kali	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Paket	3.900.000	0	0	1 Paket	4.095.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Paket	36.645.000	0	0	1 Paket	38.477.250
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			TAPIN	Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	619.842.000	0	0	12 Bulan	650.834.100
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Paket	1.190.000	0	0	1 Paket	1.249.500
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket	615.452.000	0	0	1 Paket	646.224.600
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	1 Paket	3.200.000	0	0	1 Paket	3.360.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%	30.480.000	0	0	100%	32.004.000
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%				100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			TAPIN UTARA	Jumlah Lomba Desa Tingkat Kecamatan	1 kali	30.480.000	0	0	1 kali	32.004.000
					Jumlah Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	1 Kali				1 Kali	
					Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan				12 Bulan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Paket	3.180.000	0	0	1 Paket	3.339.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Paket	3.180.000	0	0	1 Paket	3.339.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Paket	3.180.000	0	0	1 Paket	3.339.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket	3.180.000	0	0	1 Paket	3.339.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Paket	3.180.000	0	0	1 Paket	3.339.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	1 Paket	3.180.000	0	0	1 Paket	3.339.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Tapin Utara	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Paket	11.400.000	0	0	1 Paket	11.970.000
	Rantau Kiwa						447.867.700	0	0		470.261.085
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	447.867.700	0	0	100%	470.261.085
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	70%				70%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			RANTAU KIWA	Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	447.867.700	0	0	12 Bulan	470.261.085
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Rantau Kiwa	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Paket	381.819.000	0	0	1 Paket	400.909.950
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Rantau Kiwa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket	66.048.700	0	0	1 Paket	69.351.135
	Rantau Kanan						469.919.000	0	0		493.414.950
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	469.919.000	0	0	100%	493.414.950
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	70%				70%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			RANTAU KANAN	Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	469.919.000	0	0	12 Bulan	493.414.950
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Rantau Kanan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Paket	381.819.000	0	0	1 Paket	400.909.950
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Rantau Kanan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket	88.100.000	0	0	1 Paket	92.505.000
	Rangda Malingkung						494.519.000	0	0		519.244.950
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	494.519.000	0	0	100%	519.244.950
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	70%				70%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			RANGDA MALINGKUNG	Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	494.519.000	0	0	12 Bulan	519.244.950
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Rangda Malingkung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Paket	381.819.000	0	0	1 Paket	400.909.950
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Rangda Malingkung	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket	112.700.000	0	0	1 Paket	118.335.000
	Kupang						480.031.900	0	0		504.033.495
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	480.031.900	0	0	100%	504.033.495

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	70%					70%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%					100%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			KUPANG	Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	480.031.900	0	0		12 Bulan	504.033.495
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Kupang	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Paket	381.819.000	0	0		1 Paket	400.909.950
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Kupang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket	98.212.900	0	0		1 Paket	103.123.545
	Kecamatan Bakarangan						3.011.044.385	0	0			3.161.596.604
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarangan	85 poin	2.889.609.685	0	0		85 poin	3.034.090.169
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%					100%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%					100%	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	29.260.000	0	0		13 Laporan	30.723.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 buah	1.934.687.185	0	0		2 buah	2.031.421.544
					jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 buah					13 buah	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.931.287.185	0	0		12 Bulan	2.027.851.544
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Bakarangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.525.000	0	0		1 Laporan	2.651.250
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Bakarangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	875.000	0	0		1 Laporan	918.750
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan	272.775.100	0	0		12 bulan	286.413.855
					waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan					12 bulan	
					waktu penyediaan penggandaan dan percetakan	12 bulan					12 bulan	
					waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan					12 bulan	
					waktu penyediaan rapat - rapat koordinasi	12 bulan					12 bulan	
					waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 org/ bulan					12 org/ bulan	
					waktu penyediaan jasa keamanan kantor	12 org/ bulan					12 org/ bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.339.000	0	0		12 Bulan	5.605.950
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	16.145.800	0	0		12 Bulan	16.953.090
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	44.781.300	0	0		12 Bulan	47.020.365
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7.087.000	0	0		12 Bulan	7.441.350
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Bakarangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	199.422.000	0	0		12 Bulan	209.393.100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 buah/set	98.406.200	0	0		7 buah/set	103.326.510
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Pengadaan Mebel	12 Bulan	23.969.000	0	0		12 Bulan	25.167.450
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	74.437.200	0	0		17 Unit	78.159.060
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	53.261.200	0	0		12 bulan	55.924.260
					waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5.660.800	0	0		12 Bulan	5.943.840
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Bakarangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	23.600.400	0	0		12 Bulan	24.780.420
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Bakarangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	24.000.000	0	0		12 Bulan	25.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	501.220.000	0	0	1 tahun	526.281.000
					waktu penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun				1 tahun	
					waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	33.168.000	0	0	12 Bulan	34.826.400
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	7.920.000	0	0	12 Bulan	8.316.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Bakarangan	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	460.132.000	0	0	12 bulan	483.138.600
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarangan	85 poin	36.000.000	0	0	85 poin	37.800.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			BAKARANGAN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	36.000.000	0	0	12 bulan	37.800.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			kecamatan bakarangan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan	36.000.000	0	0	12 Bulan	37.800.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	36.684.700	0	0	100%	38.518.935
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	80%				85%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			BAKARANGAN	waktu penyediaan Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 kali	36.684.700	0	0	1 kali	38.518.935
					waktu penyediaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 kali				1 kali	
					jumlah penyediaan peningkatan pemberdayaan perempuan	1 tahun				1 tahun	
					Waktu penyediaan nMusrenbang Kecamatan	1 kegiatan				1 kegiatan	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	36.684.700	0	0	12 Bulan	38.518.935
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarangan	85 poin	20.870.000	0	0	85 poin	21.913.500
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuqasan Kepala Daerah			BAKARANGAN	waktu penyediaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 kali	20.870.000	0	0	1 kali	21.913.500
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Bakarangan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	1 kali	20.870.000	0	0	1 kali	21.913.500
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan admintrasi yang baik	100%	27.880.000	0	0	100%	29.274.000
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%				100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			BAKARANGAN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kali	27.880.000	0	0	1 kali	29.274.000
					waktu penyediaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 kali				1 kali	
					jumlah persediaan koordinasi aparat desa	bulan 12				bulan 12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					waktu penyediaan pengawasan dana desa	12 bulan					12 bulan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			kecamatan bakarangan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 kali	3.600.000	0	0		1 kali	3.780.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			kecamatan bakarangan	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 kali	4.190.000	0	0		1 kali	4.399.500
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			kecamatan bakarangan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 kali	4.190.000	0	0		1 kali	4.399.500
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			kecamatan bakarangan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kali	4.260.000	0	0		1 kali	4.473.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			kecamatan bakarangan	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	11.640.000	0	0		12 Bulan	12.222.000
	Kecamatan Candi Laras Selatan						3.441.610.657	0	0			3.613.691.190
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	3.009.253.657	0	0		100%	3.159.716.340
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%					80%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	6.250.300	0	0		12 bulan	6.562.815
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	6.250.300	0	0		12 Bulan	6.562.815
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Laporan	1.946.326.957	0	0		2 Laporan	2.043.643.305
					Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan					13 Laporan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.942.858.657	0	0		12 Bulan	2.040.001.590
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	2.007.900	0	0		12 Bulan	2.108.295
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	1.460.400	0	0		12 Bulan	1.533.420
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	346.170.100	0	0		12 Bulan	363.478.605
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	9.948.800	0	0		12 Bulan	10.446.240
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	39.645.000	0	0		12 Bulan	41.627.250
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	53.299.300	0	0		12 Bulan	55.964.265
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	16.032.000	0	0		12 Bulan	16.833.600
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	4.500.000	0	0		12 Bulan	4.725.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	222.745.000	0	0		12 Bulan	233.882.250
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah pengadaan tanah	1 Paket	151.423.400	0	0		1 Paket	158.994.570
					Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Buah					14 Buah	
					waktu Pembangunan / Pembuatan Bangunan Serbaguna dan Pengadaan Sarana Olahraga	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	81.761.700	0	0		12 Bulan	85.849.785

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	69.661.700	0	0	12 Bulan	73.144.785
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	50.496.400	0	0	12 Bulan	53.021.220
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6.496.000	0	0	12 Bulan	6.820.800
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20.000.400	0	0	12 Bulan	21.000.420
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	24.000.000	0	0	12 Bulan	25.200.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	508.586.500	0	0	12 Bulan	534.015.825
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	46.246.500	0	0	12 Bulan	48.558.825
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	18.340.000	0	0	12 Bulan	19.257.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	444.000.000	0	0	12 Bulan	466.200.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan	88 poin	36.000.000	0	0	89 poin	37.800.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	36.000.000	0	0	12 bulan	37.800.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	36.000.000	0	0	12 Bulan	37.800.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	105.788.200	0	0	100%	111.077.610
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			TAPIN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	2 Kegiatan	105.788.200	0	0	2 Kegiatan	111.077.610
					Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
					waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan APBDes	12 bulan				12 bulan	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Bulan	6.599.800	0	0	12 Bulan	6.929.790
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	99.188.400	0	0	12 Bulan	104.147.820
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan	88 poin	28.744.800	0	0	89 poin	30.182.040
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuangan Kepala Daerah			TAPIN	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kegiatan	28.744.800	0	0	1 Kegiatan	30.182.040

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	12 Bulan	28.744.800	0	0	12 Bulan	30.182.040
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan admintrasi yang baik	100%	261.824.000	0	0	100%	274.915.200
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%				100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 Kegiatan	261.824.000	0	0	1 Kegiatan	274.915.200
					Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	14 Kali				14 Kali	
					Waktu Pengawasan Dana Desa	12 Bulan				12 Bulan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Bulan	26.476.400	0	0	12 Bulan	27.800.220
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Bulan	12.144.800	0	0	12 Bulan	12.752.040
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	24.163.200	0	0	12 Bulan	25.371.360
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Bulan	6.613.200	0	0	12 Bulan	6.943.860
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	7.513.200	0	0	12 Bulan	7.888.860
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Bulan	90.600.000	0	0	12 Bulan	95.130.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	7.513.200	0	0	12 Bulan	7.888.860
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Candi Laras Selatan	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	86.800.000	0	0	12 Bulan	91.140.000
	Kecamatan Candi Laras Utara						2.920.784.586	0	0		3.066.823.815
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	83 poin	2.519.554.186	0	0	85 poin	2.645.531.895
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%				80%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Dokumen 13	5.150.000	0	0	Dokumen 13	5.407.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	5.150.000	0	0	13 Laporan	5.407.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Dokumen 2	2.011.715.686	0	0	Dokumen 2	2.112.301.470
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.008.282.786	0	0	12 Bulan	2.108.696.925
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Candi Laras Utara	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.617.900	0	0	1 Laporan	1.698.795
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Candi Laras Utara	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.815.000	0	0	1 Laporan	1.905.750
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	334.852.300	0	0	12 Bulan	351.594.915
					Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6.082.300	0	0	12 Bulan	6.386.415
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15.058.600	0	0	12 Bulan	15.811.530
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	59.688.600	0	0	12 Bulan	62.673.030
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10.777.800	0	0	12 Bulan	11.316.690
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kecamatan Candi Laras Utara	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	4.500.000	0	0	12 bulan	4.725.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Candi Laras Utara	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	238.745.000	0	0	12 Bulan	250.682.250
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	12 Buah	56.389.200	0	0	12 Buah	59.208.660
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Candi Laras Utara	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	32.389.200	0	0	12 bulan	34.008.660
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Candi Laras Utara	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	24.000.000	0	0	12 bulan	25.200.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	58.976.400	0	0	12 bulan	61.925.220
					waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4.176.000	0	0	12 Bulan	4.384.800
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Candi Laras Utara	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	18.800.400	0	0	12 Bulan	19.740.420
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Candi Laras Utara	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	36.000.000	0	0	12 Bulan	37.800.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	52.470.600	0	0	12 Bulan	55.094.130
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pembangunan Tempat Parkir Kantor	1 Paket				1 Paket	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	33.160.000	0	0	12 Bulan	34.818.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Candi Laras utara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	19.310.600	0	0	12 Bulan	20.276.130
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	83 poin	75.600.000	0	0	85 poin	79.380.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	75.600.000	0	0	12 bulan	79.380.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	75.600.000	0	0	12 Bulan	79.380.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%	105.788.200	0	0	100%	111.077.610
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			TAPIN	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kali	105.788.200	0	0	1 Kali	111.077.610
					Waktu penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Peremouan	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali				1 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kali	6.599.800	0	0	1 Kali	6.929.790
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	99.188.400	0	0	12 Bulan	104.147.820
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	83 poin	28.744.800	0	0	85 poin	30.182.040
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah			TAPIN	waktu Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kali	28.744.800	0	0	1 Kali	30.182.040
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	1 kali	28.744.800	0	0	1 kali	30.182.040
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	191.097.400	0	0	100%	200.652.270
					Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%				100%	
					Persentase Laporan pengaduan kamtibmas yang ditindak lanjuti	100%				100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Lomba desa tingkat kecamatan	1 Kali	191.097.400	0	0	1 Kali	200.652.270
					Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	14 Kali				14 Kali	
					Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan				12 Bulan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 kali	26.476.400	0	0	1 kali	27.800.220
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Waktu Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	12.144.800	0	0	12 bulan	12.752.040
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 kali	21.413.200	0	0	1 kali	22.483.860
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 bulan	6.613.200	0	0	12 bulan	6.943.860
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 kali	7.513.200	0	0	1 kali	7.888.860
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Waktu Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 bulan	65.300.000	0	0	12 bulan	68.565.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kali	5.338.400	0	0	1 kali	5.605.320
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Candi Laras Utara	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	46.298.200	0	0	12 Bulan	48.613.110
	Kecamatan Hatungun						2.927.751.896	0	0		3.074.139.491
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	2.795.251.896	0	0	100%	2.935.014.491
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%				80%	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	87 poin				87 poin	
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	5.200.000	0	0	2 Dokumen	5.460.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	5.200.000	0	0	13 Laporan	5.460.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	13 Dokumen	1.794.863.596	0	0	13 Dokumen	1.884.606.776
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.792.863.596	0	0	1 Tahun	1.882.506.776
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	0	0	1 Laporan	1.050.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000	0	0	1 Laporan	1.050.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	359.295.600	0	0	12 Bulan	377.260.380
					Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
					waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10.000.000	0	0	12 Bulan	10.500.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20.000.000	0	0	12 Bulan	21.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	40.391.600	0	0	12 Bulan	42.411.180
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	6.000.000	0	0	12 Bulan	6.300.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	282.904.000	0	0	12 Bulan	297.049.200
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pembangunan Tempat Parkir Kantor	1 paket	118.600.900	0	0	1 paket	124.530.945
					Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 paket				1 paket	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Buah	101.100.900	0	0	10 Buah	106.155.945
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	17.500.000	0	0	1 Paket	18.375.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	49.898.000	0	0	12 Bulan	52.392.900
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.098.000	0	0	12 Bulan	3.252.900
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	18.000.000	0	0	12 Bulan	18.900.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	28.800.000	0	0	12 Bulan	30.240.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	467.393.800	0	0	12 Bulan	490.763.490
					waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan				12 bulan	
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	57.373.800	0	0	12 Bulan	60.242.490
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	10.020.000	0	0	12 Bulan	10.521.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	400.000.000	0	0	12 Bulan	420.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	87 poin	36.000.000	0	0	87 poin	37.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			HATUNGUN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	36.000.000	0	0	12 bulan	37.800.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. Hatungun	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Bulan	36.000.000	0	0	24 Bulan	37.800.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	45.000.000	0	0	100%	47.250.000
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	70%				70%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			HATUNGUN	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kegiatan	45.000.000	0	0	1 Kegiatan	47.250.000
					Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
					Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	2.500.000	0	0	1 Kegiatan	2.625.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	42.500.000	0	0	12 Bulan	44.625.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	87 poin	25.000.000	0	0	87 poin	26.250.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Hari-Hari Besar Nasional	1 Kegiatan	25.000.000	0	0	1 Kegiatan	26.250.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	1 Kegiatan	25.000.000	0	0	1 Kegiatan	26.250.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%	26.500.000	0	0	100%	27.825.000
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%				100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			HATUNGUN	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 Kegiatan	26.500.000	0	0	1 Kegiatan	27.825.000
					Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
					Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan				12 Bulan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Kegiatan	2.500.000	0	0	1 Kegiatan	2.625.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	2.500.000	0	0	1 Kegiatan	2.625.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Kegiatan	2.500.000	0	0	1 Kegiatan	2.625.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Kegiatan	2.500.000	0	0	1 Kegiatan	2.625.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kec. Hatungun	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Bulan	2.500.000	0	0	12 Bulan	2.625.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	2.500.000	0	0	1 Kegiatan	2.625.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kantor Kecamatan Hatungun	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	11.500.000	0	0	12 Bulan	12.075.000
	Kecamatan Salam Babaris						2.906.372.085	0	0		3.051.690.689
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 100	2.746.762.085	0	0	100 100	2.884.100.189
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80 75				80 75	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	87,5 76				88 76	
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 100				100 100	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 100				100 100	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kecamatan Salam Babaris	waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 bulan	2.050.000	0	0	12 bulan	2.152.500
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kecamatan Salam Babaris	waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 bulan	1.960.000	0	0	12 bulan	2.058.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Salam Babaris	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	6.540.300	0	0	12 bulan	6.867.315
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 2	1.702.830.085	0	0	2 2	1.787.971.589
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	1.696.120.385	0	0	12 bulan	1.780.926.404
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Salam Babaris	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	2.874.700	0	0	12 bulan	3.018.435
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Salam Babaris	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	3.835.000	0	0	12 bulan	4.026.750
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 12	411.823.500	0	0	12 12	432.414.675
					waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 12				12 12	
					waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 12				12 12	
					waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 12				12 12	
					waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 12				12 12	
					waktu Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	12 12				12 12	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	4.286.600	0	0	12 bulan	4.500.930
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	20.602.500	0	0	12 bulan	21.632.625
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	70.200.000	0	0	12 bulan	73.710.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	5.881.400	0	0	12 bulan	6.175.470
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	310.853.000	0	0	12 bulan	326.395.650
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Salam Babaris	waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	126.337.200	0	0	12 bulan	132.654.060
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	4.651.600	0	0	12 bulan	4.884.180
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12.160.800	0	0	12 bulan	12.768.840
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	32.296.800	0	0	12 bulan	33.911.640
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Salam Babaris	waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	37.989.800	0	0	12 bulan	39.889.290
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Salam Babaris	waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	7.930.000	0	0	12 bulan	8.326.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Salam Babaris	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	400.192.000	0	0	12 bulan	420.201.600
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	87,5 76	83.985.000	0	0	88 76	88.184.250
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 100				100 100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 100					100 100	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kecamatan Salam Babaris	waktu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 bulan	2.000.000	0	0		12 bulan	2.100.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kecamatan Salam Babaris	waktu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bulan	57.985.000	0	0		12 bulan	60.884.250
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			SALAM BABARIS	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 12	24.000.000	0	0		12 12	25.200.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Salam babaris	waktu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 bulan	24.000.000	0	0		12 bulan	25.200.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	87,5 76	55.325.000	0	0		88 76	58.091.250
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 100					100 100	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 100					100 100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penucasan Kepala Daerah			SALAM BABARIS	waktu Peringatan Hari-hari Besar Nasional	12 12	55.325.000	0	0		12 12	58.091.250
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Salam Babaris	waktu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	12 bulan	55.325.000	0	0		12 bulan	58.091.250
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100 100	20.300.000	0	0		100 100	21.315.000
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklaniuti	100 100					100 100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			SALAM BABARIS	Waktu Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 1	20.300.000	0	0		1 1	21.315.000
					Waktu Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 1					1 1	
					Waktu Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 1					1 1	
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	13 13					13 13	
					Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 12					12 12	
					Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 12					12 12	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Salam babaris	waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 bulan	2.540.000	0	0		12 bulan	2.667.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Salam babaris	waktu Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	6.360.000	0	0		12 bulan	6.678.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Salam babaris	waktu Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 bulan	11.400.000	0	0		12 bulan	11.970.000
	Kecamatan Tapin Tengah						2.808.854.557	0	0			2.949.297.285
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	2.659.664.557	0	0		100%	2.792.647.785
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%					100%	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	86,6 poin					86,7 poin	
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	5.137.000	0	0		13 Dokumen	5.393.850
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			ASN Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	5.137.000	0	0		12 Bulan	5.393.850
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	1.810.869.957	0	0		2 Dokumen	1.901.413.455

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			ASN Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.804.070.157	0	0	12 Bulan	1.894.273.665
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	3.675.000	0	0	12 Bulan	3.858.750
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	3.124.800	0	0	12 Bulan	3.281.040
X.XX.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	339.780.200	0	0	12 Bulan	356.769.210
					waktu Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	8 buah/unit/paket				5 buah/unit/paket	
					Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	1.127.000	0	0	12 Bulan	1.183.350
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	30.445.100	0	0	12 Bulan	31.967.355
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	44.530.700	0	0	12 Bulan	46.757.235
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	8.326.400	0	0	12 Bulan	8.742.720
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	2.475.000	0	0	12 Bulan	2.598.750
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	252.876.000	0	0	12 Bulan	265.519.800
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	284.045.200	0	0	12 bulan	298.247.460
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	284.045.200	0	0	12 Bulan	298.247.460
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	83.490.000	0	0	12 Bulan	87.664.500
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.890.000	0	0	12 Bulan	1.984.500
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	34.800.000	0	0	12 Bulan	36.540.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	46.800.000	0	0	12 Bulan	49.140.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	136.342.200	0	0	12 Bulan	143.159.310
					waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	29.862.200	0	0	12 Bulan	31.355.310
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	6.730.000	0	0	12 Bulan	7.066.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	99.750.000	0	0	12 Bulan	104.737.500
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	86,6 poin	21.600.000	0	0	86,7 poin	22.680.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			TAPIN TENGAH	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	21.600.000	0	0	12 bulan	22.680.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan	21.600.000	0	0	12 Bulan	22.680.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	75%	44.810.000	0	0	80%	47.050.500
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%				100%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			TAPIN TENGAH	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kegiatan	38.360.000	0	0	1 Kegiatan	40.278.000
					waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Bulan	5.960.000	0	0	12 Bulan	6.258.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	32.400.000	0	0	12 Bulan	34.020.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan	6.450.000	0	0	1 Kegiatan	6.772.500
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Bulan	6.450.000	0	0	12 Bulan	6.772.500
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	86,6 poin	36.080.000	0	0	86,7 poin	37.884.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			TAPIN TENGAH	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kegiatan	36.080.000	0	0	1 Kegiatan	37.884.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	12 bulan	36.080.000	0	0	12 bulan	37.884.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%	46.700.000	0	0	100%	49.035.000
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%				100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			TAPIN TENGAH	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 Kegiatan	46.700.000	0	0	1 Kegiatan	49.035.000
					Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	9 Kegiatan				9 Kegiatan	
					Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan				12 Bulan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Bulan	6.000.000	0	0	12 Bulan	6.300.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	6.000.000	0	0	12 Bulan	6.300.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Bulan	7.100.000	0	0	12 Bulan	7.455.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	6.000.000	0	0	12 Bulan	6.300.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	6.600.000	0	0	12 Bulan	6.930.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	15.000.000	0	0	12 Bulan	15.750.000
	Kecamatan Tapin Selatan						4.888.440.418	0	0		5.132.862.439
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan	86,7 poin	4.643.040.618	0	0	86,8 poin	4.875.192.649

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%					100%	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%					80%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan 13	5.894.500	0	0		Laporan 13	6.189.225
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	5.894.500	0	0		13 Laporan	6.189.225
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Laporan 2	2.957.892.818	0	0		Laporan 2	3.105.787.459
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.953.727.818	0	0		12 Bulan	3.101.414.209
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kec Tapin Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.365.000	0	0		1 Laporan	2.483.250
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kec Tapin Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.800.000	0	0		1 Laporan	1.890.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	376.038.700	0	0		12 bulan	394.840.635
					waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan					12 bulan	
					waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.337.700	0	0		12 Bulan	2.454.585
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15.740.100	0	0		12 Bulan	16.527.105
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	55.926.700	0	0		12 Bulan	58.723.035
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7.150.200	0	0		12 Bulan	7.507.710
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kec Tapin Selatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	294.884.000	0	0		12 Bulan	309.628.200
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Buah	127.322.500	0	0		18 Buah	133.688.625
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41 Unit	127.322.500	0	0		40 Unit	133.688.625
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12 bulan	138.396.000	0	0		12 bulan	145.315.800
					waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan					12 bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 bulan					12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.914.000	0	0		12 Bulan	2.009.700
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec Tapin Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	24.882.000	0	0		12 Bulan	26.126.100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kec Tapin Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	111.600.000	0	0		12 Bulan	117.180.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	1.037.496.100	0	0		12 Bulan	1.089.370.905
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan					12 Bulan	
					Waktu Pembangunan Tempat Parkir Kantor	1 Paket					1 Paket	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	37.196.100	0	0		12 Bulan	39.055.905
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	4.100.000	0	0		12 Bulan	4.305.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kec Tapin Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 PAKET	996.200.000	0	0	1 PAKET	1.046.010.000
	7 UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan	86,7 poin	24.000.000	0	0	86,8 poin	25.200.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Tapin Selatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan	24.000.000	0	0	Bulan	25.200.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	179.549.800	0	0	100%	188.527.290
					Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%				100%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			TAPIN;TAPIN SELATAN	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 Kali	47.549.800	0	0	1 Kali	49.927.290
					Waktu penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 Kali				1 Kali	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Tapin Selatan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kali	4.150.000	0	0	1 Kali	4.357.500
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Selatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	43.399.800	0	0	12 Bulan	45.569.790
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			TAPIN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	12 bulan	132.000.000	0	0	12 bulan	138.600.000
					waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tambarangan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 bulan				12 bulan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kecamatan Tapin Selatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	132.000.000	0	0	12 Bulan	138.600.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan	86,7 poin	15.030.000	0	0	86,8 poin	15.781.500
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuqasan Kepala Daerah			TAPIN	waktu Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kali	15.030.000	0	0	1 Kali	15.781.500
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Tapin Selatan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	1 kali	15.030.000	0	0	1 kali	15.781.500
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100%	26.820.000	0	0	100%	28.161.000
					Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%				100%	
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%				100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			TAPIN	Jumlah Lomba desa tingkat kecamatan	1 Kali	26.820.000	0	0	1 Kali	28.161.000
					Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Kali				1 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	10 Kali					10 Kali	
					Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 Bulan					12 Bulan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Tapin Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 kali	3.990.000	0	0		1 kali	4.189.500
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Tapin Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 kali	4.980.000	0	0		1 kali	5.229.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Tapin Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 kali	3.650.000	0	0		1 kali	3.832.500
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Tapin Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kali	3.720.000	0	0		1 kali	3.906.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Tapin Selatan	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	10.480.000	0	0		12 Bulan	11.004.000
	Tambarangan						408.000.000	0	0			428.400.000
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
	7 UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	408.000.000	0	0		100%	428.400.000
					Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%					100%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%					100%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			TAMBARANGAN	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	12 bulan	408.000.000	0	0		12 bulan	428.400.000
					waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tambarangan	12 bulan					12 bulan	
					waktu Pembinaan Administrasi Kelurahan	12 bulan					12 bulan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Tambarangan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Paket	355.000.000	0	0		2 Paket	372.750.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Tambarangan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	53.000.000	0	0		12 Bulan	55.650.000
	Kecamatan Binaung						5.179.823.872	0	0			5.438.815.066
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	4.642.645.872	0	0		100%	4.874.778.166
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%					80%	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binaung	88 poin					89 poin	
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			BINUANG	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	4.150.000	0	0		13 laporan	4.357.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Binaung	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan/Dokumen	4.150.000	0	0		13 Laporan/Dokumen	4.357.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2 laporan	3.771.354.472	0	0		2 laporan	3.959.922.196
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Binaung	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.768.754.472	0	0		12 Bulan	3.957.192.196
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Binaung	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan/Dokumen	1.450.000	0	0		1 Laporan/Dokumen	1.522.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Binaung	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan/Dokumen	1.150.000	0	0		1 Laporan/Dokumen	1.207.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	353.557.500	0	0		12 bulan	371.235.375
					Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan					12 bulan	
					Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan					12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					waktu penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi	12 bulan				12 bulan	
					Waktu pemeliharaan kebersihan lingkungan	12 bulan				12 bulan	
					waktu pembinaan administrasi kelurahan	36 kelurahan/bulan				36 kelurahan/bulan	
					waktu penyediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Binuang	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.440.400	0	0	12 bulan	1.512.420
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	23.001.300	0	0	12 Bulan	24.151.365
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	76.324.200	0	0	12 Bulan	80.140.410
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	7.069.600	0	0	12 Bulan	7.423.080
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	245.722.000	0	0	12 Bulan	258.008.100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit/paket	185.651.500	0	0	3 unit/paket	194.934.075
					jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116 unit/paket				116 unit/paket	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	145.638.000	0	0	25 Unit	152.919.900
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Unit	30.030.200	0	0	15 Unit	31.531.710
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	9.983.300	0	0	1 Paket	10.482.465
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	87.500.000	0	0	12 bulan	91.875.000
					Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 org/bulan				12 org/bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan				12 bulan	
					waktu pembinaan administrasi kelurahan	36 kelurahan/bulan				36 kelurahan/bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.160.000	0	0	12 Bulan	1.218.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	44.340.000	0	0	12 Bulan	46.557.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	42.000.000	0	0	12 Bulan	44.100.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	240.432.400	0	0	12 bulan	252.454.020
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	57.242.500	0	0	12 Bulan	60.104.625
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	2.980.000	0	0	12 Bulan	3.129.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	180.209.900	0	0	12 Bulan	189.220.395
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang	88 poin	24.000.000	0	0	89 poin	25.200.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			BINJANG	waktu penyediaan jasa pelayanan dan perekaman E-KTP	24 org/bulan	24.000.000	0	0	24 org/bulan	25.200.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	24.000.000	0	0	12 Bulan	25.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	455.000.000	0	0	100%	477.750.000
					Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%				100%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	70%				70%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			BINUANG	Waktu pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	38.000.000	0	0	1 kegiatan	39.900.000
					Jumlah pelaksanaan koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1 kegiatan				1 kegiatan	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi Kegiatan Kecamatan	3 kegiatan				3 kegiatan	
					Waktu kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Peremajaan	12 bulan				12 bulan	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kali	2.150.000	0	0	1 Kali	2.257.500
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	35.850.000	0	0	12 Bulan	37.642.500
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			TAPIN	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	12 bulan	417.000.000	0	0	12 bulan	437.850.000
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	1 paket				1 paket	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karangany Putih	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	1 paket				1 paket	
					Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	1 paket				1 paket	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	417.000.000	0	0	12 Bulan	437.850.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang	88 poin	37.503.000	0	0	89 poin	39.378.150
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%				100%	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah			BINUANG	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	1 kegiatan	37.503.000	0	0	1 kegiatan	39.378.150
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	1 Kali	37.503.000	0	0	1 Kali	39.378.150
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100%	20.675.000	0	0	100%	21.708.750
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%				100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			TAPIN	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 kegiatan	20.675.000	0	0	1 kegiatan	21.708.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	9 desa/kegiatan				9 desa/kegiatan	
					Waktu pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kegiatan				1 kegiatan	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Kali	1.970.000	0	0	1 Kali	2.068.500
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kali	2.000.000	0	0	1 Kali	2.100.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Kali	2.000.000	0	0	1 Kali	2.100.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Kali	1.985.000	0	0	1 Kali	2.084.250
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kali	2.720.000	0	0	1 Kali	2.856.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Binuang	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	10.000.000	0	0	12 Bulan	10.500.000
	Binuang						466.000.000	0	0		489.300.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	7 UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	466.000.000	0	0	100%	489.300.000
					Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%				100%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	70%				70%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			BINUANG	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	12 bulan	466.000.000	0	0	12 bulan	489.300.000
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	1 paket				1 paket	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karangany Putih	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	1 paket				1 paket	
					Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	1 paket				1 paket	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Binuang	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Bulan	409.600.000	0	0	12 Bulan	430.080.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Binuang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	56.400.000	0	0	12 Bulan	59.220.000
	Raya Belanti						472.436.620	0	0		496.058.451
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	7 UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	472.436.620	0	0	100%	496.058.451
					Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	70%				70%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			RAYA BELANTI	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangang Putih	12 bulan	472.436.620	0	0	12 bulan	496.058.451
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangang Putih	1 paket				1 paket	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangang Putih	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karangang Putih	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	1 paket				1 paket	
					Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	1 paket				1 paket	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Raya Belanti	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Bulan	410.036.620	0	0	12 Bulan	430.538.451
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Raya Belanti	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	62.400.000	0	0	12 Bulan	65.520.000
	Karangang Putih						465.840.000	0	0		489.132.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	7 UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	100%	465.840.000	0	0	100%	489.132.000
					Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100%				100%	
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100%				100%	
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	70%				70%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			BINUANG	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangang Putih	12 bulan	465.840.000	0	0	12 bulan	489.132.000
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangang Putih	1 paket				1 paket	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangang Putih	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karangang Putih	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	1 paket				1 paket	
					Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Binuang	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	1 paket				1 paket	
					waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Raya Belanti	12 bulan				12 bulan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Karangang Putih	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Bulan	387.240.000	0	0	12 Bulan	406.602.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Karanganyar Putih	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	78.600.000	0	0	12 Bulan	82.530.000
	Kecamatan Bungur						3.276.061.595	0	0		3.439.864.675
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 100	3.143.604.295	0	0	100 100	3.300.784.510
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80 75				80 75	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	87,5 76				88 76	
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 100				100 100	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 100				100 100	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Bungur	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	5.080.000	0	0	12 bulan	5.334.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.616.995.295	0	0	12 Bulan	1.697.845.060
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.616.995.295	0	0	12 Bulan	1.697.845.060
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.848.500	0	0	1 Laporan	1.940.925
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.848.500	0	0	1 Laporan	1.940.925
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	1.376.500	0	0	12 Bulan	1.445.325
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	1.376.500	0	0	12 Bulan	1.445.325
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.569.800	0	0	12 Bulan	5.848.290
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.569.800	0	0	12 Bulan	5.848.290
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15.911.300	0	0	12 Bulan	16.706.865
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15.911.300	0	0	12 Bulan	16.706.865
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	49.020.500	0	0	12 Bulan	51.471.525
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	49.020.500	0	0	12 Bulan	51.471.525
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoadaan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengoadaan	12 Bulan	9.630.500	0	0	12 Bulan	10.112.025
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoadaan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengoadaan	12 Bulan	9.630.500	0	0	12 Bulan	10.112.025
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	273.286.000	0	0	12 Bulan	286.950.300
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	273.286.000	0	0	12 Bulan	286.950.300
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	93.638.800	0	0	12 Bulan	98.320.740
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	93.638.800	0	0	12 Bulan	98.320.740
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	84.589.600	0	0	12 Bulan	88.819.080
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	84.589.600	0	0	12 Bulan	88.819.080
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.480.000	0	0	12 Bulan	3.654.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.480.000	0	0	12 Bulan	3.654.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	40.482.000	0	0	12 Bulan	42.506.100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	40.482.000	0	0	12 Bulan	42.506.100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	28.800.000	0	0	12 Bulan	30.240.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	28.800.000	0	0	12 Bulan	30.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	28.811.500	0	0	12 Bulan	30.252.075
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	28.811.500	0	0	12 Bulan	30.252.075
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	6.000.000	0	0	12 Bulan	6.300.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	6.000.000	0	0	12 Bulan	6.300.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	879.084.000	0	0	12 Bulan	923.038.200
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	879.084.000	0	0	12 Bulan	923.038.200
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	87,5 76	24.000.000	0	0	88 76	25.200.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 100				100 100	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 100				100 100	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan	24.000.000	0	0	12 Bulan	25.200.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Bulan	24.000.000	0	0	12 Bulan	25.200.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 100	41.749.900	0	0	100 100	43.837.395
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100 100				100 100	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Bulan	3.600.000	0	0	12 Bulan	3.780.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Bulan	3.600.000	0	0	12 Bulan	3.780.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	38.149.900	0	0	12 Bulan	40.057.395
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	38.149.900	0	0	12 Bulan	40.057.395
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	87,5 76	22.020.000	0	0	88 76	23.121.000
					Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 100				100 100	
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 100				100 100	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	12 Bulan	22.020.000	0	0	12 Bulan	23.121.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	12 Bulan	22.020.000	0	0	12 Bulan	23.121.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100 100	44.687.400	0	0	100 100	46.921.770

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100 100				100 100	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan bungur	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Bulan	4.275.000	0	0	12 Bulan	4.488.750
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan bungur	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Bulan	4.275.000	0	0	12 Bulan	4.488.750
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Bulan	4.290.000	0	0	12 Bulan	4.504.500
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Bulan	4.290.000	0	0	12 Bulan	4.504.500
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	6.900.000	0	0	12 Bulan	7.245.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	6.900.000	0	0	12 Bulan	7.245.000
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	4.292.400	0	0	12 Bulan	4.507.020
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	4.292.400	0	0	12 Bulan	4.507.020
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	4.290.000	0	0	12 Bulan	4.504.500
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	4.290.000	0	0	12 Bulan	4.504.500
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	4.850.000	0	0	12 Bulan	5.092.500
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	4.850.000	0	0	12 Bulan	5.092.500
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	5.140.000	0	0	12 Bulan	5.397.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	5.140.000	0	0	12 Bulan	5.397.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	10.650.000	0	0	12 Bulan	11.182.500
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Bungur	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Bulan	10.650.000	0	0	12 Bulan	11.182.500
	Inspektorat						13.020.634.744	0	0		13.671.666.481
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	11.747.193.144	0	0	100%	12.334.552.801
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat	100%				100%	
					Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	11 Laporan	12.955.800	0	0	11 Laporan	13.603.590
					Jumlah laporan ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan	1 Laporan				1 Laporan	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	1.000.000	0	0	Dokumen	1.050.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	1.000.000	0	0	Dokumen	1.050.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1.000.000	0	0	Dokumen	1.050.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	1.000.000	0	0	Dokumen	1.050.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1.000.000	0	0	Dokumen	1.050.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan capaian kinerja	2 Laporan	6.856.900	0	0	Laporan	7.199.745
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan evaluasi kinerja	1 Laporan	1.098.900	0	0	Laporan	1.153.845
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan dan analisis prognosis	2 Laporan	6.153.048.944	0	0	2 Laporan	6.460.701.391

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	6.151.548.944	0	0	Bulan	6.459.126.391
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	750.000	0	0	Laporan	787.500
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan prognosis keuangan	1 Laporan	750.000	0	0	Laporan	787.500
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	21 Orang	595.835.400	0	0	21 Orang	625.627.170
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	275.500.000	0	0	Bulan	289.275.000
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	320.335.400	0	0	Bulan	336.352.170
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu ketersediaan pemenuhan administrasi perkantoran	12 Bulan	4.338.523.800	0	0	12 Bulan	4.555.449.990
					Waktu ketersediaan barang dan cetakan dan pengadaan (Bln)	12 Bln				12 Bln	
					Waktu ketersediaan konsumsi (Bln)	11 Bln				11 Bln	
					Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi (Bln)	12 Bln				12 Bln	
					Waktu ketersediaan penerangan bangunan kantor (Bln)	12 Bln				12 Bln	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	15.969.100	0	0	Bulan	16.767.555
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	78.560.200	0	0	Bulan	82.488.210
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	90.699.500	0	0	Bulan	95.234.475
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	54.250.000	0	0	Bulan	56.962.500
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	13.750.000	0	0	Bulan	14.437.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	4.085.295.000	0	0	Bulan	4.289.559.750
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	27 Unit	196.276.700	0	0	27 Unit	206.090.535
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Unit	196.276.700	0	0	Unit	206.090.535
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	149.880.000	0	0	12 Bulan	157.374.000
					Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)	12 Bln				12 Bln	
					Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)	12 Bln				12 Bln	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.480.000	0	0	Bulan	3.654.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	103.200.000	0	0	Bulan	108.360.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	43.200.000	0	0	Bulan	45.360.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	300.672.500	0	0	12 Bulan	315.706.125
					Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (Bln)	12 Bln				12 Bln	
					waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	84.078.500	0	0	12 bulan	88.282.425
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	131.644.000	0	0	Bulan	138.226.200
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	65.400.000	0	0	Bulan	68.670.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Waktu ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	19.550.000	0	0	Bulan	20.527.500
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6.01	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah		Persentase obyek pemeriksaan reguler tepat waktu	100%	563.254.000	0	0	100%	591.416.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	100%					100%	
					Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100%					100%	
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100%					100%	
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100%					100%	
					Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	100%					100%	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			TAPIN	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (Lap)	92 Laporan	540.084.000	0	0		92 Laporan	567.088.200
					Jumlah laporan hasil evaluasi lakip (Lap)	1 Laporan					1 Laporan	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	92 Laporan					92 Laporan	
					Jumlah laporan hasil review RKA (lap)	2 Laporan					2 Laporan	
					Jumlah laporan review lakip (lap)	1 Laporan					1 Laporan	
					Jumlah laporan review LKPD (Lap)	1 Laporan					1 Laporan	
					Jumlah laporan hasil review LKPD (Lap)	1 Laporan					1 Laporan	
					Jumlah dokumen rekapitulasi penyelesaian tindak lanjut (dok)	2 Dokumen					2 Dokumen	
					Jumlah dokumen rekapitulasi pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI (dok)	1 Dokumen					1 Dokumen	
					Jumlah laporan penyerapan anggaran keuangan desa (Lap)	4 Laporan					4 Laporan	
					Jumlah laporan kegiatan satgas SPIP (lap)	3 Laporan					3 Laporan	
					waktu Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik	12 bulan					12 bulan	
					waktu Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12 bulan					12 bulan	
					waktu Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (Responsif Gender)	12 bulan					12 bulan	
					waktu Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	12 bulan					12 bulan	
					waktu Reviu KUA/PPAS	12 bulan					12 bulan	
					waktu Reviu RPJMD	12 bulan					12 bulan	
					waktu Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12 bulan					12 bulan	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi	5 Laporan	264.674.000	0	0		Laporan	277.907.700
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan	2 Laporan	108.400.000	0	0		Laporan	113.820.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil reviu	2 Laporan	25.800.000	0	0		Laporan	27.090.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil reviu	2 Laporan	11.375.000	0	0		Laporan	11.943.750
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan	1 Laporan	20.200.000	0	0		Laporan	21.210.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan hasil pemantauan	2 Laporan	109.635.000	0	0		Laporan	115.116.750
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			TAPIN	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/dengan tujuan tertentu (Lap)	12 Laporan	23.170.000	0	0		12 Laporan	24.328.500
					Jumlah dokumen rekapitulasi kasus penyelesaian kerugian negara (dok)	1 Dokumen					1 Dokumen	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan	6 Laporan	17.425.000	0	0		Laporan	18.296.250
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan	6 Laporan	5.745.000	0	0		Laporan	6.032.250
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemda		Persentase self assesment per Elemen dengan kesimpulan level 3	100%	710.187.600	0	0		100%	745.696.980
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			TAPIN	Jumlah dokumen PKPT	1 Dokumen	177.848.500	0	0		1 Dokumen	186.740.925
					Jumlah Hasil Penetapan angka kredit P2UPD (Orang)	11 Orang					11 Orang	
					Jumlah laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas apip (Lap)	4 Laporan					4 Laporan	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen teknis pengawasan	2 dokumen	176.420.000	0	0		dokumen	185.241.000
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen fasilitasi pengawasan	11 dokumen	1.428.500	0	0		dokumen	1.499.925
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			TAPIN	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi	4 Laporan	532.339.100	0	0		4 Laporan	558.956.055
					Jumlah dokumen rekapitulasi LHKASN (dok)	1 Dokumen					1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang saber pungi (Lap)	1 Laporan				1 Laporan	
					Jumlah laporan review pelaksanaan aksi PPK pemda yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku (Lap)	4 Laporan				4 Laporan	
					Jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi (Lap)	1 Laporan				1 Laporan	
					waktu Survey Penilaian Integritas	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penilaian Internal Zona Integritas	12 bulan				12 bulan	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil kegiatan	2 Laporan	168.690.000	0	0	Laporan	177.124.500
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil penilaian mandiri	2 Laporan	52.453.800	0	0	Laporan	55.076.490
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil kegiatan	5 Laporan	272.253.400	0	0	Laporan	285.866.070
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil survei	1 Laporan	38.941.900	0	0	Laporan	40.888.995
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan						10.824.881.023	0	0		11.366.125.074
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.649.224.123	0	0	100%	8.031.685.329
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen laporan kinerja pada Bappelitbang	8 laporan	59.620.000	0	0	8 laporan	62.601.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Bappelitbang	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan	27.820.000	0	0	12 bulan	29.211.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Bappelitbang	Jumlah dokumen perencanaan pada Bappelitbang	3 Dokumen	31.800.000	0	0	3 Dokumen	33.390.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Bappelitbang	Jumlah dokumen laporan kinerja pada Bappelitbang	8 Laporan	31.800.000	0	0	8 Laporan	33.390.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	1 laporan	3.849.568.423	0	0	1 laporan	4.042.046.844
					Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Bappelitbang	Waktu tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.841.268.423	0	0	12 Bulan	4.033.331.844
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Bappelitbang	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	3.750.000	0	0	12 bulan	3.937.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Bappelitbang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Bappelitbang	1 Laporan	4.550.000	0	0	1 Laporan	4.777.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	2.358.271.200	0	0	12 bulan	2.476.184.760
					waktu penyediaan barang cetakan dan pengandaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan				12 bulan	
					waktu pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan pada Tapin Expo	1 kali				1 kali	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Bappelitbang	Waktu penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	16.095.900	0	0	12 Bulan	16.900.695
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bappelitbang	Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	917.790.900	0	0	12 Bulan	963.680.445
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Bappelitbang	Waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	139.098.200	0	0	12 Bulan	146.053.110
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan			Bappelitbang	Waktu penyediaan barang cetak dan pengandaan	12 Bulan	17.003.300	0	0	12 Bulan	17.853.465
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Bappelitbang	Waktu tersedianya bahan material	12 Bulan	23.322.900	0	0	12 Bulan	24.489.045
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Bappelitbang	Waktu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	13.750.000	0	0	12 Bulan	14.437.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Bappelitbang	Waktu pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	1.231.210.000	0	0	12 Bulan	1.292.770.500
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	13 unit	439.404.900	0	0	13 unit	461.375.145
					waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Bappelitbang	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin yang tersedia	33 Unit	439.404.900	0	0	33 Unit	461.375.145
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	591.590.000	0	0	12 bulan	621.169.500
					Waktu penyediaan jasa petugas kebersihan dan keamanan	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Bappelitbang	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	486.620.000	0	0	12 Bulan	510.951.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bappelitbang	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	13 Unit	30.196.000	0	0	13 Unit	31.705.800
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Bappelitbang	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	74.774.000	0	0	12 Bulan	78.512.700
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	350.769.600	0	0	12	368.308.080
					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit				4 unit	
					Jumlah Rehab Gedung Kantor	1 Paket				1 Paket	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Bappelitbang	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	9 Unit	238.809.600	0	0	9 Unit	250.750.080
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Bappelitbang	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	111.960.000	0	0	12 Bulan	117.558.000
	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01	PERENCANAAN										
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.497.552.900	0	0	100%	1.572.430.545
					Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%				100%	
					Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD	100%				100%	
					Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah	100%				100%	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			TAPIN	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kab Tapin	1 dokumen	1.051.862.900	0	0	1 dokumen	1.104.456.045
					Jumlah pelaksanaan Musrenbang	1 Kali				1 Kali	
					Jumlah dokumen RKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	
					Jumlah Nota kesepakatan KU APBD dan Nota kesepakatan PPAS APBD	2 dokumen				2 dokumen	
					Jumlah Nota kesepakatan KU APBD dan PPAS APBP Perubahan	2 dokumen				2 dokumen	
					Tersedianya dokumen perubahan RKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	
					waktu Evaluasi RPJMD	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyusunan Rancangan RPJMD	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penetapan Perubahan RPJMD	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	12 bulan				12 bulan	
					Waktu pengambanan SIPD Kab Tapin	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi				1 Aplikasi	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			Bappelitbang	Jumlah dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	141.248.700	0	0	1 Dokumen	148.311.135
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			Bappelitbang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3 Kali	62.750.000	0	0	3 Kali	65.887.500
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Bappelitbang	Jumlah Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Kali	282.750.000	0	0	1 Kali	296.887.500
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			Bappelitbang	Jumlah Koordinasi persiapan Musrenbang Kecamatan	12 Kecamatan	250.505.000	0	0	12 Kecamatan	263.030.250
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Bappelitbang	Waktu Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	314.609.200	0	0	12 bulan	330.339.660
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Bappelitbang	Waktu Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah	12 Bulan	194.500.000	0	0	12 Bulan	204.225.000
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			Bappelitbang	Waktu Pelaksanaan Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan pembangunan SKPD	12 Bulan	23.190.000	0	0	12 Bulan	24.349.500
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan Laporan RFK yang benar dan tepat waktu	100%	228.000.000	0	0	100%	239.400.000
					laporan tugas pembantuan yang benar dan tepat waktu	4 laporan				4 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
					laporan dekon yang benar dan tepat waktu	4 laporan					4 laporan	
					laporan DAK yang benar dan tepat waktu	4 laporan					4 laporan	
					Jumlah laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran	4 Laporan					4 Laporan	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Bappelitbang	Jumlah laporan capaian pembangunan daerah	4 Laporan	79.780.000	0	0		4 Laporan	83.769.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Bappelitbang	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	4 Laporan	148.220.000	0	0		4 Laporan	155.631.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD	100%	1.075.549.000	0	0		100%	1.129.326.450
					Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	100%					100%	
					Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	100%					100%	
					Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD	100%					100%	
					Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM	100%					100%	
					Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM	100%					100%	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Sosial selesai tepat waktu	100 persen	363.119.800	0	0		100 persen	381.275.790
					Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia selesai tepat waktu	100 persen					100 persen	
					Terlaksananya koordinasi TKPKD Kabupaten Tapin	4 kali					4 kali	
					Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sosial	100 persen					100 persen	
					Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia	100 persen					100 persen	
					Terlaksananya laporan SDG's	1 Dokumen					1 Dokumen	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			Bappelitbang	Jumlah kompilasi dokumen perencanaan pembangunan SKPD mitra Sub Bidang Sosial	1 Dokumen	61.640.000	0	0		1 Dokumen	64.722.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Bappelitbang	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sosial	4 Laporan	69.850.000	0	0		4 Laporan	73.342.500
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Bappelitbang	Waktu pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mitra Sub Bidang Sosial	12 Bulan	43.700.000	0	0		12 Bulan	45.885.000
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			Bappelitbang	Jumlah kompilasi dokumen perencanaan pembangunan SKPD mitra Sub Bidang Sosial	1 Dokumen	59.559.800	0	0		1 Dokumen	62.537.790
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Bappelitbang	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sosial	4 Laporan	79.820.000	0	0		4 Laporan	83.811.000
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Bappelitbang	Waktu pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mitra Sub Bidang Sosial	12 Bulan	48.550.000	0	0		12 Bulan	50.977.500
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			TAPIN	Jumlah laporan PSETK	45 Laporan	327.514.200	0	0		45 Laporan	343.889.910
					Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi selesai tepat waktu	100 persen					100 persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	100 persen				100 persen	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			Bappelitbang	Jumlah kompilasi dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi	1 Dokumen	35.189.800	0	0	1 Dokumen	36.949.290
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan			Bappelitbang	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	4 Laporan	72.970.000	0	0	4 Laporan	76.618.500
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan			Bappelitbang	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Ekonomi	12 Bulan	41.635.000	0	0	12 Bulan	43.716.750
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			Bappelitbang	Jumlah dokumen Laporan Profil, Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK) di tingkat Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) Kewenangan Kabupaten	20 Laporan	177.719.400	0	0	20 Laporan	186.605.370
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			TAPIN	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Infrastruktur selesai tepat waktu	100 persen	384.915.000	0	0	100 persen	404.160.750
					Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur	100 persen				100 persen	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			Bappelitbang	Jumlah kompilasi dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	58.415.000	0	0	1 Dokumen	61.335.750
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Bappelitbang	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur	4 Laporan	61.950.000	0	0	4 Laporan	65.047.500
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Bappelitbang	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur	12 Bulan	47.450.000	0	0	12 Bulan	49.822.500
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			Kab. Tapin	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	12 bulan	217.100.000	0	0	12 bulan	227.955.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan		Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100%	602.555.000	0	0	100%	632.682.750
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			TAPIN	waktu Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah dalam Pembangunan		180.210.000	0	0		189.220.500
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja			Rantau, Tapin	Waktu Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	12 bulan	180.210.000	0	0	12 bulan	189.220.500
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			TAPIN	waktu Jaring Penelitian dan Pengembangan		154.135.000	0	0		161.841.750
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Rantau, Tapin	Jumlah kegiatan penelitian yang difasilitasi di bidang pertanian	1 Penelitian	154.135.000	0	0	1 Penelitian	161.841.750
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			TAPIN	waktu Pengembangan SIDA dalam meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah		268.210.000	0	0		281.620.500
					waktu Sayembara Inovasi						
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Rantau, Tapin	Jumlah lomba tentang pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	1 Kali	179.400.000	0	0	1 Kali	188.370.000
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Rantau, Tapin	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang dilaksanakan	1 Sosialisasi	88.810.000	0	0	1 Sosialisasi	93.250.500
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		108.869.805.804	0	0		114.313.296.094
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	9.814.523.096	0	0	100%	10.305.249.251
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	27.900.000	0	0	12 bulan	29.295.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab.Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.800.000	0	0	Dokumen	1.890.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab.Tapin	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	26.100.000	0	0	Dokumen	27.405.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	12 bulan	6.586.863.456	0	0	12 bulan	6.916.206.629
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.552.463.456	0	0	Bulan	6.880.086.629
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	3.800.000	0	0	Dokumen	3.990.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab.Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	30.600.000	0	0	Dokumen	32.130.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Peningkatan kapasitas aparatur daerah	12 bulan	71.365.800	0	0	12 bulan	74.934.090
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab.Tapin	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	1 Kegiatan	71.365.800	0	0	Kegiatan	74.934.090
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	1.853.323.400	0	0	12 bulan	1.945.989.570
					waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan				12 bulan	
					waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan				12 bulan	
					pelaksanaan Tapin Expo	1 kali				1 kali	
					waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan				12 bulan	
					waktu Pembuatan data organisasi kantor	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab.Tapin	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	103.378.500	0	0	Bulan	108.547.425
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab.Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	663.378.600	0	0	Bulan	696.547.530
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab.Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	10.095.000	0	0	Bulan	10.599.750
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab.Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	237.611.800	0	0	Bulan	249.492.390
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab.Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	100.470.000	0	0	Bulan	105.493.500
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kab.Tapin	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	49.415.500	0	0	Bulan	51.886.275
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab.Tapin	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	30.000.000	0	0	Bulan	31.500.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab.Tapin	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	658.974.000	0	0	Bulan	691.922.700
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	waktu Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 bulan	425.037.000	0	0	12 bulan	446.288.850
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42 Unit	425.037.000	0	0	Unit	446.288.850
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	696.483.040	0	0	12 bulan	731.307.192
					Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan				12 bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab.Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	8.700.000	0	0	Bulan	9.135.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab.Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	340.560.000	0	0	Bulan	357.588.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab.Tapin	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	347.223.040	0	0	Bulan	364.584.192
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	153.550.400	0	0	12 Bulan	161.227.920
					Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan				12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023		
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	72.786.400	0	0		Bulan	76.425.720
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	30.830.000	0	0		Bulan	32.371.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	49.934.000	0	0		Bulan	52.430.700
5.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN											
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase Perda dan Perbup yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	98.182.765.408	0	0		100%	103.091.903.678
					Persentase komplain terhadap penerbitan SP2D	0%					0%	
					Persentase SKPD yang menyampaikan laporan penggunaan APBD sesuai standar dan tepat waktu	100%					100%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			TAPIN	Jumlah rancangan perda APBD	100 buku	1.458.940.000	0	0		100 buku	1.531.887.000
					Jumlah rancangan KDH tentang penjabaran APBD Kab. Tapin	100 buku					100 buku	
					Jumlah Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	100 buku					100 buku	
					Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Tapin	100 buku					100 buku	
					Jumlah DPA SKPD	149 dokumen					149 dokumen	
					Jumlah DPA SKPD	149 dokumen					149 dokumen	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	72.000.000	0	0		Dokumen	75.600.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	69.800.000	0	0		Dokumen	73.290.000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58 Dokumen	9.020.000	0	0		Dokumen	9.471.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah RKA-P SKPD yang disusun	58 Dokumen	8.980.000	0	0		Dokumen	9.429.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah DPA SKPD yang disusun	58 Dokumen	36.230.000	0	0		Dokumen	38.041.500
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah DPA-P SKPD yang disusun	58 Dokumen	36.270.000	0	0		Dokumen	38.083.500
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Kabupaten Tapin	Jumlah Perda dan Perbup APBD yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	836.230.000	0	0		Dokumen	878.041.500
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Kabupaten Tapin	Jumlah Perda dan Perbup APBD-P yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	140.510.100	0	0		Dokumen	147.535.605
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Kabupaten Tapin	Jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	4 Dokumen	249.899.900	0	0		Dokumen	262.394.895
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan penyelesaian penerbitan SP2D dan SPD yang baik dan lancar	12 bulan	737.040.000	0	0		12 bulan	773.892.000
					Waktu pelaksanaan pelayanan administrasi gaji pegawai di kabupaten Tapin	12 bulan					12 bulan	
					Jumlah keputusan kdh tentang pejabat pengelolaan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	30 SK					30 SK	
					Jumlah laporan DAK yang disusun	52 dokumen					52 dokumen	
					Jumlah Laporan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	12 laporan					12 laporan	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan rekonsiliasi bank	12 Laporan	17.220.000	0	0		Laporan	18.081.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Kabupaten Tapin	Waktu pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	4 Triwulan	31.580.000	0	0		Triwulan	33.159.000
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	2 Dokumen	15.100.000	0	0		Dokumen	15.855.000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan DAK dan DID	46 Dokumen	134.920.000	0	0		Dokumen	141.666.000
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan kas, penerimaan dan pengeluaran kas, pemungutan dan penyerotan PFK	12 Berkas	73.320.000	0	0		Berkas	76.986.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan utang dan piutang daerah	2 Dokumen	10.100.000	0	0	Dokumen	10.605.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			Kabupaten Tapin	Waktu rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	12 Bulan	90.920.000	0	0	Bulan	95.466.000
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Suhu Kegiatan			kabupaten tapin	Jumlah sisdu, perda penatausahaan keuangan, dan SK pengelolaan keuangan daerah	17 Dokumen	127.560.000	0	0	Dokumen	133.938.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			kabupaten tapin	Waktu pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	12 Bulan	236.320.000	0	0	Bulan	248.136.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			TAPIN	Jumlah Raperda Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Tapin	1 dokumen	536.520.000	0	0	1 dokumen	563.346.000
					Jumlah Raperbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen				1 dokumen	
					Jumlah Raperbup Tentang Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen				1 dokumen	
					Jumlah laporan keuangan daerah (LKD) akhir tahun Pemkab Tapin	7 dokumen				7 dokumen	
					Jumlah laporan realisasi semester I pelaksanaan APBD Pemkab Tapin dan prognosis 6 bulan berikutnya	2 dokumen				2 dokumen	
					Jumlah laporan inventarisasi pos pos LKPD	45 dokumen				45 dokumen	
					Waktu terlaksananya penyediaan data keuangan yang valid	12 bulan				12 bulan	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Kabupaten Tapin	Waktu koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas	12 Bulan	31.815.000	0	0	Bulan	33.405.750
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			Kabupaten tapin	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	18.900.000	0	0	Dokumen	19.845.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	18 Dokumen	118.560.000	0	0	Dokumen	124.488.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan pemda	6 Bulan	153.510.000	0	0	Bulan	161.185.500
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah rancangan perda dan rancangan perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dokumen	66.545.000	0	0	Dokumen	69.872.250
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemda	1 Dokumen	47.120.000	0	0	Dokumen	49.476.000
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah sisdu akuntansi dan pelaporan keuangan pemda	1 Dokumen	47.120.000	0	0	Dokumen	49.476.000
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	45 SKPD	52.950.000	0	0	SKPD	55.597.500
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			TAPIN	Peningkatan pelayanan PPKD	220 Jumlah berkas pencairan dana yang diselesaikan	95.450.265.408	0	0	220 Jumlah berkas pencairan dana yang diselesaikan	100.222.778.678
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Kab. Tapin	Persentase pencairan pinjaman pemerintah daerah yang diselesaikan	100 Persen	7.282.683.508	0	0	Persen	7.646.817.683
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Kab. Tapin	Persentase belanja tak terduga dan rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan dari DPMD yang diselesaikan	100 Persen	88.167.581.900	0	0	Persen	92.575.960.995
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	100%	872.517.300	0	0	100%	916.143.165
					Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan	100%				100%	
					Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan	100%				100%	
					Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100%				100%	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			TAPIN	Waktu peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	12 bulan	872.517.300	0	0	12 bulan	916.143.165
					Jumlah dokumen Data BMD SKPD	45 dokumen				45 dokumen	
					Jumlah laporan data rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan BMD	45 dokumen				45 dokumen	
					Jumlah SKPD yang ditetapkan status pengguna BMD	10 SKPD				10 SKPD	
					Jumlah laporan data penghapusan dan pemindahtanganan BMD	10 dokumen				10 dokumen	
					Jumlah laporan barang milik daerah	21 laporan				21 laporan	
					Jumlah kendaraan dinas pada pengelola barang dalam perawatan dan pemeliharaan	5 unit				5 unit	
					Jumlah Laporan Data Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten Tapin	1 dokumen				1 dokumen	
					Jumlah Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3 dokumen				3 dokumen	
					Jumlah Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah	1 dokumen				1 dokumen	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			Kabupaten Tapin	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1 Dokumen	117.551.000	0	0	Dokumen	123.428.550
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah standar kebutuhan BMD	1 Dokumen	11.056.300	0	0	Dokumen	11.609.115
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah RKBMD dan RKPMBMD	2 Dokumen	105.592.900	0	0	Dokumen	110.872.545
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Kabupaten Tapin	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	12 Bulan	176.685.000	0	0	Bulan	185.519.250
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Kabupaten Tapin	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	12 Bulan	12.697.900	0	0	Bulan	13.332.795
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			Kabupaten Tapin	Waktu pengamanan BMD	12 Bulan	34.032.000	0	0	Bulan	35.733.600
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah penilaian BMD	1 Kegiatan	93.184.900	0	0	Kegiatan	97.844.145
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Kabupaten Tapin	Persentase usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti	100 Persen	261.337.900	0	0	Persen	274.404.795
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah rekonsiliasi laporan BMD	90 Laporan	35.781.400	0	0	Laporan	37.570.470
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah laporan BMD	24 Laporan	15.780.000	0	0	Laporan	16.569.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD	1 Kegiatan	8.818.000	0	0	Kegiatan	9.258.900
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah						11.591.381.961	0	0		12.170.951.059
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	8.950.410.657	0	0	100%	9.397.931.190
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 Dokumen	12.980.000	0	0	13 Dokumen	13.629.000
					Jumlah Laporan Keuangan dan semesteran akhir tahun (Dokumen)	2 Dokumen				2 Dokumen	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kantor Bapenda	Waktu pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan	12 Bulan	2.000.000	0	0	Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kantor Bapenda	Waktu Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	12 Bulan	2.000.000	0	0	Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kantor Bapenda	Waktu Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	12 Bulan	2.000.000	0	0	Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kantor Bapenda	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	2.000.000	0	0	Bulan	2.100.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kantor Bapenda	Waktu evaluasi kinerja perangkat daerah (Penyusunan LKJP Bapenda)	12 Bulan	4.980.000	0	0	Bulan	5.229.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	waktu Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 bulan	5.862.331.457	0	0	12 bulan	6.155.448.030
					waktu Peningkatan Pelayanan PPKD	12 bulan				12 bulan	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kantor Bapenda	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	5.620.970.557	0	0	Bulan	5.902.019.085
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD			Kantor Bapenda	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan penjualan/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	235.760.900	0	0	Bulan	247.548.945

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kantor Bapenda	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	2.800.000	0	0	Bulan	2.940.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kantor Bapenda	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Bulan	2.800.000	0	0	Bulan	2.940.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	2.184.407.500	0	0	12 Bulan	2.293.627.875
					Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Pelaksanaan kegiatan TAPIN EXPO	1 Kali				1 Kali	
					Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Bapenda	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	67.358.300	0	0	Bulan	70.726.215
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Bapenda	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	305.527.600	0	0	Bulan	320.803.980
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kantor Bapenda	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	119.112.900	0	0	Bulan	125.068.545
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kantor Bapenda	Tersedianya barang cetak dan pengandaan	12 Bulan	571.418.100	0	0	Bulan	599.989.005
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kantor Bapenda	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	6.148.600	0	0	Bulan	6.456.030
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kantor Bapenda	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	5.500.000	0	0	Bulan	5.775.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kantor Bapenda	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	1.109.342.000	0	0	Bulan	1.164.809.100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan rumah tangga (unit/buah/paket)	1 paket	198.092.000	0	0	1 paket	207.996.600
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kantor Bapenda	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	46.077.600	0	0	Bulan	48.381.480
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Bapenda	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	152.014.400	0	0	Bulan	159.615.120
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	370.320.000	0	0	12 bulan	388.836.000
					waktu Pembuatan data organisasi kantor	12 bulan				12 bulan	
					waktu Penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan				12 bulan	
					Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Bapenda	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	331.520.000	0	0	Bulan	348.096.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kantor Bapenda	Tersusunnya akuntansi dan pelaporan keuangan dan waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	38.800.000	0	0	Bulan	40.740.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kantor	12 Bulan	322.279.700	0	0	12 Bulan	338.393.685
					Waktu pemelihara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu pemeliharaan rutin/Berkala genset	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu pemeliharaan rutin/Berkala Software	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kantor Bapenda	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	67.389.700	0	0	Bulan	70.759.185
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Bapenda	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	54.970.000	0	0	Bulan	57.718.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor Bapenda	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	199.920.000	0	0	Bulan	209.916.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KEUANGAN										
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatkan Pelayanan yang prima kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah		Persentase peningkatan objek pajak baru	0,05 OP	2.640.971.304	0	0	0,05 OP	2.773.019.869
					Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah	5%				5%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	100%				100%	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			TAPIN	Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak daerah dan retribusi daerah	360 wajib pajak	2.640.971.304	0	0	360 wajib pajak	2.773.019.869
					Jumlah Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4 laporan				4 laporan	
					Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	360 surat				360 surat	
					Jumlah Surat-Surat berharga yang di cetak	5710 buku				5710 buku	
					Kesesuaian Data NJOP PBB-P2	6012 Wajib Pajak				6012 Wajib Pajak	
					Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak daerah dan retribusi daerah	475 OPSWalet				475 OPSWalet	
					Waktu Sosialisasi PBB-P2	12 bulan				12 bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak	24 laporan				24 laporan	
					Jumlah Pendistribusian SPPT PBB P2	12 dokumen				12 dokumen	
					Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	12 laporan				12 laporan	
					Jumlah Laporan Pendapatan dan Tunjukkan Pendapatan Daerah	12 laporan				12 laporan	
					Jumlah Laporan target pendapatan	2 dokumen				2 dokumen	
					Jumlah laporan Penyusunan Laporan Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen				12 dokumen	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			Kantor Bapenda	waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	12 bulan	274.199.800	0	0	12 bulan	287.909.790
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 bulan	74.999.800	0	0	12 bulan	78.749.790
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya penyusunan kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	1 Paket	357.696.600	0	0	Paket	375.581.430
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah	1 Paket	547.885.304	0	0	Paket	575.279.569
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Kantor Bapenda	waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12 bulan	499.999.800	0	0	12 bulan	524.999.790
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya pemeliharaan dan pemuktahiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah	1 Paket	267.295.000	0	0	Paket	280.659.750
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi	1 Paket	38.500.000	0	0	Paket	40.425.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemunutan pajak dan retribusi daerah	1 Paket	186.000.000	0	0	Paket	195.300.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Kantor Bapenda	Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	1 Paket	394.395.000	0	0	Paket	414.114.750
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						9.990.093.247	0	0		10.489.597.909
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	6.080.260.647	0	0	100%	6.384.273.679
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Tersusun dan tersampainya laporan wajib BKPSDM	10 Dokumen	47.687.900	0	0	10 Dokumen	50.072.295
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah Dokumen RKA BKPSDM	1 Dokumen	6.900.000	0	0	1 Dokumen	7.245.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BKPSDM	1 Dokumen	2.650.000	0	0	1 Dokumen	2.782.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah Laporan Wajib BKPSDM	10 Dokumen	38.137.900	0	0	10 Dokumen	40.044.795
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Tersusun dan tersampainya laporan keuangan BKPSDM	1 Dokumen	3.768.868.347	0	0	1 Dokumen	3.957.311.764
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.749.710.147	0	0	12 Bulan	3.937.195.654

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4.299.800	0	0	1 Dokumen	4.514.790
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	2 Dokumen	6.503.500	0	0	2 Dokumen	6.828.675
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan keuangan	4 Dokumen	8.354.900	0	0	4 Dokumen	8.772.645
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	67.475.000	0	0	1 Kegiatan	70.848.750
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	67.475.000	0	0	1 Kegiatan	70.848.750
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bulan	1.590.362.000	0	0	12 Bulan	1.669.880.100
					Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Tersedianya konsumsi	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi (perjalanan dinas)	12 Bulan				12 Bulan	
					Tersedianya Stan BKPSDM pada Tapin expo	1 Kegiatan				1 Kegiatan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12.000.000	0	0	12 bulan	12.600.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BKPSDM Kab. Tapin	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	293.360.600	0	0	12 Bulan	308.028.630
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	22.870.400	0	0	12 bulan	24.013.920
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu penyediaan konsumsi harian pegawai	12 Bulan	99.000.000	0	0	12 Bulan	103.950.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah pelaksanaan Tapin expo	1 kali	24.978.000	0	0	1 kali	26.226.900
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu penyediaan konsumsi Tamu	12 Bulan	23.500.000	0	0	12 Bulan	24.675.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	1.114.653.000	0	0	12 Bulan	1.170.385.650
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Tersedianya Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor	12 Bulan	394.800.000	0	0	12 Bulan	414.540.000
					Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	168.000.000	0	0	12 Bulan	176.400.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah tenaga jasa pada BKPSDM Tapin	13 orang	226.800.000	0	0	13 orang	238.140.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terpeliharanya 1 buah kendaraan dinas BKPSDM Tapin	12 Bulan	211.067.400	0	0	12 Bulan	221.620.770
					Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	1 Buah	34.782.400	0	0	1 Buah	36.521.520
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pemeliharaan Mebel	12 Bulan	19.135.000	0	0	12 Bulan	20.091.750
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	64.050.000	0	0	12 Bulan	67.252.500
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 kali	93.100.000	0	0	1 kali	97.755.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.03	KEPEGAWAIAN										
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian		Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	100%	3.387.082.600	0	0	100%	3.556.436.730
					Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment	100%				100%	
					Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	100%				100%	
					Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang memenuhi syarat jabatan	100%				100%	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			TAPIN	Terlaksananya Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN	12 Bulan	611.794.000	0	0	12 Bulan	642.383.700
					Tersusunnya Data Bezetting Existing ASN	12 Bulan				12 Bulan	
					Terselesaikannya SK Penetapan CPNS menjadi PNS	12 Bulan				12 Bulan	
					Terselesaikannya usul Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS	12 Bulan				12 Bulan	
					Terselesaikannya SK berkala PNS	12 Bulan				12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya Perbaikan Data Pegawai dan Operasional SAPK	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Website	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya Entry Data dan Pengelolaan Kearsipan	12 Bulan				12 Bulan	
					Terselesaikannya usul Pembuatan Karpeg, Karis/karsu, Taspen	12 Bulan				12 Bulan	
					Terselesaikannya usulPembuatan Cuti-cuti PNS	12 Bulan				12 Bulan	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12 Bulan	1.050.000	0	0	12 Bulan	1.102.500
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan penyusunan analisis kebutuhan, formasi, dan pelaksanaan pengadaan ASN	12 Bulan	471.160.000	0	0	12 Bulan	494.718.000
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun	12 Bulan	52.640.000	0	0	12 Bulan	55.272.000
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN lainnya)	12 Bulan	20.744.000	0	0	12 Bulan	21.781.200
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Bulan	40.700.000	0	0	12 Bulan	42.735.000
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Bulan	25.500.000	0	0	12 Bulan	26.775.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			TAPIN	Terselesaikannya usul SK Mutasi PNS	12 Bulan	470.606.700	0	0	12 Bulan	494.137.035
					Terselesaikannya Usul kenaikan pangkat PNS	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya kegiatan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya kegiatanPenyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya kegiatanBaperjakat	12 Bulan				12 Bulan	
					Terselesaikannya usul pencantuman gelar	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya kegiatanPengambilan sumpah PNS	12 Bulan				12 Bulan	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan pembuatan SK Mutasi ASN	12 Bulan	3.000.000	0	0	12 Bulan	3.150.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan penyelesaian penempatan, pengangkatan, dan kepangkatan	12 Bulan	99.399.800	0	0	12 Bulan	104.369.790
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan Pengembangan Karier dan Promosi ASN	12 Bulan	368.206.900	0	0	12 Bulan	386.617.245
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya penyertaan diklat teknis dan fungsional	12 Bulan	2.202.746.900	0	0	12 Bulan	2.312.884.245
					Terlaksananya penyertaan diklat prajabatan	137 orang				137 orang	
					Terlaksananya penyertaan diklatpim IV	5 orang				5 orang	
					Terlaksananya penyertaan diklatpim III	4 orang				4 orang	
					Terlaksananya penyertaan diklatpim II	3 orang				3 orang	
					Terselesaikannya SK Pensiun	12 Bulan				12 Bulan	
					Terselesaikannya usul PembuatanPembuatan SK Jabatan Fungsional	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya Pengiriman Tugas Belajar Dokter Spesialis	orang				orang	
					Terselesaikannya usul izin belajar dan tugas belajar	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya kegiatan Pembekalan Calon Pegawai ASN	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas TK,ITK,II dan UKPPI	12 Bulan				12 Bulan	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			BKPSDM Kab. Tapin, BKD Prov. Kalsel	Waktu pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN	12 Bulan	82.775.000	0	0	12 Bulan	86.913.750
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan Pendidikan Lanjutan ASN	2 orang	100.900.000	0	0	2 orang	105.945.000
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	12 Bulan	1.996.772.000	0	0	12 Bulan	2.096.610.600
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional	12 Bulan	22.299.900	0	0	12 Bulan	23.414.895
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			TAPIN	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi	12 Bulan	101.935.000	0	0	12 Bulan	107.031.750
					Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	12 Bulan				12 Bulan	
					Terlaksananya kegiatan Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	12 Bulan				12 Bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
					Terlaksananya kegiatanApel Hari Kesadaran Nasional	12 Bulan				12 Bulan	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan pengembangan penilaian kinerja ASN	12 Bulan	50.410.000	0	0	12 Bulan	52.930.500
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan penegakkan disiplin, pemberian penghargaan, dan perlindungan ASN	12 Bulan	13.275.000	0	0	12 Bulan	13.938.750
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan pembinaan disiplin ASN	12 Bulan	38.250.000	0	0	12 Bulan	40.162.500
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya tingkat kesempatan pengembangan kompetensi aparatur		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	522.750.000	0	0	100%	548.887.500
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			INDONESIA	Terselenggaranya tes kompetensi jabatan	12 Bulan	522.750.000	0	0	12 Bulan	548.887.500
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			BKPSDM Kab. Tapin	Waktu pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	12 Bulan	522.750.000	0	0	12 Bulan	548.887.500
TOTAL							1.673.130.721.323	0	0		1.756.787.257.389



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat tapin antara lain pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*), serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:



**Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Makro Daerah**

INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET 2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,11	71,1 - 72,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,73	3.04 - 3.36
Pertumbuhan Ekonomi	-1,5	2,01 - 3
Tingkat Kemiskinan	3,06	2.79 - 3.48
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,09	69,2
Pendapatan per Kapita	43.358.403	44.277.602

**Tabel 6.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2022**

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target 2022
1	Indeks pembangunan manusia (poin)	68,7	71,1 - 72,4
2	Rata-rata lama sekolah (poin)	7,53	9,15
3	Harapan lama sekolah (poin)	11,52	13,74
4	Rasio budaya baca (poin)	0,002665	0,002685
5	Angka Harapan Hidup (poin)	69,72	72,55
6	Pengeluaran per kapita	1.141.745	1.285.045
7	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	78	80
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83,87	85,11
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72,99	73,39
10	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	2,01 - 3
11	Indeks Gini (poin)	0,33	0,29
12	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0,32	0,28
13	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	6.072.028	6.834.121



No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target 2022
14	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7.656.271	8.617.201
15	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21,75	23,91
16	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2,3	2,8
17	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,3	1,7
18	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	7,03	7,8
19	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2,7	3,7
20	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1,2	1,6
21	Indeks Desa Membangun (poin)	0,55	0,59
22	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	86,2	88
23	Persentase penduduk miskin (%)	3,76	3,45
24	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0,41	0,45
25	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0,08	0,04
26	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,25	3,04 - 3,36
27	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	44,55	60,67
28	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54,32	70
29	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	49	60
30	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55,65	62
31	Luas areal sawah yang terairi (%)	66	73
32	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	29	60
33	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	85	96
34	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.48	0.01
35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53,71	69,2



No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target 2022
36	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	46	69
37	Persentase rumah layak huni (%)	97,62	98,1
38	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4,6	5,7
39	Indeks rasa aman (poin)	0	0,52
40	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	0	B
41	Nilai SAKIP (predikat)	B	BB
42	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP
43	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	0	99
44	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	76	83

Beberapa target kinerja di tahun 2022 mengalami koreksi akibat dari adanya dampak Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2022 yang semula ditargetkan 70,7 menjadi 71,1 – 72,4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2022 sebelumnya ditargetkan 3,4 menjadi 3,04 – 3,36. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang semula ditargetkan 5,4 persen menjadi 2,01 - 3 persen.

6.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah. Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator Kinerja Lainnya adalah meliputi indikator program (*outcome*) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada priode jangka menengah. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Tabel 6.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
1	Pendidikan	
1.1	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik (%)	80%
1.2	Persentase PAUD yang terakreditasi (%)	60%
1.3	Angka Putus Sekolah Dasar (%)	0,024%
1.4	Angka Mengulang Sekolah Dasar (%)	0,010%
1.5	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	100%
1.6	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD (%)	92%
1.7	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (%)	0,25%
1.8	Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama (%)	0,72%
1.9	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	90%
1.10	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	92,31%
1.11	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)	0,55%
1.12	Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi (%)	42,20%
1.13	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	0,89
1.14	Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan pendidikan SD dan SMP (%)	92,80%
1.15	Persentase jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan (%)	100%
2	Kesehatan	
2.1	Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan (%)	100
2.2	Persentase Puskesmas yang terakreditasi madya (%)	100
2.3	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)	100
2.4	Persentase kasus obat yang tidak aman yang ditangani (%)	100
2.5	Persentase desa yang melakukan STBM (%)	79
2.6	Persentase pelayanan gizi masyarakat (%)	86
2.7	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	63
2.8	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga (%)	50
2.9	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	100
2.10	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.1	Persentase Panjang Tebing Sungai Yang Bebas Rawan Bencana (%)	20
3.2	- Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan rigasi rawa dalam kondisi baik/ sedang	40
3.3	- Persentase pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik	30
3.4	- Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	52
3.5	- Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	14



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
3.6	- Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	58
3.7	- Persentase panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	20
3.8	- Persentase Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	15
3.9	- Persentase data jalan yang dimutakhirkan (%)	100
3.10	- Persentase data jembatan yang dimutakhirkan (%)	100
3.11	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	20
3.12	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	0,8
3.13	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)	0,9
3.14	Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	0,67
3.15	Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun (%)	0,6
3.16	Persentase jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK (%)	60
3.17	Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang (%)	69,22
3.18	Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang (%)	85,12
3.19	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	90
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
4.1	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	6,24
4.2	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	62,78
4.3	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
5.1	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan (%)	100
5.2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	100
5.3	- Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	100
5.4	- Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih (%)	100
5.5	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	70
5.6	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	80
5.7	Persentase daerah terdampak bencana yang pulih (%)	70
5.8	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (%)	80
5.9	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku (%)	100
5.10	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani (%)	80
5.11	Persentase Ormas yang terdata (%)	85
5.12	- Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya (%)	80
5.13	- Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	90
5.14	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
5.15	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
5.16	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
5.17	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
5.18	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100
6	Sosial	
6.1	Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	55,1
6.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan (%)	2,28
6.3	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	35,1
6.4	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	3,04
6.5	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PPKS (%)	56,16
6.6	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100
6.7	Persentase PPKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	10,1
7	Tenaga Kerja	
7.1	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	40
7.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	60
7.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	45
7.4	Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja (%)	10
7.5	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100
7.6	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	100
7.7	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	75
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8.1	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	90
8.2	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (%)	90
8.3	- Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	2,3
8.4	- Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah (%)	55
8.5	- Persentase pelaku usaha rumahan perempuan (%)	19
8.6	Persentase perkawinan usia anak (%)	2.3
8.7	Persentase keluarga pelaku usaha (%)	0,86
8.8	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput	90
8.9	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	8.3
8.10	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	1.69
8.11	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	7.69



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
8.12	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	50
8.13	Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	46.15
9	Pangan	
9.1	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita)	14,949,341 (Kg/kapita/tahun)
9.2	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)	100%
10	Pertanahan	
10.1	Persentase cakupan data penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan (%)	18,18
10.2	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%)	100
11	Lingkungan Hidup	
11.1	Persentase cakupan area pelayanan (%)	0,5833
11.2	Persentase volume sampah yang tertangani (%)	50,5
11.3	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan (%)	85
11.4	- Status Mutu Air (status)	Cemar Sedang
11.5	Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80%
11.6	Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	60%
11.7	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati (%)	60%
11.8	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah (%)	75%
11.9	Persentase MHA yang ditetapkan haknya (%)	38%
11.10	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air (%)	32%
11.11	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara (%)	32%
11.12	- Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi (%)	100%
11.13	Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 (%)	64%
11.14	Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan (%)	55%
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	
12.1	IKM terhadap pelayanan KTP & Kartu Keluarga (Poin)	89
12.2	IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan (Poin)	89
12.3	Tingkat Akurasi Data Penduduk (%)	90
12.4	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan (%)	83
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
13.1	- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten (%)	79
13.2	- Persentase BUMDES yang aktif (%)	81



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
13.3	- Persentase BUMDES menghasilkan laba (%)	1,85
13.4	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar (%)	47
13.5	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	91
13.6	- Persentase PKK aktif (%)	94
13.7	- Persentase posyandu aktif (%)	87
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
14.1	Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) (%)	2,09%
14.2	Persentase peserta KB aktif MKJP (%)	8,87%
14.3	- Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	68,02%
14.4	- Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (%)	92,36%
14.5	Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS (%)	92,09%
14.6	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB (%)	83,98%
14.7	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL (%)	73,61%
14.8	Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan (%)	75%
14.9	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (%)	75%
14.10	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja (%)	40%
15	Perhubungan	
15.1	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar (%)	9000%
15.2	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek (%)	100,00%
15.3	Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu-lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor (%)	6500%
16	Komunikasi dan Informatika	
16.1	Persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki Izin	0,62
16.2	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI (%)	100%
16.3	Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa (%)	100%
16.4	Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online (%)	100%
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
17.1	Persentase Koperasi Aktif (%)	87,41
17.2	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	60
17.3	Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro (%)	34,25
17.4	Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)	15,95
17.5	Persentase pelaku usaha mikro menjadi usaha kecil	33,29
18	Penanaman Modal	
18.1	1. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	100
18.2	2. Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
18.3	Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan (%)	70
18.4	Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	70
18.5	Pertumbuhan penanaman modal (%)	5
18.6	Persentase dokumen RUPM yang tersedia	0
18.7	Persentase rekomendasi PM (investor baru)	70
18.8	1. Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	100
18.9	2. Persentase perizinan yang diterbitkan	100
19	Kepemudaan dan Olahraga	
19.1	jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional (cabor)	14
19.2	jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional (cabor)	12
19.3	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik (%)	96
19.4	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi (%)	70
19.5	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	100
20	Statistik	
20.1	Persentase data statistik sektoral yang disajikan (%)	100%
21	Persandian	
21.1	Persentase aparaturnya persandian yang memahami standar persandian (%)	100%
22	Kebudayaan	
22.1	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah (%)	90
22.2	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik (%)	100
22.3	Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina (%)	45
22.4	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif (%)	50
23	Perpustakaan	
23.1	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka (%)	4,97%
23.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	74%
23.3	Angka rata - rata pemanfaatan Perpustakaan	1,08%
23.4	Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP (%)	50%
23.5	Persentase peningkatan tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	50%
23.6	Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan (%)	4,06%
23.7	Persentase jumlah perangkat daerah dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK (%)	55,55%
23.8	Persentase pengelola arsip yang terampil (%)	55,55%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
II	Fokus Layanan Urusan Pilihan	
1	Kelautan dan Perikanan	
1.1	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya (%)	100
1.1.1	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap (%)	100
1.1.2	Persentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas (%)	100
2	Pariwisata	
2.1	Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik (%)	75
2.2	Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%)	35
2.3	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan (%)	35
2.4	Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina (%)	40
3	Pertanian	
3.1	- Produktivitas Padi (Ku/Ha)	50,72
3.2	- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	49,49
3.3	- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	9,46
3.4	- Luas Panen Padi (Ha)	81800
3.5	- Luas Panen Jagung (Ha)	1872
3.6	- Luas Panen Kedelai (Ha)	116
3.7	- Persentase RMU yang menghasilkan beras dengan mutu baik (%)	15
3.8	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil tanaman pangan	1
3.9	- Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	157
3.10	- Luas Panen Bawang Merah (Ha)	70
3.11	- Luas Panen Jeruk (Ha)	250
3.12	Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	93,25
3.13	Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	72,60
3.14	Produktivitas Jeruk (Ku/Ha)	399,16
3.15	- Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	1
3.16	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura	1
3.17	- Persentase lahan sawah fungsional yang Terairi (%)	15,35
3.18	- Rasio ketersediaan alat mesin pertanian pra panen (%)	27,71
3.19	- Rasio ketersediaan alat mesin pertanian pasca panen (%)	2,48
3.20	- Jumlah luas lahan fungsional (Ha)	63113
3.21	- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	659,01
3.22	- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	2071,26
3.23	- Luas Tanaman Karet (Ha)	14978
3.24	- Luas Tanaman Sawit (Ha)	3437
3.25	- Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	3,5
3.26	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik (%)	21,88
3.27	- Populasi sapi (ekor)	7251
3.28	- Populasi kambing (ekor)	4783
3.29	- Populasi unggas (ekor)	2330206
3.30	- Angka konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	3,94
3.31	- Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	100
3.32	Persentase kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina (%)	2



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
3.33	- Persentase Kelas kelompok tani Madya (%)	19
3.34	- Persentase penyuluh yang bersertifikat kompetensi teknis	55
4	Perdagangan	
4,1	- Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang tidak Sesuai SNI (%)	95
4,2	- Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah (%)	100
4,3	Persentase Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan (%)	100
4,4	Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar (indeks)	76
4,5	Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat (%)	100
4,6	Persentase pasar tradisional yang dibangun	95,12
4,7	Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi	83,33
4,8	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan (%)	100
4,9	Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang (%)	100
5	Perindustrian	
5,1	Persentase Bertambahnya Usaha Industri logam dan aneka (%)	0,37
5,2	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industrilogam dan aneka (%)	0,26
5,3	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	2,01
5,4	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	2,31
III	Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan	
1	Perencanaan	
1.1	- Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100
1.2	- Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD:	
1.2.1	a. sasaran	100
1.2.2	b. program	100
1,3	- Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD	
1.3.1	a. program	100
1.3.2	b. kegiatan	100
1,4	- Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah	
1.4.1	a. kinerja	100
1.4.2	b. anggaran	100
1,5	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD (%)	100
1,6	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)	
1.6.1	a. program	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
1.6.2	b. kegiatan	100
1,7	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)	
1.7.1	a. kinerja	100
1.7.2	b. anggaran	100
1,8	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD (%)	100
1,9	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM (%)	
1.9.1	a. program	100
1.9.2	b. kegiatan	100
1.10	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM (%)	
1.10.1	a. kinerja	100
1.10.2	b. anggaran	100
2	Keuangan	
2.1	Persentase Perda, Perbup dan Pedoman yang disahkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100
2,2	Persentase komplain terhadap penerbitan SP2D (%)	0
2,3	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan penggunaan APBD sesuai standar dan tepat waktu (%)	100
2,4	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	100
2,5	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan	100
2,6	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	100
2,7	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan	90
2,8	Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100
2,9	Persentase peningkatan objek pajak baru (OP)	0.05
2.10	- Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.	5.00
2,11	- Persentase Penerimaan Piutang daerah	5.00
2,12	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	80
2,13	Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	100
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
3.1	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessorment (%)	99
3.2	Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan (%)	90%
3.3	Persentase Pejabat fungsional tertentu yang memenuhi syarat jabatan (%)	90%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
3.4	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	80
3.5	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian (%)	99
3.6	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja (%)	95
4	Penelitian dan Pengembangan	
4.1	Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan (%)	100
5	Pengawasan	
5.1.	- Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu (%)	100%
5,2	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	90%
5,3	- Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	100%
5,4	- Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100%
5,5	Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat (%)	100%
5,6	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	85%
5,7	- Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	100%
5,8	- Persentase Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 (%)	80%
5,9	Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu (%)	100%
6	Sekretariat Dewan	
6.1	Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (%)	90%
6.2	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu (%)	80%
6.3	Persentase pembahasan Penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu (%)	80%
7	Sekretariat Daerah	
7.1	Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten (poin)	3,0
7.2	Persentase batas wilayah yang telah ditetapkan (%)	100
7.3	Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu (%)	100
7.4	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel (%)	71
7.5	Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel (%)	88
7.6	Persentase informasi pembangunan daerah terhadap publik melalui media massa dan media elektronik (%)	280
7.7		760
7,7	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilayani (%)	775
7,8	Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu (%)	0,95



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2022
7,9	- Persentase BUMD yang sehat dan profitable (%)	0,95
7.10	- Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	100%
7.11	Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu (%)	100%
7.12	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu (%)	100
7.13	Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses lelangnya (%)	90
7.14	Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppup yang diharmonisasi (%)	100%
7.15	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu (%)	100%
7.16	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	100%
7.17	Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan (%)	100%
7.18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin (nilai)	100%



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tapin sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. RKPD Tahun 2022 tidak hanya memuat Program, kegiatan dan sub kegiatan, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
3. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap Program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2022.
5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2022 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
6. Berdasarkan Permendagri 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 pasal 9 ayat (1-6) yang menyatakan bahwa Penjabaran dari RPJMD dituangkan dalam RKPD. Selain penjabaran juga memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah



yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD 2022 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam hal nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra belum sesuai, maka pemerintah melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra dengan tetap memperhatikan target kinerja. Hasil penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra dituangkan dalam kertas kerja perangkat daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 **BUPATI TAPIN,**

H. M. ARIFIN ARPAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BERITA ACARA

KESEPAKATAN HASIL RAPAT ASISTENSI PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RPJMD DAN RENSTRA SKPD TAHUN 2018 - 2023

**Nomor : 050 / 181 - Randal/Bappelitbang
Tanggal 27 Mei 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos : 71114

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL RAPAT
ASISTENSI PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN PADA RPJMD DAN RENSTRA SKPD
Nomor : 050 / 181 - Randal/Bappelitbang
Tanggal 27 Mei 2021**

Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Rapat Asistensi Penyesuaian Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RPJMD dan Renstra SKPD yang dihadiri sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 pasal 9 ayat (1-6) yang menyatakan bahwa Penjabaran dari RPJMD dituangkan dalam RKPD. Selain penjabaran juga memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD 2022 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam hal nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra belum sesuai, maka pemerintah melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra dengan tetap memperhatikan target kinerja. Hasil penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra dituangkan dalam kertas kerja perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada Rapat Asistensi Penyesuaian Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RPJMD dan Renstra SKPD MENYEPAKATI:

KESATU : Menyepakati kertas kerja perangkat daerah yang memuat hasil penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra (LAMPIRAN I).

KEEMPAT

:

Hal-hal lainnya terkait hasil penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah,



H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650422 198803 1 008

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Entry Data dan Pengelolaan Kearsipan	Terlaksananya Entry Data dan Pengelolaan Kearsipan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	Terlaksananya kegiatan Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	Terlaksananya kegiatan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Pembekalan Calon Pegawai ASN	Terlaksananya kegiatan Pembekalan Calon Pegawai ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Ujian Dinas Tk.ITK.II dan UKPPI	Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas Tk.ITK.II dan UKPPI	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional	Terlaksananya kegiatanApel Hari Kesadaran Nasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Kegiatan Baperjakat	Terlaksananya kegiatanBaperjakat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Pengambilan sumpah PNS	Terlaksananya kegiatanPengambilan sumpah PNS	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya kegiatanPenyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi (perjalanan dinas)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan dan Pengembangan Website	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Website	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Bantuan Tugas Belajar Dokter Spesialis	Terlaksananya Pengiriman Tugas Belajar Dokter Spesialis	orang	2	2	2	2	2	2
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Diklat Prajabatan	Terlaksananya penyertaan diklat prajabatan	orang	137	137	137	137	137	137
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	Terlaksananya penyertaan diklat teknis dan fungsional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Diklatpim II	Terlaksananya penyertaan diklatpim II	orang	3	3	3	3	3	3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Diklatpim III	Terlaksananya penyertaan diklatpim III	orang	4	4	4	4	4	4
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Diklatpim IV	Terlaksananya penyertaan diklatpim IV	orang	5	5	5	5	5	5
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perbaikan Data Pegawai dan Operasional SAPK	Terlaksananya Perbaikan Data Pegawai dan Operasional SAPK	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN	Terlaksananya Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 1 buah kendaraan dinas BKPSDM Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terseadinya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Terseadinya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terseadinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Terseadinya konsumsi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Terseadinya perlengkapan dan peralatan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Jasa Petugas Keamanan dan Kebersihan	Terseadinya Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Terseadinya Stan BKPSDM pada Tapin expo	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan test kompetensi jabatan	Terseleenggaranya tes kompetensi jabatan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Penyelesaian kenaikan pangkat PNS	Terselesaiakannya Usul kenaikan pangkat PNS	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin/kegiatan Tim MP2HD	Terselesaiakannya kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sistem Informasi Berkala Online	Terselesaiakannya SK berkala PNS	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penetapan CPNS menjadi PNS	Terselesaiakannya SK Penetapan CPNS menjadi PNS	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Penyelesaian SK Pensiun	Terselesaiakannya SK Pensiun	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Penyelesaian administrasi Ijin Belajar dan Tugas Belajar	Terselesaiakannya usul izin belajar dan tugas belajar	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyelesaian Proses Pembuatan Karpeg, Karis/karsu, Taspen	Terselesaiakannya usul Pembuatan Karpeg, Karis/karsu, Taspen	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Penyelesaian Proses Pembuatan SK Jabatan Fungsional	Terselesaiakannya usul PembuatanPembuatan SK Jabatan Fungsional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Kegiatan Pencantuman Gelar	Terselesaiakannya usul pencantuman gelar	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS	Terselesaiakannya usul Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Penyelesaian SK Mutasi	Terselesaiakannya usul SK Mutasi PNS	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Proses Penyelesaian Pembuatan Cuti-cuti PNS	Terselesaiakannya usulPembuatan Cuti-cuti PNS	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusun dan tersampainya laporan keuangan BKPSDM	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun dan tersampainya laporan wajib BKPSDM	Dokumen	10	10	10	10	10	10
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengolahan Data Bezetting Existing ASN	Tersusunnya Data Bezetting Existing ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	13	13	13	13	13	13
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	laporan	2	2	2	2	2	2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan kepada Parpol Kab. Tapin	Jumlah Partai Politik yang diverifikasi	Parpol	10	10	10	10	10	10
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Hari Besar Sejarah Nasional	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional Yang Dilaksanakan (Kali)	Kali	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan AC, Personal Komputer dan Lap Top	unit	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah peserta Dialog/Diskusi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	org/keg	140	140	140	140	140	140
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah peserta penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	org/keg	150	150	150	150	150	150
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah peserta rakor Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	org/kali	96	96	96	96	96	96

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah peserta rakor PPWK	org/kali	60	60	60	60	60	60
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Saresehan dan Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan	Jumlah peserta Sarasehan dan Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan	org/keg	60	60	60	60	60	60
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sarasehan/Diskusi/Dialog Interaktif Ttg Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta Sarasehan/Diskusi/Dialog Interaktif ttg Peningkatan Kesadaran Bela Negara	org/keg	120	120	120	120	120	120
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Politik	Jumlah peserta Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Politik	org/keg	100	100	100	100	100	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas	Jumlah peserta Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas	org/keg	70	70	70	70	70	70
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	org/keg	100	100	100	100	100	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Sosialisasi Pemilu Tahun 2020	Jumlah peserta Sosialisasi Pemilu Tahun 2020	org/keg	200	200	200	200	200	200
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	Jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	org/keg	50	50	50	50	50	50
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah rakor peserta Tim P4GN	org/kali	56	56	56	56	56	56
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Sosialisasi Pemilu Tahun 2020	Jumlah spanduk dan baliho Sosialisasi Pemilu 2020	buah	11	11	11	11	11	11
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bimtek Intelijen	waktu Bimtek Intelijen	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	waktu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Gelar adat budaya Antar Suku dalam rangka karnaval Hari Jadi Kabupaten Tapin	waktu Gelar adat budaya Antar Suku dalam rangka karnaval Hari Jadi Kabupaten Tapin	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu ketersediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Waktu ketersediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu ketersediaan jasa kebersihan dan keamanan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan makanan/minuman harian pegawai, rapat dan tamu	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Tapin	Waktu Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kab. Tapin	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	Waktu pemantauan perkembangan politik di daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	waktu Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penanganan Konflik Sosial	Waktu penanganan konflik sosial	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	waktu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin	Waktu pengawasan dini pemerintah daerah di Kab. Tapin	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sistem Informasi Ormas	Waktu pengelolaan Sistem Informasi Informasi Ormas	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Fasilitasi kegiatan eksekutif dan legislatif	Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi (Bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Revolusi Mental	waktu Revolusi Mental	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kab. Tapin	waktu Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kab. Tapin	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penataan barang milik daerah	Jumlah dokumen Data BMD SKPD	dokumen	45	45	45	45	45	45
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan/pembuatan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	dokumen	149	149	149	149	149	149

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan dan pembuatan keputusan KDH tentang pejabat pengelola dan pelaksana penatausahaan keuanga	Jumlah keputusan kdh tentang pejabat pengelolaan pelaksanaan penatausahaan keungan daerah	SK	30	30	30	30	30	30
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan laporan barang milik daerah pemerintah kabupaten Tapin	Jumlah laporan barang milik daerah	laporan	21	21	21	21	21	21
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan/Pembuatan Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah laporan DAK yang disusun	dokumen	52	52	52	52	52	52
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penghapusan dan pemindahtanganan BMD pemerintah kabupaten Tapin	Jumlah laporan data penghapusan dan pemindahtanganan BMD	dokumen	10	10	10	10	10	10
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan BMD	dokumen	45	45	45	45	45	45
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan laporan keuangan daerah (LKD) akhir tahun Pemkab. Tapin	Jumlah laporan keuangan daerah (LKD) akhir tahun Pemkab Tapin	dokumen	7	7	7	7	7	7
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan laporan realisasi semester I pelaksanaan APBD Pemkab. Tapin dan prognosis 6 bulan berikut	Jumlah laporan realisasi semester I pelaksanaan APBD Pemkab Tapin dan prognosis 6 bulan berikutnya	dokumen	2	2	2	2	2	2
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan KDH tentang penjabaran APBD Kab. Tapin	buku	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Tapin	buku	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah rancangan perda APBD	buku	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	buku	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Raperbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Raperbup Tentang Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	dokumen	3	3	3	3	3	3
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Tapin	dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pendataan hasil pengadaan dan penetapan status penggunaan BMD	Jumlah SKPD yang ditetapkan status pengguna BMD	SKPD	10	10	10	10	10	10
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Peningkatan pelayanan penyelesaian penerbitan SP2D dan SPD	Waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan penyelesaian penerbitan SP2D dan SPD yang baik dan lancar	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan administrasi gaji pegawai se kabupaten Tapin	Waktu pelaksanaan pelayanan administrasi gaji pegawai di kabupaten Tapin	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan/pembuatan DPPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	dokumen	149	149	149	149	149	149
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan dan Perawatan kendaraan dinas pada Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas pada pengelola barang dalam perawatan dan pemeliharaan	unit	5	5	5	5	5	5
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan barang milik daerah	Jumlah Laporan Data Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten Tapin	dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pra penyusunan laporan keuangan daerah (LKD) Pemkab. Tapin	Jumlah laporan inventarisasi pos pos LKPD	dokumen	45	45	45	45	45	45
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	laporan	0	0	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	pelaksanaan Tapin Expo	kali	1	1	1	1	1	1
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan pelayanan PPKD	Peningkatan pelayanan PPKD	Jumlah berkas pencairan dana yang diselesaikan	berkas	220	220	220	220	220
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembuatan data organisasi kantor	waktu Pembuatan data organisasi kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala genset	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	waktu Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah	Waktu Peningkatan kapasitas aparatur daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Waktu peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	waktu Penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu Penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga	waktu Penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah	Waktu terlaksananya penyediaan data keuangan yang valid	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Jumlah Identifikasi, verifikasi Kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	buah	15	15	15	15	15	15
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Jitu Pasma	Jumlah Pelatihan jitu Pasma	tahun	1	1	1	1	1	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	Jumlah Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	desa	1	1	1	1	1	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, karhutla, puting beliung , Tanah Longsor dan Kekeringan)	Jumlah Pembuatan Rencana Kontijensi dan Gladi (banjir, Karhutla, puting beliung , Tanah Longsor dan Kekeringan)	dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Bencana/posko	Jumlah Pengelolaan Bencana/posko	kali	2	2	2	2	2	2
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	8	8	8	8	8	8
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	laporan	2	2	2	2	2	2
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	Jumlah Rapat Koordinasi Pemulihan sosial, ekonomi dan psikologi	kali	2	2	2	2	2	2
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebencanaan	Jumlah Sosialisasi kebencanaan	kali	4	4	4	4	4	4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah Tapin Expo	kali	1	1	1	1	1	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tim Reaksi Cepat	Jumlah Tim Reaksi Cepat	orang	25	25	25	25	25	25
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan gudang logistik dan perlengkapannya	waktu	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	waktu Penyediaan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Apel Kesiapsiagaan Bencana	waktu Apel Kesiapsiagaan Bencana	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	waktu Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Operasional Dapur Umum lapangan	Waktu Operasional Dapur Umum lapangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelaksanaan Mitigasi Struktural	waktu Pelaksanaan Mitigasi Struktural	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	waktu Pelatihan/ diklat SAR dan Relawan PB	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana	waktu Pemasangan sistem Peringatan dini Bencana	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan	waktu Pemasangan Videotron dan Rambu-Rambu Kebencanaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pembangunan garasi mobil	waktu pembangunan garasi mobil	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan gudang logistik dan perlengkapannya	waktu Pembangunan gudang logistik dan perlengkapannya	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	waktu Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di Sekolah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	waktu Pembuatan Peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	Waktu Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala komputer peripheralnya	waktu Pemeliharaan rutin/berkala komputer peripheralnya	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mobil Operasional	waktu Pengadaan mobil operasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mobil Operasional	waktu Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus	waktu Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pengelolaan Peralatan dan Logistik	Waktu Pengelolaan Peralatan dan Logistik	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	Waktu Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana	waktu Peningkatan Keterampilan aparat penanggulangan bencana	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	waktu Peningkatan wawasan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	waktu Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Ekspedisi/Pengiriman	Waktu Penyediaan Jasa Ekspedisi/Pengiriman	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan Makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (banjir, karhutla, puting beliung, tanah longsor)	waktu Review Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan bencana (banjir, karhutla, puting beliung, tanah longsor)	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	13	13	13	13	13	13
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan semesteran akhir tahun (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	2	2
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penyusunan Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	laporan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penyusunan Laporan Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah laporan Penyusunan Laporan Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penetapan Target Pendapatan	Jumlah Laporan target pendapatan	dokumen	2	2	2	2	2	2
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	laporan	4	4	4	4	4	4
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah Pelaksanaan kegiatan TAPIN EXPO	Kali	1	1	1	1	1	1
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak	laporan	24	24	24	24	24	24
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	laporan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pendistribusian dan Penagihan PBB P2	Jumlah Pendistribusian SPPT PBB P2	dokumen	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	surat	360	360	360	360	360	360
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan rumah tangga (unit/buah/paket)	paket	1	1	1	1	1	1
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pengelolaan Surat-Surat Berharga	Jumlah Surat-Surat berharga yang di cetak	buku	5710	5710	5710	5710	5710	5710
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pendaftaran, Pendaftaran dan Pemutakhiran Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak daerah dan retribusi daerah	wajib pajak	360	360	360	360	360	360
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pendaftaran Objek Pajak Daerah Bangunan Sarang Burung Walet	Jumlah Wajib Pajak yang di data terdaftar dan Pemuktahiran pajak daerah dan retribusi daerah	OPSWalet	475	475	475	475	475	475
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Perbaikan Data dan Validasi Data PBB-P2	Kesesuaian Data NJOP PBB-P2	Wajib Pajak	6012	6012	6012	6012	6012	6012
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembuatan data organisasi kantor	waktu Pembuatan data organisasi kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala genset	Waktu pemeliharaan rutin/Berkala genset	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Software	Waktu pemeliharaan rutin/Berkala Software	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	waktu Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan PPKD	waktu Peningkatan Pelayanan PPKD	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga	waktu Penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Sosialisasi PBB-P2	Waktu Sosialisasi PBB-P2	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran/akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	laporan	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kab Tapin	dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja pada Bappelitbang	laporan	8	8	8	8	8	8
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran	Jumlah laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran	Laporan	4	4	4	4	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pelaksanaan Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)	Jumlah laporan PSETK	Laporan	45	45	45	45	45	45
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS	Jumlah Nota kesepakatan KU APBD dan Nota kesepakatan PPAS APBD	dokumen	2	2	2	2	2	2
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan	Jumlah Nota kesepakatan KU APBD dan PPAS APBP Perubahan	dokumen	2	2	2	2	2	2
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan pada Tapin Expo	kali	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	4	4	4	4	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	unit	13	13	13	13	13	13
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rehab Gedung Kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor	Paket	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	laporan DAK yang benar dan tepat waktu	laporan	4	4	4	4	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	laporan dekon yang benar dan tepat waktu	laporan	4	4	4	4	4	4

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	laporan tugas pembantuan yang benar dan tepat waktu	laporan	4	4	4	4	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi selesai tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Infrastruktur selesai tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Sosial selesai tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia	Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia selesai tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	persen	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Infrastruktur	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur	persen	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sosial	persen	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia	Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia	persen	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Persentase SKPD menyampaikan Laporan RfK yang benar dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran/akhir tahun	Terlaksananya administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Tapin	Terlaksananya koordinasi TKPKD Kabupaten Tapin	kali	4	4	4	4	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyusunan dan Pemuktahiran Sustainable Development Goals (SDG's) Kabupaten	Terlaksananya laporan SDG's	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan perubahan RPKD	Tersedianya dokumen perubahan RPKD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Analisis Standard Belanja (ASB)	Tersusunnya ASB	dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya SSH	dokumen	1	1	1	1	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	waktu Pengembangan SIDA dalam meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penyusunan profile daerah	waktu Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah dalam Pembangunan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	waktu Sayembara Inovasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Evaluasi RPJMD	waktu Evaluasi RPJMD	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penyusunan dan anlisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	waktu Jaring Penelitian dan Pengembangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	waktu pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penetapan Perubahan RPJMD	waktu Penetapan Perubahan RPJMD	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Waktu pengembangan SIPD Kab Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa petugas kebersihan dan keamanan	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	waktu Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Rancangan RPJMD	waktu Penyusunan Rancangan RPJMD	bulan	12	12	12	12	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	waktu Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan alat kesenian dan kebudayaan	Jumlah alat kesenian dan kebudayaan yang tersedia (bh)	buah	0	0	0	5	5	5
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Balai Adat	Jumlah balai adat yang dibangun	bh	1	1	1	1	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Benda Cagar Budaya	Jumlah benda cagar budaya yang terdaftar	buah	50	50	50	50	50	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Benda Cagar Budaya	Jumlah benda cagar budaya yang terdaftar	buah	50	50	50	50	50	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyusunan Profil Pariwisata Kabupaten Tapin	Jumlah buku / CD Profil Pariwisata	bh	0	1	1	1	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	bh	1	1	1	1	2	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa pemangku adat dayak	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (bh)	buah	1	1	1	1	2	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Operasional Destinasi Wisata	Jumlah destinasi yang terpelihara	bh	3	3	3	3	3	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata	dok	1	1	1	1	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah duta wisata yang mengikuti pemilihan nanang galuh	orang	2	2	2	2	2	2

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah event aktualisasi budaya daerah	kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Teknologi dan informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah informasi pariwisata	bh	48	48	48	48	48	48
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa pemangku adat dayak	Jumlah jasa pemangku adat dayak	orang/bulan	300	300	300	300	300	300
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan perawatan Benda Cagar Budaya / Situs	Jumlah juru pelihara BCB/situs yang aktif	orang/bulan	324	324	324	324	324	324
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan perawatan Benda Cagar Budaya / Situs	Jumlah juru pelihara BCB/situs yang aktif	orang/bulan	324	324	324	324	324	324
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian aruh adat lereng meratus	Jumlah kegiatan aruh adat	kali	7	7	7	7	7	7
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan tapin expo	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kerjasama Promosi Pariwisata dengan Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang bekerjasama	orang	2	5	6	7	8	10
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Festival Batu Hapu	Jumlah peserta	orang	0	100	100	100	100	100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bimtek Kepariwisata bagi ASN	Jumlah Peserta	orang	0	0	50	50	50	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Apresiasi dan Penghargaan Pokdarwis	Jumlah peserta apresiasi Pokdarwis	orang	0	16	18	20	22	98
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Festival Pasar Digital	Jumlah peserta festival pasar digital	booth	0	0	30	40	50	75
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lomba Kampung Tematik	Jumlah peserta lomba kampung tematik	klp	0	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian aruh adat lereng meratus	Jumlah peserta lomba kampung tematik (kampung)	kampung	0	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata	orang	0	75	75	75	75	75
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pembinaan Pokdarwis	Jumlah peserta pembinaan dan bimtek tata kelola Pokdarwis	orang	0	100	100	100	100	100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Bimtek Tata Kelola Pokdarwis	Jumlah peserta pembinaan dan bimtek tata kelola Pokdarwis	orang	0	100	100	100	100	100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	orang	40	40	40	40	48	58
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Standarisasi Pelayanan Usaha Industri Pariwisata	Jumlah Peserta Pembinaan Standarisasi Pelayanan Usaha Industri Pariwisata	orang	0	0	40	40	48	58
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lomba Photo	Jumlah peserta terbaik lomba photo pariwisata	orang	0	0	10	10	10	10
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	Jumlah promosi pariwisata	kali	2	3	3	3	3	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Promosi seni budaya daerah	Jumlah promosi seni budaya daerah	group	6	6	6	6	6	6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah rakoor	kali	3	3	3	3	3	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	Jumlah rakoor	kali	0	5	5	5	5	5
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Koordinasi dan partisipasi dunia usaha dalam pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah rakoor	kali	0	0	0	2	3	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Koordinasi dan partisipasi dunia usaha dalam pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah rakoor	kali	0	0	0	2	3	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Jumlah rakoor pembangunan kemitraan pariwisata	kali	1	1	3	3	3	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sanggar budaya aktif	kelompok	2	2	2	2	2	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan tentang pelestarian seni budaya daerah	Jumlah sanggar seni budaya terbina	kelompok	6	6	6	6	6	6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemilihan duta wisata daerah	Jumlah terpilih duta wisata	orang	10	8	8	8	8	8
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Penyelenggaraan Ritus Budaya Daerah	waktu Dukungan Penyelenggaraan Ritus Budaya Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Festival Layang-layang	waktu Festival Layang-layang	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Festival teater tradisi (mamanda /Ba pandung / Japin carita) (Org)	waktu Festival teater tradisi (mamanda /Ba pandung / Japin carita) - (Org)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Promosi seni budaya binaan	waktu Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti Festival seni dan budaya daerah	waktu Mengikuti Festival seni dan budaya daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pagelaran Seni Budaya di Rantau Baru	waktu Pagelaran Seni Budaya di Rantau Baru	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pawai Seni Budaya Daerah	waktu Pawai Seni Budaya Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	waktu Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Fasilitas Pembentukan Desa Wisata	Waktu pembinaan dan pembentukan desa wisata	bulan	0	0	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Musyawarah Dewan Kesenian Daerah	Waktu pembinaan dan pembentukan desa wisata (bln)	bulan	0	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Promosi seni budaya daerah	waktu Pembinaan Standarisasi Pelayanan Usaha Industri Pariwisata	paket	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembuatan bahan dan Pembelian Alat Promosi Pariwisata	Waktu pembuatan bahan dan pembelian alat promosi pariwisata	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan bahan dan Pembelian Alat Promosi Pariwisata	Waktu pembuatan bahan dan pembelian alat promosi pariwisata	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemuktahiran Penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD)	waktu Pemuktahiran Penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penampilan seni bernuansa islami dan hiburan rakyat pada Tapin Expo	waktu Penampilan seni bernuansa islami dan hiburan rakyat pada Tapin Expo	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Seni, Budaya, Sastra dan Tradisi Khas Daerah (WBTB)	waktu Pendataan Seni, Budaya, Sastra dan Tradisi Khas Daerah (WBTB)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Desa Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa Tertib Administrasi Kependudukan	desa	20	20	20	20	20	20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	jumlah pelayanan publik (tahun)	orang	16	16	16	16	16	16
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	jumlah pelayanan publik (tahun)	orang	16	16	16	16	16	16
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan tertib administrasi kependudukan pada desa binaan	jumlah desa yang dibina (20 kali)	desa	10	10	10	10	10	10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	buah	13	13	13	13	13	13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran & Akhir Tahun	jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	buah	2	2	2	2	2	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah jasa kebersihan (OB)/tahun	orang	2	2	2	2	2	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Expo	jumlah kegiatan tapin expo	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	jumlah pelayanan publik	kecamatan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan perkawinan non muslim	jumlah pencatatan perkawinan massal pasangan non muslim	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimtek peningkatan kapasitas petugas pelayanan adminduk	waktu Bimtek peningkatan kapasitas petugas pelayanan adminduk	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bimtek peningkatan kapasitas petugas pelayanan adminduk	waktu Bimtek peningkatan kapasitas petugas pelayanan adminduk	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Desa Adminduk	waktu Desa Adminduk	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	waktu koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pembentukan tim registrasi kematian di desa	waktu Pembentukan tim registrasi kematian di desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Desa Tertib Administrasi Kependudukan	Waktu pembinaan Desa Tertib Administrasi Kependudukan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	waktu pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan kantor	waktu pengadaan peralatan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Blanko, Tinta Ribbon dan Film Kartu Identitas Anak (KIA)	waktu pengadaan blanko,tinta ribbon dan film KIA	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makan minum	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	waktu penyediaan ATK	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu penyediaan instalasi listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan komunikasi sumber daya listrik dan air	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	waktu penyediaan pemeliharaan dan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	waktu penyediaan surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	waktu Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	waktu Penyusunan SKM Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem Aplikasi Pelayanan Pelaporan Kependudukan secara online	waktu Sistem Aplikasi Pelayanan Pelaporan Kependudukan secara online	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Sistem Aplikasi Pelayanan Pelaporan Kependudukan secara online	waktu Sistem Aplikasi Pelayanan Pelaporan Kependudukan secara online	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Kependudukan	waktu Sosialisasi Kependudukan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Kependudukan	waktu Sosialisasi Kependudukan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan	waktu Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat/Desa	Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	Ton	10	10	10	10	10	10
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Data Analisis Ketersediaan (BNBM,PPH,HBKN dan Analisis)	Laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Di sediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk	Jumlah Data dan Analisis PPH Konsumsi dan PPM	Laporan	1	1	1	1	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Jumlah Dokumen Data dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Di sediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah Kelompok yg Dibina untuk pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Lomba	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Jumlah KWT yg di bina untk pengembangan pangan B2SA	KWT	7	7	7	7	7	7
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah Pameran Pembangunan	Pameran	1	1	1	1	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan keamanan pangan segar	Jumlah Sampel Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	Sampel	3	3	3	3	3	3
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Waktu Kendaraan Dinas/Operasional Yang Di Pelihara Rutin/Berkala	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Waktu Peralatan Gedung Kantor Yang Di Pelihara Rutin/Berkala	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Waktu Perlengkapan Gedung Kantor Yang Di Pelihara Rutin/Berkala	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Komputer Unit Jaringan	Laptop dan Printer	8	8	8	8	8	8
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan dan Komponen Listrik Untuk Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat Konsultasi/Koordinasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terantispasinya Masalah Rawan Pangan Melalui Implementasi SKPG	Laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terantispasinya Masalah Rawan Pangan Melalui Implementasi SKPG	Laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Orang	5	5	5	5	5	5
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / Akhir Tahun	waktu Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / Akhir Tahun	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jangkauan Jaringan Fiber Optic	Km	10	10	10	10	10	10
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Buku KDA dan PDRB yang dicetak	Buah	150	150	150	150	150	150
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten	Jumlah Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten	Berita	288	288	288	288	288	288
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKIP)	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi SPBE	jumlah Evaluasi SPBE	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang di Data	unit	70	70	70	70	70	70
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama Media Massa Kegiatan Pengembangan kemitraan	Jumlah jam tayang Talkshow (60 Menit 1x Tayang) (wawancara)	Tayang	1	1	1	1	1	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WIFI)	Jumlah Jaringan Internet Publik (WIFI Gratis) bagi masyarakat	Jaringan	3	3	3	3	3	3
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk	KIM	1	1	1	1	1	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dengan baik	unit	2	2	2	2	2	2
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama informasi dan media massa kegiatan pelatihan jurnalistik bagi pelajar	Jumlah kerjasama informasi dan media massa kegiatan pelatihan jurnalistik bagi pelajar	Siswa	60	60	60	60	60	60
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran & akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Laporan	2	2	2	2	2	2
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diseminasi Informasi Melalui Media Massa	Jumlah Media yang bekerjasama dalam penyebarluasan informasi daerah	Media	1	1	1	1	1	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah Pengunjung Pada Stand Kominfo	Pengunjung	200	200	200	200	200	200
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah SDM yang paham tentang Opini dan Aspirasi Publik	Orang	50	50	50	50	50	50
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Bimtek IT	Jumlah Sosialisasi Bimtek IT	orang	40	40	40	40	40	40
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi SPBE	Jumlah Sosialisasi SPBE	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Kabupaten	Jumlah Website Kabupaten yang berfungsi secara baik	Website	2	2	2	2	2	2
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentasi peserta Bimtek yang memahami materi Bimtek (%)	%	70	70	70	70	70	70
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kemitraan Informasi Melalui LPPL	Realisasi waktu tayang hasil kerjasama Pemda dengan LPPL	menit	7350	7350	7350	7350	7350	7350
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mengikuti peningkatan wawasan dan pelatihan TI	waktu mengikuti peningkatan wawasan dan pelatihan TI	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Pelaksana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Pelayanan Pengadministrasi Keuangan dan Perencanaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Internet Di SKPD & Kecamatan	waktu Pembangunan Internet Di SKPD & Kecamatan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Taman dan Penghijauan Kantor	waktu Pemeliharaan Taman dan Penghijauan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Konsultasi Pembangunan Kantor Diskominfo	waktu Pengadaan Konsultasi Pembangunan Kantor Diskominfo	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi e-Government	waktu Pengembangan Aplikasi e-Government	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Kabupaten	waktu Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Kabupaten	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan & Keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor yang Terlaksana	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Updating Berita Pada Website Kabupaten	waktu Updating Berita Pada Website Kabupaten	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02	keg dari PUPR	Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen yang Dilaksanakan (Dokumen)	Dokumen	2	2	3	3	3	3
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02	keg dari bappelitbang	Penyusunan KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen yang Dilaksanakan (Dokumen)	Dokumen	0	1	0	1	0	0
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah alat laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (Unit)	Unit	0	300	3	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah bimtek perlindungan dan pengelolaan LH yang dilaksanakan (kali)	Kali	0	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemantauan Kualitas Lingkungan	jumlah hasil analisa laboratorium tentang kualitas lingkungan yang dipantau (kali)	Kali	161	180	180	180	180	180
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Jasa Non PNS yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Jasa Non PNS yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Daya dukung dan daya tampung (DDDT) Sungai Tapin	Jumlah Kajian daya dukung daya tampung yang dibuat (laporan)	Laporan	0	0	1	0	0	0
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat (laporan)	Laporan	0	0	0	1	0	0
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dilaksanakan (kali)	Kali	3	3	3	3	3	3
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Pengawasan Penaatan Pengelolaan B3 dan LB3	Jumlah kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap pengelolaan B3 dan LB3 (kegiatan/u)	Kegiatan/Usaha	334	34	34	36	38	40
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Inventarisasi dan identifikasi kelompok masyarakat hukum adat kabupaten Tapin	Jumlah kelompok masyarakat hukum adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi (kelompok)	Kelompok	8	1	0	0	0	0
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat (laporan)	Laporan	14	14	14	14	14	14
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang dibuat (laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Inventarisasi Dan Identifikasi Sumber Pencemar Lingkungan	Jumlah laporan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Lingkungan (laporan)	Laporan	0	0	1	0	1	0
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Inventarisasi GRK	Jumlah laporan Inventarisasi GRK (laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut	Jumlah laporan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut (laporan)	Laporan	0	0	1	0	0	0
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kawasan Karst Kabupaten Tapin	Jumlah laporan Inventarisasi Kawasan Karst (kali)	Kali	0	0	1	0	0	1
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Laporan)	Laporan	2	2	2	2	2	2
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penyediaan informasi status kerusakan tanah	Jumlah laporan status kerusakan tanah (laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk pengembangan kepedulian LH (kelompok)	Kelompok	0	0	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah lokasi konservasi SDA dan keanekaragaman hayati yang dikelola (lokasi)	Lokasi	3	2	2	2	2	2
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan PROKASIH	Jumlah lokasi pengelolaan kali/sungai di Kabupaten Tapin (lokasi)	Lokasi	0	0	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kampung Iklim	Jumlah lokasi pengelolaan kampung iklim (lokasi)	Lokasi	1	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03	ada perubahan indikator (mjd luas), tp diminta pa Arif sesuai Renstra saja dlu	Peningkatan Tutupan Lahan	Jumlah Lokasi yang dilakukan penutupan lahan (lokasi)	Lokasi	0	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekolah Hijau	Jumlah lomba memelihara dan menjaga lingkungan sekolah (kali)	Kali	1	0	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan keterampilannya dalam pengelolaan LH (kelompok)	Kelompok	0	0	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kantor Di SKPD Kabupaten Tapin Yang Ramah Lingkungan	jumlah pelaksanaan penilaian kebersihan kantor SKPD (kali)	Kali	1	0	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah pelaksanaan penilaian kota sehat/adipura (kali)	Kali	3	3	3	3	3	3
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan LH	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH (kali)	Kali	0	0	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemegang Izin Lingkungan	Jumlah pemegang izin lingkungan yang diawasi ketaatannya (perusahaan)	Perusahaan	25	27	29	31	33	35
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pos pengaduan penanganan kasus lingkungan	Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang di verifikasi dan didentifikasi (pengaduan)	Pengaduan	3	4	4	4	4	4
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Jumlah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang disosialisasikan (kali)	Kali	0	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (unit)	Unit	0	0	4	6	8	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja RKL-RPL	Jumlah perusahaan yang taat melaporkan hasil rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan (Perusahaan)	Perusahaan	0	15	20	25	25	25
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah promosi dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilaksanakan (kali)	Kali	3	0	3	3	3	3
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B4	Penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah rekomendasi dokumen perijinan tempat penyimpanan sementara LB3 (dokumen)	Dokumen	5	0	6	8	10	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembinaan AMDAL	Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan atas kegiatan/usaha (Keg/usaha)	Kegiatan/Usaha	20	20	20	20	20	15

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dibuat (laporan)	Laporan	0	0	0	0	1	0
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang disediakan / dibangun (paket)	Paket	0	0	2	4	5	6
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Komisi Penilai AMDAL	Jumlah SDM komisi penilai Amdal yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Orang	0	20	20	20	20	20
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pembinaan SDM Laboratorium Lingkungan	Jumlah SDM laboratorium lingkungan yang mengikuti pelatihan (orang)	Orang	13	10	10	10	10	10
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengawasan Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya melalui bimtek atau sosialisasi (orang)	Orang	0	0	3	3	3	3
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (di lampiran Permendagri 90 nama kegiatannya "Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur")	Peningkatan kemampuan aparat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH (Orang)	Orang	0	0	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (di lampiran Permendagri 90 nama kegiatannya "Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur")	Peningkatan kemampuan aparat dalam perlindungan & konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman hayati	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH (Orang)	Orang	0	0	2	2	2	2
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja SDM dalam Implementasi AMDAL	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tentang Amdal (Orang)	Orang	2	2	2	2	2	2
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	Jumlah sekolah yang dibina (sekolah)	Sekolah	10	10	10	10	10	10
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Sosialisasi dan Kampanye Sistem Pengurangan Sampah	Jumlah sosialisasi dan kampanye sistem pengurangan sampah yang dilaksanakan (kali)	Kali	2	2	4	5	6	6
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA	Jumlah sosialisasi/pelatihan perlindungan dan konservasi SDA yang dilaksanakan (kali)	Kali	0	0	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah stand Tapin Expo yang dibuat (Stand)	Stand	1	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Expo	Jumlah stand Tapin Expo yang dibuat (Stand)	Stand	1	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan TPS khusus limbah B3	Jumlah TPS khusus LB3 yang di bangun dan dikelola (unit)	Unit	0	0	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup	Jumlah usulan penghargaan tentang lingkungan hidup (usulan)	Usulan	2	1	1	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan alat penunjang operasional persampahan	Tersedianya peralatan penunjang operasional persampahan (Unit)	Unit	1	1	3	3	3	3
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu koordinasi kedalam dan keluar daerah yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Operasional dan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Persampahan dan Alat Berat	Waktu operasional armada persampahan dan alat berat yang dipelihara (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Operasional Laboratorium	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Operasi dan Pemeliharaan Bank Sampah	Waktu operasional pemeliharaan bank sampah yang disediakan (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Waktu operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan rumah sampah dan Satgas Persampahan	Waktu operasional rumah sampah dan satgas persampahan yang disediakan (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan dan Perkotaan	Waktu pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan perkotaan yang disediakan (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09	keg baru yg dimunculkan di peruabhan 2020 (krn tidak ada di dokumen Renstra)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Waktu Penyediaan Informasi Lingkungan hidup Secara Online (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa telepon, internet, listrik dan air (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan bangunan pelengkap jalan	Â Panjang bangunan pelengkap jalan yang dibangun	(Km)	11	14	13	13	13	13
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Indeks Kinerja P3A Kabupaten Tapin	%	0	70	70	70	70	70
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS	Jumlah Akses Air bersih Yang di Bangun	sr	90	100	110	115	120	125
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah Akses Air bersih Yang di Bangun	sr	100	100	110	115	120	125
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Sanitasi	Jumlah Akses Air Limbah Yang di Bangun	kk	200	500	510	515	520	525
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Aparat yang ikut diklat	orang	3	4	10	10	10	10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Database dan Pemetaan Infrastruktur kePU-an Kab. Tapin Berbasis SIG	Jumlah Aplikasi Database yang disusun	buah	0	1	1	1	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sistem dan Prasarana akses informatif peruntukan ruang Kab. Tapin berbasis Digital	Jumlah aplikasi yang dilaksanakan	buah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dok Revisi yang dilaksanakan	dokumen	2	3	3	3	3	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah Dok Revisi yang dilaksanakan	dokumen	2	3	3	3	3	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis	Jumlah Dok yang dilaksanakan	dokumen	1	2	3	3	3	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen perencanaan untuk pembangunan jalan	dokumen	10	10	10	10	10	10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen RDTR Kawasan yang disusun (Dok)	dokumen	1	2	2	2	2	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen RDTR Kawasan yang disusun (Dok)	dokumen	1	2	2	2	2	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen yang dilaksanakan	dokumen	2	2	3	3	3	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah Kegiatan Tapin Expo	tahun	1	1	1	1	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah koordinasi penanganan pengendalian dan pemanfaatan ruang	kali	4	8	8	8	8	8
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Luasan Tanah yang di ganti rugi	Ha	1,5	10	10	10	10	10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Monitoring Evaluasi & Pelaporan Bidang Jaskon & Peralatan	Jumlah Monitoring dan Pelaporan yang dilaksanakan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	kegiatan	3	4	0	0	0	0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rekondisi Alat Berat	Jumlah Pemeliharaan alat-alat berat yang siap pakai	paket	1	1	0	0	0	0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang	bulan	12	12	20	20	20	20
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	laporan	2	2	2	2	2	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Peralatan alat berat yang direkondisi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Interpretasi Peta Citra Satelit dan Penyusunan Peta Penggunaan Lahan terhadap kesesuaian tata ruang Kab. Tapin berbasis SIG	Jumlah Peta yang disusun	buah	2	3	3	3	3	3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengembangan sistem informasi dan penguatan database jalan	Jumlah Sistem Informasi Data Base Jalan	(Aplikasi)	1	1	1	1	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengembangan sistem informasi dan penguatan database jembatan	Jumlah Sistem Informasi Data Base Jembatan	(Aplikasi)	1	1	1	1	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Survey dan pemetaan	Jumlah Survei dan Pemetaan yang dilaksanakan	kegiatan	3	4	4	4	4	4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai	Panjang bangunan pengaman tebing sungai yang terbangun	km	2,1	2,82	2,92	3	3,24	3,64
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan Yang Dibangun	kilometer	3	1,9	3	3,5	2	2,5
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan yang dibangun (Km)	km	6	6	6	6	6	6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang di inspeksi	(meter)	500	500	500	500	500	500
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dan Jembatan yang terpelihara	(KM)	22	22	22	22	22	22
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan jalan lingkaran dalam kota rantau	Panjang Jalan Lingkaran Dalam Kota Rantau yang dibangun (km)	km	25	25	25	25	25	25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun	kilometer	3	1,9	3	3,5	2	2,5
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	km	252	210	215	212	212	212
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembalian fungsi saluran irigasi	Panjang saluran irigasi yang terbangun	km	1,2	1,3	1,5	1,3	1,8	1,4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rehab. Saluran Sungai	Panjang sungai yang di rehab	km	300	346,5	348	346,5	348,5	338
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Waktu Honorarium Pegawai Tidak Tetap	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring Evaluasi & Pelaporan	Waktu Monitoring Evaluasi & Pelaporan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Waktu monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Waktu monitoring, evaluasi dan pelaporan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Waktu monitoring, evaluasi dan pelaporan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Gedung Kantor	waktu Pembangunan Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Pembinaan Jasa Konstruksi	Waktu Pembinaan Jasa Konstruksi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Pintu Air	Waktu pembuatan Pintu Air	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat berat	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	17	17	0	0	0	0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Kantor	Waktu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Waktu Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	waktu Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa Surat Penyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa Surat Penyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Panataan BPD	Jumlah BPD yg ditata	Desa	126	126	126	126	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang di bina	BUMDes	126	126	126	126	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pendampingan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa	Jumlah desa yang di dampingi dalam Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa	Desa	126	126	126	126	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah desa yang memutakhirkan data IDM	Desa	126	126	126	126	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Perlombaan Desa	Jumlah Desa yg mengikiti perlombaan desa tingkat kabupaten	Desa	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capai kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	9	9	9	9	9	9
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semester dan akhir tahun	Laporan	6	6	6	6	6	6
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kabupaten	PKK	1	1	1	1	1	1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Melalui Pokjanal Posyandu	Jumlah pokjanal posyandu yang dikembangkan dan diberdayakan	pokjanal	126	126	126	126	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar Melalui Kader Posyandu	Jumlah posyandu yang diberdayakan dan dikembangkan	poyandu	194	194	194	194	194	194
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemasyarakatan Posyantek dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah posyantek yang dikembangkan	posyantek	5	5	5	5	5	5
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Pelaksanaan HUT kabupaten	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	waktu Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kegiatan Analisa Pengembangan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal	waktu Kegiatan Analisa Pengembangan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	waktu Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	waktu Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG	waktu Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan	waktu Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan SDA	waktu Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan SDA	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	waktu Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG	waktu Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Permo dalam Bagi Usaha Mikro Kecil dan Mene ngah di Perde saan	waktu Kegiatan Pening katan Permo dalam Bagi Usaha Mikro Kecil dan Mene ngah di Perde saan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa	waktu Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa (DAPM)	waktu Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Desa (DAPM)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Pelaksanaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pelatihan Administrasi Desa	waktu Pelatihan Administrasi Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pelatihan Administrasi Desa	waktu Pelatihan Administrasi Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pelatihan Pelaksanaan Operasional BUMDesa	waktu Pelatihan Pelaksanaan Operasional BUMDesa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Peliharan Kendaraan Oprasioanal Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Peliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat	waktu Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar	waktu Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dasar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Gotong Royong Masyarakat Desa	waktu Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Gotong Royong Masyarakat Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga	waktu Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	waktu Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembuatan PERDA dan PERBUB Berkaitan dengan PEMDES	waktu Pembuatan PERDA dan PERBUB Berkaitan dengan PEMDES	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembuatan Regulasi Desa	waktu Pembuatan Regulasi Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembuatan Regulasi Desa	waktu Pembuatan Regulasi Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penataan Aset Desa	waktu Penataan Aset Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penatausahaan Keuangan Desa	waktu Penatausahaan Keuangan Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pendampingan Penyusunan Data Profil Desa	waktu Pendampingan Penyusunan Data Profil Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa	waktu Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Program Inovasi Desa (Inovasi Desa)	waktu Pendampingan Program Inovasi Desa (Inovasi Desa)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	waktu Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pengembangan Adat dan Budaya di Desa	waktu Pengembangan Adat dan Budaya di Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Adat dan Budaya di Desa	waktu Pengembangan Adat dan Budaya di Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyakatan Desa melalui Lomba	waktu Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyakatan Desa melalui Lomba	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan	waktu Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa	waktu Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa	waktu Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	waktu Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	waktu Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Terhadap pembangunan (Pelatihan)	waktu Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Terhadap pembangunan (Pelatihan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Posyandu	waktu Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Posyandu	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	waktu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makan dan Minum harian Pegawai	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan ATK	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	waktu Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa Telephone , Internet ,Listrik dan Air	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pilkades Gelombang 3	waktu Pilkades Gelombang 3	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PKK Kabupaten	waktu PKK Kabupaten	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sosialisasi Produk Hukum Desa	waktu Sosialisasi Produk Hukum Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemetaan dan Pengembangan Usaha Rumahan Perempuan	Jumlah pemetaan dan pengembangan usaha rumahan perempuan	kecamatan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Seleksi Forum Anak	Jumlah Anak yang Berpartisipasi dalam Jambore Form Anak dan Lomba Inovasi & Kreativitas	anak	15	15	15	15	15	15
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Asistensi Pendampingan dan Advokasi Layanan Kesehatan Rujukan terhadap anak korban kekerasan	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Rujukan Akibat Tindak Kekerasan	Kasus	8	8	8	8	8	8
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Evaluasi Data Gender Anak	Jumlah Dokumen (Buku) Data Gender dan Anak (dokumen (b)	dokumen	1	1	1	1	1	1
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan Dan Pembekalan Forum Anak	Jumlah Forum Anak Kecamatan Yang dibina	Kecamatan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Penanganan Tindak kekerasan	Jumlah Kasus yang ditangani Pelayanan Penanganan Tindak kekerasan	Kasus	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Asistensi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan yang di Asistensi Kecamatan Layak Anak	kecamatan	4	4	4	4	4	4
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD	bh	13	13	13	13	13	13
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun	bh	2	2	2	2	2	2
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peringatan Hari Ibu	Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Ibu	kelompok	50	50	50	50	50	50
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peringatan Hari Kartini	Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Kartini	kelompok	50	50	50	50	50	50
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah	24	24	24	24	24	24
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Asistensi Pendampingan dan Advokasi tindakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pendampingan dan Advokasi Tindakan Hukum Akibat Tindak Kekerasan	Kasus	8	8	8	8	8	8
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi / Gerakan / Kelompok Perempuan	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi / Gerakan / Kelompok Perempuan	Orang	72	72	72	72	72	72
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) di Bidang Politik dan Dunia Usaha	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Memahami (KKG) di Bidang Politik dan Dunia Usaha	Orang	109	109	109	109	109	109
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	Jumlah Peserta Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	Orang	72	72	72	72	72	72
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Workshop Updating Data Kekerasan Perempuan dan anak	Jumlah Peserta yang mamahami Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Elektronik	Orang	40	40	40	40	40	40
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pembaharuan Forum Data Gender dan Anak	Jumlah peserta yang memahami Forum Data Gender dan Anak	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Kha Tenaga Pendidik Dan Advokasi Sekolah Ramah Anak (SRA)	Jumlah Peserta Yang Memahami Pelatihan Kha Tenaga Pendidik Dan Advokasi Sekolah Ramah Anak (SRA)	orang	54	54	54	54	54	54
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah Peserta Yang Memahami Pelatihan Ruang Bermain Ramah Anak	Orang	21	21	21	21	21	21
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap anak	Jumlah Peserta Yang Memahami Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Anak	Orang	50	50	50	50	50	50
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Forum Pendidikan, Pengasuhan, Budaya, Dan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Peserta yang Memahami Sosialisasi Forum Pendidikan Pengasuhan Budaya dan Sekolah Ramah Anak	Orang	54	54	54	54	54	54
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PTT) Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Peserta yang Memahami Sosialisasi PTT Perlindungan dan Anak Berbasis Masyarakat di kecamatan	Orang	100	100	100	100	100	100
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gerakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Jumlah peserta yang mengikuti gerakan pencegahan perkawinan usia anak dan Penatalaksanaan Puspaga	orang	350	350	350	350	350	350

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Gebyar Ramadhan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan gebyar ramadhan	orang	145	145	145	145	145	145
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Pameran Hasil Karya Perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Pameran Hasil Karya Perempuan	Kecamatan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Usaha Rumahan Perempuan	Jumlah Peserta yg mengikuti Pelatihan Keterampilan dibidang Usaha Rumahan Perempuan	Orang	109	109	109	109	109	109
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Dan Edukasi Puskesmas Ramah Anak (PRA)	Jumlah Puskesmas yang di Advokasi dan Edukasi PRA	puskesmas	13	13	13	13	13	13
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Penatalaksanaan PUSPA	Jumlah PUSPA yang terbentuk (bh) dan Jumlah Partisipasi PUSPA	Buah				1	1	1
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah SKPD sebagai Anggota Gugus Tugas KLA	SKPD	30	30	30	30	30	30
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Jumlah SKPD yang mengikuti kegiatan dan asistensi PPRG dan ARG	SKPD	45	45	45	45	45	45
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Evaluasi Sistem Informasi Data Kekerasan	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kekerasan	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kampanye Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GNAKSA)	waktu Kampanye Gerakan Nasional Anti Kekerasan (GNAKSA)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan Konsumsi Harian Pegawai Rapat dan Tamu	bulan	11	11	11	11	11	11
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Ketersediaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pelaksanaan PUSPA	waktu Pembentukan dan Pelaksanaan PUSPA	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga	Waktu Peningkatan Kualitas Keluarga	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu Penyediaan Benda Pos dan Jasa Pengiriman	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa kebersihan,keamanan kantor dan bahan pembersih	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan keamanan kantor dan Bahan pembersih	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	waktu Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Pramuka	Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang dibina	Okp dan pramuka	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Pramuka	Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang dibina	Okp dan pramuka	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan POPDA & Invitasi Olahraga Pelajar	Jumlah Cabang Olah Raga yang di Lombakan	cabor	10	10	10	10	10	10
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan penyelenggaraan Olahraga Paralympic/NPC	Jumlah cabang olahraga paralympic yang dilombakan	Cabor	7	7	7	7	7	7
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Lomba dan Pembinaan Olah Raga Pelajar	Jumlah cabang olahraga pelajar yang dilombakan dan dibina	cabor	10	10	10	10	10	10
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Lomba dan Pembinaan Olah Raga Prestasi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dilombakan dan dibina	cabor	10	10	10	10	10	10
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan paduan suara remaja dan pemuda Kab. Tapin	Jumlah pembinaan paduan suara remaja dan pemuda	Kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tapin	Jumlah penyelenggaraan kegiatan	kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah peserta diklat	Orang	40	40	40	40	40	40
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Seleksi Kapal Pemuda Nusantara	Jumlah peserta kapal pemuda nusantara	orang	2	2	2	2	2	2
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengetahuan Mengenang Para Pahlawan (Napak Tilas Jejak Pahlawan)	Jumlah peserta napak tilas	Orang	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah peserta pelatihan	Orang	40	40	40	40	40	40
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga Olahraga Prestasi	Jumlah peserta pelatihan pelatih olahraga prestasi	orang	20	20	20	20	20	20
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Orang	40	40	40	40	40	40
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda	Jumlah peserta penyuluhan narkoba	Orang	40	40	40	40	40	40

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Jenesys	Jumlah peserta PPAN & Jenesys	orang	4	4	4	4	4	4
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP/BPAP) / Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Jumlah Peserta PPAP/BPAP/JPI terpilih	orang	4	4	4	4	4	4
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4)	Jumlah peserta SP4	orang	10	10	10	10	10	10
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	Jumlah peserta terpilih	orang	53	53	53	53	53	53
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah petugas keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana olahraga	orang	408	408	408	408	408	408
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Paket	4	4	4	4	4	4
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	buah	21	21	21	21	21	21
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian, Pembinaan, Penyelenggaraan dan Pengiriman Atlet Olahraga Tradisional ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Waktu pelestarian pembinaan penyelenggaraan dan pengiriman atlet Olahraga Tradisional	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Federasi Olah Raga Masyarakat Indonesia (FORMI)	Waktu pembinaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Fasilitasi Olahraga ASN lingkup Pemkab Tapin	Waktu pembinaan dan fasilitasi olahraga bagi ASN lingkup Pemkab. Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pelatihan Marching Band	Waktu pembinaan dan pelatihan marching band	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/SMPC	Waktu pembinaan dan penyelenggaraan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan, Pembibitan dan Pengiriman Atlet Olahraga Khusus/Paralympic ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Waktu pembinaan, pembibitan dan pengiriman atlet olahraga khusus	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penampilan / Demonstrasi Komunitas	Waktu Penampilan komunitas	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Olahraga	Waktu Pengadaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana olahraga	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pemuda dan Olahraga	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan tagihan pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dokumen	2	2	2	2	2	2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	Buah	1	1	1	1	1	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Buah	1	1	1	1	1	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan operasional/dinas yang dipelihara	Unit	6	6	6	6	6	6
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen	11	11	11	11	11	11
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Investasi	Jumlah pelaksanaan monitoring	Kali	10	10	10	10	10	10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan tapin expo	Paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan tapin expo	Paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Penegakan Perizinan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Aduan	7	7	7	7	7	7

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Paket	3	3	3	3	3	3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah perizinan jasa usaha dan perizinan tertentu yang diproses	Izin	1756	1756	1756	1756	1756	1756
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Paket	2	2	2	2	2	2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM yang diperoleh	Poin	81	81	81	81	81	81
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rapat Koordinasi Perizinan dengan Instansi Terkait di lingkungan Pemkab Tapin	Persentase perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi penyelenggaraan pameran investasi	waktu Partisipasi penyelenggaraan pameran investasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas / Khusus	waktu Pengadaan Pakaian Dinas / Khusus	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pengembangan potensi unggulan daerah	waktu Pengembangan potensi unggulan daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Penyajian Data Perizinan dan Non Perizinan	waktu Pengolahan dan Penyajian Data Perizinan dan Non Perizinan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Tapin	waktu Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Tapin	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	waktu Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP	Jumlah cabang lomba Festival Lomba seni siswa nasional Tingkat SMP	Cabang	5	5	5	5	5	5
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP	Jumlah cabang lomba olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat SMP	Cabor	5	5	5	5	5	5
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP	Jumlah cabang lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP	Cabang	3	3	3	3	3	3
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi	Jumlah Cabang Lomba yang diikuti GTK PAUD Dikmas	Cabang	8	8	8	8	8	8
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Seleksi Cakap dan Pengawas Sekolah	Jumlah Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang diseleksi	Orang	40	40	40	40	40	40
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Seleksi Cakap dan Pengawas Sekolah	Jumlah Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang diseleksi	Orang	40	40	40	40	40	40
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Seleksi Cakap dan Pengawas Sekolah	Jumlah Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang diseleksi	Orang	40	40	40	40	40	40
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemutakhiran Data Pendidikan	Jumlah Data Pendidikan	Data	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemutakhiran Data Pendidikan	Jumlah Data Pendidikan	Data	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar Berprestasi	Jumlah Guru yang Berprestasi	orang	0	15	15	15	15	15
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar Berprestasi	Jumlah Guru yang Berprestasi	orang	0	15	15	15	15	15
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar Berprestasi	Jumlah Guru yang Berprestasi	orang	0	15	15	15	15	15
Dinas Pendidikan	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Profesi Guru	Jumlah guru yang mengikuti diklat pendidikan profesi guru	Guru	160	160	160	160	160	160
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Wawasan bagi Guru Mata Pelajaran UN dan Kepala Sekolah jenjang SMP	Jumlah Guru yang mengikuti peningkatan wawasan mapel UN	guru/sekolah	0	26	26	26	26	26
Dinas Pendidikan	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelaksanaan sertifikasi Guru	Jumlah guru yang profesional	Guru	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Jumlah Hari Pendidikan Nasional yang diperingati	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan KF dan KF Qur'an	Jumlah Kelompok belajar KF dan KF Qur'an	Kelompok Belajar	0	0	6	6	6	6
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Paket A	Jumlah Kelompok Belajar Paket A	Kelompok Belajar	3	3	3	3	3	3
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Paket B	Jumlah Kelompok Belajar Paket B	Kelompok Belajar	6	6	6	6	6	6
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Paket C Lanjutan	Jumlah Kelompok Belajar Paket C	Kelompok Belajar	7	7	7	7	7	7
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Manajemen Tim BOS Kab.Tapin	Jumlah Kepala Sekolah dan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah yang dibina sesuai dengan juknis BOS	Kepsek/Bendahara	394	394	394	394	394	394
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Komputer UNBK SKB	Jumlah Komputer UNBK SKB yang dikembangkan/dipelihara	Sanggar Kegiatan Belajar	0	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan laporan akhir tahun	Laporan	2	2	2	2	2	2
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan dokumen perencanaan	Laporan	13	13	13	13	13	13
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Hari Aksara Internasional (HAI)	Jumlah Lembaga yang ikut serta dalam pelaksanaan HAI	Lembaga	10	10	10	10	10	10
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Lembaga yang mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	Lembaga	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kompetensi Mata Pelajaran Olimpiade Sains Nasional	Jumlah Mata Pelajaran Olimpiade Sains Nasional yang ditingkatkan	Mata Pelajaran	3	3	3	3	3	3

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kompetensi Mata Pelajaran UN Siswa SMP	Jumlah Mata Pelajaran UN Siswa SMP	Mata Pelajaran	4	4	4	4	4	4
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Meubelur Sekolah	Jumlah Meubelur Sekolah yang layak untuk kegiatan belajar mengajar	sekolah	22	22	22	22	22	22
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Karnaval HUT RI	Jumlah pelaksanaan Karnaval HUT RI	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Pagar Sekolah	Jumlah Pembangunan Pagar Sekolah	Unit	8	8	8	8	8	8
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Pagar Sekolah	Jumlah Pembangunan Pagar Sekolah	Unit	5	5	5	5	5	5
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan SD	Jumlah Pembangunan SD	Unit	2	2	2	2	2	2
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan SMP	Jumlah Pembangunan SMP	Unit	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Sarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Jumlah pengadaan Sarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Workshop Pengembangan Sekolah Inklusi	Jumlah Pengembangan sekolah inklusi	sekolah	30	15	30	35	40	45
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Workshop Pengembangan Sekolah Inklusi	Jumlah Pengembangan sekolah inklusi	sekolah	30	15	30	35	40	45
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Bintek Jafung	Jumlah penilaian angka kredit jabatan fungsional	Kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Bintek Jafung	Jumlah penilaian angka kredit jabatan fungsional	Kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Bintek Jafung	Jumlah penilaian angka kredit jabatan fungsional	Kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Pendidikan	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penyusunan Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peringatan Hari Guru Nasional	Jumlah peringatan Hari Guru Nasional	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Asistensi Pelaksanaan US SD	Jumlah Peserta Ujian Sekolah (US) SD	Siswa	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru	Jumlah Peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guru	Peserta	200	200	200	200	200	200
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru	Jumlah Peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guru	Peserta	200	200	200	200	200	200
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru	Jumlah Peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan guru	Peserta	200	200	200	200	200	200
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah peserta Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Kepsek dan Pengawas	0	199	199	199	199	199
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah peserta Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Kepsek dan Pengawas	0	199	199	199	199	199
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah peserta Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Kepsek dan Pengawas	0	199	199	199	199	199
Dinas Pendidikan	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah peserta Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Kepsek dan Pengawas	0	199	199	199	199	199
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Khataman Al Quran Siswa SMP	Jumlah Peserta yang mengikuti Khataman Al Quran jenjang SMP	Siswa	1457	1457	1457	1457	1457	1457
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Khataman Al Quran Massal Siswa SD	Jumlah Peserta yang mengikuti Khataman Al Quran Massal jenjang SD	Siswa	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	BOP PKBM	Jumlah PKBM yang melaksanakan Proses Belajar Mengajar	Lembaga	11	11	11	11	11	11
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Pemeliharaan rutin dan berkala gedung / Kantor Disdikab. / UPT Disdik Kec.	Jumlah ruang kantor yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Sampul Raport	Jumlah Sampul raport yang dibagikan ke sekolah	sekolah	0	26	26	26	26	26
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Sarana untuk SMP	Jumlah Sarana Sekolah yang layak untuk kegiatan belajar mengajar	sekolah	26	26	26	26	26	26
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (KPA S/M)	Jumlah SD dan SMP yang terakreditasi	Sekolah	50	50	50	50	50	50
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (KPA S/M)	Jumlah SD dan SMP yang terakreditasi	Sekolah	50	50	50	50	50	50
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru SMP	Jumlah Sekolah yang melaksanakan penerimaan siswa baru SMP	sekolah	26	26	26	26	26	26
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Absen Finger Print Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerapkan Finger Print	sekolah	0	197	197	197	197	197
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Absen Finger Print Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerapkan Finger Print	sekolah	0	197	197	197	197	197
Dinas Pendidikan	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Absen Finger Print Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerapkan Finger Print	sekolah	0	197	197	197	197	197
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI TIRIK	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI TUNGKAP 1	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI TUNGKAP 2	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI ANDHIKA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI WARINGIN DALAM	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SDN SWATO TATAKAN 2	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI PUNCAK HARAPAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI RANGDA MALINGKUNG 1	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI RANGDA MALINGKUNG 3	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI ANTASARI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI ANTASARI HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI ASAM RANDAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI AYUNAN PAPAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BAGAK	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BAKARANGAN 1	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BAKARANGAN 2	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BALAWAIAAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BALAWAIAAN HILIR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BANUA HALAT KANAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BANUA HANYAR HULU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BANUA PADANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BARAMBAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BATALAS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BATU AMPAR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI TELUK HAUR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI TIMBAAN 1	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI TIMBAAN 2	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI TIMBUNG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI BUNGUR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI MIAWA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	BOS SD NEGERI PIPITAK JAYA 2	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 PIANI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 RANTAU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 TAPIN TENGAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 2 BAKARANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 2 BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 2 BUNGUR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 2 CANDI LARAS SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 2 CANDI LARAS UTARA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 2 PIANI	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 2 RANTAU	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 2 SALAM BABARIS	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 BAKARANGAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 BINUANG	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 BUNGUR	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 CANDI LARAS UTARA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 3 CANDI LARAS UTARA	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SMP NEGERI 1 HATUNGUN	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	BOS SD NEGERI KEMBANG HABANG 3	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	sekolah	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelaksanaan Lomba Sanitasi/UKS TK,SD, dan SMP	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Sanitasi/UKS jenjang TK,SD,dan SMP	sekolah/jenjang	4	4	4	4	4	4
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan Lomba Sanitasi/UKS TK,SD, dan SMP	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Sanitasi/UKS jenjang TK,SD,dan SMP	sekolah/jenjang	4	4	4	4	4	4
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelaksanaan Lomba Sanitasi/UKS TK,SD, dan SMP	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Sanitasi/UKS jenjang TK,SD,dan SMP	sekolah/jenjang	4	4	4	4	4	4
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Biaya Operasional Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan UN/SMP-MTs	sekolah	43	43	43	43	43	43
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan UPAS/M	Jumlah sekolah yang terakreditasi	sekolah	22	46	50	50	50	50
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan UPAS/M	Jumlah sekolah yang terakreditasi	sekolah	22	46	50	50	50	50
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Alat Permainan Edukatif (APE) Luar	waktu Alat Permainan Edukatif (APE) Luar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SD (Kurikulum 2013)	waktu Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SD (Kurikulum 2013)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimtek Pengembangan Kurikulum SD	waktu Bimtek Pengembangan Kurikulum SD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Diklat Guru SD, SMP Peningkatan kompetensi	waktu Diklat Guru SD, SMP Peningkatan kompetensi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Diklat Guru SD, SMP Peningkatan kompetensi	waktu Diklat Guru SD, SMP Peningkatan kompetensi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N) SD	waktu Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N) SD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	waktu Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)	waktu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	HUT Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Tingkat Provinsi di Kabupaten Tapin	waktu HUT Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Tingkat Provinsi di Kabupaten Tapin	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kursus Wirausaha Perdesaan (KWD)	waktu Kursus Wirausaha Perdesaan (KWD)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lomba Gugus TK/PAUD	waktu Lomba Gugus TK/PAUD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Manajemen Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal	waktu Manajemen Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD Non Fisik	waktu Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran DAK BOP PAUD Non Fisik	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Indonesia Tingkat SMP	Waktu pelaksanaan Liga sepak bola (GALA) Siswa Indonesia Tingkat SMP	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan Lomba Sanitasi/UKS SMP	waktu Pelaksanaan Lomba Sanitasi/UKS SMP	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelaksanaan Matematika and Science Olimpiade dan Olimpiade Sains Nasional	waktu Pelaksanaan Matematika and Science Olimpiade dan Olimpiade Sains Nasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelaksanaan O2SN SD	waktu Pelaksanaan O2SN SD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan pembelajaran berbasis TIK	Waktu pelaksanaan pengembangan pembelajaran TIK	kali	0	0	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat dinas pendidikan serta Konsultasi dan Monitoring	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat dinas pendidikan serta Konsultasi dan Monitoring	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Waktu pelaksanaan tapin expo	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelatihan Penilik/PKBM/LKP	waktu Pelatihan Penilik/PKBM/LKP	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Infrastruktur PAUD	waktu Pembangunan Infrastruktur PAUD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Ruang Guru	waktu Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Ruang Guru	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sekolah	waktu Pembangunan Sekolah	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penghargaan sekolah dan siswa berprestasi Jenjang SMP	Waktu pemberian penghargaan ke sekolah berprestasi dan Siswa Berprestasi jenjang SMP	kali	0	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan kampung PAUD	waktu Pembinaan kampung PAUD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah	waktu Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah	waktu Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan PAUDNI	Waktu Pembinaan PAUDNI	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan Disdik	Waktu pemeliharaan rutin dan berkala peralatan dan perlengkapan disdik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	waktu Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	waktu Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	waktu Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penerimaan Murid Baru Jenjang SD	waktu Penerimaan Murid Baru Jenjang SD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan komputer UNBK SKB	waktu Pengadaan komputer UNBK SKB	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Tanah	waktu Pengadaan Tanah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Rumah Pintar	waktu Pengelolaan Rumah Pintar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Pengembangan ICT	waktu Pengembangan ICT	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP	waktu Pengembangan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Karakter	waktu Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Karakter	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) / Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	waktu Pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) / Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Website Pendidikan	waktu Pengembangan Website Pendidikan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penghargaan sekolah dan siswa berprestasi Jenjang SD	waktu Penghargaan sekolah dan siswa berprestasi Jenjang SD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Mutu Satuan PAUD	waktu Peningkatan Mutu Satuan PAUD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Mutu Satuan PNF	waktu Peningkatan Mutu Satuan PNF	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Waktu peningkatan pelayanan Pendidikan di Kabupaten Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan prasarana pendidikan informal	waktu Peningkatan prasarana pendidikan informal	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Prasarana SD	waktu Peningkatan Prasarana SD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makan dan minum harian dan rapat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyusunan dan penggandaan soal ujicoba UAS SD	Waktu penyusunan dan penggandaan soal uji coba UAS SD	Minggu	3	3	3	3	3	3
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Try Out UNBK Nonformal	waktu Try Out UNBK Nonformal	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Analisis Kebutuhan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Waktu untuk menganalisis kebutuhan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Workshop Sekolah Ramah Anak	waktu Workshop Sekolah Ramah Anak	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Workshop Sekolah Ramah Anak	waktu Workshop Sekolah Ramah Anak	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Workshop Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	waktu Workshop Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	48	48	48	48	48	48
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	Jumlah pelaksanaan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Kali	3	3	3	3	3	3
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional	Kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKB, BKL dan orang tua hebat	Kali	3	3	3	3	3	3
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Kali	3	3	3	3	3	3
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelaksanaan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD)	Akseptor	250	250	250	250	250	250
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL)	Kelompok	2	2	2	2	2	2

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan kemah bhakti saka kencana	Orang	150	150	150	150	150	150
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pembinaan Koalisi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Koalisi Kependudukan	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	Sekolah	11	11	11	11	11	11
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	Jumlah pelaksanaan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB	Dokumen	160	160	160	160	160	160
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kantor	Unit	29	29	29	29	29	29
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	Jumlah Pelaksanaan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	Kali	4	4	4	4	4	4
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	13	13	13	13	13	13
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	Laporan	2	2	2	2	2	2
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	Jumlah pelaksanaan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional	Kali	3	3	3	3	3	3
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK	Kali	3	3	3	3	3	3
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah Pelaksanaan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	Kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita	Orang	130	130	130	130	130	130
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	waktu Bakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan Rumah Dataku	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Rumah Dataku	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	Waktu Pelaksanaan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Waktu Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	Waktu Pelaksanaan Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Waktu pelaksanaan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	Waktu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PKB/PLKB	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Waktu pelaksanaan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	Waktu pelaksanaan penyebarluasan informasi dan advokasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa kebersihan,keamanan kantor dan bahan pembersih	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	11	11	11	11	11	11
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Permutakhiran Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung yang akurat	data	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembuatan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/Warung	jumlah ketersediaan database pasar	surat	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Dinas Perdagangan	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pengelolaan SRG	jumlah ketersediaan kegiatan operasional Pengelolaan SRG	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah ketersediaan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	laporan	10	10	10	10	10	10
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah ketersediaan laporan keuangan	laporan	2	2	2	2	2	2

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Perdagangan	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Penyuluhan Perlindungan Konsumen	Jumlah ketersediaan penyuluhan	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perdagangan	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penyuluhan pedagang kecil informal	jumlah ketersediaan penyuluhan pedagang informal kecil	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perdagangan	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Semarak hari jadi Kabupaten Tapin	jumlah Koordinasi penyelenggaraan Tapin Expo	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perdagangan	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin	jumlah partisipasi pameran luar kabuparen Tapin	Kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Operasi Pasar	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar	Kali	3	3	3	3	3	3
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pendataan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Jumlah Pendataan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Kali	48	48	48	48	48	48
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	buah	7	7	7	7	7	7
Dinas Perdagangan	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (UTTP)	Jumlah Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan perengkapannya (UTTP)	kali	4	4	4	4	4	4
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	jumlah Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	kali	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Pengawasan, monitoring dan evaluasi perusahaan	jumlah Pengawasan monitoring dan evaluasi perusahaan	kali	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rekomendasi izin usaha perdagangan	jumlah rekomendasi izin usaha perdagangan	surat	400	400	400	400	400	400
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rekomendasi izin usaha perdagangan	jumlah rekomendasi izin usaha perdagangan	surat	400	400	400	400	400	400
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Rekomendasi izin usaha perdagangan	jumlah rekomendasi izin usaha perdagangan	surat	400	400	400	400	400	400
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Rekomendasi izin usaha perdagangan	jumlah rekomendasi izin usaha perdagangan	surat	400	400	400	400	400	400
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah tersedianya Tapin Expo	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Pasar	waktu pembangunan pasar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi SRG	waktu Sosialisasi SRG	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	waktu ketersediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	waktu ketersediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	waktu ketersediaan jasa Keamanan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	waktu ketersediaan jasa kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu ketersediaan jasa petugas kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu ketersediaan jasa telepon listrik dan air	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu ketersediaan komponen listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu ketersediaan konsumsi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembersihan Drainase Pasar	waktu ketersediaan Pembersihan drainase pasar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembersihan Lingkungan pasar	waktu ketersediaan Pembersihan lingkungan pasar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Inventaris Kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan Peralatan inventaris kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pasar	waktu ketersediaan pemeliharaan sarana/prasarana pasar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengamanan dan penertiban pasar	waktu ketersediaan Pengamanan dan penertiban pasar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Terbungkus	waktu ketersediaan Pengawasan barang beredar, barang dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Terbungkus	waktu ketersediaan Pengawasan barang beredar, barang dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Pemantauan Monitoring dan Informasi Harga Sembako	waktu ketersediaan Pengawasan, pemantauan, monitoring dan informasi harga sembako	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peresmian Pasar Kuliner Ramadhan	waktu ketersediaan Peresmian pasar kuliner ramadhan	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	waktu ketersediaan Perjalanan Dinas	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Monitoring dan pengawasan SRG	Waktu Monitoring dan pengawasan SRG	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pembangunan Gedung Metrologi	waktu Pembangunan Gedung Metrologi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	pembuatan perda jasa retribusi kemetrologi	waktu pembuatan perda jasa retribusi kemetrologi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembuatan raperda retribusi pasar	waktu Pembuatan raperda retribusi pasar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengadaan peralatan standar kemetrologi	waktu Pengadaan peralatan standar kemetrologi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan dan peningkatan pasar	waktu Pengembangan dan peningkatan pasar	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	waktu Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	revitalisasi pasar tradisional	waktu revitalisasi pasar tradisional	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran & akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran & akhir tahun	Laporan	2	2	2	2	2	2
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Administrasi Perkantoran	Waktu tenaga teknis pendukung administrasi perkantoran	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Akreditasi Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor	Waktu Akreditasi Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Waktu Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Waktu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Waktu pelaksanaan Tapin Expo 2020	hari	10	10	10	10	10	10
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Pengawasan Angkutan	Waktu Pelayanan dan Pengawasan Angkutan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas	Waktu Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas	Waktu Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Waktu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Marka Jalan	Waktu Pembuatan Marka Jalan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembuatan Zona Selamat Sekolah	Waktu Pembuatan Zona Selamat Sekolah	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Halte	Waktu Pemeliharaan Halte	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemeliharaan Pelabuhan / Dermaga	Waktu Pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rambu Darat	Waktu Pemeliharaan Rambu Darat	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pemeliharaan Terminal / Tempat Parkir	Waktu Pemeliharaan Terminal / Tempat Parkir	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Pemeliharaan Terminal / Tempat Parkir	Waktu Pemeliharaan Terminal / Tempat Parkir	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Traffict Light	Waktu Pemeliharaan Traffict Light	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Warning Light	Waktu Pemeliharaan Warning Light	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan/Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Waktu Pemeliharaan/Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengadaan Buku dan Plat Uji KIR	Waktu Pengadaan Buku dan Plat Uji KIR	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Waktu Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Darat	Waktu Pengadaan dan Pemasangan Rambu Darat	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Waktu Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Traffict Light	Waktu Pengadaan dan Pemasangan Traffict Light	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Waktu Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana Keselamatan Jalan	Waktu Pengadaan Prasarana Keselamatan Jalan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas	waktu Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan / Dermaga	Waktu Penyediaan Pembangunan pelabuhan/dermaga	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peraturan Perundangan di Bidang Lalu Lintas	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundangan di Bidang Lalu Lintas	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengembangan BBI lokal linuh	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana BBIL LINUH (Bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	26	26	26	26	26	26
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dinas yang dipelihara rutin/berkala	Unit	20	20	20	20	20	20
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buku)	buku	8	8	8	8	8	8
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun (Laporan)	laporan	5	5	5	5	5	5
Dinas Perikanan	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Jumlah pemantauan jual beli anak ikan (kali)	kali	20	20	20	20	20	20
Dinas Perikanan	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Penanganan Pasca Produk Hasil Perikanan	jumlah penanganan pasca panen dan promosi	kali	9	9	9	9	9	9
Dinas Perikanan	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penanganan Pasca Produk Hasil Perikanan	jumlah penanganan pasca panen dan promosi	kali	9	9	9	9	9	9
Dinas Perikanan	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan (Kelompok) dan rehab sarana budidaya	paket	5	5	5	5	5	5
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan (Kelompok) dan rehab sarana budidaya	paket	5	5	5	5	5	5
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan peralatan kantor	jumlah pengadaan peralatan kantor (unit)	unit	1	1	1	1	1	1
Dinas Perikanan	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	jumlah Razia terpadu dan pengawasan SD Perikanan (kali)	kali	15	15	15	15	15	15
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah terlaksananya Tapin Expo (kali)	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perikanan	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Penanganan Pasca Produk Hasil Perikanan	Jumlah uji sampel produk perikanan	sampel	10	10	10	10	10	10
Dinas Perikanan	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Pengolahan Informasi Data Atas Hasil Produk Perikanan	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan Informasi Data Atas Hasil Produk Perikanan	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor (bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan) (bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu peyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kampanye Makan Ikan	waktu Kampanye Makan Ikan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kemitraan dan Diklat Usaha Perikanan	waktu Kemitraan dan Diklat Usaha Perikanan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan	waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan	waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan peralatan gedung kantor	waktu Pengadaan peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Ikan	waktu Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Ikan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengembangan Pertanian Terpadu Kebun PKK Bidang Perikanan	waktu Pengembangan Pertanian Terpadu Kebun PKK Bidang Perikanan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi	waktu Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta pembinaan dan monev dalam daerah dan penas tani	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13	13	13	13	13
Dinas Perindustrian	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan RAT Koperasi	Jumlah Bimbingan RAT Koperasi	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ketersediaan pemeliharaan gedung kantor	Paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah ketersediaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Laporan	2	2	2	2	2	2
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Partisipasi Dekranasda Pada Banjarmasin Festival Sasirangan	Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Banjarmasin Festival Sasirangan	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Kalsel Expo	Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Kalsel Expo	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tapin EXPO	Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tapin EXPO	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional	Jumlah Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional	Kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah partisipasi Tapin Expo	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Expo	Jumlah partisipasi Tapin Expo	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pembinaan UP2K	Jumlah Pembinaan UP2K	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeringkatan Koperasi	Jumlah pemeringkatan koperasi	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pendukung Operasionalisasi DEKRANASDA KAB.TAPIN	Jumlah penyediaan pendukung Operasionalisasi DEKRANASDA Kab.Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Perpajakan Bagi koperasi	Jumlah Penyuluhan Perpajakan Bagi koperasi	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Tertib Administrasi dan Peizinan Bidang Perindustrian Bagi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sosialisai dukungan informasi penyediaan permodalan	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu ketersediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Koperasi Online	Waktu ketersediaan operasional data koparasi online	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kegiatan Galeri TAMASA	Waktu ketersediaan operasional Galeri TAMASA	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengolahan Kaolin	Waktu ketersediaan operasional kegiatan pengolahan kaolin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Inventarisasi dan Pendataan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Waktu penyediaan inventarisasi dan pendataan usaha IKM	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah arsip yang dikelola sesuai NSPK (buah)	buah		1200	1210	1220	1225	1230
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang disusun	Laporan	2	2	2	2	2	2
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun	Laporan	13	13	13	13	13	13
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	Jumlah Jadwal Retensi Arsip yang tersusun (buah)	buah			4			
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pameran dan Promosi Perpustakaan	Jumlah jenis alat promosi yang tercetak	Jenis	3	3	3	3	3	3
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah laporan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Buah	21	22	23	24	25	26
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah laporan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Buah	21	22	23	24	25	26
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Informasi	Jumlah orang yang dilayani dengan baik	Orang	21817	21817	21817	21817	21817	21817
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Informasi	Jumlah orang yang dilayani dengan baik	Orang	21817	21817	21817	21817	21817	21817
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Bahan Perpustakaan	Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan	Buku	800	800	800	800	800	800
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Bahan Perpustakaan	Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan	Buku	800	800	800	800	800	800
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Buah	29	29	29	29	29	29
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan (buah)	buah				1		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gerakan Minat dan Budaya Baca	Jumlah pengunjung (pemustaka)	Orang	21817	21817	21817	21817	21817	21817
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan PERBUP Kearsipan	Jumlah PERBUP Kearsipan yang tersusun (paket)	paket		0		1	1	1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan PERBUP Kearsipan	Jumlah PERBUP Kearsipan yang tersusun (paket)	paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan PERDA Kearsipan	Jumlah PERDA Kearsipan yang tersusun (paket)	paket			1			
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan PERDA Kearsipan	Jumlah PERDA Kearsipan yang tersusun (paket)	paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Buah	16	16	16	16	16	16
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Buah	16	16	16	16	16	16
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Kearsipan (org)	Org				50	50	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Kearsipan (org)	Org	50	50	50	50	50	50
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan (org)	Org			200	100		100
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan (org)	Org	100	100	200	100	100	100
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan	Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	Orang	16	16	16	16	16	16
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan	Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	Orang	16	16	16	16	16	16
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Penilaian dan Pemusnahan Arsip	Jumlah Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip (org)	org				11	11	11
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan Sarana Gedung/kantor	waktu Pembangunan Sarana Gedung/kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Waktu pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (bln)	bln				12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Waktu pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (bln)	bln	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu terpelihara peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanganan dan pengendalian OPT Tanaman pangan	Jumlah Bahan Pengendalian OPT (paket)	paket	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Ternak unggulan	Jumlah bantuan hadiah ternak unggulan (Paket)	Paket	2	2	2	2	2	2
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Aren Genjah	Jumlah bibit Aren Genjah yang diserahkan kepada masyarakat (Pohon)	Pohon	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Produksi karet dan Kelapa Sawit	Jumlah Bimtek yang diselenggarakan (Kali)	Kali	9	9	9	9	9	9
Dinas Pertanian	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasional TP3K	Jumlah Bokar Bermutu (Ton)	Ton	500	500	500	500	500	500
Dinas Pertanian	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan rabies	Jumlah cakupan wilayah pemberantasan rabies tingkat kabupaten (Kecamatan)	Kecamatan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pertanian	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (Kecamatan)	Kecamatan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (Kecamatan)	Kecamatan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (Kecamatan)	Kecamatan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Aneka Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah Desa pengembangan tanaman Toga dan sayuran (Desa)	Desa	2	2	2	2	2	2
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (Dokumen)	Dokumen	5	5	5	5	5	5
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala (dokumen)	Dokumen	4	4	4	4	4	4
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	Jumlah Kelas Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan (BPP) yang Meningkatkan (unit)	Unit	2	2	2	2	2	2
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Penangkaran Padi dan palawija	Jumlah kelompok penangkar yang dibina (Kelompok)	Kelompok	3	3	3	3	3	3
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sharing Kegiatan Dirjenbun. PSP. APBD Provinsi	Jumlah Kelompok Tani yang didampingi (Kelompok)	Kelompok	3	3	3	3	3	3
Dinas Pertanian	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang terlatih PHT Perkebunan (kelompok)	kelompok	2	2	2	2	2	2
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Hortikultura	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan yang dibina (kelompok)	kelompok	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbenihan Tanaman Perkebunan	Jumlah Ketersediaan Bibit Karet Okulasi Yang Bermutu (pohon)	Pohon	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbenihan Tanaman Perkebunan	Jumlah Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit Yang Bermutu (pohon)	Pohon	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Dinas Pertanian	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Sertifikasi dan Perlindungan Tanaman Holtikultura	Jumlah komoditas hortikultura yg di sertifikasi (komoditas)	komoditas	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan kelapa Sawit	Jumlah Luasan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat yang dikembangkan (Ha)	Ha	25	25	25	25	25	25
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Sistem Informasi dan manajemen Penyuluhan	Jumlah Media Informasi Penyuluhan yang diterbitkan (paket)	paket	7	7	7	7	7	7
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Jumlah Pengembangan Bawang Merah (Ha)	Ha	78	78	78	78	78	78
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Komoditi Jeruk	Jumlah Pengembangan Jeruk (Ha)	Ha	25	25	25	25	25	25
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Sentra Cabe Rawit Hiyung	Jumlah Pengembangan Cabe Rawit Hiyung (Ha)	Ha	25	25	25	25	25	25
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan di BPK	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Meningkatkan Kompetensinya (orang)	orang	10	13	15	17	19	21
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengawasan dan Pendampingan di Sentra Komoditas Strategis	Jumlah Percontohan usaha tani yang dilaksanakan (unit)	unit	8	8	8	8	8	8
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan pengolahan dan peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan	Jumlah pertemuan kelompok usaha dan pengolahan hasil pertanian (kali)	kali	6	6	6	6	6	6
Dinas Pertanian	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembiayaan dan Investasi	Jumlah Peserta AUTP (org)	org	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Optimalisasi Pengelolaan UPB Padi dan Palawija	Jumlah Produksi Benih Padi Bermutu (ton)	ton	7	7	7	7	7	7
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Optimalisasi Pengelolaan UPB Hortikultura	Jumlah Produksi Bibit Jeruk (mata tempel)	mata tempel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyusunan Program Penyuluhan	Jumlah Program Penyuluhan Pertanian yang Disusun (Buku)	Buku	13	13	13	13	13	13
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Promosi atas hasil produksi peternakan	Jumlah promosi atas hasil produksi peternakan (Kali)	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Gerakan Makan Daging dan Telor	Jumlah promosi gerakan makan daging dan telur (Kali)	Kali	5	5	5	5	5	5
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	promosi dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan	Jumlah promosi hasil produksi dan pengolahan Tanaman Pangan (kali)	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	jumlah promosi komoditi pertanian dan produk olahan serta ekspos kegiatan (kali)	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah Promosi yang dilaksanakan (kali)	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Gerakan Minum Susu	Jumlah promosi/ sosialisasi Gerakan Minum Susu (Kali)	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Air	Jumlah sarana pengairan dan irigasi yang dibangun (paket)	paket	5	5	5	5	5	5
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Penumbuhan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan	Jumlah sosialisasi Penumbuhan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan (Kali)	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Peremajaan dan Intensifikasi Tanaman Karet	Luas Intensifikasi Karet (Ha)	Ha	15	15	15	15	15	15
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Tanaman Pangan Berkelanjutan	Luas Pertanaman Jagung (Ha)	Ha	700	800	900	1.000	1.100	1.200
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Tanaman Pangan Berkelanjutan	Luas Pertanaman Kedelai (Ha)	Ha	200	250	300	350	400	450
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Tanaman Pangan Berkelanjutan	Luas Pertanaman Padi (Ha)	Ha	82.152	83.352	84.096	85.315	86.535	87.548
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengembangan Peremajaan dan Intensifikasi Tanaman Karet	Luas Rehabilitasi Karet (Ha)	Ha	100	100	100	100	100	100
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengembangan Infrastruktur Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun (meter)	meter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Kegiatan penunjang Operasional yang diperlukan	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Inventarisasi Pengolahan Hasil Peternakan	Waktu inventarisasi pengolahan hasil peternakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Kawin Suntik Sapi dan Pembibitan Ternak	Waktu optimalisasi pengelolaan pembibitan ternak (tahun)	tahun	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Optimalisasi pengelolaan Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Waktu Optimalisasi pengelolaan TTP (tahun)	tahun	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Kecamatan	waktu optimalnya pelayanan administrasi kecamatan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	waktu pelaksanaan rapat-rapat konsultasi pelatihan Pembinaan/monitoring ke kecamatan dan menghadiri rapat koordinasi (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi & revitalisasi poskeswan (Pusat Kesehatan Hewan)	Waktu pelayanan kesehatan hewan pada wilayah sentra peternakan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu pembayaran upah untuk petugas kebersihan kantor dan keamanan kantor (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	waktu pemenuhan barang cetakan penggandaan dan penjilidan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengelolaan Kebun Pertanian Terpadu	Waktu pengelolaan Kebun Pertanian Terpadu (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan ATK (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Waktu penyediaan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu Penyediaan Telpon Internet Listrik dan Air (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor hingga dapat digunakan dan berfungsi dengan baik (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Survey dan pendataan Pertanahan	Jumlah dokumen survey dan pendataan pertanahan	dokumen	1	1	1	1	1	1
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	13	13	13	13	13	13
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	laporan	2	2	2	2	2	2
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Luasan Tanah yang di ganti rugi	Ha	1,5	10	10	10	10	10
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Kawasan Perumahan dan Permukiman	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi drainase kawasan perumahan dan permukiman	kawasan	1	1	1	1	1	1
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penanganan kawasan Permukiman kumuh perkotaan	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	buah	4	4	4	4	4	4
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penanganan kawasan Permukiman kumuh perkotaan	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	buah	4	4	4	4	4	4
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penanganan kawasan Permukiman kumuh perkotaan	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	buah	4	4	4	4	4	4
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penanganan kawasan Permukiman kumuh perkotaan	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	buah	4	4	4	4	4	4
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penanganan kawasan Permukiman kumuh perkotaan	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	buah	4	4	4	4	4	4
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan kawasan Permukiman kumuh perkotaan	Jumlah renovasi permukiman kumuh perkotaan	buah	4	4	4	4	4	4
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pengelolaan RTH Publik Perkotaan	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) publik yang terpelihara dengan baik	kawasan	2	2	2	2	2	2
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	buah	3	3	3	3	3	3
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah sistem informasi pertanahan yang dibuat	buah	1	1	1	1	1	1
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Kali	2	2	2	2	2	2
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah penyuluhan hukum pertanahan	kali	2	2	2	2	2
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terpenuhinya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	tahun	1	1	1	1	1	1
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Waktu fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Waktu pelaksanaan Tapin Expo 2020	kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum (PJU)	waktu Pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum (PJU)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pemeliharaan PJU	Waktu pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan	waktu Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Pegawai Non PNS	Waktu penyediaan jasa Pegawai Non PNS	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang dilayani dengan baik	Orang	5	5	5	5	5	5
Dinas Sosial	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Anak dan Pelayanan Sosial Anak Lanjut Usia	Jumlah anak lanjut usia yang dilayani dengan baik	Orang	5	5	5	5	5	5
Dinas Sosial	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rehabilitasi Sosial Anak dan Pelayanan Sosial Anak Lanjut Usia	Jumlah anak lanjut usia yang dilayani dengan baik	Orang	5	5	5	5	5	5

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang magang setelah mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Bakat	Orang	6	6	6	6	6	6
Dinas Sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan bimbingan dalam pengembangan bakat dan keterampilan	orang	15	15	15	15	15	15
Dinas Sosial	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS	KT	137	137	137	137	137	137
Dinas Sosial	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah Laporan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pedampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah laporan kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pendampingan /Sharing BLM Dana Dekonsentrasi Kementrian Sosial RI	Jumlah Laporan Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Dana Asistensi	Laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pendampingan Sosial/Asistensi Lanjut Usia dan Orang Terlantar	Jumlah laporan Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Jaminan Sosial	Laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Sosial	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data PBI	Jumlah laporan verifikasi dan validasi Data PBI	laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Sosial	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data PMKS	Jumlah laporan verifikasi dan validasi Data PMKS	laporan	1	1	1	1	1	1
Dinas Sosial	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu	Jumlah laporan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu	bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan/Pengembangan LK3	Jumlah Masyarakat bermasalah sosial psikologis yang dilayani dengan baik melalui LK3	orang	15	15	15	15	15	15
Dinas Sosial	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Panti Asuhan	Jumlah Panti Asuhan yang memberikan pelayanan dengan baik	PA	7	7	7	7	7	7
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Jumlah partisipasi aktif dalam hari jadi Kabupaten Tapin	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Sosial	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Expo	Jumlah partisipasi aktif dalam hari jadi Kabupaten Tapin	Kali	1	1	1	1	1	1
Dinas Sosial	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna	Jumlah pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna	Kali	5	5	5	5	5	5
Dinas Sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Asistensi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Berat	Jumlah Penyandang disabilitas berat yang mendapatkan Pelayanan Sosial dengan baik	orang	10	10	10	10	10	10
Dinas Sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Penyandang Cacat melalui LBK	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Bimbingan dan Keterampilan Melalui LBK	orang	15	15	15	15	15	15
Dinas Sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Praktek Belajar Kerja Penyandang Cacat	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terampil dengan mengikuti praktek Belajar kerja	Orang	5	5	5	5	5	5
Dinas Sosial	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Penyandang Gangguan Jiwa (Mental) Sensorik dan Intelektual	Jumlah Penyandang Gangguan Jiwa (Mental) Sensorik dan Intelektual yang dilayani dengan baik	orang	5	5	5	5	5	5
Dinas Sosial	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Penyandang Penyakit Kronis dan psikotok	Jumlah Penyandang Kronis dan Psikotok yang dilayani dengan baik	orang	5	5	5	5	5	5
Dinas Sosial	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah Perempuan Rawan Sosial konomi (PRSE) yang mendapatkan Pelayanan Sosial dengan baik	orang	14	14	14	14	14	14
Dinas Sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah PMKS yang dilayani dengan baik atau memerlukan program sosial daerah dan pusat melalui SLRT	Orang	300	300	300	300	300	300
Dinas Sosial	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah PSM yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS	orang	33	33	33	33	33	33
Dinas Sosial	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Bedah Rumah Keluarga Miskin	Jumlah rumah tidak layak huni yang diidentifikasi dan diprioritaskan untuk direhab	Rumah	25	25	25	25	25	25
Dinas Sosial	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS dan memperoleh insentif	org/bln	144	144	144	144	144	144
Dinas Sosial	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu pelayanan Surat Menyurat (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP Puspa Raya dan Ziarah Pendi Kabupaten Tapin	Waktu Pemeliharaan TMP Ziarah Pendi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Waktu penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Waktu penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Waktu Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor yang cukup (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan dan jasa pengolahan data perencanaan dan pelaporan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan Kantor dan belanja bahan pembersih	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai tamu dan rapat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu penyediaan rapat dan koordinasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pembinaan Bipartit dan Tripartit	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan Bipartit dan Tripartit	Orang	35	30	30	30	30	30
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rehab gedung workshop/ bengkel	Jumlah gedung workshop/ bengkel yang direhab	Gedung	0	0	1	0	0	0
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus yang terselesaikan	Kasus	13	10	10	10	10	10
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Padat Karya Produktif	Jumlah Masyarakat/ pencari kerja yang diberikan fasilitas sistem pendanaan	Orang	22	22	22	22	22	22
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Penyuluhan informasi pasar kerja	Jumlah orang yang mendapatkan informasi pasar kerja	Orang	75	50	50	50	50	50
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Expo	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar di bursa kerja online	Orang	20	20	20	20	20	20
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Bursa Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar di bursa kerja online	Orang	2234	2500	2500	2500	2500	2500
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	79	9	9	9	9	9
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Prosedur PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	Buah	269	100	100	100	100	100
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Peserta sosialisasi PMI (Pekerja Migran)	Orang	0	25	25	25	25	25
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah Peserta Sosialisasi Siap Pakai	Orang	75	75	75	75	75	75
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Orang	35	30	30	30	30	30
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja LLK Tapin	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	16	16	16	16	16	16
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rehab Gedung	Jumlah Rehab Gedung	Unit	0	1	1	1	1	1
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	Orang	278	0	0	0	0	0
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pembinaan jamsostek sektor formal dan informal	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi jamsostek sektor formal dan informal	Orang	0	30	30	30	30	30
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dewan Pengupahan	Jumlah Tim Dewan Pengupahan	Orang	0	14	14	14	14	14
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penganggulangan PMI Non Prosudural (satgas)	Jumlah Tim Satgas	Orang	0	23	23	23	23	23
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Wirausaha baru yang mendapat pelatihan	Orang	10	10	10	10	10	10
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Waktu Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan prasarana LLK Tapin	Waktu Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana BLK Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	waktu pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	waktu pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan	3	3	3	3	3	3
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Peyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan	Jumlah aparaturng pengawas yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	Orang	21	21	21	21	21	21
Inspektorat	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Laporan	11	11	11	11	11	11
Inspektorat	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance	Jumlah dokumen PKPT	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelesaian kerugian negara	Jumlah dokumen rekapitulasi kasus penyelesaian kerugian negara (dok)	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	LHKASN	Jumlah dokumen rekapitulasi LHKASN (dok)	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	Jumlah dokumen rekapitulasi pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI (dok)	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi, BPK, BPKP dan Irjen	Jumlah dokumen rekapitulasi penyelesaian tindak lanjut (dok)	Dokumen	2	2	2	2	2	2
Inspektorat	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tim Penilai P2UPD	Jumlah Hasil Penetapan angka kredit P2UPD (Orang)	Orang	11	11	11	11	11	11
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Evaluasi Laki	Jumlah laporan hasil evaluasi laki (Lap)	Laporan	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan	Laporan	92	92	92	92	92	92
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (Lap)	Laporan	92	92	92	92	92	92
Inspektorat	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/dengan tujuan tertentu (Lap)	Laporan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Satgas Kapabilitas APIP	Jumlah laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas apip (Lap)	Laporan	4	4	4	4	4	4
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil review LKPD (Lap)	Laporan	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review RKA SKPD	Jumlah laporan hasil review RKA (lap)	Laporan	2	2	2	2	2	2
Inspektorat	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Jumlah laporan ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan	Laporan	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Satgas SPIP	Jumlah laporan kegiatan satgas SPIP (lap)	Laporan	3	3	3	3	3	3
Inspektorat	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan dan analisis prognosis	Laporan	2	2	2	2	2	2
Inspektorat	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	LHKPN	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi	Laporan	4	4	4	4	4	4
Inspektorat	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Sapu Bersih Pungli	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang saber pungli (Lap)	Laporan	1	1	1	1	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyerapan Anggaran keuangan Desa	Jumlah laporan penyerapan anggaran keuangan desa (Lap)	Laporan	4	4	4	4	4	4
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review LAKIP	Jumlah laporan review lakip (lap)	Laporan	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan review LKPD (Lap)	Laporan	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	RAD PPK	Jumlah laporan review pelaksanaan aksi PPK pemda yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku (Lap)	Laporan	4	4	4	4	4	4
Inspektorat	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi (Lap)	Laporan	1	1	1	1	1	1
Inspektorat	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Unit	27	27	27	27	27	27
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (Responsif Gender)	waktu Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (Responsif Gender)	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	waktu Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang dan cetakan dan penggandaan (Bln)	Bln	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi (Bln)	Bln	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan konsumsi (Bln)	Bln	11	11	11	11	11	11
Inspektorat	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (Bln)	Bln	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu ketersediaan pemenuhan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Waktu ketersediaan penerangan bangunan kantor (Bln)	Bln	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	waktu Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Penilaian Internal Zona Integritas	waktu Penilaian Internal Zona Integritas	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	waktu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)	Bln	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)	Bln	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu KUA/PPAS	waktu Reviu KUA/PPAS	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	waktu Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik	waktu Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu RPJMD	waktu Reviu RPJMD	bulan	12	12	12	12	12	12
Inspektorat	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Survey Penilaian Integritas	waktu Survey Penilaian Integritas	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah/set	7	7	7	7	7	7
Kecamatan Bakarangan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah penyediaan peningkatan pemberdayaan perempuan	tahun	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	buah	13	13	13	13	13	13
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	buah	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Bakarangan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	jumlah persediaan koordinasi aparat desa	12	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	waktu penyediaan jasa keamanan kantor	org/ bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	org/ bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan Jasa Petugas e-KTP	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	waktu penyediaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Bakarangan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	waktu penyediaan Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Waktu penyediaan nMusrenbang Kecamatan	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Bakarangan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	waktu penyediaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	waktu penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	tahun	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	waktu penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	tahun	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Bakarangan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	waktu penyediaan pengawasan dana desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan penggandaan dan percetakan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bakarangan	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	waktu penyediaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	waktu penyediaan rapat - rapat koordinasi	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Benuang	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	desa/kegiatan	9	9	9	9	9	9
Kecamatan Benuang	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi Kegiatan Keagamaan	kegiatan	3	3	3	3	3	3
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Benuang	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	unit/paket	3	3	3	3	3	3
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit/paket	116	116	116	116	116	116
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benuang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benuang	paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	laporan	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Benuang	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	13	13	13	13	13	13
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Dana Desa	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Waktu pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benuang	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benuang	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Benuang	Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Benuang	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karangany Putih	Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karangany Putih	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Raya Belanti	Waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Raya Belanti	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembinaan Administrasi Kelurahan	waktu pembinaan administrasi kelurahan	kelurahan/bulan	36	36	36	36	36	36
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembinaan Administrasi Kelurahan	waktu pembinaan administrasi kelurahan	kelurahan/bulan	36	36	36	36	36	36
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Waktu pemeliharaan kebersihan lingkungan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benuang	Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benuang	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangany Putih	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Raya Belanti	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu penyediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	org/bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan Jasa Petugas e-KTP	waktu penyediaan jasa pelayanan dan perekaman E-KTP	org/bulan	24	24	24	24	24	24
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Benuang	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	76	76	86	86,5	87	87,5	88
Kecamatan Bungur	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	76	76	86	86,5	87	87,5	88
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	76	76	86	86,5	87	87,5	88
Kecamatan Bungur	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100	100	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidakanjuti	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75	80	80	80	80	80	80
Kecamatan Bungur	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Kali	14	14	14	14	14	14
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Kegiatan	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13	13	13	13	13
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	14	14	14	14	14	14
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah	Paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan / Pembuatan Bangunan Serbaguna dan Pengadaan Sarana Olahraga	waktu Pembangunan / Pembuatan Bangunan Serbaguna dan Pengadaan Sarana Olahraga	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan APBDes	waktu Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan APBDes	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu Pengawasan Dana Desa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan Jasa Petugas e-KTP	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Kali	14	14	14	14	14	14
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Lomba desa tingkat kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	13	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Waktu Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Waktu pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan Jasa Petugas e-KTP	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	waktu Penyediaan Jasa Petugas Menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	waktu Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Hari-hari Besar Nasional	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Jumlah Pembangunan Tempat Parkir Kantor	paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Dokumen	13	13	13	13	13	13
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Waktu pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan Jasa Petugas e-KTP	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Kali	9	9	9	9	9	9
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Kali	1	1	1	1	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kec. Lokpaikat	Jumlah Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kec. Lokpaikat	Paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	7	7	7	7	7	7
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13	13	13	13	13
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bitahan	waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bitahan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	waktu Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bitahan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Org/Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Org/Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan jasa pelayanan e-KTP	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	Org/Bulan	24	24	24	24	24	24
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Waktu Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket/unit	11	11	11	11	11	11
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Kali	9	9	9	9	9	9
Kecamatan Piani	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Jumlah koordinasi pengawasan dana desa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Piani	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Piani	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Halaman kantor Kec. Piani	Jumlah Peningkatan Halaman kantor Kec. Piani	Paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13	13	13	13	13
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kec. Piani	waktu Pembangunan Tempat Parkir Kantor Kec. Piani	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan jasa pelayanan e-KTP	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan E-KTP	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	13	13	13	13	13	13	13
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	4	4	4	4	4	4	4
Kecamatan Salam Babaris	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Waktu Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Waktu Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	1	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Salam Babaris	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Waktu Musrenbang Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Waktu Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	waktu Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	waktu Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan Jasa Petugas e-KTP	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Salam Babaris	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	waktu Peringatan Hari-hari Besar Nasional	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Kali	10	10	10	10	10	10
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Lomba desa tingkat kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	18	18	18	18	18	18
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	2	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Waktu Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Paket	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tambarangan	waktu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tambarangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembinaan Administrasi Kelurahan	waktu Pembinaan Administrasi Kelurahan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	waktu Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambarangan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Petugas e-KTP	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	waktu Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Kegiatan	9	9	9	9	9	9
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	13	13	13	13	13	13
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	waktu Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	buah/unit/paket	8	0	1	7	8	5
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	waktu Pengadaan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan Jasa Petugas e-KTP	waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP	bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	Laporan	13	13	13	13	13	13
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Laporan	2	2	2	2	2	2
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Lomba Desa Tingkat Kecamatan	kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapin Expo	Jumlah Tapin Expo yang Terselenggara	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu Penyediaan Instalasi Listrik dan Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Jasa Alat tulis Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan Lingkungan	Tahun	1	1	1	1	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyediaan jasa pelayanan e-KTP	Waktu Penyediaan Jasa Perekaman dan Pelayanan E-KTP	Bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket/Unit	11	11	11	11	11	11
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12	12	12	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan (unit)	unit	12	39	13	13	14	9
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Hydran Rs	Jumlah Hydran RS	paket	0	0	1	0	0	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Radiologi	Jumlah Pembangunan Gedung Radiologi	paket	0	1	0	0	0	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	orang	57	49	55	69	78	80
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	orang	57	49	55	69	78	80
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi gedung bersalin	Jumlah Rehabilitasi gedung bersalin	paket	0	0	1	0	0	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi gedung gizi	Jumlah Rehabilitasi gedung gizi	paket	0	0	0	1	0	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi selasar Rumah Sakit Datu Sanggul	Jumlah Rehabilitasi selasar Rumah Sakit Datu Sanggul (Paket0)	paket	1	1	0	0	0	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pembinaan Toko Obat dan Apotek	Waktu Pembinaan Toko Obat dan Apotek	bulan	12	12	12	12	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Waktu penyelenggaraan BLUD RS	bulan	12	12	12	12	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Waktu Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan operasional Satpol PP dan Damkar	Terpenuhinya semua suku cadang, BBM/Gas/Pelumas untuk semua Mobil Operasional dan Kendaraan Dinas Roda 2 (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan Kantor dan belanja bahan pembersih(bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Ketertiban Umum, Patroli Rutin di Wilayah Kab. Tapin	jumlah anggota untuk pengamanan unsur Muspida serta aset-aset yang ada di Kabupaten Tapin (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pelatihan Aparat Pemadam Kebakaran	Jumlah aparat damkar yang mengikuti pelatihan (org)	orang	11	11	11	11	11	11
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lomba keterampilan pemadam kebakaran tingkat provinsi dan kabupaten	jumlah kegiatan lomba keterampilan pemadam kebakaran tingkat kabupaten dan provinsi (keg)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi - Penyuluhan Perda & Perkada	Jumlah Perda yang disosialisasikan (buah)	buah	8	8	8	8	8	8
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	jumlah tenaga dukung yang melaksanakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	Penyelenggaraan Tapin Expo	kali	1	1	1	1	1	1" 2166;Dinas Perustakaan dan Kearsipan ;2;17;1;X
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya koordinasi dalam Daerah dan Luar Daerah (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor, sebagai penunjang di dalam pelaksanaan tugas/kegiatan sehari-hari (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Note book, Printer , AC dan PC(unit/%)	unit	5	6	6	6	6	6
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja SKPD (dok)	dok	2	2	2	2	2	2
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan ATK	Terpenuhinya alat tulis kantor yang cukup(bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan Korsik	Terpenuhinya peralatan korsik satpol pp (set)	set	8	8	8	8	8	8
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya semua suku cadang, BBM/Gas/Pelumas untuk semua mobil dinas kasat,(bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia nya barang cetakan dan penggandaan(bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia nya biaya pembelian alat-alat listrik dan elektronik (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselesainya cacatan laporan capaian dan ikhtisar kinerja SKPD (dok)	dok	13	13	13	13	13	13
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan jasa pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan, kegiatan kemasyarakatan, dan kegiatan publik lainnya	waktu pelaksanaan kegiatan pengamanan (org)	orang	120	120	120	120	120	120

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pengawasan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Tamu-tamu VIP dan Pejabat penting lainnya	waktu pelaksanaan pengawasan unsur Muspida serta aset-aset yang ada di Kabupaten Tapin (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan pelanggaran Perda & Perkada	waktu pelaksanaan Pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan pelanggaran Perda & Perkada (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan kerjasama dengan Aparat Hukum & Instansi terkait dalam rangka Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	waktu pelaksanaan peningkatan hubungan baik dan berkelanjutan dengan Aparat Hukum dan Instansi terkait dalam upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Perda & Perkada (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan kerjasama dengan Aparat Hukum Intansi terkait dalam rangka Penegakan Perda & Perkada	waktu pelaksanaan Peningkatan kerjasama dengan Aparat Hukum Intansi terkait dalam rangka Penegakan Perda & Perkada (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	waktu Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda & Perkada	waktu Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda & Perkada	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebakaran	waktu pemeliharaan sarpras kebakaran (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah	Waktu Peningkatan kapasitas aparatur daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	waktu peningkatan Kinerja PNS dan terbentuknya Tim Penegakan Disiplin PNS (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran	Waktu Penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran (bln)	bulan	12	12	12	12	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Posko Siaga Bencana Kebakaran	Waktu penyediaan posko siaga bencana kebakaran (hari)	hari	365	365	365	365	365	365
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Belanja Barang dan Jasa	Barang dan jasa yang disediakan	Buah	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Belanja Barang dan Jasa	Barang dan jasa yang disediakan	Buah	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah acara dilingkungan Pemkab Tapin	Kali	10	10	10	13	13	15
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah acara dilingkungan Pemkab Tapin	Kali	10	10	10	13	13	15
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi Daerah	jumlah BUMD yang sehat	BUMD	4	5	6	6	6	6
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi Daerah	jumlah BUMD yang sehat	BUMD	4	5	6	6	6	6
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pengiriman Kafilah MTQ Kabupaten Tapin Untuk Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah cabang yang diikuti	cabang	17	0	30	30	30	30
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pengiriman Kafilah MTQ Kabupaten Tapin Untuk Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah cabang yang diikuti	cabang	17	0	30	30	30	30
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	jumlah dokumen kebijakan yang direkomendasikan	dokumen	3	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	jumlah dokumen kebijakan yang direkomendasikan	dokumen	3	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Kumpulan Produk Hukum	buah	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Penyusunan dokumen LKPJ Tahunan	Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Penyusunan dokumen LKPJ Tahunan	Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Penyusunan dokumen LPPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	2	2
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Penyusunan dokumen LPPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	2	2
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pengembangan Komunikasi, Publikasi Dan Media Massa	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah terhadap Publik melalui Media Massa dan Media elektronik	Berita	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penunjang Keprotokoleran Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil yang dilayani	jadwal dan sambutan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penunjang Keprotokoleran Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil yang dilayani	jadwal dan sambutan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Penamaan dan Pembakuan Nama Rupabumi	Jumlah Kegiatan Penamaan Rupabumi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Penamaan dan Pembakuan Nama Rupabumi	Jumlah Kegiatan Penamaan Rupabumi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	7	7	7	8	8	8
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	7	7	7	8	8	8
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengawasan batas kabupaten	Jumlah Konflik Batas Yang Diselesaikan (Kabupaten)	Kabupaten	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengawasan batas kabupaten	Jumlah Konflik Batas Yang Diselesaikan (Kabupaten)	Kabupaten	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Safari Jum'at	Jumlah kunjungan safari Jumat	kali	0	20	20	20	20	20
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Safari Jum'at	Jumlah kunjungan safari Jumat	kali	0	20	20	20	20	20
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Safari Ramadhan	Jumlah kunjungan safari Ramadhan	kali	15	20	20	20	20	20
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Safari Ramadhan	Jumlah kunjungan safari Ramadhan	kali	15	20	20	20	20	20
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pendampingan dan Evaluasi CSR	jumlah laporan evaluasi CSR	dokumen	2	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pendampingan dan Evaluasi CSR	jumlah laporan evaluasi CSR	dokumen	2	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Pengendalian inflasi daerah	jumlah laporan TPID	dokumen	2	2	2	2	2	2
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian inflasi daerah	jumlah laporan TPID	dokumen	2	2	2	2	2	2

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Silaturrehmi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat	Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	orang	300	300	300	300	300	300
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Silaturrehmi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat	Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	orang	300	300	300	300	300	300
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Kehidupan Beragama (Tausiyah Bulanan)	Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	orang	300	300	300	300	300	300
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Kehidupan Beragama (Tausiyah Bulanan)	Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan/perayaan keagamaan	orang	300	300	300	300	300	300
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Organisasi	Jumlah organisasi sosial yang berperan aktif dalam pengembangan kreativitas masyarakat	organisasi	3	3	0	0	0	0
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Organisasi	Jumlah organisasi sosial yang berperan aktif dalam pengembangan kreativitas masyarakat	organisasi	3	3	3	3	3	3
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Penunjang Organisasi	Jumlah organisasi sosial yang ditunjang pelaksanaan kegiatannya	organisasi	0	0	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penunjang Organisasi	Jumlah organisasi sosial yang ditunjang pelaksanaan kegiatannya	organisasi	0	0	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Penunjang Organisasi	Jumlah organisasi sosial yang ditunjang pelaksanaan kegiatannya	organisasi	0	0	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penunjang Organisasi	Jumlah organisasi sosial yang ditunjang pelaksanaan kegiatannya	organisasi	0	0	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Pembelian Inventaris Rumah Jabatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket Inventaris Rumah Jabatan Kdh dan Wakil Kdh	bulan	6	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembelian Inventaris Rumah Jabatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket Inventaris Rumah Jabatan Kdh dan Wakil Kdh	bulan	5	6	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Pembelian Inventaris Rumah Jabatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket Inventaris Rumah Jabatan Kdh dan Wakil Kdh	bulan	6	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan gedung kantor	Jumlah paket kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Paket	2	2	3	3	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan gedung kantor	Jumlah paket kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Paket	2	2	3	3	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan Asrama mahasiswa	Jumlah paket perlengkapan Asrama Mahasiswa	Paket	2	2	2	2	2	2
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan Asrama mahasiswa	Jumlah paket perlengkapan Asrama Mahasiswa	Paket	2	2	2	2	2	2
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	Paket	4	3	3	3	3	3
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	Paket	4	3	3	3	3	3
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dialog/audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Dialog/audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	kali	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dialog/audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Dialog/audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	kali	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji daerah	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji daerah	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar Islam	kegiatan	3	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringatan Hari Besar Islam	Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar Islam	kegiatan	3	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Pelaksanaan Hari Besar Sejarah Nasional	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional Yang Dilaksanakan (Kali)	Kali	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Pelaksanaan Hari Besar Sejarah Nasional	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional Yang Dilaksanakan (Kali)	Kali	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Semarak Idul Adha	Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Adha	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Semarak Idul Adha	Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Adha	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Semarak Idul Fitri	Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Fitri	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Semarak Idul Fitri	Jumlah pelaksanaan Semarak Idul Fitri	kegiatan	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Silaturrehmi Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Keluarga Penuntut Kabupaten, Mantan Bupati, Mantan Ketua DPRD dan Tokoh-tokoh Ulama	Jumlah pelaksanaan silaturrehmi	kali	20	30	30	30	30	30
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Silaturrehmi Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Keluarga Penuntut Kabupaten, Mantan Bupati, Mantan Ketua DPRD dan Tokoh-tokoh Ulama	Jumlah pelaksanaan silaturrehmi	kali	20	30	30	30	30	30
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Tanah	Jumlah penambahan tanah daerah	Paket	5	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Tanah	Jumlah penambahan tanah daerah	Paket	5	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Pensiunan Wredatama Veteran	Jumlah pensiunan wredatama yang dibantu untuk meningkatkan kesejahteraannya	orang/kali	29	29	29	29	29	29
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Pensiunan Wredatama Veteran	Jumlah pensiunan wredatama yang dibantu untuk meningkatkan kesejahteraannya	orang/kali	29	29	29	29	29	29
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Kafilah MTQ Kabupaten Tapin Untuk Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah peserta kafilah yang dibina	orang	33	0	35	35	35	35
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Kafilah MTQ Kabupaten Tapin Untuk Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah peserta kafilah yang dibina	orang	33	0	35	35	35	35
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Penyuluhan Hukum dan HAM	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan (org)	orang	200	100	100	200	200	
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Tapin	Jumlah qori yang berprestasi di tingkat daerah provinsi dan nasional	orang	30	0	35	35	35	35
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Tapin	Jumlah qori yang berprestasi di tingkat daerah provinsi dan nasional	orang	30	0	35	35	35	35

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Raperda/Perbup/Kepbup yang diselesaikan	produk hukum	260	258	258	258	255	
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertambangan dan Energi	Jumlah rumusan kebijakan dibidang pertambangan yang ditindak lanjuti	kebijakan	8	10	10	10	10	10
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertambangan dan Energi	Jumlah rumusan kebijakan dibidang pertambangan yang ditindak lanjuti	kebijakan	8	10	10	10	10	10
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Silatullahmi Pemda dengan Keluarga Yang Meninggal	Jumlah tokoh masyarakat pemuka agama dan aktivis sosial yang mendapatkan fasilitasi masalah sosial	orang	5	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Silatullahmi Pemda dengan Keluarga Yang Meninggal	Jumlah tokoh masyarakat pemuka agama dan aktivis sosial yang mendapatkan fasilitasi masalah sosial	orang	5	5	5	5	5	5
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Asrama Mahasiswa Tapin	Paket pengadaan Tanah untuk Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	Paket	1	1	0	0	0	0
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan Asrama Mahasiswa Tapin	Paket pengadaan Tanah untuk Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	Paket	1	1	0	0	0	0
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapin Expo	pelaksanaan Tapin Expo	kali	1	1	1	1	1	1
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemanfaatan Tanah Daerah	Pemanfaatan tanah daerah secara efektif dan efisien	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemanfaatan Tanah Daerah	Pemanfaatan tanah daerah secara efektif dan efisien	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Perkara yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Pengendalian pelaksanaan pembangunan	pesentase pengadaan barang dan jasa SKPD yang tepat waktu	Persen	0	80	85	90	95	100
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian pelaksanaan pembangunan	pesentase pengadaan barang dan jasa SKPD yang tepat waktu	Persen	0	80	85	90	95	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum	Terpenuhinya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum	Terpenuhinya kenyamanan pengguna jalan umum pada malam hari	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	waktu Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Asistensi dan Fasilitasi Aturan Ketatalaksanaan	waktu Asistensi dan Fasilitasi Aturan Ketatalaksanaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Asistensi dan Fasilitasi Aturan Ketatalaksanaan	waktu Asistensi dan Fasilitasi Aturan Ketatalaksanaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pelaksanaan Analis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analis Beban Kerja	waktu Pelaksanaan Analis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analis Beban Kerja	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pelaksanaan Analis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analis Beban Kerja	waktu Pelaksanaan Analis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analis Beban Kerja	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pelaksanaan Analis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analis Beban Kerja	waktu Pelaksanaan Analis Jabatan, Formasi Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analis Beban Kerja	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional hak Azasi manusia	Waktu pelaksanaan koordinasi RANHAM (bln)	bulan	12	12	12	12	12	
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	waktu Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	waktu Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	waktu Pembentukan dan Revisi Kelembagaan Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pembinaan Pelayanan Publik	waktu Pembinaan Pelayanan Publik	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pembinaan Pelayanan Publik	waktu Pembinaan Pelayanan Publik	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	waktu Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	waktu Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	waktu Pembinaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Manajemen Aset	Waktu Pengelolaan aset yang efektif dan efisien	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Manajemen Aset	Waktu Pengelolaan aset yang efektif dan efisien	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Publikasi Peraturan Perundang- Undangan	Waktu pengelolaan Jaringan Informasi Hukum (bln)	bulan	12	12	12	12	12	
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Penunjang Keprotokoleran Kepala Daerah	waktu Penunjang Keprotokoleran Kepala Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen alat listrik/penerangan di bangunan kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Waktu penyediaan lelang dan maintenance LPSE	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	waktu Penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi kegiatan eksekutif dan legislatif	Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi (Bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi kegiatan eksekutif dan legislatif	Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi (Bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	waktu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Waktu Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	waktu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	waktu Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Review dan Evaluasi Kelembagaan	waktu Review dan Evaluasi Kelembagaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Review dan Evaluasi Kelembagaan	waktu Review dan Evaluasi Kelembagaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Review dan Evaluasi Kelembagaan	waktu Review dan Evaluasi Kelembagaan	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Mahasiswa	Waktu terpelihara Asrama Mahasiswa/i Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Mahasiswa	Waktu terpelihara Asrama Mahasiswa/i Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Waktu terpelihara fasilitas komputer dan kelengkapannya di Sekretariat Daerah dan Gedung PKK Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Waktu terpelihara fasilitas komputer dan kelengkapannya di Sekretariat Daerah dan Gedung PKK Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu terpelihara fasilitas mobil dinas dan sepeda motor dinas di Sekretariat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu terpelihara fasilitas mobil dinas dan sepeda motor dinas di Sekretariat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu terpelihara gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu terpelihara gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu terpelihara peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu terpelihara peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu terpelihara perlengkapan gedung kantor Sekratriat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu terpelihara perlengkapan gedung kantor Sekratriat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Waktu terpelihara perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Waktu terpelihara perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Waktu terpelihara rumah dinas	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Waktu terpelihara rumah dinas	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Waktu Terpeliharanya mobil dinas jabatan Kdh dan Wakil Kdh	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Waktu Terpeliharanya mobil dinas jabatan Kdh dan Wakil Kdh	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Waktu Terpeliharanya mobil dinas jabatan Kdh dan Wakil Kdh	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemeliharaan Rumah Jabatan Dan Barang-Barang Inventaris Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Waktu Terpeliharanya rumah jabatan Kdh dan Wakil Kdh	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rumah Jabatan Dan Barang-Barang Inventaris Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Waktu Terpeliharanya rumah jabatan Kdh dan Wakil Kdh	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rumah Jabatan Dan Barang-Barang Inventaris Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Waktu Terpeliharanya rumah jabatan Kdh dan Wakil Kdh	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Asrama Mahasiswa	Waktu tersedia rumah Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Asrama Mahasiswa	Waktu tersedia rumah Asrama Mahasiswa Tapin di Kota Malang	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Waktu Tersedianya belanja rumah tangga Kdh dan Wakil Kdh	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Waktu Tersedianya belanja rumah tangga Kdh dan Wakil Kdh	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor di Sekretariat Daerah dan Gedung Pendopo Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor di Sekretariat Daerah dan Gedung Pendopo Tapin	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD	Jumlah Bahan Kajian Untuk Fungsi Anggaran Dan Pengawasan DPRD, Bahan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD (Bhn/Thn)	Tahun	1	1	1	1	1	1
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.28	Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis Alat tulis kantor yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis barang Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Buah)	Buah	44	44	44	44	44	44
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.35	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit/Buah)	Unit/Buah	25	25	25	25	25	25
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.37	Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	Buah	650	650	650	650	650	650
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.18	Layanan Administrasi DPRD	Kegiatan Pembuatan Risalah Rapat-Rapat DPRD	Jumlah Hasil risalah rapat-rapat paripurna Rapat istimewa rapat komisirapat gabungan rapat banmus D (Jumlah Ris)	Risalah	150	150	150	150	150	150

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.17	Layanan Administrasi DPRD	Kegiatan Pembuatan Himpunan Keputusan DPRD	Jumlah himpunan keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD (Jmlh Himpun)	Himpunan	20	20	20	20	20	20
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Kegiatan Pelantikan-pelantikan/sidang istimewa	Jumlah Kegiatan Pelantikan-pelantikan/Sidang Istimewa (Kali/Tahun)	kali	1	1	1	1	1	1
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.22	Layanan Administrasi DPRD	Kegiatan Reses Anggota DPRD	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD (Org/kali)	Orang/kali	75	75	75	75	75	75
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan Kinerja/Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan semesteran dan akhir tahun (Laporan)	Laporan	15	15	15	15	15	15
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan Kinerja/Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan semesteran dan akhir tahun (Laporan)	Laporan	15	15	15	15	15	15
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Beserta Atributnya	Jumlah Pakaian dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya yang diadakan (Stell)	Stell	175	175	175	175	175	175
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.23	Layanan Administrasi DPRD	Hearing Dialog/Konsultasi Dengan Pejabat Pemda	Jumlah pelaksanaan Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda/tokoh masyarakat.	Kali	10	10	10	10	10	10
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.24	Layanan Administrasi DPRD	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali	1	1	1	1	1	1
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.32	Layanan Administrasi DPRD	Tapin Expo	Jumlah Pelaksanaan Tapin EXPO (Kali)	kali	1	1	1	1	1	1
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Buah)	Buah	50	50	50	50	50	50
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan kantor (Org/Thn)	Orang/Tahun	156	156	156	156	156	156
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.44	Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan Jasa Jasmani pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota beserta Medical Check Up	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (Org)	Orang	25	25	25	25	25	25
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda Insiatif	Jumlah rancangan Perda atas inisiatif DPRD yang terfasilitasi menjadi Perda	Perda	10	10	10	10	10	10
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.19	Layanan Administrasi DPRD	Kerjasama Bantuan Hukum dan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga bantuan hukum dan tenaga ahli fraksi yang disediakan (Org/bulan)	Orang/bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.33	Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu bahan bacaan yang disediakan koran/surat kabar	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Waktu pelaksanaan Ketua dan Anggota DPRD untuk mengikuti workshop/bimtek, studi banding/Kunjungan kerja/Konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam daerah	Waktu pelaksanaan kunjungan kerja/Sidak/monitoring dalam daerah DPRD (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.31	Layanan Administrasi DPRD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.42	Layanan Administrasi DPRD	Rehab Gedung Kantor	Waktu pelaksanaan rehab gedung/kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.43	Layanan Administrasi DPRD	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.41	Layanan Administrasi DPRD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Waktu pemeliharaan rutin/berkala mesin genset (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.40	Layanan Administrasi DPRD	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Waktu pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala mobil kendaraan dinas/operasional (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.29	Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Waktu Penyediaan Informasi kegiatan DPRD yang dimuat di media massa publik (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.20	Layanan Administrasi DPRD	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Waktu Penyediaan Informasi kegiatan DPRD yang dimuat di media massa publik (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.38	Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.30	Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Jasa Non PNS	Waktu Tenaga Pengolah data umum dan Kepegawaian yang tersedia (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.25	Layanan Administrasi DPRD	Penyediaan Jasa Non PNS	Waktu Tenaga Pengolah data umum dan Kepegawaian yang tersedia (Bulan)	Bulan	12	12	12	12	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.27	Layanan Administrasi DPRD	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara	Waktu yang disediakan untuk Aparatur mengikuti workshop/bimtek diklat seminar, sosialisasi, pendampingan kunker/studi banding anggota DPRD	Bulan	12	12	12	12	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Program Pengelolaan dan Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Program Kinerja, Pengembangan Karier dan Disiplin Aparatur	Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Program Kinerja, Pengembangan Karier dan Disiplin Aparatur	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang memenuhi syarat jabatan	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Program Kinerja, Pengembangan Karier dan Disiplin Aparatur	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah	Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten	Poin	3	3	3	3	3	3
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Program Peningkatan Kesadaran Luhur Perjuangan Bangsa	Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	%	0	50	80	80	80	80
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	%	100	100	80	85	85	90
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Program Pemeliharaan Kamtibmas	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani	%	0	80	80	80	80	80
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	%	0	0	80	80	80	80
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	%	0	0	85	85	90	90
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan	%	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan	%	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	%	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program Perbendaharaan	Persentase komplain terhadap penerbitan SP2D	%	0	0	0	0	0	0
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	%	100	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program penyusunan anggaran	Persentase Perda dan Perbup yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Program Penatausahaan Keuangan	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan penggunaan APBD sesuai standar dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	100	100	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	%	100	100	100	100	100	100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan	%	80	80	80	80	80	80
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pasca Bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang pulih	%	70	70	70	70	70	80
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	50	50	50	60	70	80
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	90	90	90	90	90	90
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	90	90	90	90	90
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	90	90	90	90	90
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENATAUSAHAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	%	0	100	100	100	100	100
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	%	100	100	100	100	100	100
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Persentase peningkatan objek pajak baru	OP	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.	%	130,5	5	5	5	5	5
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	100	100	100	100	100	100
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKP	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Program pengembangan data/informasi	Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase sasaran dan program RKP yang konsisten dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Persentase kelompok sadar wisata yang aktif	%	20	20	25	35	40	55
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Persentase kelompok sadar wisata yang aktif	%	20	20	25	35	40	55
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Program Perlindungan dan Pelestarian Unsur Budaya	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Program Perlindungan dan Pelestarian Unsur Budaya	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan	%	25	30	33	35	40	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik	%	70	70	73	75	78	80
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina	%	25	30	35	40	45	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Program pengembangan Unsur Kebudayaan	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif	%	30	35	40	50	45	80
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Program Pembinaan Unsur Kebudayaan	Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	%	30	40	50	45	75	80
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Program Pembinaan Unsur Kebudayaan	Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	%	30	40	50	45	75	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Program Pemanfaatan Unsur Kebudayaan	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah	%	98,57	83	85	90	95	100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	92	95	96	98	100
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	92	95	96	98	100
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan	poin	87	88%	89%	89%	89%	89%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM terhadap pelayanan KTP & Kartu Keluarga	poin	87	88%	89%	89%	89%	89%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Program Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan	%	83	81	82	83	84	85
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	99	100	100	100	100	100
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	95	100	100	100	100	100
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	99	100	100	100	100	100
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Penduduk	%	1	90	90,1	90,2	90,3	90,4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Penduduk	%	1	90	90,1	90,2	90,3	90,4
Dinas Kesehatan	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	100	100	100	100	
Dinas Kesehatan	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Program Pengawasan Obat	PRESENTASE SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persen	100	100	100	100	100	100
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	kg/kapita	12000	14368840	14656216	14949341	15248327	15553294
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	kg/kapita	12000	14368840	14656216	14949341	15248327	15553294
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%	80	100	100	100	100	100
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%	80	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase aparatur persandian yang memahami standar persandian	%	0	50	50	50	100	100
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase data statistik sektoral yang disajikan	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online	%	80	100	100	100	100	100
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu-lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran Informasi melalui media massa	%	80	100	100	100	100	100
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	Persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki Izin	%	57,33	57,33	59,67	62	64,67	64,67
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan	%	50	50	58,33	58,33	66,67	66,67
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan	%	50	50	58,33	58,33	66,67	66,67
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah	%	25	25	50	75	100	100
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati	%	0	20	40	60	80	100
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditetapkan haknya	%	0	12,5	25	37,5	50	62,5
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditetapkan haknya	%	0	12,5	25	37,5	50	62,5
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	%	60	60	60	60	60	60
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	%	80	80	80	80	80	80
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	%	87	43	57	64	71	79
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air	%	20	24	28	32	36	40
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air	%	20	24	28	32	36	40
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara	%	36	24	28	32	36	40
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara	%	36	24	28	32	36	40
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Kajian Dampak Lingkungan	Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan	%	20	40	50	55	60	65
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	%	75	75	80	85	90	95
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	%	75	75	80	85	90	95
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase volume sampah yang tertangani	%	45,25	46,5	48,18	50,5	54,4	58,25
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase volume sampah yang tertangani	%	45,25	46,5	48,18	50,5	54,4	58,25
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02	Keg Inventarisasi kawasan Karst	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	status	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	status	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08	keg peningkt peran serta masy dlm perlindungan & konservasi SDA	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	status	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	status	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01	Keg peningkt kemampuan aparat dlm pengendalian pencemaran & kerusakan LH	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	status	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase data jalan yang dimutakhirkan	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase data jembatan yang dimutakhirkan	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	5	5	8	15	20	25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan	Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik	%	55	58	62	67	70	75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan	Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik	%	55	58	62	67	70	75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Program Peningkatan Perizinan, Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK	%	0	60	60	60	60	60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	49	52	55	58	60	65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	%	3	10	12	15	20	22
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang	%	23,08	38,46	53,86	69,22	86,6	100
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang	%	12,8	30,24	47,68	65,12	82,56	100
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara	%	10	12	15	20	21	25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan rigasi rawa dalam kondisi baik/sedang	%	50	55	57	60	65	70
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Panjang Tebing Sungai Yang Bebas Rawan Bencana	%	37	41	45	47	49	50
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	%	88,53	90	90	90	90	90
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Persentase pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik	%	40	45	48	50	52	55
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	45,55	48	50	52	55	57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang	%	9,25	12	13	14	15	18
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	%	60	70	75	80	85	90
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	%	51,36	60	70	75	80	85
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah	%	78	83	88	90	93	95
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah	%	73,18	78	83	88	90	93
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun (%)	%	45	50	55	60	65	70
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten	%	56	68	74	76	79	81
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten	%	56	68	74	76	79	81
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten	%	56	68	74	76	79	81
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar	%	30	35	40	43	47	67
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar	%	30	35	40	43	47	67

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM				NAMA PROGRAM	2018	2019	2020	2021	2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar	%	30	35	40	43	47	67
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	89	91	93	95	95	97
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	97	98	98	98	98	98
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	97	98	98	98	98	98
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK	%	78	83	85	89	91	93
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK	%	78	83	85	89	91	93
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK	%	78	83	85	89	91	93
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Rata-Rata jumlah kelompok binaan PKK	%	78	83	85	89	91	93
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Program Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	0,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Program Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput	%	85	90	90	90	90	90
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan	%	75	38,46	38,46	46,15	53,84	61,53
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA	%	75	75	50	50	50	50
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	%	90	90	90	90	90	90
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	%	90	90	90	90	90	90
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan	%	8,33	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Program Kualitas Keluarga	Persentase keluarga pelaku usaha	%	0,71	0,76	0,81	0,86	0,91	0,96
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Program Kualitas Hidup Perempuan	Persentase pelaku usaha rumahan perempuan	%	15	17	18	19	20	22
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Program Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah	%	52	53	54	55	56	57
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Program Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan usia anak	%	2,7	3	2,5	2,3	2,2	2,1
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan	%	8	8,33	7,69	7,69	7,69	7,69
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	%	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Cabang Olahraga	13	14	18	21	24	27
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Prestasi	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Cabang Olahraga	7	10	12	14	16	18
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi	%	48	58	68	78	88	100
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Program Pelayanan dan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	42	58	75	83	92	100
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Program Pelayanan dan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	42	58	75	83	92	100
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	95	96	96	96	96	96
Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	%	0	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase dokumen RUPM yang tersedia	%	0	0	50	0	50	0
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan	%	0	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	%	0	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase rekomendasi PM	%	0	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase rekomendasi PM	%	0	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	90	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	%	0	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	%	0	100	100	100	100	100
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	90	100	100	100	100	100
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pembinaan SD	Angka Mengulang Sekolah Dasar	%	0,021	0,02	0,015	0,01	0,005	0,002
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pembinaan SMP	Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama	%	1,31	1,12	1,01	0,72	0,33	0
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pembinaan SD	Angka Putus Sekolah Dasar	%	0,039	0,034	0,029	0,024	0,019	0,014
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pembinaan SMP	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama	%	0,4	0,38	0,3	0,25	0,2	0
Dinas Pendidikan	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	74	79	84	89	94	100
Dinas Pendidikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan	%	82,87	100	100	100	100	100
Dinas Pendidikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	71	100	100	100	100	100
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD yang terakreditasi	%	15	30	45	60	75	90
Dinas Pendidikan	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan pendidikan SD dan SMP	%	82,15	85,7	89,25	92,8	96,35	100
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pendidikan Non Formal	Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi	%	7,69	19,2	30,7	42,2	57,6	76,9
Dinas Pendidikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	93,89	100	100	100	100	100
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	%	67	74	77	80	84	88
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pembinaan SD	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD	%	89	90	91	92	93	94
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pembinaan SMP	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	%	73,07	76,92	84,6	92,31	96,15	100
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pembinaan SD	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	%	82	82	95	100	100	100
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pembinaan SMP	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	%	63	70	80	90	95	100
Dinas Pendidikan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	%	0,5	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	%	60	65	75	80	85	85
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Program Advokasi dan Penggerakan	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	%	20	30	35	40	45	50
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi	Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	%	0	2,11	2,1	2,09	2,08	2,07
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Program Generasi Berencana (Genre)	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	%	66,07	66,12	67,02	68,02	79,52	71,12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS	%	91,99	92,04	92,07	92,09	92,14	92,19
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB	%	83,83	83,88	83,93	83,98	84,02	84,07
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	%	71,86	71,91	72,11	73,61	73,11	73,66
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Program Generasi Berencana (Genre)	Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	%	90,02	91,1	92,28	92,36	92,56	92,8
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase peserta KB aktif MKJP	%	7,58	8,9	8,88	8,87	8,86	8,83
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Program Pengendalian Penduduk	Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	%	60	65	70	75	80	85
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perdagangan	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda terasah	%	100	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM				NAMA PROGRAM	2018	2019	2020	2021	2022
Dinas Perdagangan	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat	%	102,08	100	100	100	100	100
Dinas Perdagangan	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Program Promosi dan Informasi Daerah	Persentase Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perdagangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perdagangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perdagangan	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Tradisional yang dibangun	%	90,24	92,68	92,68	95,12	97,66	100
Dinas Perdagangan	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Tradisional yang direvitalisasi	%	75	75	75	83,33	91,67	100
Dinas Perdagangan	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perdagangan	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perdagangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perdagangan	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang tidak Sesuai SNI	%	90	90	90	95	95	95
Dinas Perdagangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perdagangan	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	indeks	73	75	76	76	78	79
Dinas Perhubungan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Program Pelayanan Lalu-Lintas dan Angkutan	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perhubungan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Program Pelayanan Lalu-Lintas dan Angkutan	Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Lolos Uji KIR	%	99	1000	0	0	0	0
Dinas Perhubungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perhubungan	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar	%	75	80	85	90	95	100
Dinas Perhubungan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor	%	40	45	55	65	75	85
Dinas Perhubungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perhubungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	70	70	70	70	70	70
Dinas Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Program Peningkatan Kualitas SDM, Kelembagaan dan Optimalisasi Produksi Perikanan	Persentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perindustrian	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	%		0,23%	0,25%	0,26%	0,27%	0,29%
Dinas Perindustrian	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	%		0,23%	0,25%	0,26%	0,27%	0,29%
Dinas Perindustrian	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	%		0,23%	0,25%	0,26%	0,27%	0,29%
Dinas Perindustrian	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro	%	17	17,56	18,4	19,51	20,9	22,55
Dinas Perindustrian	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	%		0,30%	0,33%	0,37%	0,38%	0,41%
Dinas Perindustrian	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	%		0,30%	0,33%	0,37%	0,38%	0,41%
Dinas Perindustrian	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	%		0,30%	0,33%	0,37%	0,38%	0,41%
Dinas Perindustrian	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	82,52	86,96	87,23	87,41	87,59	87,84
Dinas Perindustrian	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	82,52	86,96	87,23	87,41	87,59	87,84
Dinas Perindustrian	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	82,52	86,96	87,23	87,41	87,59	87,84
Dinas Perindustrian	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	%	1,2	40	50	60	70	80
Dinas Perindustrian	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	%	1,2	40	50	60	70	80

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Perindustrian	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	%	1,2	40	50	60	70	80
Dinas Perindustrian	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perindustrian	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perindustrian	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM Yang Memilikizin Usaha	%	4,49	14,02	14,98	15,95	16,91	17,88
Dinas Perindustrian	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Program Promosi Perpustakaan	Angka rata - rata pemanfaatan Perpustakaan	%	5,005	0	2,99	2,29	1,08	0,37
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase pengelola arsip yang terampil	%	46,68%	48,89%	51,11%	53,33%	55,55%	57,78%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	0	100	100	100	100
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP	%	30	33,33	100	100	50	33,33
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	%	3,98%	0	3,98	4,48	4,97	5,47
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK	%	46,68%	48,89%	51,11%	53,33%	55,55%	57,78%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	- Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	%	5	1	1	1	1	1,00
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	- Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	- Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	Ku/Ha	69,6	69	71	73	73	73
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	- Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	Ku/Ha	69,6	69	71	73	73	73
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	- Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	Ku/Ha	85,5	89	91	93	94	94
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	- Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	Ku/Ha	85,5	89	91	93	94	94
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	47	48	49	49	50	51
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	47	48	49	49	50	51
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Ku/Ha	9	9	9	9	10	10
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Ku/Ha	9	9	9	9	10	10
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	Ku/Ha	603	621	640	659	679	699
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	Ku/Ha	603,0881358	621	640	659	679	699
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	Ku/Ha	1789,236449	1.879	1.973	2.071	2.175	2.284
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	Ku/Ha	1.789	1.879	1.973	2.071	2.175	2.284
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	Angka konsumsi daging per kapita (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun	4	4	4	4	4	4
Dinas Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)	Ha	63038	63063	63088	63113	63138	63163,00
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina (kelompok)	Kelompok	2	2	2	2	2	2
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Kemitraan Pemasaran yang dibentuk (MoU)	MoU	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Persentase Kelas kelompok tani Madya (%)	%	10	13	16	19	22	25
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik (%)	%	12,5	15,63	18,7	21,88	25	28,18
Dinas Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase lahan sawah fungsional yang terairi (persen)	%	15,22	15,26	15,3	15,35	15,4	15,45
Dinas Pertanian	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pertanian	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis (%)	%	25	35	45	55	65	75

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Pertanian	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Persentase Perijinan yang dipenuhi (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Persentase RMU yang menghasilkan Beras dengan mutu baik (%)	%	3,35	5	10	15	20	25
Dinas Pertanian	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pertanian	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	-Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	49	49	50	51	51	52
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	-Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	49	49	50	51	51	52
Dinas Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pasca Panen (persen)	%	2,41	2,43	2,46	2,48	2,51	2,53
Dinas Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rasio Ketersediaan Alat Mesin Pertanian Pra Panen (Persen)	%	26,89	27,16	27,43	27,71	27,98	28,26
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Luas Panen Padi (Ha)	Ha	78.966	79.900	80.845	81.800	82.768	83.746
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Luas Panen Jagung (Ha)	Ha	1.691	1.749	1.810	1.872	1.937	2.003
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Luas Panen Kedelai (Ha)	Ha	105	109	112	116	120	124
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	Ha	148	149	152	157	163	171
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	Luas Panen Bawang Merah (Ha)	Ha	139	140	143	147	153	161
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	Luas Panen Jeruk (Ha)	Ha	401,5714286	406	414	427	444	466
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	jumlah kemitraan pemasaran Hasil Hortikultura	Mitra	1	1	1	1	1	1
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Luas Tanaman Karet (Ha)	Ha	13309	14.118	14.542	14.978	15.427	15.890
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Luas Tanaman Sawit (Ha)	Ha	44961	3.239	3.337	3.437	3.540	3.646
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	%	5	5	4	4	3	3
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	Populasi sapi (ekor)	ekor	6.900	7.015	7.015	7.366	7.734	8.121
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	Populasi kambing (ekor)	ekor	4.585	4.650	4.716	4.783	4.851	4.920
Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	Populasi unggas (ekor)	ekor	2.301.089	2.315.533	2.315.533	2.330.206	2.346.072	2.364.135
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Luas Panen Padi (Ha)	Ha	78.966	79.900	80.845	81.800	82.768	83.746
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Luas Panen Jagung (Ha)	Ha	1.691	1.749	1.810	1.872	1.937	2.003
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Luas Panen Kedelai (Ha)	Ha	105	109	112	116	120	124
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	Ha	148	149	152	157	163	171
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	Luas Panen Bawang Merah (Ha)	Ha	139	140	143	147	153	161
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	Luas Panen Jeruk (Ha)	Ha	401,5714286	406	414	427	444	466
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Luas Tanaman Karet (Ha)	Ha	13309	14.118	14.542	14.978	15.427	15.890
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Luas Tanaman Sawit (Ha)	Ha	44961	3.239	3.337	3.437	3.540	3.646
Dinas Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	%	5	5	4	4	3	3
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola	%	90	100	100	100	100	100
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik	%	50	60,56	61,67	62,78	36,89	65
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	%	90	100	100	100	100	100
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	%	90	100	100	100	100	100
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan	%	50	18,18	18,18	18,18	18,18	27,27
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	0,17	0,5	0,63	0,88	1,45	4,24
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	0,17	0,5	0,63	0,88	1,45	4,24
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	0,17	0,5	0,63	0,88	1,45	4,24
Dinas Sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Program pembinaan anak terlantar dan lanjut usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	%	35	35	35,05	35,1	35,12	35,14
Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	%	3	3	3,02	3,04	3,06	3,08
Dinas Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	55	55	55,05	55,1	55,12	55,14
Dinas Sosial	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	0	10	10,05	10,1	10,12	10,14
Dinas Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS	%	56,1	56,1	56,15	56,16	56,17	56,18
Dinas Sosial	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS	%	56,1	56,1	56,15	56,16	56,17	56,18
Dinas Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan	%	2,26	23	2,27	2,28	2,29	2,3
Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	75	75	75	75	75	75
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	59,09	50	50	50	50	50
Dinas Tenaga Kerja	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	%	22,11	40	40	40	40	40
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Administrasi Perkantoran	Persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS	Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI BIDANG PENGAWASAN	Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase obyek pemeriksaan reguler tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENUNJANG DAN PENDUKUNG GOOD GOVERNANCE	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PENUNJANG DAN PENDUKUNG GOOD GOVERNANCE	Persentase self assesment per Elemen dengan kesimpulan level 3	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENUNJANG DAN PENDUKUNG GOOD GOVERNANCE	Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Inspektorat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarangan	poin	85	86,4	85	85	85	85

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Bakarangan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarangan	poin	85	86,4	85	85	85	85
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarangan	poin	85	86,4	85	85	85	85
Kecamatan Bakarangan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidakklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bakarangan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	%	0	65	70	75	80	85
Kecamatan Bakarangan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang	poin	85	85	86	87	88	89
Kecamatan Binuang	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang	poin	85	85	86	87	88	89
Kecamatan Binuang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang	poin	85	85	86	87	88	89
Kecamatan Binuang	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidakklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	80	80	80	80	80	80
Kecamatan Binuang	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Binuang	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	70	70	70	70	70	70
Kecamatan Bungur	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	76	76	86	86,5	87	87,5	88
Kecamatan Bungur	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	76	76	86	86,5	87	87,5	88
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	76	76	86	86,5	87	87,5	88
Kecamatan Bungur	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Bungur	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75	80	80	80	80	80	80
Kecamatan Bungur	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Bungur	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan	poin	85	85	86	87	88	89
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan	poin	85	85	86	87	88	89
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	80	80	80	80	80	80
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	poin	75	77	79	81	83	85
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	poin	75	77	79	81	83	85
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	poin	75	77	79	81	83	85
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Laporan pengaduan kamtibmas yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	80	80	80	80	80	80
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	poin	85	86	87	87	87	87
Kecamatan Hatungun	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	poin	85	86	87	87	87	87
Kecamatan Hatungun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun	poin	85	86	87	87	87	87
Kecamatan Hatungun	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	95	80	80	80	80	80
Kecamatan Hatungun	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Hatungun	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	%	70	70	70	70	70	70
Kecamatan Hatungun	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat	poin	85	86,4	86,5	86,6	86,7	86,8
Kecamatan Lokpaikat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat	poin	85	86,4	86,5	86,6	86,7	86,8
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat	poin	85	86,4	86,5	86,6	86,7	86,8
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	80	80	80	80	80	80
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani	poin	85	86,5	86,6	86,7	86,8	87
Kecamatan Piani	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani	poin	85	86,5	86,6	86,7	86,8	87

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Piani	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani	poin	85	86,5	86,6	86,7	86,8	87
Kecamatan Piani	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Piani	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	%	0	65	70	75	80	85
Kecamatan Piani	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	76	76	86	86,5	87	87,5	88
Kecamatan Salam Babaris	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	76	76	86	86,5	87	87,5	88
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bungur	76	76	86	86,5	87	87,5	88
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75	80	80	80	80	80	80
Kecamatan Salam Babaris	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Salam Babaris	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan	poin	85	86,4	86,5	86,6	86,7	86,8
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan	poin	85	86,4	86,5	86,6	86,7	86,8
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan	poin	85	86,4	86,5	86,6	86,7	86,8
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	%	100	100	100	100	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	95	80	80	80	80	80
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	poin	85	85	86,4	86,5	86,6	86,7
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	poin	85	85	86,4	86,5	86,6	86,7
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	poin	85	85	86,4	86,5	86,6	86,7
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidakanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	%	0	0	65	70	75	80
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara	poin	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara	poin	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara	poin	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan adminitrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang ditidakanjuti	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	97,38	80	80	80	80	80

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	%	70	70	70	70	70	70
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	Nilai	A	A	A	A	A	A
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	(%)	75	78	80	85	90	95
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar	%	50	59,55	68,64	77,27	86,82	92,72
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	- Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih	%	100	100	100	100	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	- Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100	100	100	100	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan penanggulangan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	100	100	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan	%	100	100	100	100	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah	Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten	Poin	3	3	3	3	3	3
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	Nilai	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	Nilai	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Fasilitasi dan Penataan Batas Wilayah	Persentase batas wilayah yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Program perumusan kebijakan perekonomian	Persentase BUMD yang sehat dan profitable	%	80	85	90	95	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Program perumusan kebijakan perekonomian	Persentase BUMD yang sehat dan profitable	%	80	85	90	95	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Peningkatan Kesadaran Luhur Perjuangan Bangsa	Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pembinaan Kehidupan Beragama Untuk Meningkatkan Iman dan Taqwa	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	%	54	65	68	71	74	77
Sekretariat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pembinaan Kesejahteraan Pembangunan Masyarakat	Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	%	78	79	83	88	93	98
Sekretariat Daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Program perumusan kebijakan perekonomian	Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Program perumusan kebijakan perekonomian	Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Program peningkatan pengendalian bidang pembangunan	Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	%	80	85	90	95	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Program peningkatan pengendalian bidang pembangunan	Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	%	80	85	90	95	100	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		RPJMD - RENSTRA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	NAMA PROGRAM			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perkara hukum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang disebarluaskan	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	94,7	95	95	96	97	97
Sekretariat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat Daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase usulan raperda /perbup/kepup yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100
Sekretariat DPRD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur sesuai kompetensinya	%	90,16	90	90	90	90	90
Sekretariat DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	%	89,06	90	90	90	90	90
Sekretariat DPRD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	%	95,47	100	100	100	100	100
Sekretariat DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pembahasan Penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	0	70	80	80	80	80
Sekretariat DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	%	65,99	80	80	80	80	80
Sekretariat DPRD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	80,99	90	90	90	90	90
Sekretariat DPRD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	84,26	100	90	90	90	90

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA BKPSDM	Dokumen	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BKPSDM	Dokumen	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan keuangan	Dokumen	4	4
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	Dokumen	2	2
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Wajib BKPSDM	Dokumen	10	10
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pelaksanaan Tapin expo	kali	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pada BKPSDM Tapin	orang	13	13
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	Buah	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kali	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Waktu Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Waktu Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Waktu Evaluasi Disiplin ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Waktu Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Waktu Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Waktu Evaluasi Pemberhentian ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Waktu Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Waktu Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Waktu Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Waktu Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Waktu Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Waktu pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN lainnya)	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Waktu Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Waktu pelaksanaan pembinaan disiplin ASN	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Waktu pelaksanaan pembuatan SK Mutasi ASN	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Waktu pelaksanaan Pendidikan Lanjutan ASN	orang	2	2
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Waktu pelaksanaan penegakkan disiplin, pemberian penghargaan, dan perlindungan ASN	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Waktu pelaksanaan Pengelolaan Data Kepegawaian	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Waktu pelaksanaan pengelolaan Karier dalam Jabatan Fungsional	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Waktu pelaksanaan Pengembangan Karier dan Promosi ASN	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Waktu pelaksanaan pengembangan penilaian kinerja ASN	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Waktu pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Waktu pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Waktu pelaksanaan penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Waktu pelaksanaan penyelesaian penempatan, pengangkatan, dan kepangkatan	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Waktu pelaksanaan penyusunan analisis kebutuhan, formasi, dan pelaksanaan pengadaan ASN	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	1	1
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Waktu Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Waktu Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabata	Waktu Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Um	Waktu Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerinta	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu pemeliharaan Mebel	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Waktu Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Waktu Pengelolaan Assessment Center	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Waktu Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Waktu Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Waktu Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Waktu Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan konsumsi harian pegawai	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu penyediaan konsumsi Tamu	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Waktu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Waktu Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Waktu Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Waktu Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fu	Waktu Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajaba	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Waktu Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Waktu Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Waktu Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Waktu Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Waktu Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Waktu Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan	12	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan	%	0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	%	0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan a	%	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Program Pemeliharaan Kamtibmas	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang dit	%	0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang m	%	100

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dala	%	0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	%	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Peningkatan Kesadaran Luhur Perjuangan Bangsa	Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu	%	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah	Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten	Poin	0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disus	%	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01	PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kon	%	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	waktu Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	waktu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	waktu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	waktu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	waktu Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Dae	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	waktu Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	waktu Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	waktu Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	waktu Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	waktu Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Da	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	waktu Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	waktu Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penan	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	waktu Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit	waktu Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	8	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	Dokumen	58	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-P SKPD yang disusun	Dokumen	58	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemda	Dokumen	1	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD	Laporan	24	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan DAK dan DID	Dokumen	46	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan kas, penerimaan dan pengeluaran kas, pemungutan dan penyerotan PFK	Berkas	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	18	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	Dokumen	2	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	18	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi bank	Laporan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan utang dan piutang daerah	Dokumen	2	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	SKPD	45	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD	Kegiatan	1	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	42	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian BMD	Kegiatan	1	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perbub APBD yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbub APBD-P yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	4	\N

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan perda dan rancangan perbub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	2	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	Dokumen	4	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	1	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan BMD	Laporan	90	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang disusun	Dokumen	58	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-P SKPD yang disusun	Dokumen	58	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPMD	Dokumen	2	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sisdur akuntansi dan pelaporan keuangan pemda	Dokumen	1	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah sisdur, perda penatausahaan keuangan, dan SK pengelolaan keuangan daerah	Dokumen	17	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar kebutuhan BMD	Dokumen	1	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	Dokumen	1	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase belanja tak terduga dan rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan dari DPMD yang diselesaikan	Persen	100	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase pencairan pinjaman pemerintah daerah yang diselesaikan	Persen	100	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti	Persen	100	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	Kegiatan	1	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Waktu Analisis Investasi Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Waktu Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Waktu Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Waktu Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Waktu Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Waktu Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Waktu konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan pemda	Bulan	6	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Waktu koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Waktu Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Waktu Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Waktu Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Waktu Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Waktu Penagihan Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Waktu Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Waktu Penetapan Wajib Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan BMD	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Waktu Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Waktu Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Waktu Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Waktu Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Waktu Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Triwulan	4	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Waktu Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Waktu Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Waktu Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Waktu Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Waktu Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Waktu Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Waktu Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Waktu Perencanaan pengelolaan pajak daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Waktu rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Bulan	12	\N
Badan Keuangan dan Aset Daerah	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	13	13
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	4	4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Buah	27	27
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah	3	3
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan didesa/Kel	Desa/Kel	1	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Buah	1	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	40	40
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) di Desa/Kel	Desa/Kel	4	4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Waktu Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Waktu Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Waktu Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Waktu Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Waktu Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Waktu Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Waktu Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Waktu Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Waktu Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Waktu Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Waktu Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Waktu Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Waktu Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Waktu Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Waktu Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Waktu Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Waktu Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Waktu Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Waktu Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Waktu Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Waktu Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Waktu Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Waktu Penyusunan Rencana Kontijensi	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Waktu Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Waktu Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Waktu Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Waktu Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Waktu Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Waktu Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	bulan	12	12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Waktu Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	bulan	12	12
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	Paket	1	\N
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah	Paket	1	\N
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	Paket	1	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah	Paket	1	\N
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya penyusunan kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Paket	1	\N
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi	Paket	1	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya akuntansi dan pelaporan keuangan dan waktu pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	Bulan	12	\N

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	waktu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	bulan	12	12
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu evaluasi kinerja perangkat daerah (Penyusunan LKIP Bapenda)	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan	Bulan	12	\N
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	waktu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	bulan	12	12
Badan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja pada Bappelitbang	Laporan	8	8
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen Laporan Profil, Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK) di tingkat Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) Kewenangan Kabupaten	Laporan	20	20
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pada Bappelitbang	Dokumen	3	3
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah kegiatan penelitian yang difasilitasi di bidang penataan ruang dan pertanahan	Penelitian	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah kegiatan penelitian yang difasilitasi di bidang pertanian	Penelitian	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah kompilasi dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi	Dokumen	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah kompilasi dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah kompilasi dokumen perencanaan pembangunan SKPD mitra Sub Bidang Sosial	Dokumen	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah kompilasi dokumen perencanaan pembangunan SKPD mitra Sub Bidang Sosial	Dokumen	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kali	3	3
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Koordinasi persiapan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan capaian pembangunan daerah	Laporan	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Laporan	7	7
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sosial	Laporan	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sosial	Laporan	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	Laporan	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Bappelitbang	Laporan	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Laporan	4	4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah lomba tentang pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Kali	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Kabupaten/Kota	Kali	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	9	9
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	33	33
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Unit	13	13
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah repostory hasil kelitbangan online	Aplikasi	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang dilaksanakan	Sosialisasi	1	1
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Waktu Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Waktu Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Waktu Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Waktu Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Waktu Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Waktu Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Waktu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Waktu Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Waktu Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Waktu Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Ekonomi	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Waktu pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mitra Sub Bidang Sosial	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Waktu pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mitra Sub Bidang Sosial	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Waktu Pelaksanaan Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan pembangunan SKPD	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Waktu Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Waktu Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Waktu Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Waktu Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Waktu Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Waktu Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Waktu Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Waktu Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Waktu Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Waktu Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Waktu Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Waktu Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Waktu Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Waktu Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Waktu Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Waktu Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Waktu Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Waktu Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Waktu Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Waktu Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Waktu Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Waktu Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Waktu Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Waktu Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Waktu Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu tersedianya bahan material	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	buah	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata	kali	6	6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan wisata strategis yang terpelihara	buah	3	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah koordinasi dengan Mitra Event pariwisata	kali	1	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang wajib disusun	dok	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang wajib disusun	dok	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten	kali	4	4
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga Cagar Budaya yang terdata	buah	10	10
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah pelaksanaan event Lembaga adat	kali	19	19
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata	kali	6	6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pelaksanaan event seni dan budaya	kali	6	6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pemberian Penghargaan kepada Pelaku seni dan budaya yang aktif	orang	10	10

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	klp	10	10
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan pokdarwis	klp	16	16
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pembinaan sanggar seni budaya	klp	3	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang tersedia	unit	1	0
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	buah	10	10
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi pariwisata	buah	48	48
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana destinasi yang tersedia	Jenis	8	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana Museum	buah	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penyusunan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	bh	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	buah	1	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan kinerja dan dokumen perencanaan	dok	13	13
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peserta Bimtek peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang	50	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta Bimtek Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	orang	50	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta Bimtek Kesenian Tradisional	orang	50	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Bimtek Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	orang	40	40
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	orang	40	40
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Peserta pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	orang	50	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Peserta Pelaku seni dan budaya yang bersertifikasi	orang	50	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	50	50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah petugas jasa kebersihan Cagar Budaya yang aktif	org/bulan	324	324
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah petugas jasa kebersihan pemangku adat dayak yang aktif	org/bulan	300	300
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah sanggar seni budaya terbina	klp	3	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Waktu Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.03.02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitas Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Waktu Fasilitas Kekayaan Intelektual	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitas Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitas Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Waktu Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Waktu Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Waktu Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Waktu Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Waktu Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Waktu Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Waktu Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Waktu Pemanfaatan Cagar Budaya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Waktu Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.06	Pemberian Insentif	Waktu Pemberian Insentif	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Waktu Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.03.01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.04.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Waktu Penetapan Cagar Budaya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Waktu Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.02.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Waktu Pengelolaan Investasi Pariwisata	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Waktu Pengembangan Cagar Budaya	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Waktu Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Waktu Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.02	Pengembangan Pendidikan	Waktu Pengembangan Pendidikan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.01	Pengembangan Riset	Waktu Pengembangan Riset	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Waktu Pengembangan Sistem Pemasaran	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Waktu Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Waktu Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur	Waktu Penyediaan Infrastruktur	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Waktu Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.04.2.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Waktu Perlindungan Hasil Kreativitas	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Waktu Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Waktu Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.26.05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Waktu Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	14	14
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	2	2
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	orang	40	40
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta terseleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	orang	53	53
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Waktu Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Waktu Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Waktu Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Waktu Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Waktu Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Waktu Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Waktu Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Waktu Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Waktu Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Waktu Pengembangan Organisasi Keolahragaan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Waktu Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Waktu Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Waktu Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Waktu Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Waktu Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Waktu Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Waktu Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Waktu Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Waktu Penyelenggaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Waktu Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Waktu Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Waktu Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Waktu Seleksi Atlet Daerah	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Waktu Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Bulan	12	12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Waktu Terpenuhinya Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program S	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Akta Nikah dan Akta Cerai	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Bimbingan Teknis terkait PIAK dan Pendayagunaan Data	Kali	2	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Blangko, formulir & blangko	Kali/Triwulan	4	4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil	Buah	20	20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.09	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Data Perkawinan Penganut Kepercayaan	Laporan	2	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangun	Jumlah Data Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	2	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Desa yang dilaksanakan Pelayanan Keliling (Jemput Bola)	Desa	60	60
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa yang dilaksanakan Pelayanan Pendataan Penduduk Non Permanen	Desa	10	10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah IKM Pelayanan Pencatatan Sipil	Semester	2	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kali	13	13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Tapin Expo	Kali	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (Laporan)	Buah	13	13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	Buah	1	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (Laporan)	Buah	1	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan SKM	Dokumen Laporan	2	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Bimtek Pencatatan Sipil	Kali Kegiatan	1	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayan Publik	Orang	11	11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Desa	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pemutakhiran Data Penduduk	Kali	1	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil	Kali	1	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan Data Kependudukan	SKPD	1	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Waktu Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Waktu Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Waktu Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Waktu Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Waktu Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Waktu Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Waktu Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Waktu Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Waktu Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Waktu Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Waktu Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Waktu Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan S	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Waktu Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Waktu Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Waktu Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Waktu Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Waktu Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Waktu Pencatatan, Penatausahaan, dan penerbitan dokumen akta kematian	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Waktu Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.02	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Waktu Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.05	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Waktu Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Waktu Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Waktu Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.04.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Waktu Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Waktu Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Waktu Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Waktu Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Waktu Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Waktu Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Waktu Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Waktu Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Waktu Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Waktu Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Waktu Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Waktu Sistem Aplikasi Penyajian Data Kependudukan	Bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Waktu Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Waktu Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.04.02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangun	Waktu Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pem	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	waktu Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	waktu Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	waktu Operasional Pelayanan Rumah Sakit	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	waktu Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	waktu Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	waktu Pembangunan Puskesmas	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kesehatan	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	waktu Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	waktu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	waktu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	waktu Pengadaan Bahan Habis Pakai	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	waktu Pengadaan Obat, Vaksin	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	waktu Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	waktu Pengelolaan Surveilans Kesehatan	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	waktu Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	waktu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	waktu Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	waktu Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	waktu Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	waktu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	waktu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	unit	15	15
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KWT	7	7
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	10	10
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	10	10
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Laporan	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	pameran	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Terlaksananya Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lomba	2 x	2 x
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sampel	3	3
Dinas Ketahanan Pangan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Laporan	1	1
Dinas Ketahanan Pangan	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan	1	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Layanan Hubungan Media	1 Paket	10000 menit	10000 menit
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Paket	60 orang	60 orang
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	75%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Paket	210 buku	210 buku
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan baru)	1 Paket	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Paket	60 orang	60 orang
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	75%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Paket	480 berita	480 berita
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Paket	4 unit	5 unit
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Paket	50%	75%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dins/Operasional	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	100%	100%

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Geung Kantor	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik dan Kebersihan kantor	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Umum Kantor	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan	100%	100%
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Waktu Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Waktu Manajemen Komunikasi Krisis	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Waktu Membangun Metadata Statistik Sektoral	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Waktu Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Waktu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Waktu Pelayanan Informasi Publik	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Waktu Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Waktu Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Waktu Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Waktu Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Waktu Pengembangan Infrastruktur	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Waktu Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Waktu Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Waktu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Waktu Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah	Waktu Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Waktu Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Waktu Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Waktu Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Waktu Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	bulan	12	12
Dinas Komunikasi dan Informatika	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Desa Mandiri Peduli Gambut yang Terbentuk	Desa	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan(Unit)	Unit	3	5
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan atas kegiatan/Usaha (Keg/Usaha)	Keg/Usaha	15	15
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang Disediakan (Unit)	Unit	2	
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan yang Disediakan (Unit)	Unit	3	
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang Direhabilitasi (M2)	M2	100	100
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase hasil pengendalian dan pengelolaan sampah B3 domestik (non corporate) di Kabupaten Tapin (%)	%	80	80
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dan mempunyai izin penyimpanan sementara limbah B3 memenuhi ketentuan	Perusahaan	6	6
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kali)	Kali	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kegiatan)	Kegiatan	2	2
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Kegiatan)	Kegiatan	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Tapin (LHU)	Laporan Hasil Uji (LHU)	180	180
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kegiatan	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dokumen)	Dokumen	2	2
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	Kegiatan	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota (Kegiatan)	Kegiatan	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	7	7

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kegiatan)	Kegiatan	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (Kegiatan)	Kegiatan	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	3	3
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Laporan	8	8
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Lainnya (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material (bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat tak Bermotor (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	3	3
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	Laporan	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (Laporan)	Laporan	1	1
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Waktu Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Waktu Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Waktu Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	Waktu Pengelolaan Kebun Raya	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Waktu Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Waktu Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Waktu Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Waktu Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Waktu Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Waktu Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Waktu Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Waktu Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Waktu Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Waktu penyediaan/pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Waktu Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Waktu Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Waktu Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Waktu Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Waktu yang disediakan untuk Pelaksanaan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen Pengawasan	Dokumen		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen Pengawasan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan	Dokumen		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen Perencanaan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen pengawasan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	kali	2	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	kali	6	6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	kali	2	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	kali	2	2

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	keg	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	%	15	30
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Paket	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Sosialisasi	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paket	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Paket	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Paket	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Paket	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan,Pembangunan,Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi,Renovasi,Ubahsuai,serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlaksananya Sistem Informasi Penataan Ruang	Paket	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	kali	2	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya Survey kondisi Jalan/Jembatan	Paket		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya kebijakan pelaksanaan penataan ruang	Dokumen	2	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Waktu Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Waktu Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Waktu Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Waktu Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Waktu Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Waktu Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Waktu Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Danau	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Waktu Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Waktu Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Sungai	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Waktu Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Waktu Operasional Unit Pengelola Irigasi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Waktu Pelebaran Jalan Menambah Lajur	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	Waktu Pelebaran Jembatan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Waktu Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Waktu Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Waktu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Waktu Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.15	Pembangunan Bangunan Sabo	Waktu Pembangunan Bangunan Sabo	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Waktu Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	Waktu Pembangunan Bendung Irigasi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.05	Pembangunan Bendungan	Waktu Pembangunan Bendungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.17	Pembangunan Breakwater	Waktu Pembangunan Breakwater	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.16	Pembangunan Check Dam	Waktu Pembangunan Check Dam	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Waktu Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Waktu Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.13	Pembangunan Flyover	Waktu Pembangunan Flyover	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Waktu Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Waktu Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Waktu Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Waktu Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Waktu Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.12	Pembangunan Kanal Banjir	Waktu Pembangunan Kanal Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Waktu Pembangunan Polder/Kolam Retensi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Waktu Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Waktu Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Waktu Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Waktu Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Waktu Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Waktu Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Waktu Pembangunan Tanggul Sungai	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Waktu Pembangunan Terowongan/Tunnel	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Waktu Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.14	Pembangunan Underpass	Waktu Pembangunan Underpass	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	Waktu Pembangunan Unit Air Baku	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Waktu Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Waktu Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Waktu Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Waktu Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Waktu Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.03.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Waktu Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Waktu Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Waktu Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.11	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Waktu Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Waktu Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Waktu Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Waktu Pemeliharaan Berkala Jalan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Waktu Pemeliharaan Berkala Jembatan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Waktu Pemeliharaan Rutin Jembatan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Waktu Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Waktu Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Waktu Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Waktu Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Waktu Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Waktu Pengelolaan Leger Jalan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Waktu Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Waktu Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Waktu Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Waktu Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.40	Peningkatan Bangunan Sabo	Waktu Peningkatan Bangunan Sabo	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Waktu Peningkatan Bendung Irigasi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.42	Peningkatan Breakwater	Waktu Peningkatan Breakwater	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.41	Peningkatan Check Dam	Waktu Peningkatan Check Dam	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Waktu Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Waktu Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Waktu Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Waktu Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.37	Peningkatan Kanal Banjir	Waktu Peningkatan Kanal Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Waktu Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Waktu Peningkatan Polder/Kolam Retensi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Waktu Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Waktu Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Waktu Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Waktu Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Waktu Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Waktu Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Waktu Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Waktu Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	Waktu Peningkatan Tanggul Sungai	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Waktu Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Waktu Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Waktu Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Waktu Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Waktu Penyediaan Sarana Persampahan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Waktu Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Waktu Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Waktu Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Waktu Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Waktu Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Waktu Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Waktu Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Waktu Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Waktu Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Waktu Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Waktu Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Waktu Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Waktu Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Waktu Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Waktu Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Waktu Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Waktu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Waktu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Waktu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Waktu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Waktu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Waktu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Waktu Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Waktu Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Waktu Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Waktu Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Waktu Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Waktu Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Waktu Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.30	Rehabilitasi Bangunan Sabo	Waktu Rehabilitasi Bangunan Sabo	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Waktu Rehabilitasi Bendung Irigasi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.20	Rehabilitasi Bendungan	Waktu Rehabilitasi Bendungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.32	Rehabilitasi Breakwater	Waktu Rehabilitasi Breakwater	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.31	Rehabilitasi Check Dam	Waktu Rehabilitasi Check Dam	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Waktu Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Waktu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Waktu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Waktu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Waktu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Waktu Rehabilitasi Jembatan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Waktu Rehabilitasi Kanal Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Waktu Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Waktu Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Waktu Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Waktu Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Waktu Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Waktu Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Waktu Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Waktu Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Waktu Rehabilitasi Tanggul Sungai	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Waktu Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Waktu Rehabilitasi Unit Air Baku	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Waktu Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Waktu Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Waktu Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.01.45	Revitalisasi Danau	Waktu Revitalisasi Danau	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Waktu Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Waktu Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Waktu Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Waktu Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Waktu Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Waktu Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	bulan	12	12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Waktu Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	Kec/Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi PosyanteK Kecamatan PosyanteK Desa dan Pelaksanaan Lomba Inovasi Desa Tingkat Kabupaten	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa an BPD	Kec/Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi PKK serta pembinaan dan pelatihan TP.PKK	kec	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Pelaksanaan tertatanya administrasi desa	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padata Karya	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Desa yang berasal dari BUMDes dan BUMDESMA	Desa	126	126
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Waktu Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Waktu Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Waktu Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Waktu Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Waktu Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Waktu Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Waktu Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Waktu Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Waktu Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Waktu Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Waktu Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Waktu Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Waktu Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Waktu Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Waktu Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Waktu Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Waktu Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Waktu Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Waktu Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Waktu Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Waktu Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bln	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bln	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	kali	2	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	kali	1	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	kali	1	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD	bh	4	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	bh	1	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	bh	1	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga dan SKPD yang mendapatkan Advokasi Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	73	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan	2	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kali	5	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Buah	14	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Buah	34	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	2000	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peserta	50	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	172	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta satgas	Peserta	165	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	orang	148	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yg mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yg mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	500	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SKPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	skpd	45	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang memanfaatkan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	skpd	35	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang mendapatkan Advokasi kebijakan dan pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	34	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	174	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Waktu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	kali	1	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	kali	1	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Waktu Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	bulan	12	12
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah inventarisasi dan updating data penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Dokumen	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Izin	1850	1900
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	13	13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Dokumen	3	3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kali	-	-

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan terhadap Pelaku Usaha/ Perusahaan	Kali	10	10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha/ Perusahaan	Kali	10	10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Penanaman Modal Daerah yang Teridentifikasi	Buah	2	2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Penanaman Modal yang Dipromosikan	Buah	1	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	30
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	15	15
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	30	30
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Buah	10	10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Terkait Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Diterbitkan	Kali	1	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	20	20
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dilingkungan Pemkab. Tapin	Kali	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal terkait Pemberian Fasilitas Insentif Daerah	Kali	1	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal	Buah	1	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Telaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya RUPM Kabupten Tapin	Dokumen	-	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Telaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang di koordinasikan dan di susun	Dokumen	5	5
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen	3	3
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD Dinas Pendidikan yang di koordinasikan dan di susun	Dokumen	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD Dinas Pendidikan yang di koordinasikan dan di susun	Dokumen	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen PAUD yang di bina	Lembaga	183	183
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang di bina	Lembaga	6	6
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang di bina	Sekolah	178	178
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang di bina	Sekolah	26	26
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah lembaga yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Lembaga	183	183
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yang terkelolanya dana BOP PAUD	Lembaga	183	183
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang di bina	Kegiatan	3	3
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang di bina	Kegiatan	4	4
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	5	5

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Pembangunan Kantin Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4	4
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang tersedia	Sekolah	178	178
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang tersedia	Sekolah	26	26
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	Lembaga	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Warga Belajar	752	752
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket/Sekolah		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	Siswa	965	965
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Siswa PAUD	130	130
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Lembaga	14	14
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lembaga	14	14
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lembaga	14	14
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kelompok	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lembaga	14	14
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang di bangun	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Unit		

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Unit	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Unit	3	3
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	3	3
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di bangun	Unit	2	2
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang ditambahkan	Unit		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di bangun	UKS	1	1
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di bangun	Unit	31	31
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	26	26
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah	178	178
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	26	26

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	178	178
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	26	26
Dinas Pendidikan	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah/lembaga yang dihitung dan dipetakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sekolah/Lembaga	401	401
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah terkelolanya Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah	175	175
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah terkelolanya Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah	22	22
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Terkelolanya Manajemen BOS Sekolah Dasar	Sekolah	178	178
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Terkelolanya Manajemen BOS Sekolah Dasar	Sekolah	26	26
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah tersedianya Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Siswa	1632	1632
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang di bangun	Sekolah		
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersedianya Dana Insentif bagi Pendidik PAUD non PNS (KB dan TK)	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tersedianya Naskah soal ujicoba ujian akhir sekolah dan jadwal ujicoba ujian akhir sekolah bagi Satuan Pendidikan Dasar	Sekolah	178	178
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Waktu Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	Waktu Pembangunan Asrama Sekolah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Waktu Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Waktu Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Waktu Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Waktu Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Waktu Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Waktu Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Waktu Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Waktu Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Waktu Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Waktu Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Waktu Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Waktu Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Waktu Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Waktu Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Waktu Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Waktu Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Waktu Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Waktu Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Waktu Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Waktu Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Waktu Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Waktu Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Waktu Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Waktu Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Waktu Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Waktu Pengadaan Perlengkapan Sekolah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Waktu Pengadaan Perlengkapan Siswa	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Waktu Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Waktu Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.06.2.01.04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Waktu Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Waktu Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Waktu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Waktu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Waktu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Waktu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Waktu Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Waktu Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.06.2.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Waktu Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Waktu Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.06.2.01.01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Waktu Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Waktu Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Waktu Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Waktu Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Waktu Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.06.2.01.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Waktu Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Waktu Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Waktu Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Waktu Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Terlaksana penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kali	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tahun	1	1
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Dinas Pendidikan	1.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas SKPD	Buah	44	44
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit/kali	46	46
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	7
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	15	15
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah sub kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah sub Kegiatan Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	kali/keg	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	kali/keg	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah sub kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Akseptor	978	978
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah sub Kegiatan dukungan pelaksanaan survei/ pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan	kali/keg	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah sub kegiatan Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah sub kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	kali/keg	6	6
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sub kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kegiatan	2	2
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah sub kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	kali/keg	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberda	Jumlah sub kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Kegiatan	20	20
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah sub kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Akseptor	7	7
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sub kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah sub kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Akseptor	774	774
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah sub kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kegiatan	2	2
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah sub kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	kali/keg	2	2
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kegiatan	6	6
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kegiatan	1	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Waktu Advokasi dan Promosi IPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Waktu Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Waktu Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Waktu Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Waktu Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Waktu Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Waktu Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Waktu Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Waktu Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Pelaksanaan sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Waktu Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Waktu Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Waktu Pembinaan Terpadu Kampung KB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Waktu Pemetaan Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Waktu Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Waktu Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Waktu Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Waktu Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Waktu Pengendalian Program KKBPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Waktu Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Waktu Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Waktu Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Waktu Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Waktu Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Waktu Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Waktu Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Waktu Peningkatan Kesertaan KB Pria	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Waktu Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Waktu Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Waktu Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Waktu Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Waktu Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Waktu Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Waktu Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Waktu Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Waktu Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Waktu Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Waktu Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Waktu Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Waktu Perumusan Parameter Kependudukan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Waktu Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Waktu Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Waktu Sosialisasi IPK	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Waktu Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran produk unggulan daerah yang diikuti	kali	2	\N
Dinas Perdagangan	3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran produk unggulan daerah yang diikuti	kali	2	\N
Dinas Perdagangan	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	buah	1.382	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	berkas	10	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	berkas	1	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	berkas	4	\N
Dinas Perdagangan	3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Jenis Produk Yang Dipamerkan	buah	28	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Jenis Produk Yang Dipamerkan	buah	28	\N
Dinas Perdagangan	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Konsumen mendapatkan penyuluhan	orang	100	\N
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Obyek berpotensi mengedarkan yang dimonitor	buah	12	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah pasar yang direvitalisasi	buah	1	\N
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Operasi Pasar	kali	24	\N
Dinas Perdagangan	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang mengikuti Sosialisasi	orang	50	\N
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	kali	48	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	21	\N

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	buah	75	\N
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	orang	26	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	orang	104	\N
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	buah	150	\N
Dinas Perdagangan	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Resi yang diterbitkan	resi	12	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	buah	9	\N
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana dan prasarana yang diperbaiki	buah	3	\N
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Surat Perjanjian Sewa menyewa toko/los/kios/warung	Dokumen	750	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	20	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Petani yang mengikuti Sosialisasi	orang	50	\N
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	stabilitas ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	persen	1,5	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Waktu Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Waktu Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Waktu Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Waktu Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	waktu Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Waktu Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Waktu Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Waktu Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Waktu Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Waktu Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Waktu Peningkatan Citra Produk Ekspor	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Waktu Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	\N

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	bulan	12	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	bulan	12	\N
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	\N
Dinas Perdagangan	3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Waktu Penyidikan Metrologi Legal	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	3.30.02.2.04.01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Waktu Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	bulan	12	12
Dinas Perdagangan	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bulan	12	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bulan	12	
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.09.01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.05.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.17.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.07.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terint	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.19.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.16.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.18.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.08.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.05.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Waktu Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Waktu Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.17.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.07.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.18.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.08.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.16.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Waktu Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Waktu Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Waktu Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Waktu Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Waktu Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Waktu Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Waktu Pembangunan Gedung Terminal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Waktu Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Waktu Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Waktu Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Waktu Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Waktu Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Waktu Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Waktu Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Waktu Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Waktu Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Waktu Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.09.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.10.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Waktu Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Waktu Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Waktu Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Waktu Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Waktu Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Waktu Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Waktu Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.06.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.07.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.03.2.09.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Waktu Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.03.01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.06.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.10.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.04.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Waktu Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Waktu Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.03.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.05.2.06.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perhubungan	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Waktu Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	kali		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	kali		
Dinas Perikanan	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok		
Dinas Perikanan	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	kali		

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulan		
Dinas Perikanan	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	paket		
Dinas Perikanan	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan	kali		
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	bulan		
Dinas Perikanan	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok		
Dinas Perikanan	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	kali		
Dinas Perikanan	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	bulan		
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	paket		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	bulan		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan		
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	paket		
Dinas Perikanan	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	bulan		
Dinas Perikanan	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Bulan	12	
Dinas Perikanan	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	laporan		
Dinas Perikanan	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket		

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Waktu Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Waktu Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Mengguna	Waktu Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Me	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.06.02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Waktu Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.05.02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Waktu Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Waktu Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Waktu Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Waktu Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.06.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Waktu Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Inten	Waktu Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.05.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Waktu Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Waktu Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Waktu Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perikanan	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Waktu Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Waktu Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	bulan	12	12
Dinas Perikanan	3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Waktu Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perikanan	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Peta	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sosialisasi	4	4
Dinas Perindustrian	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Laporan	1	1
Dinas Perindustrian	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan	2	2
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perindustrian	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi	1	1
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Sertifikasi	10	10
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pameran	5	5
Dinas Perindustrian	3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rapat	1	1
Dinas Perindustrian	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	37	37
Dinas Perindustrian	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeringkatan	1	1
Dinas Perindustrian	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Bimbingan	1	1
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Waktu Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Waktu Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Waktu Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Waktu Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perindustrian	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Waktu Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perindustrian	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang di pelihara (Box) yang sesuai NSPK	Box	20	30
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah jenis alat promosi yang tercetak (jenis)	Jenis	5	6
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan kearsipan internal	laporan	5	5
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dilayani dengan baik (org)	org	22.636	23.047
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan (buku)	Buku	900	1.000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Buah	82	90
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Buah	8	10
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah pengunjung (pemustaka) (org)	Org	22.636	23.047
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah SKPD yang arsipnya dimusnahkan sesuai NSPK	Unit kerja	1	1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa arsip yang ditata sesuai NSPK	Unit kerja	10	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dikelola sesuai NSPK	Unit kerja	3	3
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil (org)	org	132	150
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Waktu Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Waktu Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Waktu Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Waktu Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Waktu Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Waktu Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Waktu Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Waktu Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Waktu Pengembangan Bahan Pustaka	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Waktu Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Waktu Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Waktu Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Waktu Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Waktu Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Waktu Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Waktu Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Waktu Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Waktu Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu penyediaan Bahan/material	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Waktu Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Waktu Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bln)	Bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Waktu Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Waktu Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	bulan	12	12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	waktu Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	waktu Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	waktu Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	waktu Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	waktu Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	waktu Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.04.02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	waktu Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	waktu Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	waktu Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	waktu Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	waktu Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	waktu Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	waktu Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	waktu Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	waktu Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	waktu Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	waktu Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	waktu Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	waktu Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.03.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	waktu Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.04.01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	waktu Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pertanian	3.27.03.2.04.02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	waktu Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.03.2.04.03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	waktu Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	waktu Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	waktu Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	waktu Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	waktu Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	waktu Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	waktu Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	waktu Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	waktu Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	waktu Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	waktu Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	waktu Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	waktu Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	waktu Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	waktu Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	waktu Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	waktu Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	waktu Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.06.2.02.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	waktu Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pertanian	3.27.06.2.02.03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	waktu Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.06.2.02.04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	waktu Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	waktu Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.06.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	waktu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	waktu Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Angka Kelahiran Ternak Sapi (Ekor)	ekor	1600	1700
Dinas Pertanian	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bahan Pengendalian OPT (paket)	Paket	3	3
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun (DAK)	unit	1	1
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	dokumen		
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang dibangun (DAK)	unit	1	1
Dinas Pertanian	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang divaksin dan diobati (Ekor)	ekor	9000	9000
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelas Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan (BPP) yang Meningkatkan (unit)	Unit	5	5
Dinas Pertanian	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Kelompok Hasil Peternakan yang dibina (Kelompok)	kelompok	2	2
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang di berdayakan (kelompok)	kelompok	55	55

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pertanian	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Luas Pertanaman Padi (Ha)	Ha	89577,6	94056,48
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Paket)	paket	2	2
Dinas Pertanian	3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	paket	1	1
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	2	2
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	1
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (unit)	Unit	3	3
Dinas Pertanian	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Peserta AUTP (Ha)	Ha	3000	3000
Dinas Pertanian	3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah petani yang Mendapatkan Akses Permodalan (org)	Org	30	30
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah sarana pengairan dan irigasi yang dibangun/direhab (paket)	Paket	2	2
Dinas Pertanian	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun (Meter)	Meter	7500	7500
Dinas Pertanian	3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terlaksananya Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	paket	1	1
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya barang bahan logistik Kantor	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi kunjungan tamu	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	dokumen	1	1
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir	dokumen	1	1
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	2	2
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Waktu Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Pertanian	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Waktu pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Waktu Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Bulan)	Bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Waktu Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	bulan	12	12
Dinas Pertanian	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Waktu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Paket	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Laporan	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terlaksananya Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terlaksananya Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	4	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dokumen	1	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	100	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	205	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlaksananya Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Paket	2	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kali	4	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Waktu Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Waktu Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Waktu Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Waktu Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Waktu Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Waktu Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Waktu Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Waktu Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02.06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Waktu Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Waktu Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Waktu Pemanfaatan Tanah Kosong	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Waktu Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Waktu Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Waktu Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Waktu Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Waktu Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.04.2.01.03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Waktu Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Waktu Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.04.02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Waktu Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02.07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Waktu Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Waktu Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Waktu Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.07.2.01.03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Waktu Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Waktu Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Waktu Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.06.02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Waktu Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Waktu Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Waktu Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Waktu Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Waktu Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Waktu Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Waktu Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Waktu Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Waktu Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang mendapatkan Penjangkauan	Orang	50	50
Dinas Sosial	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang mendapatkan Rujukan	Orang	50	50
Dinas Sosial	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	350	350
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Keluarga	5	5
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Orang	20	20

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Sosial	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13
Dinas Sosial	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
Dinas Sosial	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
Dinas Sosial	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan	Orang	60	60
Dinas Sosial	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	7	7
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	Buah	20	20
Dinas Sosial	1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	Buah	20	20
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material untuk Tapin Expo	Kali	1	1
Dinas Sosial	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan	Paket	500	500
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	Paket	905	905
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	Paket	60	60
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	20	20
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	20	20
Dinas Sosial	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	20	20
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang mendapatkan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	35	35
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	500	500
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang mendapatkan Layanan Kedaruratan	Orang	20	20
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang mendapatkan Layanan Rujukan	Orang	500	500
Dinas Sosial	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS yang mendapatkan pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	20	20
Dinas Sosial	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Rumah masyarakat miskin (RUTILAHU) yang direhab	Unit	120	120
Dinas Sosial	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan	Orang	11	11
Dinas Sosial	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dirawat	Buah	1	1
Dinas Sosial	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi	Orang	50	50
Dinas Sosial	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah tenaga penanganan Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Koordinasi, Sosialisasi	Orang	80	80

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Sosial	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan	Orang	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Waktu Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Waktu Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Waktu Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Waktu Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Waktu Pelayanan Dukungan Psikososial	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Waktu Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Waktu Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Waktu Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Waktu Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Waktu Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Waktu Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Waktu Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Sosial	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Waktu Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Sosial	1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Waktu Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Sosial	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	10
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen PP yang divalidasi	Dokumen	50	50
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga kerja swasta yang terbina	Lembaga	25	25
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Orang (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Orang	15	15
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Orang Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Orang	105	105
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang diberi Sosialisasi Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Orang	500	500
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Orang yang mendapat kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orang	45	45
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Orang yang mendapat Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migra Indonesia (CPMI)	Orang	30	30
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Orang Yang mendapatkan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	1300	1300
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan informasi Pelayanan Kerja	Orang	30	30

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang mendapatkan pelatihan	Orang	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Gedung	3	2
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Kabupaten/Kota	Kasus	10	10
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	288	336
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Waktu Job Fair/Bursa Kerja	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Waktu Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Waktu Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.11.03	Pelaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Waktu Pelayanan antar Kerja	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Waktu Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Waktu Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Waktu Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Waktu Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Waktu Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Waktu Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Waktu Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Waktu Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Waktu Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Waktu Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Waktu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Waktu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Waktu Perluasan Kesempatan Kerja	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Dinas Tenaga Kerja	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1	
Inspektorat	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	
Inspektorat	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen fasilitasi pengawasan	dokumen	11	
Inspektorat	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	2	
Inspektorat	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	
Inspektorat	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	
Inspektorat	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen teknis pengawasan	dokumen	2	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Inspektorat	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	Laporan	2	
Inspektorat	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Laporan	1	
Inspektorat	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan	Laporan	2	
Inspektorat	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil kegiatan	Laporan	5	
Inspektorat	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan hasil pemantauan	Laporan	2	
Inspektorat	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan	Laporan	2	
Inspektorat	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan	Laporan	1	
Inspektorat	6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan	Laporan	1	
Inspektorat	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan	Laporan	6	
Inspektorat	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan	Laporan	6	
Inspektorat	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi	Laporan	5	
Inspektorat	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil penilaian mandiri	Laporan	2	
Inspektorat	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu	Laporan	2	
Inspektorat	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu	Laporan	2	
Inspektorat	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil survei	Laporan	1	
Inspektorat	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	1	
Inspektorat	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis keuangan	Laporan	1	
Inspektorat	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mabel	Unit	1	
Inspektorat	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	1	
Inspektorat	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu ketersediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Inspektorat	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu ketersediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu ketersediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	
Inspektorat	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Inspektorat	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Inspektorat	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Inspektorat	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Inspektorat	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	kali	1	1
Kecamatan Bakarangan	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kali	1	1
Kecamatan Bakarangan	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali	1	1
Kecamatan Bakarangan	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	kali	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13
Kecamatan Bakarangan	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	kali	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAKET	1	1
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	17	17
Kecamatan Bakarangan	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Bakarangan	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Binuang	7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali	1	1
Kecamatan Binuang	7.01.06.2.01.07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kali	1	1
Kecamatan Binuang	7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kali	1	1
Kecamatan Binuang	7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kali	1	1
Kecamatan Binuang	7.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kali	1	1
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan/Dokumen	13	13
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan/Dokumen	1	1
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan/Dokumen	1	1
Kecamatan Binuang	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Kali	1	1
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	23	25
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	11	15
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	1
Kecamatan Binuang	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kali	1	1
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Binuang	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Waktu Evaluasi Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Waktu Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Waktu Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Waktu Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Waktu Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Waktu Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Waktu Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Waktu Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Waktu Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Waktu Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Bungur	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Waktu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Bungur	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Waktu Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.04.04	Pelantikan Imeum Mukim	Waktu Pelantikan Imeum Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Waktu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Waktu Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Waktu Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Waktu Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.04.02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Waktu Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.04.01	Penyelenggaraan Mukim	Waktu Penyelenggaraan Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.04.03	Peresmian Mukim	Waktu Peresmian Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Waktu Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Waktu Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Bungur	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Waktu Evaluasi Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Waktu Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Waktu Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Waktu Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Waktu Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Waktu Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Waktu Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Waktu Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Waktu Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Waktu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Waktu Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.04.04	Pelantikan Imeum Mukim	Waktu Pelantikan Imeum Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Waktu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Waktu Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Waktu Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Waktu Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.04.02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Waktu Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.04.01	Penyelenggaraan Mukim	Waktu Penyelenggaraan Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Waktu Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.04.03	Peresmian Mukim	Waktu Peresmian Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Waktu Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Waktu Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Selatan	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	kali	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kali	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	kali	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	kali	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kali	1	1
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Waktu Evaluasi Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Waktu Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Waktu Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Waktu Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Waktu Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Waktu Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Waktu Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Waktu Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Waktu Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Waktu Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Waktu Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Waktu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Waktu Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.04.04	Pelantikan Imeum Mukim	Waktu Pelantikan Imeum Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Waktu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Waktu Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Waktu Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Waktu Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.04.02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Waktu Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.04.01	Penyelenggaraan Mukim	Waktu Penyelenggaraan Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.04.03	Peresmian Mukim	Waktu Peresmian Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Waktu Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Candi Laras Utara	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Waktu Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Candi Laras Utara	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kegiatan	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Kegiatan	1	1
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Buah	10	10
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	1
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	24	24
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan	1	1
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Waktu Evaluasi Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Waktu Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Waktu Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Waktu Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Waktu Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Waktu Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Waktu Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Waktu Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Waktu Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Waktu Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Hatungun	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Waktu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Waktu Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.04.04	Pelantikan Imeum Mukim	Waktu Pelantikan Imeum Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Waktu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Waktu Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Waktu Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Waktu Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.04.02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Waktu Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.04.01	Penyelenggaraan Mukim	Waktu Penyelenggaraan Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Waktu Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.04.03	Peresmian Mukim	Waktu Peresmian Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Waktu Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Hatungun	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Waktu Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Hatungun	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	9	9
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kali	1	1
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Lokpaikat	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Keuangan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Paket	1	1
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	1
Kecamatan Piani	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Paket	1	1
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepadaMasyarakat di Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Waktu Evaluasi Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Waktu Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Waktu Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Waktu Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Waktu Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Waktu Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Waktu Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Waktu Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Waktu Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Waktu Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Piani	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Waktu Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Waktu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Piani	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Waktu Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.04.04	Pelantikan Imeum Mukim	Waktu Pelantikan Imeum Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Waktu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Waktu Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Waktu Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Waktu Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.04.02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Waktu Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.04.01	Penyelenggaraan Mukim	Waktu Penyelenggaraan Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.04.03	Peresmian Mukim	Waktu Peresmian Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Waktu Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Waktu Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Piani	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	waktu Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	waktu Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	waktu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	waktu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	waktu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	waktu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Salam Babaris	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	kali	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kali	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	kali	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Paket	2	2
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	kali	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAKET	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	41	40
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kali	1	1
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Selatan	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Bulan	12	
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.04.04	Pelantikan Imeum Mukim	Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Terlaksananya Pengadaan Alat Besar	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Terlaksananya Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan Data Retribusi Daerah	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.04.02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.04.01	Penyelenggaraan Mukim	Terlaksananya Penyelenggaraan Mukim	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.04.03	Peresmian Mukim	Terlaksananya Peresmian Mukim	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Waktu Evaluasi Kelurahan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Waktu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Tengah	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Waktu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	1

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Paket	1	1
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Waktu Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Waktu Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Waktu Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Waktu Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Waktu Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Waktu Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Waktu Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Waktu Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Waktu Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Waktu Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Utara	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Waktu Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Waktu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Waktu Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Waktu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.04.04	Pelantikan Imeum Mukim	Waktu Pelantikan Imeum Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Waktu Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Waktu Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Waktu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Waktu Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.04.02	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Waktu Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Waktu Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Waktu Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.04.01	Penyelenggaraan Mukim	Waktu Penyelenggaraan Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.04.03	Peresmian Mukim	Waktu Peresmian Mukim	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Waktu Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Waktu Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	bulan	12	12
Kecamatan Tapin Utara	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	bulan	0	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	unit	489	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	aplikasi	0	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	unit	0	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	set	0	0
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	orang	23	23
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Waktu Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Waktu Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Waktu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Waktu Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Waktu Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Waktu Operasional Pelayanan Puskesmas	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Waktu Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Waktu Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	waktu pelayanan rumah sakit	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Waktu Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Waktu Pembangunan Puskesmas	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Waktu Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Waktu Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Waktu Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Waktu Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Waktu Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Waktu Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Waktu Pengadaan Bahan Habis Pakai	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Waktu Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Waktu Pengadaan Obat, Vaksin	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Waktu Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Waktu Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Waktu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Waktu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Waktu Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Waktu Pengelolaan Penelitian Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Waktu Pengelolaan Surveilans Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Waktu Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Waktu Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Waktu Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Waktu Pengembangan Puskesmas	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Waktu Pengembangan Rumah Sakit	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Waktu Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Waktu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Waktu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Waktu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Waktu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Waktu Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Waktu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Waktu Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Waktu Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Waktu Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Waktu Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Waktu Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Waktu Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Waktu Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Waktu Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Waktu Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Waktu Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Waktu Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Waktu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Waktu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Waktu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Waktu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang disusun	dok	2	2
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	kali	50	50
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satlinmas yang dibina	orang	500	500
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Anggota yang dibina untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	orang	15	15
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota yang dilatih	orang	130	130
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur DAMKAR Yang dibina	orang	15	15
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	4	4
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	kali	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	kali	50	50
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	kali	24	24

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	kali	50	50
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dok	4	4
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dok	4	4
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	120	120
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kali	4	4
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali	150	150
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain	kali	24	24
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kali	3	3
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran di dalam Daerah Kabupaten/Kota	kali	50	50
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pelaksanaan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	kali	3	3
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	keg	50	50
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	kali	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat	orang	3	3
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	kali	200	200
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	kali	50	50
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kali	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan relawan damkar	kali	4	4
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit/set	2	2
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	unit/set	6	6
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras Ttantibum	unit/set	10	10

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	kali	1	1
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit/set	6	6
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit/set	2	2
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan Pengembangan Kapasitas	kali	30	35
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dok	50	50
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah penyusunan lapoan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	dok	13	13
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang dibina	orang	3	5
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit/set	2	2
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Waktu Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Waktu Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Waktu Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Waktu Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Waktu Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Waktu Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Waktu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Waktu Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Waktu Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Waktu Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Waktu Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Waktu Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Waktu Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Waktu Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Waktu Penyusunan Rencana Kontijensi	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Waktu Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	Waktu Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Waktu Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Waktu Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Waktu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Waktu Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	bulan	12	12
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Waktu Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah acara dilingkungan Pemkab Tapin	Acara	13	15
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah BUMD yang dibina	BUMD	2	2
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen Kumpulan Produk Hukum	dokumen	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah fasilitasi penyusunan program pembangunan	Kali	4	4
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	kegiatan	55	
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan pengelolaan dan pembinaan mental spritual yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel	kegiatan	94	
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Unit	8	8
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	jumlah koordinasi kebijakan energi dan air	Kali	4	4
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	jumlah koordinasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Kali	4	4
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah koordinasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Kali	4	4
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah laporan evaluasi program pembangunan	Dokumen	4	4
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan pelaksanaan pembangunan	Dokumen	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	jumlah laporan pembinaan ekonomi mikro kecil	Dokumen	1	1
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah laporan TPID	Dokumen	2	2
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan gedung kantor	Paket	2	2
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel	Paket	3	3
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin	Paket	3	3
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Paket	3	3
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda/Perbup/Keppub yang diselesaikan	produk hukum	255	255
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah SKPD dengan kinerja pelayanan berkategori baik	SKPD	2	2
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah skpd yang telah di Anjab, ABK, dan Evjab	Dok	10	10
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Transparansi dan Akuntabilitas Pemkab. Tapin	Nilai	BB	BB

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Waktu Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Waktu Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Waktu Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Waktu Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Waktu Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Waktu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Waktu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Waktu pelaksanaan koordinasi RANHAM	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Waktu Penataan Administrasi Pemerintahan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Waktu Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Waktu Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen alat listrik/penerangan di bangunan kantor Sekretariat Daerah, Gedung Pendopo dan Gedung PKK Tapin	Bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dokumen	1	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan akhir tahun	Dokumen	1	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Dokumen	1	
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang di fasilitasi	Naskah	10	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kali	2	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah pelaksanaan Medical Check UP DPRD	Orang	25	
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan Reses	Kali	3	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya.	Buah	2	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Buah	7	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	Paket	3	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah penyediaan Bahan material kantor	kali	1	

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah penyediaan pakaian dinas dan Atribut DPRD	Paket	2	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	15	
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Pertemuan pembahasan APBD	Kali	3	
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Pertemuan pembahasan KUA dan PPAS	Kali	3	
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Pertemuan pembahasan Laporan Semester	Kali	1	
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Pertemuan pembahasan PBD Perubahan	Kali	3	
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pertemuan pembahasan pertanggungjawaban APBD	Kali	3	
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pertemuan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Kali	3	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Waktu Bimbingan Teknis DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Waktu Fasilitasi Fraksi DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Waktu Fasilitasi Keprotokolan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Waktu Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Waktu Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Waktu Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	waktu koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	bulan	12	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Waktu Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu menyediakan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Waktu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Waktu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Waktu Orientasi DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Waktu Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pemeliharaan Mebel	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Waktu Pemindahan Tugas ASN	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Waktu Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Waktu Pemulangan Pegawai yang Pensiun	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Waktu Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Waktu Pendokumentasian Tugas Pimpinan	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Waktu Penetapan Wajib Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Waktu Pengadaan Alat Besar	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pengadaan Aset Tak Berwujud	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Waktu Pengadaan Aset Tetap Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Waktu Pengadaan Mebel	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Waktu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Waktu Pengawasan Kode Etik DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Waktu Pengawasan Penggunaan Anggaran	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Waktu Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Waktu Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Waktu Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Waktu Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Waktu Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Waktu Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Waktu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Waktu Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Waktu Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Waktu Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Waktu penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	Bulan	12	
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Waktu Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Waktu Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Waktu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Waktu Penyusunan Kode Etik DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Waktu Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Waktu Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Waktu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Waktu Penyusunan Tata Tertib DPRD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Waktu Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	bulan	12	12

NAMA SKPD	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 - KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020		INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN			2022	2023
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Waktu Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Waktu untuk bahan komunikasi dan publikasi dewan	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Waktu untuk kunjungan kerja dalam daerah	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Waktu untuk pembahasan rancangan peraturan Daerah	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Waktu untuk penyediaan Tim ahli dan kelompok pakar	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Waktu untuk penyelenggaraan fasilitasi Tugas pimpinan DPRD	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Waktu untuk penyelenggaraan Koordinasi dan konsultasi Dewan	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Waktu untuk penyusunan dan Pembahasan peraturan Daerah	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Waktu untuk penyusunan pokok-pokok pikiran Dewan	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Waktu untuk penyusunan program kerja DPRD	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Waktu untuk publikasi dan dokumentasi kegiatan Dewan	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu yang disediakan untuk menyediakan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu yang disediakan untuk menyediakan bahan logistik kantor	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu yang disediakan untuk menyediakan berkas cetak dan digandakan	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu yang disediakan untuk menyediakan komponen listrik Kantor	Bulan	12	12
Sekretariat DPRD	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu yang disediakan untuk menyediakan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12